



**PENGGUNAAN DIKSI DAN GAYA BAHASA OLEH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 2014—2019**

SKRIPSI

oleh

**Nency Ugi Lestari
NIM 110110201060**

**JURUSAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PENGGUNAAN DIKSI DAN GAYA BAHASA OLEH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 2014—2019**

SKRIPSI

diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S-1
pada Program Studi S-1 Sastra Indonesia Fakultas Sastra
Universitas Jember

oleh

**Nency Ugi Lestari
NIM 110110201060**

**JURUSAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. bapak dan ibu tercinta, Bapak Lawinardi dan Ibu Tarmi, yang tulus memberikan cinta dan kasih sayangnya, doa yang berlimpah, serta pengorbanan lahir dan batin kepada penulis;
2. guru-guru baik akademik maupun nonakademik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu hingga terselesaikannya program S-1 penulis;
3. pembaca di bidang bahasa maupun di luar bidang bahasa;
4. Almamater Fakultas Sastra Universitas Jember.

MOTO

There real monopoly is never that of technical means, but of speech.

(Jean Baudrillard)*)

Hal yang dipikirkan saja tidak akan mengubah apapun, jadi berpikir dan bertindaklah!

(Penulis)

Lauguage is also a medium of domination and power.

(Jurgen Habermas)**)

*) Jean Baudrillard dalam Yudi Latif dan Ibrahim. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Penerbit Mizan.

***) Jurgen Habermas dalam Yudi Latif dan Ibrahim. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Penerbit Mizan.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nancy Ugi Lestari

NIM : 110110201060

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Penggunaan Diksi dan Gaya Bahasa oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014–2019” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Juni 2015

Yang menyatakan,

Nancy Ugi Lestari
NIM 110110201060

SKRIPSI

**PENGGUNAAN DIKSI DAN GAYA BAHASA OLEH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 2014—2019**

oleh

**Nency Ugi Lestari
NIM 110110201060**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Bambang Wibisono, M.Pd.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Andang Subahianto, M.Hum.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penggunaan Diksi dan Gaya Bahasa oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014–2019” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Sastra Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Selasa, 9 Juni 2015

tempat : Fakultas Sastra

Tim Penguji:

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Prof. Dr. Bambang Wibisono, M.Pd.
NIP 196004091985031003

Drs. Andang Subahianto, M.Hum.
NIP 196504171990021001

Penguji 1,

Penguji 2,

Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum.
NIP 196805161992011001

Edy Hariyadi, S.S., M.Si.
NIP 197007262007011001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Hairus Salikin, M.Ed.
NIP 196310151989021001

RINGKASAN

Penggunaan Diksi dan Gaya Bahasa oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014–2019; Nancy Ugi Lestari; 110110201060; 2015; 239 halaman; Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Jember.

Bahasa politik adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu demi kepentingan tertentu atas dasar kekuasaan. Pembicaraan tentang politik adalah pembicaraan tentang kekuasaan, tentang pengaruh, dan tentang otoritas. Politisi menggunakan bahasa bukan hanya untuk menyatakan pendapat dan pikirannya, melainkan juga untuk menyembunyikan pikirannya. Untuk mengetahui bentuk-bentuk bahasa politik, peneliti mengambil objek kajian pada saat politisi Indonesia berkumpul yaitu Sidang Paripurna DPR RI.

Anggota DPR RI memiliki gaya bahasa dan diksi yang beragam dalam penyampaian pendapat. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang anggota DPR RI. Permasalahan penelitian ini adalah (1) bagaimana penggunaan diksi dan gaya bahasa oleh anggota DPR RI; (2) bagaimana maksud dan tujuan penggunaan diksi dan gaya bahasa oleh anggota DPR RI. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menjelaskan diksi dan gaya bahasa yang digunakan anggota DPR RI. Selanjutnya, mendiskripsikan maksud dan tujuan penggunaan diksi dan gaya bahasa berdasarkan konteks dan teori Analisis Wacana Kritis (AWK). Metode penyediaan data yang digunakan adalah metode simak, kemudian teknik lanjutan teknik simak bebas libat cakap, dan terakhir teknik catat. Selanjutnya, metode analisis data adalah metode deskriptif dan metode padan dengan pendekatan kontekstual serta didukung dengan menggunakan AWK. Kemudian metode penyajian hasil analisis data yang digunakan yaitu metode penyajian formal dan informal.

Hasil dari penelitian, ditemukan adanya istilah-istilah politik yang khusus digunakan dalam persidangan DPR RI. Istilah-istilah politik yang digunakan oleh

anggota DPR RI dalam Sidang Paripurna misalnya *lobi, skors, voting, pimpinan sidang*, dan sejenisnya. Berdasarkan jenisnya diksi yang digunakan anggota dewan pada saat Sidang Paripurna dapat berupa diksi denotatif, konotatif, polisemi, dan sinonimi. Selanjutnya, ditemukan gaya bahasa yang digunakan dalam Sidang Paripurna DPR RI yaitu gaya bahasa eufemisme, erotesis, koreksi, oksimoron, resmi, klimaks, repetisi, personifikasi, dan sindiran. Penggunaan gaya bahasa anggota dewan dapat menunjukkan anggota dewan yang sebenarnya. Penggunaan gaya bahasa eufemisme menunjukkan bahwa anggota dewan dalam berpendapat ada yang disembunyikan maksud dan tujuan. Penggunaan gaya bahasa erotesis menunjukkan bahwa anggota dewan dalam berpendapat selalu meyakinkan pendengarnya. Penggunaan gaya bahasa koreksi menunjukkan bahwa anggota dewan tidak selalu fokus pada permasalahan yang dibicarakan dan menunjukkan ketidaktegasan. Penggunaan gaya bahasa oksimoron menunjukkan bahwa bahasa anggota dewan berbelit-belit yang sebenarnya bertujuan untuk menjatuhkan lawan bicara. Penggunaan gaya bahasa resmi menunjukkan bahwa Sidang Paripurna adalah forum resmi. Penggunaan gaya bahasa klimaks menunjukkan bahwa penyampaian pemikiran anggota dewan runtut. Penggunaan gaya bahasa repetisi menunjukkan bahwa anggota dewan menggunakan bahasa menekan agar dapat dipercaya. Penggunaan gaya bahasa personifikasi menunjukkan bahwa adanya bahasa kiasan yang digunakan pada forum resmi. Penggunaan gaya bahasa sindiran menunjukkan anggota dewan berani terang-terangan untuk melawan lawan politiknya dengan gaya menyindir.

Analisis yang ketiga ditemukan maksud-maksud tertentu dari anggota dewan dilihat dari diksi dan gaya bahasa yang digunakannya. Dilihat berdasarkan bahasa yang digunakan anggota dewan, peneliti dengan berpedoman teori AWK menemukan adanya maksud, apakah anggota dewan berpihak kepada rakyat atau hanya mementingkan kepentingan individu atau kepentingan fraksi saja. Hasil penelitian mengungkapkan terdapat maksud untuk kepentingan individu/fraksi/koalisi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat dan adanya unsur-unsur propaganda di dalam pernyataannya.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Penggunaan Diksi dan Gaya Bahasa oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014–2019” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada Jurusan Sastra Indonesia Fakultas sastra Universitas jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Hairus Salikin, M.Ed., selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember;
2. Dra. Sri Ningsih, M.S., selaku Ketua Jurusan Sastra Indonesia;
3. Drs. Agus Sariono, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa;
4. Prof. Dr. Bambang Wibisono, M.Pd., selaku pembimbing I yang telah membimbing, meluangkan waktu, pikiran, dan memotivasi hingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
5. Drs. Andang Subahianto, M.Hum., selaku pembimbing II yang telah membimbing, meluangkan waktu, pikiran, dan memotivasi hingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
6. Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum., selaku Penguji I yang telah mendukung, membimbing, memotivasi, dan memberikan bahan kepada penulis hingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
7. Edy Hariyadi, S.S., M.Si., selaku penguji II yang telah mendukung, membimbing dan memotivasi hingga terselesainya penulisan skripsi ini;
8. Staf Pengajar Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis;

9. Heru Widiyatmoko, selaku Staf Administrasi Jurusan Sastra Indonesia yang selalu membantu dan memperlancar urusan administrasi hingga terselesainya penulisan skripsi ini;
10. Andy M. Lesmana, S.H., selaku mantan Staf Administrasi Jurusan Sastra Indonesia yang sekarang menjadi Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sastra Universitas Jember yang telah membantu kelancaran administrasi penulis;
11. Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sastra Universitas Jember yang telah membantu kelancaran administrasi penulis;
12. Karyawan Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember yang telah membantu dan melayani penulis dengan ramah dalam mencari sumber referensi buku;
13. Karyawan UPT Perpustakaan Universitas Jember yang telah membantu penulis dalam mencari sumber referensi buku;
14. Bapak Lawinardi dan Ibu Tarmi sekeluarga yang memberikan dorongan, doa dan material demi terselesaikannya skripsi ini.
15. saudara-saudara IMASIND yang telah menjadi tempat berproses selama penulis menjadi mahasiswa;
16. teman-teman angkatan 2011 yang selalu menjadi teman seperjuangan untuk mendapat gelar S.S.;
17. teman-teman bermain dan berproses yang telah menjadi teman yang menunjukkan arti berproses dan berpengalaman.

Penulis yakin bahwa kesungguhan dan niat yang tulus akan menghasilkan sesuatu yang besar. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat	7
1.3.1 Tujuan	7
1.3.2 Manfaat	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Wacana	12
2.2.2 Bahasa Politik	22
2.2.3 Diksi	23

2.2.4 Gaya Bahasa.....	29
2.2.5 Komunikasi Politik	44
2.2.6 Propaganda Politik.....	47
2.3 Sistematika Konsep Teori	48
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....	52
3.1 Data dan Sumber Data	52
3.1.1 Data	52
3.1.2 Sumber Data.....	53
3.2 Tahap Penyediaan Data	54
3.3 Tahap Analisis Data.....	54
3.4 Tahap Penyajian Hasil Analisis Data.....	57
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Penggunaan Diksi Anggota Dewan	59
4.1.1 Denotatif	59
4.1.2 Konotatif	87
4.1.3 Polisemi.....	91
4.1.4 Sinonimi.....	93
4.2 Penggunaan Gaya Bahasa Anggota Dewan.....	95
4.2.1 Gaya Bahasa Eufemisme	95
4.2.2 Gaya Bahasa Erotesis.....	103
4.2.3 Gaya Bahasa Koreksi.....	104
4.2.4 Gaya Bahasa Oksimoron.....	106
4.2.5 Gaya Bahasa Resmi	108
4.2.6 Gaya Bahasa Klimaks	109
4.2.7 Gaya Bahasa Repetisi	110
4.2.8 Gaya Bahasa Personifikasi.....	116
4.2.9 Gaya Bahasa Ironi, Sinisme, Sarkasme	117
4.3 Analisis Wacana Kritis terhadap Maksud dan Tujuan Penggunaan Diksi dan Gaya Bahasa.....	139

4.3.1 Sidang Pemilihan Pimpinan DPR RI.....	139
4.3.2 Sidang Penetapan Nama-Nama Fraksi dalam Alat Kelengkapan Dewan	158
4.3.3 Sidang Penetapan Ketua KPK dan Kapolri	165
BAB 5. PENUTUP	179
5.1 Kesimpulan	179
5.1 Saran	183
DAFTAR PUSTAKA	185
LAMPIRAN	188

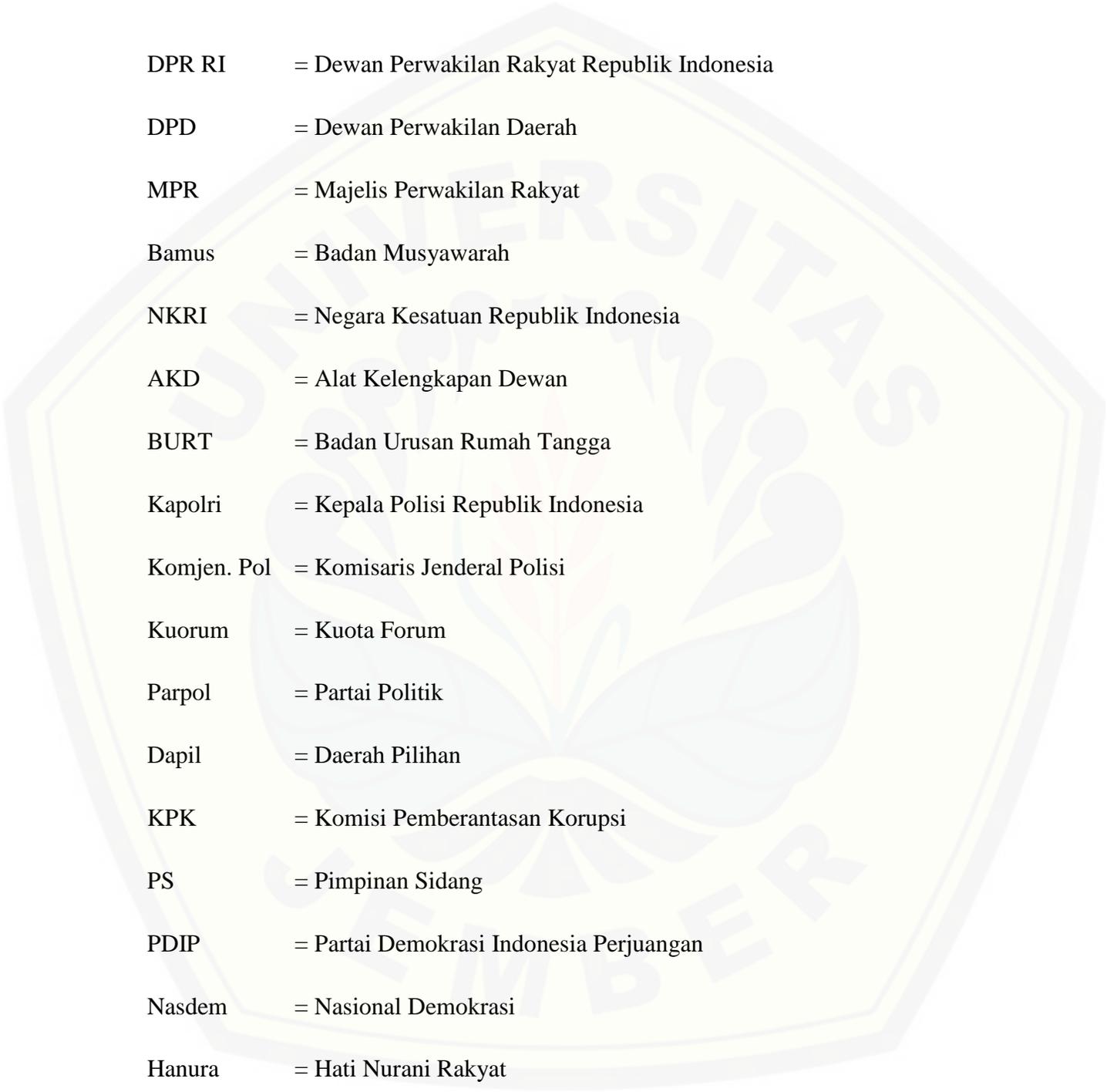
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Analisis Wacana dan Analisis Wacana Kritis	19
Tabel 4.2 Tuturan Popong.....	140
Tabel 4.3 Elemen Kata Ganti (1)	143
Tabel 4.4 Elemen Maksud.....	145
Tabel 4.5 Elemen Kata Ganti (2)	146
Tabel 4.6 Elemen Kata Ganti (3)	149
Tabel 4.7 Kemungkinan Perolehan Suara Pemilihan Pimpinan DPR.....	155
Tabel 4.8 Elemen Detil	167
Tabel 4.9 Intensitas Penggunaan Kata	169
Tabel 4.10 Elemen Kata Ganti (4)	172
Tabel 4.11 Elemen Penjelas	176

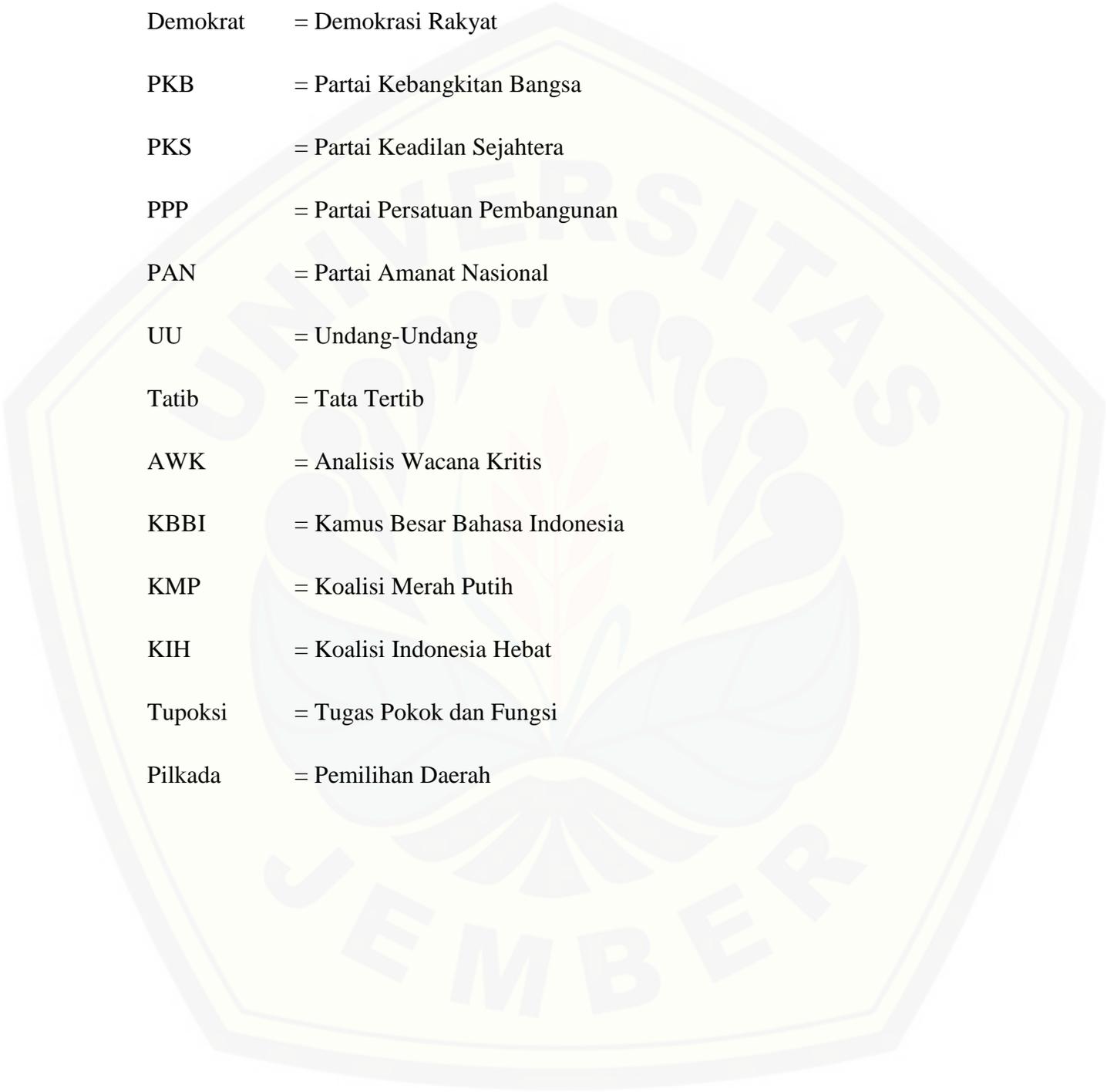
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Analisis Van Dijk.....	21
Gambar 2.2 Jenis Makna.....	24
Gambar 2.3 Sistematika Konsep Teori	51
Gambar 4.4 Alur Pendapat Fraksi PDIP dan Situasi Politik.....	150
Gambar 4.5 Alur Keseluruhan Sidang Paripurna Pemilihan Ketua DPR	157
Gambar 4.6 Alur Keseluruhan Sidang Paripurna Penetapan AKD.....	164
Gambar 4.7 Alur Pengambilan Keputusan Komisi III.....	166
Gambar 4.8 Alur Pendapat Fraksi Demokrat.....	172
Gambar 4.9 Alur Keputusan Mengenai Calon Pimpinan KPK.....	177
Gambar 4.10 Alur Keputusan Mengenai Calon Kapolri.....	178

DAFTAR SINGKATAN



DPR RI	= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPD	= Dewan Perwakilan Daerah
MPR	= Majelis Perwakilan Rakyat
Bamus	= Badan Musyawarah
NKRI	= Negara Kesatuan Republik Indonesia
AKD	= Alat Kelengkapan Dewan
BURT	= Badan Urusan Rumah Tangga
Kapolri	= Kepala Polisi Republik Indonesia
Komjen. Pol	= Komisaris Jenderal Polisi
Kuorum	= Kuota Forum
Parpol	= Partai Politik
Dapil	= Daerah Pilihan
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi
PS	= Pimpinan Sidang
PDIP	= Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Nasdem	= Nasional Demokrasi
Hanura	= Hati Nurani Rakyat
Gerindra	= Gerakan Indonesia Raya



Golkar	= Golongan Karya
Demokrat	= Demokrasi Rakyat
PKB	= Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	= Partai Keadilan Sejahtera
PPP	= Partai Persatuan Pembangunan
PAN	= Partai Amanat Nasional
UU	= Undang-Undang
Tatib	= Tata Tertib
AWK	= Analisis Wacana Kritis
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KMP	= Koalisi Merah Putih
KIH	= Koalisi Indonesia Hebat
Tupoksi	= Tugas Pokok dan Fungsi
Pilkada	= Pemilihan Daerah

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa merupakan sumber dari berbagai aspek kehidupan. Bahasa sebagai media untuk komunikasi, bahasa digunakan untuk meraih kekuasaan, dan bahasa sebagai alat serta pelindung. Bahasa erat kaitannya dengan komunikasi, bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berbentuk verbal maupun nonverbal. Bahasa adalah alat komunikasi antaranggota masyarakat yang berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa memiliki simbol yang universal, yang digunakan oleh masyarakat untuk mengekspresikan perasaan dan mengungkapkan benda-benda ataupun fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya (Waljafri, 2011: 1). Namun, terkadang masyarakat tidak mengetahui maksud sebenarnya dari bahasa tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh ahli komunikasi bahwa makna bahasa sangat subjektif dan tidak pernah tunggal “*word do not mean what people mean*” (Walfajri, 2011: 3). Makna yang dipahami masyarakat belum tentu makna yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penutur.

Tidak jarang bahasa digunakan untuk memanipulasi suatu kebenaran/kenyataan, memaksa, mengubah suatu persepsi orang terhadap suatu isu-isu melalui komunikasi. Itulah pengertian lain dari bahasa, seperti halnya yang diungkapkan oleh Aristoteles (dalam Cangara, 2011: 14) komunikasi menekankan “siapa mengatakan apa kepada siapa”. Komunikasi menekankan siapa yang berbicara, mengenai apa penutur berbicara, dan kepada siapa penutur berbicara.

Secara klasik komunikasi memiliki fungsi untuk memberi informasi, menghibur, mendidik, dan membentuk opini publik (Cangara, 2011: 20). Membentuk opini publik adalah fungsi komunikasi yang sangat dimanfaatkan dalam dunia politik. Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah politik, segala sesuatu yang dilakukan atas dasar kepentingan kelompok atau kekuasaan seringkali di atas namakan

dengan label politik (Cangara, 2011: 22). Kekuasaan dekat dengan bahasa. Sudah diutarakan sebelumnya bahasa merupakan sumber dari berbagai aspek, salah satunya aspek yang digunakan oleh dunia politik. Seperti saat politisi mengadakan kampanye, para politisi bersorak-sorak mengajak, menyuarakan tentang dirinya dan janji-janji yang akan dilaksanakannya setelah ia terpilih. Para politisi ini harus pintar-pintar menggunakan bahasa yang persuasif agar masyarakat tersentuh oleh ucapannya dengan menggunakan program persuasif dan teori propaganda. Program persuasif yaitu yang bertujuan mengubah opini masyarakat dengan memberi informasi yang membujuk anggota sasaran sehingga berperilaku sesuai dengan keinginan komunikator (Iriantara dan Malik, 1994: 99). Sama halnya dengan propaganda, propaganda merupakan alat ampuh yang memungkinkan keberhasilan dengan mempengaruhi massa atau meraih kekuasaan (Shoelhi, 2012: 73). Pada penggunaan propaganda, para politisi berusaha menanamkan gagasan ke dalam benak masyarakat, tidak hanya untuk mengarahkan pada opini publik melainkan juga untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan masyarakat.

Hal ini terlihat dalam dunia politik bahwa kekuasaan berperan penting dalam penggunaan bahasa. Seperti pada masa Orde Baru, orang yang memiliki kekuasaan pada masa itu yaitu Presiden Soeharto. Sering menggunakan kosa kata dengan akhiran {-ken}, maka masyarakat mengikutinya dan menggunakannya. Hal ini memberikan suatu opini bahwa kekuasaan mempengaruhi bahasa. Selain itu Soeharto juga banyak menggunakan kosa kata *korupsi*, *rehabilitasi*, *grace periode* (masa gemilang), *rescheduling* (penjadwalan kembali), *hantam karma* (membabi buta), *nggege mangsa* (berambisi) (Latif dan Ibrahim, 1996: 68).

Lewuk (dalam Waljafri, 2011: 5) menyatakan terdapat empat kategorisasi ideologi kebahasaan yang dipergunakan oleh kelompok kekuasaan. Pertama, bahasa berdimensi satu, suatu ideologi kebahasaan yang menuntut orang yang menyatakan sikap dan pernyataan yang sama (satu), sesuai dengan kemauan penguasa dan tidak ditemukan logika protes. Kedua, *orwelianisme* bahasa, dalam konteks ini adalah teknik penyatuan dua pengertian yang sebenarnya bertentangan, sehingga perbedaan

antara yang benar dengan yang salah menjadi kabur. Ungkapan-ungkapan tentang kebebasan mengeluarkan pendapat, diartikan sebagai kepatuhan terhadap instruksi yang dikeluarkan pihak penguasa. Untuk menunjukkan *sikap demokratis*, dipakai istilah *kritik konstruktif* atau *kritik membangun* yang maknanya setiap kritik tidak boleh menyinggung kebijakan dan tidak boleh bertentangan dengan kehendak kekuasaan. Ketiga, bahasa takut-takut, yaitu bahasa yang diucapkan masyarakat yang memiliki kepanutan monoloyalitas terhadap berbagai instruksi yang dilambungkan melalui simbol bahasa. Pada saat Pemilu, kita mendengar *Golput haram* atau “Golput berarti tidak bertanggung jawab terhadap demokrasi”. Keempat, bahasa menyembunyikan pikiran, artinya bahasa bukan lagi sebagai alat menyatakan pikiran. Namun, di balik itu terdapat kepentingan yang memanipulasi bahasa itu sendiri.

Para penguasa atau politisi sering menggunakan simbol-simbol dalam mengutarakan pendapat hingga menimbulkan berbagai makna. Misalnya, pernyataan anggota dewan, “menjadi permasalahan yang krusial yang kita bahas pada saat itu”. Kata *krusial* merupakan kata yang tidak jelas maksud sebenarnya. Pemakaian bahasa yang demikian terutama disebabkan oleh keinginan para politisi untuk menyembunyikan pikiran atau tujuan yang sebenarnya di balik paparan bahasa yang digunakannya, hal ini sepaham dengan teori ideologi kebahasaan yang diutaran oleh Lewuk (dalam Waljafri, 2011:5). Politisi menggunakan bahasa bukan hanya untuk menyatakan pendapat dan pikirannya, melainkan juga untuk menyembunyikan pikirannya (terdapat maksud dan tujuan berdasarkan kepentingan masing-masing). Mereka harus menyembunyikan pikiran yang sebenarnya, karena di balik pikiran itu terdapat berbagai kepentingan yang harus dipertahankan, baik bersifat individu maupun kelompok.

Pada ideologi kebahasaan keempat juga lebih menjurus pada topik yang akan dibahas, yaitu penggunaan diksi dan gaya bahasa para anggota dewan. Dengan pembahasan diksi dan gaya bahasa para anggota dewan, kita akan mengetahui maksud dan tujuan dari penggunaan bahasa para anggota dewan tersebut. Contoh, bentuk gaya bahasa yang diucapkan anggota dewan saat sidang “*Jangan bercanda*

memimpin rapat ibu”. Pernyataan salah satu anggota dewan tersebut memiliki makna bahwa Pimpinan Sidang (PS) tidak serius dalam memimpin sidang. Pernyataan yang seperti ini merupakan suatu bentuk sindiran yang dilakukan oleh anggota dewan kepada Pimpinan Sidang dengan menggunakan gaya bahasa sindiran. Penggunaan diksi dan gaya bahasa para anggota dewan ini perlu diteliti, sehingga peneliti mengambil judul “Penggunaan Diksi dan Gaya Bahasa oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014–2019”. Peneliti mengambil kajian semantik khususnya diksi dan gaya bahasa.

Gaya bahasa (majas) merupakan bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan kesan dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda dengan benda lain atau hal lain yang lebih umum. Majas merupakan bentuk retorik yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan ataupun mempengaruhi para penyimak atau pembaca (Kasih, 2008: 17). Bahasa-bahasa yang digunakan oleh anggota dewan untuk memanipulasi suatu keadaan yang sebenarnya. Banyak pula bahasa politik yang digunakan untuk melindungi kepentingannya sendiri. Untuk tujuan seperti itu, para anggota dewan banyak menggunakan gaya bahasa yang beragam. Maka dari itu, perlu adanya penelitian mengenai gaya bahasa agar mengetahui gaya bahasa apa saja yang digunakan oleh para anggota dewan tersebut dan mengetahui maksud sebenarnya dilihat dari gaya bahasa yang digunakannya. Selain itu, peneliti juga mengkaji diksi (pilihan kata). Di dalam diksi, terdapat satu kesesuaian diksi yaitu suatu cara penulis atau pembicara memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi di mana dia berbicara, dengan siapa, dan pada saat apa dia berbicara (Keraf, 1996: 24). Penulis atau pembicara dapat mengungkapkan ide atau gagasan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan lingkungan tempat menyampaikan. Banyak para anggota dewan yang menggunakan diksi (pilihan kata) yang tidak diketahui masyarakat apa maknanya. Misalnya, kata *interupsi* yang digunakan oleh anggota dewan saat persidangan. Kata *interupsi* digunakan untuk meminta izin berbicara saat persidangan. Hal ini perlu diteliti di samping untuk mengetahui makna, maksud, dan tujuan dari diksi yang

digunakan para anggota dewan. Dengan meneliti ini, maka akan menambah daftar istilah politik yang digunakan oleh politisi tersebut.

Objek kajian dari penelitian ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (yang seterusnya disingkat DPR RI). DPR RI adalah pusat pemerintahan RI selain Presiden RI yang ada di Indonesia. Anggota DPR RI merupakan perwakilan semua fraksi yang ada di Negara Republik Indonesia. DPR RI merupakan objek kajian yang tepat, karena DPR RI sudah mewakili semua latar belakang politik yang ada di Indonesia. Saluran komunikasi politik dengan pesan politik dan urusan politik yang disampaikan, dapat melalui sidang-sidang DPR atau sidang kabinet di istana (Shoelhi, 2012: 2). DPR RI memiliki masa sidang dan masa reses. Masa sidang merupakan masa anggota DPR RI melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR RI. Masa Reses merupakan masa anggota DPR RI melakukan kegiatan diluar Masa Sidang, terutama diluar gedung DPR RI untuk melaksanakan kunjungan kerja, baik yang dilakukan oleh anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok. Rapat DPR bermacam-macam di antaranya yaitu Sidang Paripurna, Sidang Paripurna Luar Biasa, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum.

Sidang Paripurna merupakan rapat tertinggi dan merupakan rapat pengambilan keputusan tingkat II yang dihadiri seluruh anggota DPR RI yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI. Sidang Paripurna Luar Biasa merupakan rapat yang diadakan dalam Masa Reses atas permintaan Presiden RI dengan persetujuan Pimpinan DPR RI dengan persetujuan Badan Musyawarah (yang seterusnya disingkat Bamus), atau diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota dengan persetujuan Bamus. Rapat Kerja merupakan rapat antara komisi, komisi gabungan, Badan Legislasi, Panitia Anggaran atau Panitia Khusus dengan pemerintah (dalam hal ini presiden/menteri/pimpinan lembaga setingkat menteri untuk mewakili) atas undangan Pimpinan DPR RI. Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antarkomisi dalam Rapat Gabungan Komisi, Badan Legislasi atau Panitia Khusus dengan pemerintah. Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antarkomisi dalam

Rapat Gabungan Komisi, Badan Legilasi, atau Panitia Khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi (badan swasta), baik undangan Pimpinan DPR RI maupun atas permintaan yang bersangkutan. Selain rapat yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat rapat yang dilakukan oleh setiap Alat Kelengkapan Dewan (yang seterusnya disingkat AKD) yaitu Rapat Komisi dan Rapat Badan Urusan Rumah Tangga (seterusnya disingkat BURT). Sifat rapat ada tertutup dan terbuka. Semua rapat bersifat terbuka kecuali Rapat Pimpinan Dewan, Rapat BURT, Rapat Dewan Kehormatan, Rapat Panitia Kerja kecuali terdapat kebijakan sebelumnya.

Peneliti mengambil objek pada saat persidangan DPR RI khususnya Sidang Paripurna DPR RI, karena Sidang Paripurna merupakan rapat tertinggi dan dihadiri oleh semua anggota DPR RI serta rapat pengambilan keputusan tingkat II yang menandakan bahwa keputusan atau kebijakan diputuskan pada saat Sidang Paripurna. Serta didukung dengan terdapat penayangan secara langsung Sidang Paripurna DPR RI. Hal ini, semakin menguatkan peneliti untuk meneliti diksi dan gaya bahasa yang digunakan oleh DPR RI pada persidangan, karena pada persidangan ini akan diketahui berbagai diksi yang belum diketahui masyarakat apa makna dari diksi tersebut. Selain itu, akan diketahui pula maksud dan tujuan dari setiap wacana yang disampaikan anggota DPR RI dalam persidangan dilihat dari diksi dan gaya bahasa yang digunakan. Dengan meneliti maksud dan tujuan dari anggota dewan tersebut, masyarakat dapat mengetahui tujuan yang sebenarnya dari anggota dewan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana diksi yang digunakan oleh anggota DPR RI dalam ranah persidangan?
2. Bagaimana gaya bahasa yang digunakan oleh anggota DPR RI dalam ranah persidangan?

3. Bagaimana maksud dan tujuan penggunaan diksi dan gaya bahasa oleh para anggota DPR RI dalam ranah persidangan dianalisis menurut Analisis Wacana Kritis (AWK)?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Suatu hasil pencapaian, apapun bidangnya baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan pasti memiliki tujuan dan berharap akan mempunyai manfaat bagi pembacanya. Begitu pula penyusunan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan dan berharap mempunyai manfaat bagi pembacanya.

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a) Mendiskripsikan diksi yang digunakan oleh para anggota DPR RI dalam ranah persidangan.
- b) Mendiskripsikan gaya bahasa yang digunakan oleh para anggota DPR RI dalam ranah persidangan.
- c) Mendiskripsikan maksud dan tujuan penggunaan diksi dan gaya bahasa oleh para anggota DPR RI dalam ranah persidangan dari sudut pandang Analisis Wacana Kritis (AWK).

1.3.2 Manfaat

Hasil penelitian yang berupa paparan mengenai diksi dan gaya bahasa anggota DPR RI ini, diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaatnya sebagai berikut.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoritis tentang bentuk-bentuk penggunaan diksi dan gaya bahasa oleh para anggota DPR RI serta mengetahui maksud dan tujuannya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi pembaca tentang bentuk-bentuk penggunaan diksi dan gaya bahasa oleh para

anggota DPR RI. Selain itu, diharapkan pembaca mengetahui maksud dan tujuan para anggota DPR RI dilihat dari penggunaan bahasa mereka.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, diketahui bahwa bahasa yang digunakan politisi belum banyak yang meneliti, hanya ada beberapa orang yang meneliti bahasa politik dengan berbagai kajian. Peneliti menemukan tinjauan pustaka baik dilihat dari objek kajiannya maupun dilihat dari kajiannya. Penelitian Agus Setya Nugroho (2009) yang berjudul “Diksi dan Gaya Bahasa dalam Rubrik *Celathu Butet*”, menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan diksi rubrik *Celathu Butet* ditandai dengan penggunaan unsur bahasa daerah, yakni bahasa Jawa dan dialek Jakarta serta bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Pemanfaatan bentuk singkatan dan akronim, istilah, serta pemanfaatan gaya bahasa dalam tuturan. Gaya bahasa penutur juga sangat menarik karena sering memanfaatkan masalah sosial, budaya dan sebagainya. Tulisan yang disampaikan dapat dipahami oleh pembaca (masyarakat) surat kabar tersebut. Fungsi diksi dan gaya bahasa pada rubrik *Celathu Butet* adalah untuk memperhalus maksud tuturan, memperjelas maksud tuturan, dan menimbulkan kesan humor.

Penelitian Dewi Hajar Khusnul Khuluq (2012) yang berjudul “Analisis Diksi, Gaya Bahasa, dan Gramatikal Pada Lirik Lagu-Lagu Opick”, menggunakan pendekatan kualitatif dan objek kajiannya adalah berupa lagu-lagu Opick. Terdapat tiga permasalahan yang diambil yaitu diksi dan gaya bahasa serta makna gramatikal dalam lirik lagu Opick. Hasil penelitian menunjukkan diksi dan gaya bahasa dalam lirik lagu Opick menggunakan kata denotatif dan konotatif. Selain itu, dalam lagu Opick juga didapatkan penggunaan kata umum dan khusus. Diksi yang menggunakan makna denotatif terlihat sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat tanpa menimbulkan pemaknaan ganda. Gaya bahasa dalam lagu Opick lebih banyak menggunakan gaya bahasa perbandingan yang terdiri atas gaya bahasa perumpamaan, metafora, dan personifikasi.

Penelitian yang dilakukan Mardiana Tri Lestari (2014) berjudul "Analisis Diksi dan Stilistika Genetis Pada Lirik Lagu Ebiat G. Ade", mengungkapkan tiga permasalahan yaitu diksi, stilistika genetik, dan gaya bahasa yang ada dalam lirik lagu Ebiat G. Ade. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa diksi yang terdapat pada lirik lagu Ebiat G. Ade mempunyai makna konotatif. Sementara secara stilistika genetik dan gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa simile, personifikasi, dan metafora.

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Sofyan (2001) berjudul "Bahasa dan Realitas Pergolakan Sosio-Politis: Kasus Bahasa Indonesia pada Era Orde Baru, Pergerakan Reformasi, dan Era Gus Dur", mengungkapkan tiga permasalahan penggunaan bahasa Indonesia berdasarkan tiga era yaitu Era Orde Baru, Pergerakan Reformasi, dan Era Gus Dur. Pada Era Orde baru disebutkan bahwa bahasa Indonesia mengalami pemisahan bahasa yaitu *bahasa pemerintahan* dan *bahasa rakyat*. Pada era Pergerakan Reformasi 1998 terjadi "perang simbol" antara pemerintah dan rakyat, dengan pengelompokan (a) penggunaan simbol yang berlawanan untuk hal yang sama; (b) penggunaan simbol yang sama tetapi alasannya berlawanan; (c) terjadinya reaksi yang berlawanan terhadap simbol yang sama. Bahasa Indonesia pada era Gus Dur, penggunaan eufemisme sangat dihindari oleh pemerintah dan banyak dijumpai plesetan baik digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Gufran Ali Ibrahim (2005) berjudul "Idiom Kegamangan dalam Bahasa Politik Kita", mengkaji tentang idiom-idiom bahasa politik. Ibrahim menyebutkan bahwa terjadinya pergeseran tindak tutur dari tradisi eufemisme ke permainan makna. Ibrahim menyebutkan bahwa ada empat karakter dalam idiom bahasa politik yaitu dunia yang gamang, keras, berkelompok, dan berbohong.

Penelitian Melanie Barnes (2004) yang berjudul "Bahasa dan politik: Wacana politik dan plesetan", membahas tentang jargon politik dan wacana politik. Barnes membahas darimana asal jargon politik tersebut, bagaimana wacana politik mempengaruhi masyarakat, dan bagaimana aktivis (di luar masyarakat politik)

melawan politik dengan menggunakan bahasa plesetan. Hasil penelitian Barnes menunjukkan bahwa bahasa bisa mengubah cara orang berpikir, lewat propaganda pemerintah atau media massa yang menguasai pendapat umum, atau di sisi lain lewat bahasa perlawanan yang digunakan aktivis-aktivis, bahasa emosi bisa mengubah pendapat masyarakat.

Penelitian Mohammad Amin (2012) yang berjudul “Penyimpangan Bahasa Indonesia di Kalangan Pejabat Negara”, menerangkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di kalangan pejabat negara banyak mengalami penyimpangan. Penyimpangan bahasa Indonesia di kalangan pejabat bisa dijumpai pada masa Orde Baru. Kekacauan struktur bahasa tersebut dapat dilihat pada pengucapan sufiks {-kan} menjadi {-ken}, misalnya *melaksanakan* menjadi *melaksanaken*. Namun, penggunaan bahasa tersebut tetap diikuti karena salah satunya dipengaruhi oleh kekuasaan.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalahnya dan objek kajiannya. Sebagaimana disebutkan pada bagian rumusan masalah, dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah. Berikut diuraikan secara rinci.

Masalah (1) menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk diksi (pihan kata) yang digunakan oleh para anggota DPR RI. Pada masalah (1) dijelaskan penggunaan diksi para anggota DPR RI. Seperti yang dapat kita lihat, penggunaan diksi para anggota dewan, masyarakat banyak yang tidak mengetahui maknanya, terutama istilah-istilah politik. Pada masalah (1) diungkap secara lebih rinci tidak hanya istilah-istilah yang digunakan para anggota dewan saja. Namun, diungkap juga jenis dan makna diksi yang digunakan para anggota DPR RI.

Masalah (2) menjelaskan bagaimana gaya bahasa yang digunakan para anggota DPR RI. Pada masalah (2) dijelaskan gaya bahasa apa saja yang digunakan para anggota dewan tersebut. Peneliti mengungkapkan berbagai gaya bahasa yang digunakan oleh anggota dewan. Setelah diamati secara sekilas, banyak anggota dewan dalam menyampaikan pendapat ada yang berupa sindiran, ada yang berupa

propaganda, ada juga yang mengungkapkan suatu pendapat menggunakan bahasa yang lebih rumit. Hal ini dikarenakan bahasa politik tidak mengungkapkan sesuatu secara gamblang melainkan memiliki kode-kode tersendiri, yang disebabkan adanya suatu kepentingan baik itu untuk individu atau kelompok.

Masalah (3) menjelaskan bagaimana maksud dan tujuan dari penggunaan diksi dan gaya bahasa para anggota DPR RI tersebut. Para anggota dewan ini, pasti memiliki suatu maksud dan tujuan tersendiri. Hal ini dapat diketahui melalui bahasa yang digunakannya. Pada dasarnya anggota dewan ini dibawa oleh berbagai fraksi yang menaungi mereka. Ada kepentingan-kepentingan yang belum diketahui secara umum. Pada masalah (3) dijelaskan secara rinci apa maksud dan tujuan para anggota dewan menggunakan diksi dan gaya bahasa. Untuk mengetahuimaksud dan tujuan anggota dewan tersebut dengan melihat konteksnya misalnya dilihat dari latar belakang pendidikan, latar belakang politik (fraksi yang menaungi), jenis kelamin, etnis dan sebagainya.

2.2 Landasan Teori

Berikut teori-teori yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Teori tersebut adalah (1) wacana; (2) bahasa politik; (3) diksi; (4) gaya bahasa; (5) komunikasi politik; dan (6) propaganda politik.

2.2.1 Wacana

Tarigan (1987:27) mengemukakan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik, mempunyai awal dan akhir yang jelas, berkesinambungan, dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Dalam wacana lisan terdapat pembicara dan pendengar. Wacana adalah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi. Disiplin ilmu yang berusaha mengkaji penggunaan bahasa yang nyata dalam tindak komunikasi adalah analisis wacana.

a. Karakteristik Wacana

Wacana lisan memiliki karakteristik yang berbeda dengan wacana tulis. Brown dan Yule (dalam Kasih, 2008: 13) mengemukakan bahwa wacana lisan dapat dilihat dari sudut pandang produksinya, penutur dapat memanfaatkan efek kualitas suara dan paralinguistik untuk menghasilkan tambahan makna pada wacana lisan. Yang dimaksud efek kualitas suara yaitu tekanan suara, nada, irama, tempo, dan jeda suara. Sedangkan paralinguistik yaitu ekspresi wajah, gerakan anggota tubuh, dan sikap tubuh pada saat tuturan dihasilkan.

Wacana lisan, tidak mungkin penutur menghentikan percakapan dan meninggalkannya dengan melakukan kegiatan lain. Sedangkan pada wacana tulisan, penulis dapat menghentikan sesaat pada proses penulisan berlangsung dan hal ini tidak mempengaruhi makna yang terkandung dari wacana tulisan. Berbeda dengan wacana lisan, apabila penutur tiba-tiba menghentikan pembicaraannya pasti ada sesuatu yang terjadi dan itu memiliki makna tertentu. Dilihat dari performansinya, wujud wacana lisan dan tulisan dapat diterangkan sebagai berikut (Darma, 2009: 10-11).

1. Wujud Wacana dalam Bentuk Lisan

- a) Sebuah percakapan atau dialog yang lengkap dari awal sampai akhir, misalnya satu obrolan singkat dalam satu situasi.
- b) Suatu penggalan ikatan percakapan dalam rangkaian percakapan dalam rangkaian percakapan yang lengkap, telah menggambarkan suatu situasi, maksud, dan rangkaian penggunaan bahasa.

2. Wujud Wacana dalam Bentuk Tulisan

- a) Sebuah teks tertulis yang dibentuk oleh lebih dari satu alenia yang menggunakan sesuatu secara berurutan dan utuh, misalnya sebuah cerita, sebuah uraian sepucuk surat dan sebagainya.
- b) Sebuah alenia merupakan sebuah wacana apabila teks itu hanya terdiri dari satu alenia atau apabila kandungan sebuah alenia itu memiliki kesatuan misi korelasi dan disituasi yang utuh.

- c) Sebuah wacana mungkin dapat dibentuk oleh sebuah kalimat majemuk beranak atau dengan kalimat majemuk rapatan atau sistem elips unsur tertentu.

b. Jenis Pemakaian Wacana

Jenis pemakaian wacana berwujud monolog dan dialog (Darma, 2009: 26-32). Wacana dialog merupakan wacana yang dibentuk oleh percakapan atau pembicaraan antara dua pihak. Jenis wacana ini berupa: obrolan pembicaraan dalam telepon, wawancara, teks drama, dan sebagainya. Sedangkan wacana monolog adalah wacana yang tidak melibatkan suatu bentuk tutur percakapan atau pembicaraan dua pihak yang berkepentingan. Jenis wacana ini berupa: teks, surat, bacaan, cerita, dan sebagainya.

Jenis pemakaian wacana dapat ditentukan berdasarkan medium dan sifatnya. Berdasarkan medium terdapat wacana lisan dan tulisan (yang sudah dijelaskan sebelumnya). Berdasarkan sifatnya terdapat wacana transaksional dan wacana interaksional. Wacana transaksional adalah wacana yang mementingkan isi komunikasinya, misalnya pidato, ceramah, deklarasi dan sebagainya. Wacana interaksional adalah komunikasi timbal balik, misalnya percakapan, debat, persidangan, tanya jawab dan sebagainya.

c. Analisis Wacana

Stubbs (dalam Darma, 2009: 15) mengemukakan analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti dan menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik lisan atau tulis. Analisis wacana juga menekankan kajiannya pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam penggunaan bahasa antarpemuter. Analisis wacana juga digunakan untuk menemukan makna wacana yang sama persis atau paling tidak sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh pembicara dalam wacana lisan atau tulisan (Darma, 2009: 15).

Fillmore (dalam Rani, 2004: 17) menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam percakapan tatap muka merupakan penggunaan bahasa yang mendasar dan utama sehingga dapat digunakan untuk mendiskripsikan penyimpangan kaidah

penggunaan aturan bahasa. Oleh karena itu, analisis wacana percakapan merupakan usaha untuk memahami bahasa dan pemakainya.

d. Analisis Wacana Kritis (AWK)

Fairclough dan Wodak (dalam Eriyanto, 2003: 7) menyatakan Analisis Wacana Kritis (AWK) sebagai praktik sosial yang menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Selain itu, menganalisis wacana kritis menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing. AWK tertarik pada cara bagaimana bahasa dan wacana digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial termasuk untuk pemeliharaan kohesi sosial atau perubahan-perubahan sosial (Haryatmoko, 2014: 2). Asumsi dasar AWK adalah bahwa bahasa digunakan untuk beragam fungsi dan mempunyai konsekuensi, misalnya digunakan untuk memerintah, mendiskripsikan, memanipulasi, menggerakkan kelompok, membujuk dan sebagainya. Tujuan akhir AWK sampai pada membongkar bentuk-bentuk dominasi yang tersembunyi, diskriminasi atau prasangka yang merugikan. Para pioner AWK seperti N. Fairclough, T.A. Van Dijk, T. Van Leeuwee, dan R. Wodak mendapat inspirasi dari gagasan Foucault tentang hubungan pengetahuan, kekuasaan, dan kebenaran yang bertumpu pada wacana (Haryatmoko, 2014: 1). Berikut ini karakteristik penting dari analisis wacana kritis menurut Teun A. Van Dijk, Fairclough dan Wodak (dalam Eriyanto, 2003: 8-14), di antaranya sebagai berikut.

a) Tindakan

Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Wacana bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Orang berbicara atau menulis bukan ditafsirkan sebagai ia menulis atau berbicara dengan dirinya sendiri melainkan ia berbicara atau menulis dengan menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Dengan pemahaman seperti ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memahami wacana. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk,

menyangga, bereaksi, dan sebagainya. Seseorang pasti memiliki maksud tertentu pada saat berbicara atau menulis. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau di luar kesadaran mereka.

b) Konteks

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana disini dipandang, diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Analisis wacana juga memeriksa konteks dari komunikasi: siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa, dalam jenis khalayak dan situasi apa, melalui medium apa, bagaimana perbedaaan tipe dari perkembangan komunikasi, dan hubungan untuk masing-masing pihak. Guy Cook (dalam Eriyanto, 2003: 9) menyebutkan terdapat tiga hal sentral dalam pengertian wacana yaitu teks, konteks, dan wacana. Teks adalah semua bentuk bahasa bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas tetapi juga jenis ekspresi komunikasi, ucapan, music, gambar, efek suara, citra dan sebagainya. Konteks merupakan sesuatu yang memasukan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi dimana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan dan sebagainya. Wacana di sini memaknai teks dan konteks bersama-sama. Studi mengenai bahasa di sini, memasukan konteks, karena bahasa selalu berada dalam konteks dan tidak ada tindakan komunikasi tanpa partisipan, interteks, situasi, dan sebagainya.

Ada beberapa konteks yang penting yang harus dipahami dan berpengaruh terhadap wacana. Pertama, partisipan wacana, latar siapa yang memproduksi wacana tersebut, yaitu meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnik, agama, dalam banyak hal relevan untuk menggambarkan wacana. Kedua, setting sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana.

c) Historis

Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Misalnya, melakukan analisis wacana teks selebaran mahasiswa menentang soeharto. Pemahaman mengenai teks hanya akan diperoleh kalau kita bisa memberikan konteks historis di mana teks itu diciptakan. Bagaimana situasi politik dan suasana pada saat itu. Oleh karena itu pada waktu melakukan analisis perlu tinjauan untuk mengerti mengapa wacana yang berkembang seperti itu dan mengapa bahasa yang dipakai seperti itu.

d) Kekuasaan

Wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Misalnya percakapan antara majikan dan buruh, percakapan tersebut bukanlah percakapan yang alamiah, karena di sana terdapat dominasi kekuasaan majikan terhadap buruh tersebut. Aspek kekuasaan itu perlu dikritisi untuk melihat, misalnya jangan-jangan apa yang dikatakan oleh buruh tersebut hanya untuk menyenangkan hati majikannya.

Kekuasaan itu dalam hubungannya dengan wacana, penting untuk melihat apa yang disebut sebagai kontrol. Satu orang atau kelompok mengontrol orang atau kelompok lain lewat wacana. Kontrol di sini tidak saja berbentuk fisik dan langsung tetapi juga secara mental dan psikis (Eryanto, 2003: 12). Melalui wacana, seseorang dapat memanipulasi suatu kebenaran/kenyataan, memaksa, mengubah suatu persepsi orang terhadap suatu isu-isu. Jadi dengan menggunakan wacana dan tidak perlu menggunakan fisik seperti memukul, mengepung bahkan membunuh, seseorang dapat mengubah cara berpikir orang. Adanya suatu kontrol tidak lepas dari kekuasaan dan pengaruh. Kelompok dominan mungkin akan membuat kelompok lain (kelompok

yang lemah) mengikuti perkataan dari kelompok tersebut. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Van Dijk (dalam Eriyanto, 2003: 12) bahwa kelompok dominan lebih mempunyai akses seperti pengetahuan, uang, pendidikan, dibandingkan dengan kelompok yang lemah.

e) Ideologi

Ideologi merupakan salah satu konsep yang sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal ini karena teks percakapan adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Darma (2009: 54) mengemukakan ideologi berpengaruh terhadap pemakaian bahasa yang digunakan dalam konstruksi wacana, termasuk pengelompokan dan penafsiran situasi sosial. Misalnya ketika orang kulit putih membicarakan orang kulit hitam, maka gaya dan pembicaraannya sangat mungkin dipengaruhi oleh ideologi (dilihat benci atau tidak benci), hal ini termasuk ideologi ras. Begitupun saat orang kulit putih membangun citra dirinya dengan memaknai interaksi, pengetahuan, status, dan pandangan hidup, sehingga membentuk tipikal kepribadiannya. Fitur tipikal ini dapat terlihat melalui aspek wacana, yaitu intonasi, kalimat, pilihan kata, topik, dan berbagai perangkat bicara.

Ideologi juga dipandang dapat mempengaruhi atau memanipulasi kelompok tertentu. Ideologi dari kelompok dominan mempengaruhi atau memanipulasi ideologi kepada kelompok yang tidak dominan melalui kampanye disinformasi, melalui kontrol media, dan sebagainya. Teun A. Van Dijk (dalam Eriyanto, 2003: 13) mengatakan bahwa ideologi dimaksudkan untuk mengatur masalah tindakan dan praktik individu atau anggota suatu kelompok. Ideologi membuat anggota suatu kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah mereka dan memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi di dalam kelompok.

e. Kekhasan Analisis Wacana Kritis (AWK)

Analisis wacana berbeda dengan Analisis Wacana Kritis (AWK), perbedaannya terletak pada posisi keterlibatan peneliti dan tujuan. Dalam analisis wacana, posisi peneliti tidak melibatkan diri karena peneliti berusaha objektif tanpa

memihak. Sedangkan AWK peneliti mengambil posisi dan berpihak dengan tujuan membongkar bentuk-bentuk dominasi melalui analisis wacana (Haryatmoko, 2014: 4). Jadi, analisis dan diskripsi teori berperan untuk mengkritisi ketidakadilan, misalnya atas dasar gender, etnis, agama, politik dan sebagainya. Menurut Haryatmoko (2014: 5) tujuan yang akan dicapai dalam AWK adalah (i) menganalisis praktik wacana yang mencerminkan atau mengkontruksi masalah sosial; (ii) meneliti bagaimana ideologi dibekukan dalam bahasa dan menemukan cara bagaimana mencairkan ideologi yang mengikat bahasa atau kata; (iii) meningkatkan kesadaran agar peka terhadap ketidakadilan, diskriminasi, prasangka, dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Untuk lebih mengetahui perbedaan analisis wacana dan AWK dapat dijelaskan menggunakan tabel sebagai berikut (Haryatmoko, 2014: 5).

Tabel 2.1 Perbedaan Analisis Wacana dan Analisis Wacana Kritis

No.		Analisis Wacana (Objektif)	Analisis Wacana Kritis (AWK)
1.	Struktur Pengetahuan	Diskripsi tentang fakta dengan ambisi bebas nilai atau objektif.	Pengembangan dari tradisi ilmu sosial kritis yang tidak bebas nilai dan subjek harus ikut terlibat
2.	Kerangka Acuan	Tidak mau condong pada nilai politik tertentu; mengambil jarak untuk menjelaskan, kontrol, dan prediksi.	Dimotivasi oleh tujuannya memberi dasar ilmiah bagi pertanyaan kritis terhadap kehidupan sosial dalam rangka moral, politik, keadilan sosial, dan kekuasaan (berpihak).

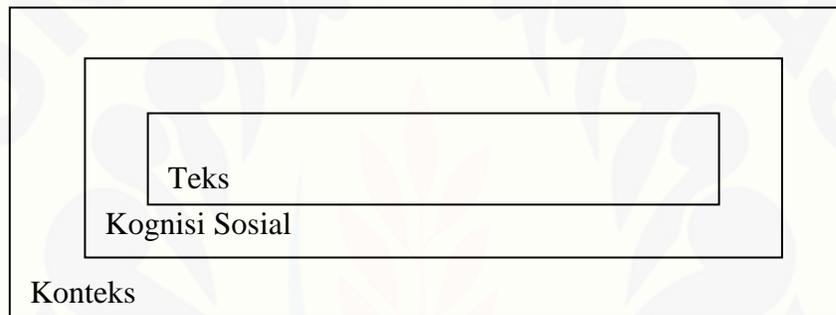
3.	Tujuan	Memberdayakan bentuk-bentuk kehidupan sosial agar bisa bekerja lebih efektif dan efisien tanpa merasa terlibat dalam masalah moral dan politik.	<p>a. Menumbuhkan kesadaran kritis.</p> <p>b. Membongkar bentuk-bentuk dominasi yang disembunyikan dengan harapan menjadi <i>agent of change</i>.</p> <p>c. Menghasilkan pengetahuan untuk melawan cara memerintah yang dominan.</p> <p>d. Menantang kebebasan untuk membuka kemungkinan bertindak kreatif.</p>
----	--------	---	---

Sumber: Jurnal Haryatmoko dalam Seminar Bahasa, 2014

f. Model Analisis Teun Van Dijk

Model analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Van Dijk adalah model yang banyak dipakai. Model yang dipakai oleh Van Dijk sering disebut sebagai “Kognisi Sosial”. Menurut Van Dijk (dalam Eryanto, 2003: 221) penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produk yang harus juga diamati. Untuk menggambarkan modelnya tersebut, Van Dijk membuat banyak studi pemberitaan media. Titik perhatian Van Dijk terutama pada studi mengenai realisme yang ada dalam masyarakat. Contoh wujud realisme melalui teks yaitu wawancara, rapat pengurus, debat di parlemen, propaganda politik, periklanan, artikel ilmiah, dan sebagainya (Eryanto, 2003: 223). Van Dijk juga melihat bagaimana struktur sosial dominasi dan kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kognisi atau pikiran dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks

tertentu. Wacana oleh Van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi atau bangunan yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Van Dijk memanfaatkan dan mengambil analisis linguistik tentang kosa kata, kalimat, proposisi, dan paragraf untuk menjelaskan dan memaknai teks. Kognisi sosial merupakan dimensi untuk menjelaskan bagaimana suatu teks diproduksi oleh individu/kelompok pembuat teks. Sedangkan analisis sosial atau konteks melihat bagaimana teks dihubungkan lebih jauh dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat atas suatu wacana. Inti analisis Van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis, berikut Gambar ketiga dimensi tersebut.



Gambar 2.1 Model Analisis Van Dijk

Prinsip-prinsip AWK menurut Van Dijk (Haryatmoko, 2014: 5) adalah sebagai berikut.

- 1) Teks atau pembicaraan benar-benar terjadi. Studi tentang wacana memfokuskan pada pembicaraan atau teks yang pernah terjadi, bukan dibuat-buat atau hanya dari contoh diskonstruksi seperti fiksi.
- 2) Melihat konteks merupakan bagian dari pemahaman konteks lokal dan global, sosial, dan budaya.
- 3) Wacana adalah pembicaraan yang fokus pada interaksi verbal dalam pembicaraan formal/informal/dialog institusional.
- 4) Wacana merupakan praksis sosial dalam konteks sosio-budaya tertentu.
- 5) Pengkategorian analisis dihindari.
- 6) Sekuensialitas, pemenuhan atau pelaksanaan wacana dianggap linier dan berurutan.

- 7) AWK mengandaikan kostruktivitas, maksudnya wacana merupakan hasil kostruksi.
- 8) Tingkat dan dimensi saling berhubungan dalam wacana, seperti suara, makan, dan tindakan.
- 9) Makna dan fungsi dimaksudkan bahwa pengguna bahasa dan analisis ada di belakang makna.
- 10) Aturan interaksi mengandaikan bahwa bahasa, komunikasi, seperti wacana terdapat aturannya.
- 11) Terdapat strategi, maksudnya pengguna bahasa mengetahui dan menerapkan strategi interaksi dalam pemahaman yang efektif dan perwujudan tujuan-tujuan komunikasi dan sosial.
- 12) Peran kognisi sosial, peran ini terkait dengan proses mental dan representasi dalam produksi dan pemahaman teks dan pembicaraan.

2.2.2 Bahasa Politik

Bahasa merupakan simbol yang universal, yang digunakan oleh masyarakat untuk mengekspresikan perasaan dan mengungkapkan benda-benda ataupun fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Sedangkan politik adalah serentetan peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas kekuasaan (Arifin, 2011: 4). Jadi bahasa politik adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu demi kepentingannya atas dasar kekuasaan. Pembicaraan tentang politik adalah pembicaraan tentang kekuasaan, tentang pengaruh, dan tentang otoritas. Nimmo (dalam Arifin, 2011: 5) membagi penggunaan pembicaraan dalam politik menjadi beberapa segi, diantaranya sebagai berikut.

1. Meyakinkan dan membangkitkan massa
2. Otoritas sosial
3. Ungkapan personal
4. Diskusi publik

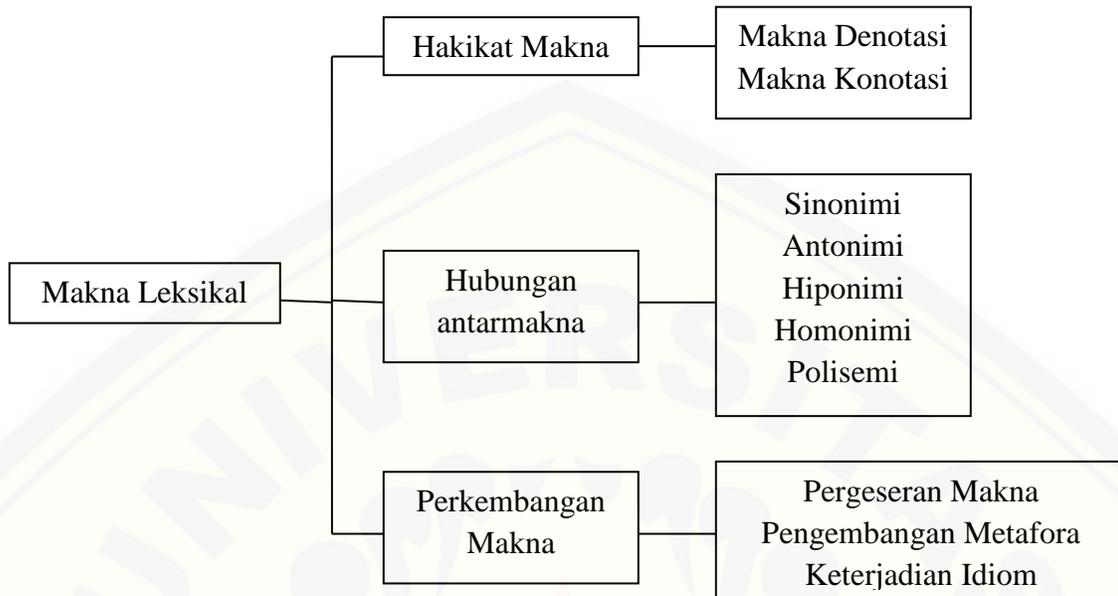
Bahasa politik sangat berhubungan kekuasaan, karena pada dasarnya bahasa adalah pengendali secara positif tanpa adanya fisik. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Foucault (dalam Eriyanto, 2003: 67) Kekuasaan tidak bekerja dengan cara negatif dan represif, melainkan dengan cara positif dan produktif. Strategi kekuasaan tidak bekerja melalui penindasan, melainkan melalui normalisasi dan regulisasi, menghukum dan membentuk publik yang disiplin. Publik tidak dikontrol lewat kekuasaan yang sifatnya fisik tetapi dikontrol, diatur dan disiplinkan melalui wacana. Maka dari itu, wacana merupakan cara yang dipilih para politisi Indonesia untuk menyuarakan dirinya. Setiap bahasa yang digunakan oleh para politisi (yang berhubungan dengan pemerintahan) tidak semata-mata menggunakan bahasa sehari-hari, para politisi ini menggunakan bahasa yang dapat menggugah dan mengubah persepsi masyarakat yang mendengarnya akan terkendali, itulah bahasa politik.

2.2.3 Diksi

Keraf (1996: 24) yang menyatakan ada tiga kesimpulan utama mengenai diksi, antara lain sebagai berikut.

- a. Pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat.
- b. Pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar.
- c. Pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan penguasaan sejumlah besar kosa kata atau perbendaharaan kata bahasa.

Makna merupakan pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Makna linguistik dibagi menjadi dua yaitu makna leksikal dan makna gramatikal (Parera, 2004: 8).



Gambar 2.2 Jenis Makna

1) Makna Denotasi

Makna denotasi atau makna denotatif menurut Keraf (1996: 28) dapat disebut sebagai makna *denotasional*, makna *kognitif*, makna *konseptual*, makna *ideasional*, makna *referensial*, atau makna *proposional*. Dikatakan makna *denotasional/ referensial/ proposional*, karena makna itu menunjuk pada suatu *referen*, konsep, atau ide tertentu dari suatu *referen*. Sedangkan dikatakan sebagai makna *kognitif*, karena makna itu berhubungan dengan dengan pengetahuan dari pihak pembicara dan pendengar. Dikatakan makna *proposional*, karena ia berhubungan dengan informasi yang faktual. Jadi, apabila seorang penulis ingin menyampaikan sesuatu yang ilmiah maka menggunakan makna denotatif, karena pada dasarnya suatu karya ilmiah tidak menginginkan interpretasi.

Contoh:

Halaman itu luasnya 300 meter persegi.

2) Makna Konotasi

Makna konotasi atau makna konotatif merupakan suatu jenis makna yang diungkapkan oleh pembicara dan pendengarnya mengandung nilai-nilai emosional. Makna konotatif muncul karena pembicara ingin menimbulkan perasaan setuju,

setuju, senang, tidak senang, dan sebagainya kepada pihak pendengar. Selain itu konotasi dapat timbul karena masalah hubungan sosial atau hubungan interpersonal. Menurut Palmer (Keraf, 1996: 30) ada beberapa cara yang memperlihatkan bahwa bahasa tidak semata-mata menjadi alat untuk menyampaikan informasi faktual diantaranya sebagai berikut.

- a. Penutur membuat pernyataan tetapi juga mengajukan pertanyaan dan memberi perintah. Misalnya suatu kalimat tanya yang memang ada hubungannya dengan menyampaikan informasi, namun terdapat maksud tersembunyi yaitu menanyakan informasi. Hal ini, sesuai dengan hubungan sosial atau interpersonal, bahwa bentuk-bentuk itu dapat bergeser dengan memasukan nilai emotif atau nilai konotatif tertentu.
- b. Penutur dalam berbicara memiliki maksud diantaranya berusaha untuk menakutkan, membujuk, mengingatkan, atau menyindir orang lain. Penutur biasanya menggunakan bahasa untuk mempengaruhi orang lain dengan bermacam-macam cara.
- c. Terdapat banyak hal yang sebenarnya ingin mengungkapkan evaluasi namun seolah-olah mengungkapkan fakta, sehingga hal ini akan mempengaruhi sikap orang. Serta dalam pengungkapannya menimbulkan nilai rasa yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Misalnya kata politikus-negarawan, menyembunyikan-menutupi.
- d. Bahasa digunakan sesuai dengan situasi, keadaan, dan status sosial penutur berada. Dalam hal ini terdapat kata yang dianggap kasar dan ada yang dianggap sopan. Pada situasi tertentu terdapat kata yang dianggap kasar apabila digunakan di situasi tertentu, namun kata itu dapat dianggap sopan apabila digunakan pada situasi yang lain. Misalnya kata istri dan bini, kata bini' akan dianggap kasar apabila digunakan pada forum resmi, sedangkan kata bini' akan dianggap sopan apabila digunakan pada kehidupan sehari-hari.

- e. Seringkali terjadi bahwa apa yang dikatakan bermakna lain dari makna yang tersirat dalam rangkaian kata yang diucapkan. Hal ini, intonasi akan mempengaruhi makna sebuah kalimat.
- f. Terdapat pernyataan namun sebenarnya itu hanyalah suatu pengandaian.

3) Sinonimi

Sinonimi merupakan istilah yang menunjukkan kata-kata yang memiliki makna yang sama (Keraf, 1996: 34). Sinonimi muncul antara kata asli dan serapan, antara kata berdasarkan kolokasi, dan antara dialek serta bahasa umum yang tidak perlu dibatasi karena kemunculannya sebagian terjadi secara alami dan sebagian disengaja (Parera, 2004: 69). Menurut Keraf (1996: 35) tolak ukur kesinoniman adalah sebagai berikut.

- a. Kedua kata itu harus saling bertukar dalam semua konteks, hal ini disebut sinonim total.
- b. Kedua kata itu memiliki identitas makna kognitif dan emotif sama, hal ini disebut sinonim komplet.

Dari tolak ukur kesinoniman yang sudah dijelaskan sebelumnya, diperoleh empat macam sinonim yaitu (i) sinonim yang total dan komplet; (ii) sinonim yang tidak total tetapi komplet; (iii) sinonim yang total tetapi tidak komplet; (iv) sinonim yang tidak total dan tidak komplet.

4) Antonimi

Antonimi merupakan relasi antar makna yang sangat berbeda atau bertentangan. Parera (2004: 70) mengungkapkan bahwa analisis antonimi merupakan keaneragaman dimensi untuk menyertakan dua makna atau lebih itu bertentangan makna. Menurut Parera (2004: 72-73) secara logika antonimi dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut.

a. Kontradiksi

Makna dikatakan berkontraduksi apabila dua makna yang saling mengucilkan dan menolak kemunculannya bersama-sama dalam satu proposisi atau kalimat pernyataan. Apabila terdapat satu yang benar, maka yang lain salah.

Contoh:

hidup >< mati

b. Kontrer

Dua kata atau proposisi dikatakan dalam posisi kontrer jika dua kata atau proposisi itu tidak mungkin sama-sama benar, tetapi ada kemungkinan keduanya salah. Leech (dalam Parera, 2004: 73) membedakan pertentangan makna dibagi menjadi dua yaitu pertentangan makna beranting dan pertentangan makna polaris. Pertentangan makna beranting biasanya terdapat dalam kelompok kata yang menunjukkan satu jenis dan kelas benda atau zat. Sedangkan pertentangan makna Polariss biasanya terdapat pada kelompok makna adjektif.

Contoh:

Emas >< perak

Kata 'emas' dan 'perak' merupakan bertentangan secara kontrer dengan tipe beranting.

Kaya >< miskin

Kata *kaya* dan *miskin* merupakan bertentangan secara Polariss.

Menurut Keraf (1996: 40-41) antonimi atau oposisi dibedakan menjadi enam diantaranya sebagai berikut.

a. Oposisi Kembar

Oposisi kembar merupakan oposisi yang mencakup dua anggota, dimana terdapat penegasan terhadap yang satu berarti penegasan terhadap anggota yang lain, penegasan terhadap yang satu berarti penyangkalan terhadap yang lain.

Contoh:

Laki-laki >< Wanita

b. Oposisi Majemuk

Oposisi majemuk merupakan oposisi yang mencakup suatu perangkat yang terdiri dua kata, dimana oposisi ini berhubungan terutama dengan hiponim-hiponim dalam suatu kelas tertentu. Misalnya dalam kelas logam, spesies binatang, buah-buahan dan sebagainya.

c Oposisi Gradual

Oposisi gradual merupakan oposisi yang masih berkaitan dengan oposisi kembar, namun pada oposisi gradual dua kata yang berlawanan masih memperhitungkan tingkatan.

Contoh:

Panjang >< Pendek

d Oposisi Relasional

Oposisi relasional merupakan oposisi antara dua kata yang mengandung relasi kebalikandan menyatakan arah yang berlawanan.

Contoh:

Suami >< istri

e Oposisi Hirarkis

Oposisi hirarkis merupakan hampir sama dengan oposisi majemuk, namun pada oposisi hirarkis terdapat tingkatan.

Contoh:

Desimeter >< Meter

f Oposisi Inversi

Dikatakan oposisi inversi apabila terdapat pasangan kata beberapa-semua, mungkin-wajib, boleh-harus.

5) Hiponimi

Hiponimi merangkum makna yang lebih luas dalam satu kelompok makna tertentu. Misalnya kata 'bunga' dapat diperluas terdapat berbagai jenis bunga 'mawar', 'melati', 'kamboja', dan sebagainya.

6) Homonimi

Homonimi merupakan dua ujaran yang dapat dibedakan berdasarkan lafal dan tulisannya. Dikatakan homonimi apabila lafal dan tulisannya sama. Dikatakan homofon apabila lafalnya sama tetapi tulisannya berbeda. Dikatakan homograf apabila bentuk dan ejaannya sama, namun lafalnya berbeda. Misalnya kata 'bank' dan 'bang' merupakan homofon (Parera, 2004: 81).

7) Polisemi

Polisemi merupakan satu ujaran dalam bentuk kata yang memiliki makna berbeda-beda, tetapi masih ada hubungan dan kaitan antara makna-makna yang berlainan tersebut (Parera, 2004: 81). Misalnya: meja hijau, meja sekolah, dan sebagainya.

2.2.4 Gaya Bahasa (Majas)

Majas adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan kesan dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda dengan benda lain atau hal lain yang lebih umum. Majas merupakan bentuk retorik yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan ataupun mempengaruhi para penyimak atau pembaca (Kasih, 2008: 17). Keraf (1996: 112-144) membagi jenis-jenis gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, nada, struktur kalimat, dan langsung tidaknya makna.

A. Gaya Bahasa Berdasarkan Pilihan Kata

Berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa mempersoalkan kata mana yang paling sesuai dengan posisi kalimat dan dilihat dari lapisan pemakaian bahasa dalam masyarakat. Gaya bahasa berdasarkan pilihan kata dibagi menjadi 3 yaitu gaya bahasa resmi, gaya bahasa tak resmi, dan gaya bahasa percakapan.

1. Gaya Bahasa Resmi

Gaya bahasa resmi adalah gaya dalam bentuknya yang paling lengkap, gaya yang dipergunakan dalam kesempatan-kesempatan resmi. Jenis gaya bahasa resmi berbentuk bahasa tulisan, namun tidak banyak juga digunakan dalam berpidato.

Contoh:

...Bagi saudara-saudara yang beragama Islam demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan katolik saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama hindu om atta pramahista saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama budha demi Sang Hyang Adi Budha saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya bahawa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh...

Contoh di atas adalah bentuk gaya bahasa resmi, diambil dari potongan rekaman pengambilan sumpah anggota DPR RI pada saat pelantikan tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR dari *youtube*. Bentuk bahasa yang digunakan bersifat serius dan penggunaan katanya pun tidak membingungkan.

2. Gaya Bahasa Tak Resmi

Gaya bahasa tak resmi merupakan bahasa yang dipergunakan dalam bahasa standar, khususnya pada kesempatan-kesempatan yang tidak formal.

3. Gaya Bahasa Percakapan

Gaya bahasa percakapan adalah gaya bahasa yang digunakan saat percakapan. Dalam gaya bahasa ini, pilihan katanya adalah kata-kata populer dan bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari.

Contoh:

- Erfina : "Kita minta format penulisannya sama pak bambang, nanti kita minta ajari sama pak bambang, terus kita kirim kesana langsung."
Nency : "Jadi ini gak usah?"
Erfina : "Nggak usah. Engkok kalau gak dibales kita telfon aja, pak ini kita sudah kirim email."
Nency : "Pak Pak Bambang no. ya apa sih?"

Contoh tersebut adalah kutipan yang diambil dari rekaman antara sesama mahasiswa yang terjadi di ruang lingkup Fakultas Sastra Universitas Jember pada tanggal 15 November 2013. Bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang tidak resmi dan merupakan bahasa yang digunakan dalam sehari-hari.

B. Gaya Bahasa Berdasarkan Nada

Gaya bahasa berdasarkan nada didasarkan pada sugesti yang dipancarkan dari rangkaian kata-kata yang terdapat dalam sebuah wacana. Sering kali sugesti ini akan lebih nyata apabila diikuti dengan sugesti suara dari pembicaraan, bila sajian yang dihadapi adalah bahasan lisan. Gaya bahasa berdasarkan nada dapat dibagi diantara gaya yang sederhana, gaya mulia dan bertenaga, serta gaya menengah.

1. Gaya Sederhana

Gaya sederhana dapat digunakan untuk memberi instruksi, perintah, pelajaran, perkuliahan dan sebagainya. Gaya bahasa ini biasanya digunakan untuk memberikan intruksi dan gaya ini juga cocok digunakan untuk menyampaikan fakta-fakta atau pembuktian-pembuktian.

2. Gaya Mulia dan bertenaga

Gaya bahasa yang mulia dan bertenaga merupakan suatu bentuk gaya yang digunakan untuk menggerakkan sesuatu. Nada agung dan mulia akan sanggup menggerakkan emosi setiap pendengarnya. Contoh penggunaan gaya bahasa seperti ini adalah saat seseorang berkhotbah, penyiar agama ini akan menggunakan nada suara yang agung dan mulia, hal ini dapat menjadikan emosi pendengar dapat bangkit dan menggetarkan hati pendengarnya.

3. Gaya Menengah

Gaya menengah adalah gaya yang diarahkan kepada usaha untuk menimbulkan suasana senang dan damai. Tujuan dengan menggunakan gaya bahasa ini adalah menciptakan suasana senang dan damai, maka nada yang digunakan adalah lemah-lembut, dan penuh kasih sayang. Karena sifatnya yang lemah lembut dan sopan santun, maka gaya ini biasanya menggunakan metafora bagi pilihan katanya.

C. Gaya Bahasa Berdasarkan Struktur Kalimat

Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat maksudnya adalah struktur dari sebuah kalmia dapat dijadikan landasan untuk menciptakan gaya bahasa. Menurut Keraf (1996, 124) terdapat tiga jenis sifat kalimat yaitu kalimat bersifat periodic (suatu kalimat terdapat penekanan di akhir kalimat), kalimat bersifat kendur (suatu kalimat mendapat penekanan di awal kalimat), kalimat berimbang (suatu kalimat yang mengandung dua bagian kalimat atau lebih yang kedudukannya sama tinggi atau sederajat). Berdasar ketiga sifat struktur kalimat tersebut, terdapat tiga gaya bahasa yang diperoleh yaitu sebagai berikut.

1. Klimaks

Gaya bahasa klimaks diturunkan dari kalimat yang bersifat periodik. Klimaks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan sebelumnya.

Contoh:

Kami mendoakan agar pada suatu waktu (kapan saja waktunya) mereka dapat berdiri sendiri, bukan supaya mereka tidak bisa tunduk di bawah pengaruh kita, mengabdikan, dan berbakti kepada kita, tetapi karena justru inilah keadilan sosial yang selama ini kita perjuangkan.

2. Antiklimaks

Gaya bahasa antiklimaks diturunkan dari kalimat yang bersifat mengendur. Gaya bahasa antiklimaks mengurutkan gagasan dari yang terpenting ke gagasan yang kurang penting.

Contoh:

Ketua pengadilan negeri itu adalah seorang yang kaya, pendiam, dan tidak terkenal namanya.

3. Paralelisme

Paralelisme adalah semacam gaya bahasa yang memakai kata-kata atau frasa-frasa yang menduduki fungsi yang sama dalam bentuk gramatikal yang sama. Bentuk paralelisme menonjolkan kata atau kelompok kata yang sama fungsinya. Tetapi, apabila terlalu banyak digunakan maka kalimat-kalimatnya akan menjadi kaku dan mati.

Contoh:

Sangatlah ironis kedengarannya bahwa ia menderita kelaparan dalam sebuah daerah yang subur dan kaya, serta mati terbunuh dalam sebuah negeri yang sudah ratusan tahun hidup dalam ketentraman dan kedamaian.

4. Antitesis

Antitesis adalah gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan yang bertentangan dengan menggunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan.

Contoh:

Mereka sudah kehilangan banyak harta bendanya, tetapi mereka juga telah banyak memperoleh keuntungan.

5. Repetisi

Repetisi adalah pengulangan bunyi, suku kata, kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Gaya bahasa repetisi dibagi menjadi bermacam-macam jenisnya, berdasarkan tempat kata yang diulang dalam baris, klausa dan kalimat.

a. *Epizeuksis*

Epizeuksis merupakan repetisi yang bersifat langsung, artinya kata yang diulang secara berurut-urut. Misalnya: Kita harus bekerja, bekerja, bekerja, sekali lagi bekerja untuk mengejar semua ketinggalan kita.

b. *Tautotes*

Tautotes merupakan repetisi atas sebuah kata berulang-ulang dalam sebuah konstruksi. Misalnya: Kau menuding aku, aku menuding kamu, kamu dan aku menjadi seteru.

c. *Anafora*

Anafora merupakan repetisi yang berwujud perulangan kata pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya. Misalnya: Bahasa yang baku pertama-tama berperan sebagai pembentuk suatu masyarakat bahasa-bahasa yang bermacam-macam dialeaknya. Bahasa yang baku akan mengurangi perbedaan warisan dialek Indonesia.

d. *Epistrofa*

Epistrofa merupakan repetisi yang berwujud perulangan kata atau frasa pada akhir baris atau kalimat berurutan. Misalnya: Bumi yang kau diami, laut yang kau layari adalah puisi. Udara yang kau hirupi, air yang kauteguki adalah puisi.

e. *Simpleks*

Simpleks merupakan repetisi pada awal dan akhir beberapa baris atau kalimat berturut-turut. Misalnya: Kamu bilang hidup ini brengsek. Aku bilang biarin. Kamu bilang hidup ini tak berarti.

f. *Mesodiplosis*

Mesodiplosis merupakan repetisi di tengah baris-baris atau beberapa kalimat berurutan. Misalnya: Pegawai jangan mencuri kertas itu. Pak jangan mencuri kayu itu.

g. *Epanalepsis*

Epanalepsis merupakan pengulangan yang berwujud kata terakhir dari baris, klausa, dan kalimat, mengulang kata pertama. Misalnya: Kita gunakan pikiran dan perasaan kita.

h. *Anadiplosis*

Anadiplosis merupakan kata atau frasa terakhir dari suatu klausa atau kalimat menjadi kata atau frasa pertama dari klausa atau kalimat berikutnya. Misalnya: Dalam lau ada tiram, dalam tiram ada mutiara, dalam mutiara: ah tak ada apa.

D. Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna

Gaya bahasa berdasarkan makna diukur dari langsung tidaknya makna, yaitu apakah acuan yang dipakai masih mempertahankan makna denotatifnya tau sudah terjadi penyimpangan. Bila acuan yang digunakan itu masih mempertahankan makna dasar dasar, maka bahasa masih bersifat polos. Tetapi bila sudah ada perubahan makna, entah berupa makna konotatif atau sudah menyimpang jauh dari makna denotatifnya, maka acuan itu dianggap sudah memiliki gaya. Gaya bahasa berdasarkan ketidaklangsungan makna dibagi atas dua kelompok yaitu gaya bahasa retorik dan gaya bahasa kiasan.

1. Gaya Bahasa Retoris

Gaya bahasa retorik dapat dibagi menjadi berbagai macam gaya bahasa, diantaranya sebagai berikut.

a) *Aliterasi*

Gaya bahasa *aliterasi* adalah semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang sama.

Contoh:

Keras-keras kerak kena air lembut juga.

b) *Asonansi*

Gaya bahasa *asonansi* adalah gaya bahasa dengan perulangan bunyi vokal yang sama.

Contoh:

Ini muka penuh luka siapa punya.

c) *Anastrof*

Anastrof atau inverse adalah gaya retorik yang diperoleh dengan pembalikan susunan kata yang biasa dalam kalimat.

Contoh:

Pergialah ia meninggalkan kami, keheranan kami melihat perangnya. Bersorak-sorak orang di tepi jalan memukul alat music melalui gerbang dihiasi bunga dan panji berkibar.

d) *Apofasis atau Preterisio*

Apofasis merupakan gaya bahasa yang digunakan penulis atau pengarang untuk menegaskan sesuatu, tetapi tampaknya menyangkal. Berpura-pura membiarkan sesuatu padahal sebenarnya menekankan. Berpura-pura melindungi atau menyembunyikan sesuatu, tetapi sebenarnya memamerkannya.

Contoh:

Saya tidak mau mengungkapkan dalam forum ini bahwa saudara telah menggelapkan ratusan juta rupiah uang negara.

e) *Apostrof*

Apostrof adalah gaya bahasa yang berbentuk pengalihan amanat dari para hadirin kepada sesuatu yang tidak hadir. Gaya bahasa ini biasa digunakan oleh para orator klasik. Seperti dalam pidatonya, sang orator secara tiba-tiba mengarahkan pembicaraannya langsung kepada sesuatu yang tidak hadir seperti seseorang yang sudah meninggal atau objek yang abstrak.

Contoh:

Hei kamu dewa-dewa yang berada di surge, datanglah dan bebaskanlah kami dari belunggu penindasan ini.

f) *Asindeton*

Asindeton adalah gaya bahasa yang bersifat padat, dimana kata, frasa, atau klausa yang sederajat tidak dihubungkan dengan menggunakan kata sambung. Bentuk-bentuk seperti ini biasanya hanya dipisahkan dengan tanda koma.

Contoh:

Dan kesesakan, kepedihan, kesakitan, seribu serita detik-detik penghabisan orang melampiasikan nyawa.

g) *Polisindeton*

Polisindeton adalah gaya bahasa yang merupakan kebalikan dari *asyndeton*. Gaya bahasa *polisindeton* menggunakan kata sambung dalam memisahkan kata atau frasa.

Contoh:

Kemanakah burunng-burung yang gelisah dan tak berumah dan menyerah pada gelap dan dingin yang bakal merontak.

h) *Chiasmus*

Chiasmus adalah gaya bahasa yang terdiri atas dua bagian baik frasa atau klausa yang sifatnya dipertentangkan satu sama lainnya.

Contoh:

Semua kesabaran kami sudah hilang, lenyap sudah ketekunan kami untuk melanjutkan usaha itu.

i) *Slipsis*

Slipsis adalah suatu gaya bahasa yang menghilangkan beberapa kalimat, sehingga pembaca atau pendengar dapat mengisi penghilangan tafsiran tersebut dan menafsirkan sendiri.

Contoh:

Masihkah kau tidak percaya bahwa dari segi fisik engkau taka pa-apa, tapi psikis.....

j) Eufemisme

Eufemisme yaitu pemakaian suatu ungkapan yang lembut, samar atau berputar-putar untuk mengganti suatu presisi yang kasar atau suatu kebenaran yang kurang enak. Misalnya bentuk-bentuk eufemisme dapat diamati ketika para anggota dewan mencoba mempertahankan kepentingannya dengan usaha untuk meyakinkan masyarakat, bahwa tanpa pemerintahan yang dipimpin olehnya (atau kelompoknya), negara akan mengalami persengketaan nasional atau mengalami kekalutan politik yang tidak akan berakhir. Untuk usaha-usaha menyelubungi kepentingan tersebut dalam forum politik, haruslah dipergunakan bahasa yang bersifat eufemisme.

Contoh:

Ayahnya sudah tak ada di tengah-tengah mereka.

k) *Litotes*

Litotes adalah majas yang menyatakan kebalikan daripada hiperbola, Maksudnya yaitu menyatakan sesuatu dengan memperkecil atau memperhalus keadaan. Majas *litotes* disebut juga hiperbola negatif.

Contoh:

Tapi, maaf kami tak dapat menyediakan apa-apa. Sekadar air untuk membasahi tenggorokan saja yang ada.

l) *Histeron Proteron*

Histeron Proteron adalah gaya bahasa yang merupakan kebalikan dari sesuatu yang logis atau sewajarnya. Misalnya, menempatkan sesuatu yang terjadi kemudian pada awal peristiwa.

Contoh:

Jendela ini telah memberi sebuah kamar padamu untuk dapat berteduh dengan tenang.

m) *Pleonasme atau Tautologi*

Pleonasme atau Tautologi adalah gaya bahasa yang kalimatnya menggunakan kata-kata lebih banyak daripada yang diperlukan untuk menyatakan satu pikiran atau gagasan. Walaupun secara praktis kedua istilah itu disamakan saja, namun ada yang ingin membedakan keduanya. Dikatakan *pleonasme*, apabila kata yang berlebihan itu

dihilangkan, artinya atau maknanya tetap utuh atau sama. Sedangkan dikatakan *tautologi* apabila kata yang berlebihan itu, sebenarnya mengandung pengulangan dari sebuah kata yang lain. Jadi apabila dihilangkan akan menjadi makna yang berbeda bahkan kurang.

n) *Perifrasis*

Perifrasis merupakan gaya bahasa yang mirip dengan gaya bahasa pleonasmе yaitu menggunakan kata lebih banyak dari yang diperlukan.

Contoh:

Ia telah beristirahat dengan damai.

o) *Prolepsis* atau Antisipasi

Gaya bahasa *prolepsis* adalah gaya bahasa dimana orang menggunakan lebih dahulu kata-kata atau sebuah kata sebelum gagasan yang sebenarnya terjadi. Misalnya dalam mendiskripsikan peristiwa kecelakaan pesawat terbang sebelum pesawat tersebut kecelakaan, namun penulis sudah menggunakan kata *pesawat yang sial itu*, padahal belum terjadi kecelakaan.

Contoh:

Pada pagi hari yang naas itu, ia meninggalkan sebuah sedan merah.

p) *Erotesis* (Pertanyaan Retoris)

Pertanyaan retorik merupakan gaya bahasa yang dipergunakan saat berpidato atau tulisan dengan tujuan untuk mencapai efek yang lebih mendalam dan penekanan yang wajar dan tidak menghendaki suatu jawaban.

Contoh:

Rakyatlah yang harus menanggung akibat semua korupsi dan manipulasi politik di negara ini?

q) *Silepsis dan Zeugma*

Silepsis dan Zeugma adalah gaya bahasa dengan menggunakan dua kontruksi rapatan dengan menghubungkan sebuah kata dengan dua kata lain yang sebenarnya hanya salah satunya mempunyai hubungan dengan kata pertama. Pada *silepsis* kontruksi yang digunakan secara gramatikal benar tetapi secara semantik

tidak benar. Sedangkan *zeugma*, kata yang dipakai untuk membawahi kedua kata berikutnya, kata ini benar secara gramatikal ataupun secara makna logis.

r) *Koreksi atau Epanortosis*

Koreksio adalah suatu gaya bahasa yang digunakan awalnya untuk menegaskan kemudian digunakan untuk memperbaikinya.

Contoh:

Sudah empat kali saya mengunjungi daerah itu, ah bukan, sudah lima kali.

s) *Hiperbola*

Hiperbola adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan berlebih-lebihan.

Contoh:

Keringatnya *menganak sungai*.

t) *Paradoks*

Paradoks adalah pengungkapan terhadap suatu kenyataan yang seolah-olah bertentangan, tetapi mengandung kebenaran.

Contoh:

Memang hidupnya mewah, mempunyai mobil, rumahnya besar, tetapi mereka tidak berbahagia. Tidak tahu mengapa, mungkin karena belum mempunyai anak.

u) *Oksimoron*

Oksimoron adalah pengungkapan yang mengandung pendirian/pendapat terhadap sesuatu yang mengandung hal-hal yang bertentangan.

Contoh:

- a. Siaran radio dapat dipakai untuk sarana persatuan dan kesatuan, tetapi dapat juga sebagai alat untuk memecah belah suatu kelompok masyarakat atau bangsa.
- b. Olahraga mendaki bukit memang menarik, tetapi juga sangat berbahaya.

2. Gaya Bahasa Kiasan

Gaya bahasa kiasan berdasarkan perbandingan atau persamaan. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu hal lain, untuk menemukan cirri-ciri yang menunjukkan kesamaan antara kedua hal tersebut. Halhal yang perlu diperhatikan

untuk menentukan apakah perbandingan tersebut gaya bahasa atau tidak, diantaranya sebagai berikut.

- a. Tetapkanlah terlebih dahulu kelas kedua hal yang diperbandingkan.
- b. Perhatikan tingkat kesamaan atau perbedaan antara kedua hal tersebut.
- c. Perhatikan konteks dimana cirri-ciri kedua hal diketemukakan jika tak ada kesamaan maka perbandingan itu adalah bahasa kiasan.

Macam-macam gaya bahasa kiasan, dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Persamaan atau *Simile*

Simile adalah perbandingan yang bersifat eksplisit (menyatakan secara langsung sesuatu yang sama dengan hal yang lain). Untuk menunjukkan kata persamaan biasanya dengan kata-kata seperti, sama, sebagai, bagaikan, laksana, dan sebagainya.

Contoh:

Matanya seperti kelereng.

b. *Metafora*

Metafora adalah perbandingan yang implisit. Jadi, tanpa kata pembanding di antara dua hal yang berbeda. Dengan kata lain, metafora yaitu majas yang berupa kiasan persamaan antara benda yang diganti namanya dengan benda yang menggantinya.

Contoh:

- a. Kapan Anda bertemu dengan *lintah darat* itu?
- b. Siti Mutmainah adalah *kembang desa* di sini.
- c. Kelaparan masih tetap *menghantui* rakyat Etiopia.
- d. Nina *tangkai hati* ibu.

c. *Alegori, Parabel, Fabel*

Alegori merupakan gaya bahasa yang nama-nama pelakunya bersifat abstrak dan tujuannya jelas. *Parabel* merupakan gaya bahasa dengan tokoh-tokohnya manusia yang selalu mengandung nilai moral. *Fabel* merupakan suatu metafora

berbentuk cerita mengenai dunia binatang bahkan makhluk yang tak bernyawa bertindak seolah-olah menyerupai manusia.

d. *Personifikasi*

Personifikasi adalah majas perbandingan yang menuliskan benda-benda mati menjadi seolah-olah hidup, dapat berbuat, atau bergerak.

Contoh:

- a. Peluru *mengoyak-ngoyak* dada musuh.
- b. Banjir besar telah *menelan* seluruh harta penduduk.

e. *Alusi*

Alusi merupakan gaya bahasa untuk mensugestisikan kesamaan antara orang, tempat, atau peristiwa.

Contoh:

Bandung adalah paris jawa.

f. *Eponim*

Eponim merupakan Suatu gaya bahasa dengan cara seseorang yang namanya sering dihubungkan dengan sifat tertentu, sehingga nama itu dipakai untuk menyatakan sifat tertentu itu.

Contoh:

Wonder women dipakai untuk memanggil perempuan yang sangat kuat mental ataupun fisik.

g. *Epitet*

Epitet merupakan gaya bahasa untuk menyatakan atau memanggil seseorang dengan keterangan khusus sebagai pengganti nama barang atau seseorang tersebut.

Contoh:

Putri malam untuk mengganti nama bulan.

h. *Sinekdoke*

Sinekdoke merupakan gaya bahasa dengan mempergunakan sebagian dari sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian.

Contoh:

Hari ini aku belum melihat batang hidungnya Nobita.

i. *Metonimia*

Metonimia merupakan gaya bahasa yang memepergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatau hal lain, karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. Hubungan ini dapat berupa pemilik untuk barang yang dimilikinya, akibat untuk sebab, isi untuk menyatakan kulit dan sebagainya.

Contoh:

Ani minum satu gelas kopi.

j. *Antonomasia*

Antonomasia merupakan gaya bahasa yang hampir sama dengan *sinekdoke* yaitu dengan menggunakan *epiteta* (gelar, atau jabatan) untuk menggantikan nama diri.

Contoh:

Pangeran yang meresmikan pembangunan istana ini.

k. *Hipalase*

Hipalase merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata tertentu untuk menerangkata kata yang mengandung presepsi yang berbeda.

Contoh:

Ia berbaring di atas sebuah bantal yang gelisah. (yang gelisah bukan bantalnya namun orangnya)

l. *Ironi, Sinisme, Sarkasme*

Ironi atau sindiran merupakan gaya bahasa dengan mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud yang berlawanan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-kata tersebut. Gaya bahasa *ironi* lebih halus dalam menggunakan kata-kata sindirannya. *Sinisme* merupakan gaya bahasa untuk melakukan sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. *Sinisme* dapat dikatakan lebih kasar dalam menggunakan kata-kata sindirannya dibandingkan dengan *ironi*. *Sarkasme* merupakan gaya bahasa untuk sindirang yang

paling kasar, gaya bahasa sarkasme ini lebih menyakiti hati apabila diucapkan dan tidak enak untuk didengar.

Contoh:

Lihatlah kelakuan raksasa itu. (*sarkasme*)

Harus sekali baumu, berapa hari tidak mandi (*sinisme*)

m. *Satire*

Satire merupakan gaya bahasa dengan menguraikan tafsiran lain dari makna suatu kalimat secara mendalam.

n. *Inuendo*

Inuendo merupakan sebuah sindiran dengan mengecilkan kenyataan yang sebenarnya. Ia menyatakan kritik dengan sugesti yang tidak langsung dan sering tampak tidak menyakiti.

Contoh:

Ia menjadi kaya raya karena sedikit mengadakan komersialisasi jabatannya.

o. *Antifrasis*

Antifrasis merupakan sebuah sindiran yang menggunakan kata dengan makna kebalikannya, yang bisa saja dianggap sebagai sindiran sendiri. *Antifrasis* dapat diketahui dengan jelas apabila pembaca atau pendengar dihadapkan langsung dengan kenyataannya bahwa yang dikatakan adalah sebaliknya.

Contoh:

Kamu memang orang yang terhormat.

p. *Pun atau Paronomasia*

Pun atau Paronomasia merupakan gaya bahasa kiasan dengan menggunakan permainan kemiripan bunyi tetapi maknanya sangat berbeda.

Contoh:

Kamu orang kaya, ya kaya monyet.

2.2.5 Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan sebuah studi yang interdisipliner yang dibangun atas berbagai macam disiplin ilmu, terutama dalam hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik (Cangara, 2011:12). Aritoteles (dalam Cangara, 2011: 14) komunikasi ditekankan pada siapa mengatakan siapa apa kepada siapa. Komunikasi menekankan siapa yang berbicara, mengenai apa penutur berbicara, dan kepada siapa penutur berbicara. Sedangkan menurut Eric Louw (dalam Cangara, 2011: 24) politik mengandung sejumlah konsep kenegaraan, yaitu kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan, dan pembagian atau alokasi sumber daya (*recources*).

Birch (dalam Darma, 2009: 95-96) mengungkapkan enam asumsi mengenai komunikasi, diantaranya sebagai berikut.

- a. Komunikasi selalu menentukan bentuk politiknya dahulu sebelum bentuk linguistiknya. Sebelum memilih bahasa yang digunakan seseorang akan memperhatikan kendala-kendala politik, sosial, *culture*, dan ideologinya terlebih dahulu.
- b. Komunikasi akan selalu dipengaruhi motivasi, kepentingan, dan situasi. Bentuk-bentuk linguistik yang dipilih digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan orang lain membuat makna tentang realitas, mengelompokkan sesuatu dalam realitas, dan sebagainya.
- c. Komunikasi selalu berstrategi. Tindak komunikasi selalu berkaitan dengan siasat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- d. Komunikasi selalu terjadi dalam pertemuan dan interaksi tertentu. Tindak komunikasi selalu melibatkan orang sebagai partisipan dan akan terjadi pertukan makna antar partisipan dalam konteks-konteks tertentu.
- e. Komunikasi selalu berkaitan dengan nilai. Bentuk-bentuk linguistik yang dipilih akan berkaitan dengan nilai-nilai. Nilai-nilai itu berkaitan dengan kekuasaan, subordinasi, gender, solidaritas, dan sebagainya yang tidak bersifat *given*.

f. Komunikasi selalu bersifat ketergantungan. Tindak komunikasi selalu bergantung dengan cara-cara kelompok, institusi, masyarakat, atau individu dalam memberikan nilai terhadap makna-makna tertentu. Makna bukanlah sesuatu yang alamiah, tetapi dibangun dalam proses-proses sosial dan politik. Tidak ada makna tunggal, makna akan bersifat jamak.

Menurut Darma (2009: 97) enam asumsi Birch mengenai komunikasi menjadi titik tolak kajian pembahasan terhadap bahasa politik. Pada dunia politik kadang-kadang terjadi komunikasi yang tidak ideal, di mana tidak adanya kesejajaran kekuasaan antara yang memiliki jabatan dan tidak memiliki jabatan. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, para politisi yang memiliki jabatan akan mendayagunakan bahasa untuk kepentingan politik tertentu.

Komunikasi politik ditekan pada dua titik sentral yaitu pembicaraan dan pengaruh atau mempengaruhi. Politik adalah komunikasi, hal ini karena sebagian besar kegiatan politik dilakukan dengan pembicaraan sebagai salah satu bentuk komunikasi. Sebaliknya komunikasi adalah politik, hal ini karena hampir semua komunikasi bertujuan mempengaruhi sebagai salah satu dimensi politik (Arifin, 2011: 8). Hal ini dapat dirumuskan bahwa komunikasi politik adalah pembicaraan yang bertujuan mempengaruhi dalam kehidupan bernegara.

Proses politik adalah praksis komunikasi, yaitu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi politik yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang beragam. Birch (dalam Darma, 2009: 95) menegaskan bahwa

“di mana ada kontrol disitu ada konflik, di mana ada konflik di situ ada politik. Tidak ada tindak komunikasi, tidak ada masalah dan rasa bersalah dapat melarikan diri dari politik. Semua komunikasi selalu mempunyai konsekuensi, dalam arti bahwa komunikasi selalu memiliki signifikansi di balik bentuk dan strukturnya bagi masyarakat dan institusi yang terlibat dalam penyusunan dan penafsiran.”

Pembelajaran komunikasi politik akan lebih banyak berkisar pada aktivitas politik secara praktis, misalnya rapat kerja, pemilu, kampanye, dan pengarahan massa

(Cangara, 2011: 11). Menurut Dahlan (dalam Cangara, 2011: 29) komunikasi politik merupakan suatu bidang yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, dan berpengaruh terhadap perilaku politik. Komunikasi politik memiliki unsur-unsur yang terdiri atas sumber (komunikator politik), pesan, media atau saluran, penerima di antaranya sebagai berikut (Nimmo: 1978, Mansfield dan Weaver: 1982 dalam Cangara, 2011: 31).

a. Komunikator Politik

Komunikator politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian sumber atau komunikator politik adalah seseorang yang memberi informasi tentang hal-hal yang mengenai politik, misalnya presiden, menteri, anggota DPR, MPR, KPU, gubernur, bupati/walikota, DPRD, politisi, fungsionaris partai politik, fungsionaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan.

b. Pesan Politik

Pesan politik merupakan pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari yang isinya mengandung nilai politik. Misalnya pidato politik, pernyataan politik, berita politik, puisi politik dan sebagainya.

c. Saluran atau Media Politik

Media politik merupakan sarana yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Saluran ini dapat menggunakan media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan media format kecil. Media cetak dapat menggunakan surat kabar, majalah, buku dan sebagainya. Media elektronik dapat menggunakan televisi, radio, video, dan sebagainya. Media format kecil dapat menggunakan selebaran, brosur, stiker dan sebagainya. Media luar ruang dapat menggunakan spanduk, bendera, baliho dan sebagainya.

Saluran komunikasi dapat dibagi menjadi tiga yaitu saluran komunikasi kelompok, saluran komunikasi publik, dan saluran komunikasi sosial. Saluran komunikasi kelompok dapat menggunakan partai politik, organisasi profesi, ikatan alumni, dan sebagainya. Saluran komunikasi publik dapat menggunakan aula, balai desa, alun-alun dan sebagainya. Saluran komunikasi sosial dapat menggunakan acara pernikahan, sunatan, pesta rakyat dan sebagainya.

d. Sasaran atau target politik

Sasaran merupakan anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum.

e. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik

Efek dari komunikasi politik diharapkan terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintah dan partai-partai politik, sehingga muaranya adalah pemberian suara misalnya dalam pemilihan umum.

2.2.6 Propaganda Politik

Ellul (dalam Arifin, 2011: 133) menyatakan propaganda politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, partai politik, dan kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan politik (strategi atau taktis) dengan pesan-pesan yang khas yang lebih berjangka pendek. Propaganda politik merupakan suatu bentuk wacana yang dilontarkan oleh berbagai kalangan politik guna mempengaruhinya. Propaganda dapat berbentuk lisan maupun tulisan, dalam bentuk tulisan dapat berupa selebaran atau spanduk, sedangkan dalam bentuk lisan berupa wacana yang dilakukan saat kampanye atau dalam situasi politik untuk mencari dukungan.

Propagandis (orang yang melakukan propaganda) memanfaatkan media massa untuk melancarkan kegiatan propaganda dan mencapai kepentingannya (Shoelhi, 2012: 31). Media massa merupakan wahana yang sangat efektif karena media dan propaganda memiliki misi dan target yang sama yaitu mempengaruhi massa. Menurut Shoelhi (2012: 38) propaganda dapat didefinisikan sebagai seni

permainan kata-kata dalam berkomunikasi yang rumusan pesannya dirangkai tanpa pertimbangan benar atau salah, yang disebarkan secara sistematis dengan metode serta rencana yang matang melalui berbagai alat komunikasi untuk mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa propaganda merupakan suatu bentuk komunikasi yang menyatakan kebenaran menurut sang propagandis dengan menggunakan cara-cara persuasif untuk mengubah atau mempengaruhi masyarakat atau massa yang menjadi targetnya atau untuk memperkenalkan hal yang baru.

2.3 Sistematika Konsep Teori

Blumer (dalam Koentjaraningrat, 1979: 31) menyatakan teori itu merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Maka, perlu adanya kerangka atau konsep teori dalam suatu penelitian. Dari semua teori-teori yang dijelaskan sebelumnya, akan dijelaskan kesinambungan dari teori-teori yang ada untuk menjadi dasar penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa memiliki berbagai variasi, variasi bahasa dapat dilihat dari pemakainya dan situasi pemakainya. Bahasa yang dipakai pada kalangan politisi biasa disebut dengan bahasa politik. Bahasa politik adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu demi kepentingannya atas dasar kekuasaan. Bahasa sangat dekat dengan kekuasaan, dengan kekuasaan para politisi dapat mengontrol publik. Foucault (dalam Eriyanto, 2003: 67) menyatakan publik tidak dikontrol lewat kekuasaan yang sifatnya fisik tetapi dikontrol, diatur dan disiplinkan melalui wacana .

Wacana dapat dibagi menjadi wacana tulis dan wacana lisan. Dalam penelitian ini, yang dikaji berupa wacana lisan. Brown dan Yule (dalam Kasih, 2008: 13) mengemukakan bahwa wacana lisan dapat dilihat dari sudut pandang

produksinya, penutur dapat memanfaatkan efek kualitas suara dan paralinguistik untuk menghasilkan tambahan makna pada wacana lisan. Yang dimaksud efek kualitas suara yaitu tekanan suara, nada, irama, tempo, dan jeda suara. Sedangkan paralinguistik yaitu ekspresi wajah, gerakan anggota tubuh, dan sikap tubuh pada saat tuturan dihasilkan.

Wacana lisan yang dikaji adalah saat para anggota DPR RI sedang mengadakan persidangan terutama pada Sidang Paripurna. Sidang Paripurna merupakan sidang untuk mengambil keputusan tingkat II dan pada saat Sidang Paripurna anggota DPR RI akan berkumpul menjadi satu ruangan. Dapat diketahui bahwa Anggota DPR RI merupakan pusat tempat para politisi-politisi yang ada di Indonesia berkumpul. Maka, untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk bahasa politik yang digunakan oleh politisi Indonesia, peneliti mengambil objek kajian pada saat politisi Indonesia berkumpul yaitu pada saat Sidang Paripurna.

Dalam penyampaian pendapat, anggota DPR RI memiliki gaya bahasa sendiri-sendiri dan diksi yang beragam. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai latar belakang yang dimiliki anggota DPR RI. Oleh karena itu, peneliti mengambil tiga permasalahan yang akan dikaji yaitu diksi, gaya bahasa, maksud dan tujuan para anggota DPR RI menggunakan bahasa tersebut. Walaupun dalam persidangan, rakyat tidak dapat mengubah atau ikut campur dalam pengambilan keputusan. Tetapi, persidangan DPR ditayangkan dalam stasiun televisi secara langsung. Wacana lisan yang dikeluarkan oleh para anggota DPR RI dapat mengontrol pikiran rakyat yang menontonnya.

Permasalahan pertama, yaitu bagaimana diksi yang digunakan oleh para anggota DPR RI. Pada permasalahan pertama, peneliti akan menggunakan teori tentang diksi menurut Keraf dan Parera. Diksi (pilihan kata) yang digunakan oleh para anggota DPR RI ini, berhubungan dengan istilah-istilah politik. Jadi pada permasalahan pertama, akan diuraikan istilah-istilah politik yang digunakan oleh anggota dewan saat persidangan dan jenis serta maknanya. Permasalahan kedua, yaitu bagaimana gaya bahasa yang digunakan oleh para anggota DPR RI. Pada

permasalahan kedua, peneliti akan menggunakan teori tentang gaya bahasa menurut Keraf. Ada berbagai jenis gaya bahasa yang dikemukakan oleh Keraf, misalnya hiperbola, metafora, retorik dan sebagainya. Permasalahan ketiga, yaitu bagaimana maksud dan tujuan penggunaan diksi dan gaya bahasa oleh anggota DPR RI. Pada permasalahan ketiga, peneliti akan menggunakan teori tentang analisis wacana kritis yang diungkapkan oleh Teun A. Van Dijk, Fairclough dan Wodak. Menurut Fairclough (dalam Jorgensen dan Phillip, 2010: 122) menyatakan bahwa wacana merupakan bentuk penting praktis sosial yang memproduksi dan mengubah pengetahuan, identitas, dan hubungan sosial yang mencakup hubungan kekuasaan dan sekaligus dibentuk oleh struktur serta praktik sosial lain. Berdasarkan pendekatan yang diungkapkan oleh Teun A. Van Dijk, Fairclough dan Wodak dalam (Eryanto, 2003: 8-14) analisis wacana kritis terdapat lima karakteristik yaitu tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Karakteristik inilah yang akan digunakan sebagai salah satu dasar teori untuk mencari konteks atau latar belakang penutur. Selain itu, didukung pula dengan teori yang dikemukakan oleh Foucault (dalam Iryanto, 2003: 19) bahwa wacana berperan dalam mengontrol, menormalkan, dan mendisiplinkan individu. Kemudian, model analisis wacana yang digunakan adalah model analisis kognisi sosial yang dikemukakan oleh Teun Van Dijk. Menurut Van Dijk peneliti atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata. Van Dijk menggambarkan wacana dengan menggunakan tiga dimensi yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks. Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan untuk mengetahui maksud dan tujuan dari suatu wacana tertentu. Dengan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Foucault dan model analisis Van Dijk, peneliti akan berusaha membuktikan dari data yang ada, yaitu bahasa politik yang digunakan anggota DPR RI saat Sidang Paripurna apakah suatu wacana dapat mengontrol, menormalkan, dan mendisiplinkan individu. Kemudian dari data yang ada peneliti akan mengungkapkan maksud dan tujuan penutur tersebut dilihat dari konteks penutur.



Gambar 2.3 Sistematika Konsep Teori

Keterangan:

Gambar tersebut menunjukkan alur dari objek yang akan dibahas atau diteliti dalam penelitian ini, sesuai dengan yang dipaparkan sebelumnya.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Djajasudarma (dalam Kasih, 2008: 49) metode penelitian merupakan alat, prosedur dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian. Pada penelitian ini, objek yang dikaji adalah bahasa sehingga menggunakan metode penelitian bahasa. Sudaryanto (1993: 5-7), menyatakan metode penelitian dapat dibagi dalam tiga tahapan strategi, yaitu tahap penyediaan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis data.

3.1 Data dan Sumber Data

3.1.1 Data

Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau diskripsi yang berasal dari sumber data (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember, 2011: 21). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengkaji bentuk diksi dan gaya bahasa yang digunakan dalam persidangan DPR RI serta maksud dan tujuan penggunaan diksi dan gaya bahasa yang digunakan oleh anggota dewan dalam persidangan. Data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu berupa tuturan yang dikemukakan oleh anggota dewan pada saat Sidang Paripurna DPR RI berlangsung. Khusus untuk permasalahan pertama dan kedua data yang diperlukan adalah tuturan yang menunjukkan adanya diksi dan gaya bahasa yang dituturkan oleh anggota DPR RI tersebut. Untuk permasalahan ketiga, selain tuturan yang menunjukkan adanya diksi dan gaya bahasa. Diperlukan data latar belakang dari penutur tersebut meliputi jenis kelamin, fraksi, jabatan/kelas sosial, etnis, umur, pendidikan dan sebagainya.

Contoh Data

Konteks: Kutipan dalam Sidang Paripurna DPR RI dengan topik bahasan mengenai RUU Pilkada pada tanggal 24 September 2014 pukul di Gedung DPR. Dihadiri oleh 496 anggota dewan, dengan perincian Fraksi Partai Demokrat 129

anggota dari 148, Fraksi Partai Golkar 94 orang dari 96 anggota, Fraksi PDIP 90 dari 94 orang anggota, Fraksi PKS 55 dari 57 orang anggota, Fraksi PAN 42 dari 46 anggota, Fraksi PPP 33 dari 38 anggota, Fraksi PKB 21 dari 28 anggota, Fraksi Partai Gerindra 22 dari 26 orang anggota, dan Fraksi Partai Hanura 10 dari 17 anggota, yang bersumber dari *youtube*.

Jubir Fraksi Demokrat: “...Artinya 10 syarat itu harus dilaksanakan apabila pilkada langsung itu menjadi pilihan untuk menaungi dan melindungi daulat rakyat. 10 syarat itulah yang akan melindungi suara rakyat yang akan menjamin terselenggaranya Pilkada untuk menjaga demokrasi yang bermartabat dan guna mencegah akses akses negatif yang terjadi adapun 10 syarat yang kami kemukakan bersifat *absolute* tersebut telah disampaikan dengan gamblang tadi baik dalam forum yang terhormat ini maupun dalam forum lobi dengan pimpinan fraksi yang kami hormati. 10 syarat yang sifatnya kumulatif absolute itu adalah yang pertama untuk sekedar kami ulangi. Yang kami hormati bapak ibu sekalian yang pertama adalah syarat untuk melakukan uji publik. Uji publik wajib dilakukan dan Partai Demokrat mengusulkan uji publik itu dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah untuk selanjutnya dewan perwakilan rakyat daerah boleh saja membentuk badan independen untuk melakukan uji publik terhadap para calon...” (01.10.13 - 01.15.13)

3.1.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari media elektronik yaitu *internet (youtube)* yaitu Sidang Paripurna DPR RI. Data yang diperoleh peneliti adalah berupa rekaman saat Sidang Paripurna DPR RI berlangsung pada masa sidang I dan II. Masa sidang I berlangsung dari bulan Oktober–Desember 2014 dan masa sidang II berlangsung dari bulan Januari–Februari 2015 pada tahun sidang 2014/2015. Jumlah video rekaman sidang paripurna ada 4 video, yaitu dengan topik bahasan pengambilan sumpah janji anggota DPR RI, pemilihan Ketua Umum DPR RI, penetapan Alat Kelengkapan Dewan (yang seterusnya disingkat AKD), dan penetapan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (yang seterusnya disingkat Kapolri).

3.2 Tahap Penyediaan Data

Proses awal dalam sebuah penelitian adalah tahap penyediaan data.. Metode penyediaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak. Metode simak dilakukan dengan cara menyimak penggunaan suatu bahasa. Teknik dasar yang digunakan dalam suatu penelitian dapat pula disebut metode karena teknik dasar yang digunakan hanya satu. Dalam tahap penyediaan data peneliti mengunduh video Sidang Paripurna DPR RI melalui *youtube*. Pada penelitian ini, data sudah berbentuk video jadi peneliti tidak menyadap secara langsung penutur berbicara melainkan mengunduh video Sidang Paripurna DPR RI melalui *youtube* yang diunggah oleh stasiun televisi yang menyiarkan sidang tersebut dan TV parlemen.

Setelah ditentukan teknik dasar, digunakan teknik lanjutan. Dalam penelitian ini digunakan teknik simak bebas libat cakap. Peneliti hanya menyimak pembicaraan yang sedang berlangsung, tidak ikut serta dalam dialog objek yang ditelitinya. Sudaryanto (1993:134) mengatakan bahwa pada teknik ini peneliti tidak bertindak sebagai pembicara yang berhadapan dengan mitra wicara, peneliti hanya sebagai pemerhati yang dengan penuh tekun mendengarkan apa yang dikatakan (dan bukan apa yang dibicarakan) oleh orang-orang yang hanyut dalam proses berdialog.

Teknik lanjutan yang terakhir adalah teknik catat. Setelah dilakukan teknik bebas libat cakap peneliti mencatat hasil dari rekaman tersebut sesuai dengan data yang diperolehnya. Peneliti sebisa mungkin tidak mengurangi atau menambah data yang diperoleh. Dalam teknik ini penulis mencatat dengan cara mentranskripsi secara ortografis yang sesuai dengan objek penelitiannya.

3.3 Tahap Analisis Data

Tahap analisis data adalah suatu tahapan yang digunakan peneliti untuk menganalisis dan mengolah data penelitian yang diperoleh. Metode yang digunakan peneliti pada tahap analisis data adalah metode deskriptif dan metode padan dengan pendekatan kontekstual serta didukung dengan menggunakan AWK. Metode diskriptif yaitu peneliti menganalisis data yang diperoleh berdasarkan kenyataan yang benar-

benar ada secara empiris. Metode diskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua yaitu mengenai diksi dan gaya bahasa yang digunakan anggota dewan dalam Sidang Paripurna DPR RI. Sudaryanto (1993: 3) menyatakan metode padan alat penentunya berasal dari luar, terlepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan untuk permasalahan ketiga adalah metode padan dengan pendekatan kontekstual. Selanjutnya, diperkuat dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK). Dengan menggunakan AWK bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata-mata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks (Eriyanto, 2003: 7).

Dalam menganalisis data ada beberapa tahapan yaitu yang pertama data yang sudah terkumpul diseleksi dengan cara memilah tuturan berdasarkan masalah dalam penelitian. Pada tahapan ini data yang terpilih kemudian disusun berdasarkan jenis diksi atau gaya bahasa sesuai dengan permasalahan agar mudah dalam pengelompokan dan penganalisisannya. Tahapan yang kedua setelah dipilah dapat dianalisis dan didiskripsikan berdasarkan permasalahannya. Selain itu, untuk menganalisis maksud dan tujuan pada permasalahan tiga perlu adanya analisis konteks penutur terlebih dahulu setelah itu akan mengetahui maksud dan tujuan dari penggunaan diksi serta gaya bahasa para anggota dewan tersebut.

Contoh analisis data

Konteks: Kutipan pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 24 September 2014, di Gedung DPR dengan topik bahasan RUU Pilkada yang diambil dari *youtube*. Yang dihadiri oleh 496 orang anggota dewan dengan perincian Fraksi Partai Demokrat 129 anggota dari 148, Fraksi Partai Golkar 94 orang dari 96 anggota, Fraksi PDIP 90 dari 94 orang anggota, Fraksi PKS 55 dari 57 orang anggota, Fraksi PAN 42 dari 46 anggota, Fraksi PPP 33 dari 38 anggota, Fraksi PKB 21 dari 28 anggota, Fraksi Partai Gerindra 22 dari 26 orang anggota, dan Fraksi Partai Hanura 10 dari 17 anggota.

Jubir Fraksi Demokrat: "...Berkenaan dengan Pilkada langsung kami ingin menyampaikan bahwa pilihan Partai Demokrat terhadap Pilkada langsung adalah karena Partai Demokrat menilai menjunjung tinggi apa yang merupakan kehendak rakyat. Proses dan kemajuan demokrasi langsung selama 10 tahun selama pemerintahan Susilo

Bambang Yudhoyono telah berhasil kita jalankan. Pilkada langsung dipertahankan dan menjadi opsi pertama partai Demokrat sebagai bentuk penghargaan paling tinggi atas kedaulatan dan suara rakyat...”

Pada kutipan tersebut didapatkan penggunaan berbagai jenis diksi, diantaranya *kehendak rakyat*, *kedaulatan*, *suara rakyat*, dan *opsi*. Diksi *kehendak rakyat* dan *suara rakyat* merupakan bentuk sinonimi yang artinya keinginan atau sesuatu yang diinginkan oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan ini. Diksi *kedaulatan* yang ditujukan untuk rakyat, memiliki arti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara atau daerah berada di tangan rakyat. Selanjutnya, diksi *opsi* merupakan diksi yang biasanya digunakan dalam forum-forum rapat dan jarang digunakan pada kehidupan sehari-hari, yaitu memiliki arti pilihan dari berbagai alternatif pilihan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 01.59–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. Fausi hardianto (Hanura) :“Pimpinan yang terhormat kami dari partai Hanura, terakhir pak terakhir. Saya Fausi Hardianto dari Sumsel 1. Pimpinan minta waktu 5 menit saja. Bahwa kami dari fraksi partai Hanura yang pertama tidak bertanggung jawab terhadap proses kepemimpinan, proses pemilihan pimpinan DPR RI. Kami melihat tidak ada proses demokrasi. Kami melihat tidak ada lagi aspirasi yang kami dengar...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa repetisi yaitu *kami melihat tidak ada*. Tuturan tersebut termasuk repetisi dengan jenis Anafora yaitu berwujud perulangan kata pertama tiap baris atau kalimat berikutnya. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota dewan dari Fraksi Hanura yaitu Hardianto. Penutur berusaha menekankan bahwa jalannya Sidang Paripurna DPR tidak ada demokrasi dan aspirasi yang didengar. Pendapat yang disampaikan merupakan bentuk lisan, maka terdapat banyak repetisi yang seharusnya dapat disingkat apabila dalam bentuk tulisan. Tuturan tersebut menunjukkan adanya

penekanan di setiap isi kalimatnya dan ingin menyakinkan kepada peserta sidang bahwa jalannya Sidang Paripurna sudah tidak demokratis dan aspiratif. Selain itu, gaya bahasa repetisi digunakan untuk mengajak pendengar setuju dengan pernyataannya.

3.4 Tahap Penyajian Hasil Analisis Data

Setelah tahap analisis dilakukan peneliti melakukan tahap ketiga yaitu tahap penyajian hasil analisis data. Tahap penyajian hasil analisis data adalah suatu tahapan yang digunakan untuk memaparkan hasil analisis. Metode yang dapat digunakan dalam tahap penyajian hasil analisis data yaitu metode formal dan metode informal. Dalam hal ini peneliti menggunakan kedua metode tersebut, yaitu peneliti mendeskripsikan hasil analisis menggunakan bahasa sehari-hari yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia dan bahasa ilmiah.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini membahas diksi dan gaya bahasa yang digunakan oleh anggota DPR RI pada saat Sidang Paripurna. Tidak hanya jenis dan makna yang dikaji melainkan juga maksud dan tujuan dari penggunaan diksi dan gaya bahasa tersebut dilihat dari konteks penuturnya. Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat didiskripsikan bahwa terdapat beberapa gejala yang menarik dari penggunaan bahasa anggota DPR RI ini saat Sidang Paripurna yaitu, (i) penggunaan istilah-istilah politik yang berbeda saat persidangan; (ii) ada berbagai jenis diksi dan gaya bahasa dari penggunaan bahasa anggota DPR RI; (iii) terdapat maksud dan tujuan dalam setiap bahasa yang digunakan, terutama wacana dari berbagai anggota fraksi.

Istilah-istilah politik khususnya saat persidangan, terdapat ciri khas yang tidak digunakan pada bahasa sehari-hari. Istilah-istilah ini terbentuk memang karena bahasa ini sudah menjadi tradisi dari penggunaan istilah itu saat persidangan. Tetapi ada juga istilah-istilah politik yang digunakan sesuai dari penguasa pada masa Reformasi ini. Suatu istilah juga dapat dipengaruhi oleh histori dan kekuasaan. Selain itu, istilah-istilah ini dapat dilihat dari diksi dan gaya bahasa yang para anggota dewan gunakan. Misalnya jenis diksi yang digunakan terdapat denotatif, konotatif, polisemi, akronim dan sebagainya. Sedangkan untuk jenis gaya bahasa juga demikian, terdapat berbagai macam jenis gaya bahasa, misalnya gaya bahasa retorik, eufimisme, ironi dan sebagainya. Penentuan jenis diksi dan gaya bahasa ini dilihat dari bahasa yang digunakan dan makna yang ada didalam ungkapan tersebut serta dilihat dari ciri-ciri jenis diksi dan gaya bahasa. Pengkajian diksi dan gaya bahasa merupakan awal dari pembahasan selanjutnya yaitu mengetahui maksud dan tujuan dari penggunaan diksi dan gaya bahasa tersebut dengan Analisis Wacana Kritis (AWK). Analisis ini melihat konteks penutur, diantaranya dapat dilihat dari tindakan, konteks, histori, kekuasaan, dan ideologi. Selain itu, dilihat dari tiga dimensi yang saling berkesinambungan yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks.

Penggunaan bahasa dalam ranah politik, pasti memiliki suatu maksud tersembunyi dibalik penggunaan bahasa tersebut. Misalnya wacana yang diungkapkan dari berbagai fraksi akan terkandung maksud, baik itu propaganda, sindiran, *provokasi*, *intervensi* dan sebagainya. Penggunaan bahasa dari anggota DPR RI ini dilakukan secara sengaja oleh penutur (seperti anggota fraksi, komisi, pimpinan sidang dan sebagainya) untuk menyampaikan maksud tersendiri. Ketiga masalah ini akan dikaji secara semantik dan pragmatik. Hasil kajian secara terinci dikemukakan dalam subbab-subbab sebagai berikut.

4.1 Penggunaan Diksi Anggota Dewan

Data yang sudah ditranskripsi dari video rekaman Sidang Paripurna DPR RI periode 2014–2019 pada tahun sidang 2014–2015. Dapat diuraikan bahwa para anggota DPR RI menggunakan banyak diksi. Penggunaan diksi tersebut terdapat berbagai jenis dan maknanya. Data yang menunjukkan diksi tersebut, dapat berupa frasa, kata, atau kalimat, berikut uraiannya.

4.1.1 Denotatif

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripurnan DPR RI dengan topik bahasan pengambilan sumpah janji Anggota DPR RI, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 11.45–selesai, dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet, Duta Besar (yang selanjutnya disingkat Dubes), Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI Anggota DPD, dan undangan.

Sekjen :”Petikan keputusan presiden RI no.92/p/tahun 2014 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan dan menetapkan pertama meresmikan dalam keanggotaan DPR masa jabatan tahun 2014-2019.”

Berdasarkan kutipan tersebut didapatkan lima penggunaan diksi diantaranya *menimbang*, *mengingat*, *memutuskan*, *menetapkan*, dan *meresmikan*. Kelima diksi tersebut merupakan diksi denotatif, karena kata-kata tersebut tidak memiliki interpretasi dan relevan serta sudah jelas makna yang ada dalam tuturan.

Berdasarkan KBBI *menimbang* memiliki arti memikirkan secara baik-baik buruk dan salahnya, *mengingat* memiliki arti memperhatikan dan memikirkan, *memutuskan* memiliki arti menetapkan dan menentukan, *menetapkan* memiliki arti menjadikan tetap dan memastikan, *meresmikan* memiliki arti mengumumkan dan mengesahkan. Dilihat dari KBBI diksi yang digunakan dalam tuturan sudah menggunakan bahasa ilmiah dan baku. Kelima diksi tersebut merupakan diksi yang sudah tepat dalam penggunaannya dan digunakan pada saat anggota dewan membacakan Surat Keputusan (yang seterusnya disingkat SK).

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pengambilan sumpah janji Anggota DPR RI, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 11.45–selesai, dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet, Duta Besar (yang selanjutnya disingkat Dubes), Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI Anggota DPD, dan undangan.

PS (Popong) :”...perkenankanlah kami berdua untuk meninggalkan sementara meja pimpinan ini untuk bergabung dengan rekan rekan kami yang lain...”

Berdasarkan kutipan tersebut menunjukkan adanya diksi denotatif yaitu terdapat frasa *meja pimpinan*. *Meja pimpinan* merupakan jenis diksi denotatif karena memiliki arti yang sama dengan yang dimaksud yaitu meja yang ada di depan sebagai tempat pimpinan sidang (yang selanjutnya disingkat PS) untuk memimpin Sidang Paripurna. Berdasarkan konteksnya meja pimpinan bukan diartikan *jabatan* melainkan meja yang sudah disiapkan untuk PS. Penggunaan diksi *meja pimpinan* digunakan untuk menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara meja untuk pimpinan dan meja untuk anggota atau tamu undangan, yaitu meja pimpinan terletak di depan menghadap anggota dewan dan sebagai pusat. Sedangkan meja anggota terletak di depan meja pimpinan dan lantainya lebih rendah dari meja pimpinan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pengambilan sumpah janji Anggota DPR RI, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 11.45–selesai, dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet, Duta Besar (yang selanjutnya disingkat Dubes), Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI Anggota DPD, dan undangan.

MC :”Pimpinan sementara DPR kembali menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPR...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi denotatif pada frasa *kursi anggota*. Pemakaian frasa *kursi anggota* sudah tepat yaitu memiliki arti kursi atau tempat duduk yang disediakan khusus untuk anggota DPR RI. Frasa tersebut tidak memiliki makna ganda yang berhubungan dengan interpretasi. Penggunaan diksi *kursi anggota* digunakan untuk menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara kursi untuk pimpinan dan kursi untuk anggota atau tamu undangan. Tata letak kursi hampir sama dengan tata letak meja. Kursi pimpinan terletak di depan menghadap anggota dewan dan sebagai pusat. Sedangkan kursi anggota terletak di depan pimpinan dan lantainya lebih rendah dari pimpinan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pengambilan sumpah janji Anggota DPR RI, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 11.45–selesai, dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet, Duta Besar (yang selanjutnya disingkat Dubes), Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI Anggota DPD, dan undangan.

MC :”Pimpinan sementara DPR RI dipersilahkan kembali menempati kursi pimpinan.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi denotatif pada frasa *kursi pimpinan*. Pemakaian frasa *kursi pimpinan* sudah tepat yaitu memiliki arti kursi atau tempat duduk yang disediakan khusus untuk pimpinan. Frasa tersebut tidak memiliki makna ganda yang berhubungan dengan interpretasi. Penggunaan diksi *kursi anggota* digunakan untuk menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara kursi untuk pimpinan dan kursi untuk anggota atau tamu undangan. Tata letak kursi hampir sama dengan tata letak meja. Kursi pimpinan terletak di depan menghadap anggota dewan dan sebagai pusat. Sedangkan kursi anggota terletak di depan pimpinan dan lantainya lebih rendah dari pimpinan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pengambilan sumpah janji Anggota DPR RI, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 11.45–selesai, dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet, Duta Besar (yang selanjutnya

disingkat Dubes), Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI Anggota DPD, dan undangan.

Sekjen: "...masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama: satu Prof. Dr. Bahtiar Ali, M.A. mewakili Partai Nasdemdaerah pemilihan Aceh 1 dan seterusnya sampai dengan no. 36 saudara sulaiman L. Hamzah mewakili Partai Nasdemdaerah pemilihanPapua. No. 37saudara H. Irmawan, S.Sos., M.M. mewakili Partai Kebangkitan Bangsa daerah pemilihan Aceh 1 dan seterusnya..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat frasa yang menunjukkan diksi denotatif yaitu frasa *daerah pemilihan*. Berdasarkan KBBI *daerah* memiliki arti bagian permukiman bumi dengan keadaan alam, lingkungan pemerintah atau wilayah. Sedangkan *pemilihan* memiliki arti proses, cara, perbuatan memilih baik itu secara langsung atau tidak. Jadi, *daerah pemilihan* memiliki makna proses memilih perwakilan rakyat yang berlangsung di daerah atau wilayah tertentu yang ada di Indonesia. Frasa tersebut tidak memiliki makna ganda yang berhubungan dengan interpretasi. *Daerah pemilihan* biasa disingkat dengan *Dapil*. Diksi *Dapil* digunakan untuk menunjukkan dari mana atau perwakilan daerah mana anggota tersebut. Penggunaan diksi *Dapil* tetap digunakan dan diikutsertakan dalam menyampaikan nama anggota, walaupun anggota tersebut sudah masuk dalam anggota DPR RI, dimaksudkan agar setiap perwakilan Dapil-Dapil seluruh Indonesia dapat menampung setiap aspirasi masyarakat dari daerah masing-masing yang diwakilinya.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pengambilan sumpah janji Anggota DPR RI, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 11.45–selesai, dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet, Duta Besar (yang selanjutnya disingkat Dubes), Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI Anggota DPD, dan undangan.

Sekjen: "...keputusan presidenmulai berlaku pada saat pengucapan sumpah janji salinan dan seterusnya petikan keputusan presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mestinya..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat dua frasa yang menunjukkan diksi denotatif yaitu frasa *keputusan presiden* dan *sumpah janji*. Berdasarkan KBBI

keputusan memiliki arti sesuatu yang berkaitan dengan putusan yang telah ditetapkan sesudah dipertimbangkan atau dipikirkan. Sedangkan *presiden* memiliki arti kepala negara untuk negara yang berbentuk republik. Jadi, apabila digabung menjadi frasa *keputusan presiden* memiliki makna putusan yang diambil oleh presiden atau kepala negara yang sudah melalui pertimbangan. Keputusan presiden yang dimaksud pada konteks ini adalah keputusan presiden RI yang sudah melalui pertimbangan menteri dan jajaran pejabat pemerintahan lainnya.

Frasa *sumpah janji* juga demikian, frasa tersebut terbentuk dari dua kata yaitu *sumpah* dan *janji*. Berdasarkan KBBI *sumpah* memiliki arti pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau hal yang dianggap suci. Sedangkan *janji* memiliki arti ucapa yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Frasa *sumpah janji* memiliki makna pernyataan yang diucapkan dengan bersaksi kepada Tuhan atau hal yang dianggap suci dan menyatakan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang dimaksud disini adalah memenuhi kewajiban dan tanggungjawab saat menjabat sebagai anggota DPR RI. Kedua frasa *keputusan presiden* dan *sumpah janji* memiliki makna yang sesuai dengan konteksnya dan tidak memiliki makna ganda.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pengambilan sumpah janji Anggota DPR RI, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 11.45–selesai, dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet, Duta Besar (yang selanjutnya disingkat Dubes), Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI Anggota DPD, dan undangan.

MC :”Pimpinan sementara DPR kembali menempati kursi anggota, persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPR.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat frasa yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *pimpinan sementara*. Berdasarkan KBBI *pimpinan* memiliki arti hasil memimpin, bimbingan, atau tuntunan. Sedangkan *sementara* memiliki arti tidak sementara atau tidak kekal. Berdasarkan konteks dari tuturan yang dituturkan oleh MC, *pimpinan sementara* memiliki makna pemimpin yang menjabat selama ketua DPR RI belum terpilih atau tidak selamanya. Namun, apabila dilihat dari uraian

makna masing-masing kata, pimpinan merupakan hasil dari proses memimpin seharusnya menggunakan kata *pemimpin* agar lebih tepat.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pengambilan sumpah janji Anggota DPR RI, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 11.45–selesai, dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet, Duta Besar (yang selanjutnya disingkat Dubes), Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI Anggota DPD, dan undangan.

PS (Popong): “...yang terhormat saudara pimpinan partai politik, para anggota DPD RI, para anggota DPR RI dan para undangan serta para hadirin hadiroti yang sangat kami hormati...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat frasa yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *partai politik*. Berdasarkan KBBI *partai* memiliki arti perkumpulan orang yang seazas dan memiliki satu tujuan. Sedangkan *politik* merupakan pengetahuan mengenai kenegaraan seperti sistem pemerintahan. Jadi apabila digabung menjadi frasa, *partai politik* memiliki makna perkumpulan orang yang memiliki satu tujuam di bidang politik atau pemerintahan. Frasa tersebut tidak memiliki makna ganda atau tidak memiliki makna lain apabila dilihat dari konteksnya. Diksi partai politik biasa disingkat dengan parpol. Diksi parpol selalu terdengar apabila membahas tentang pemerintahan, karena dalam negara republik Indonesia memiliki lebih dari sepuluh partai, baik partai kecil maupun besar.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pengambilan sumpah janji Anggota DPR RI, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 11.45–selesai, dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet, Duta Besar (yang selanjutnya disingkat Dubes), Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI Anggota DPD, dan undangan.

PS (Popong): “...Ketua Mahkamah Agung dan saudara saudara rohaniwan atas pelaksanaan pengucapan sumpah janji para anggota DPR RI Imasa bakti tahun 2014-2019, dalam kesempatan hari ini pimpinan DPR RI periode 2009-2014 akan menyerahkan memori DPR RI 2009-2014 kepada DPR RI Imasa bakti 2014-2019 yang akan diterima oleh kami berdua selaku pimpinan sementara. Memori termaksud memuat laporan kinerja dan inventarisasi baik yang sudah dan belum terselesaikan oleh DPR RI Imasa bakti 2009-2019 untuk dapat tentu saja dipergunakan sebagai bahan masukan bagi DPR RI masa

bakti 2014-2019. Dalam rangka melaksanakan tugas konstitusionalnya...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat lima diksi yang menunjukkan diksi denotatif, yaitu *masa bakti*, *memori*, *kinerja*, *inventarisasi*, dan *konstitusional*. Frasa *masa bakti* terdiri atas dua kata yaitu *masa* dan *bakti*. Berdasarkan KBBI *masa* memiliki arti waktu, *bakti* memiliki arti perbuatan yang menyatakan setia atau hormat. Jadi frasa *masa bakti* bermakna kurun waktu anggota DPR RI menjabat sebagai anggota DPR RI. Diksi *memori* berdasarkan KBBI memiliki arti ingatan atau catatan yang berisi penjelasan. Penggunaan diksi memori ini dimaksudkan dengan catatan masa lampau mengenai kinerja anggota DPR RI periode 2009–2014.

Selanjutnya penggunaan diksi *kinerja* dan *konstitusional*, kedua diksi ini sudah sering digunakan. *Kinerja* memiliki arti prestasi atau sesuatu yang dicapai. Sedangkan *konstitusional* memiliki arti bersangkutan dengan konstitusi suatu negara. Kedua diksi tersebut tidak memiliki makna yang berubah sesuai dengan konteksnya dan akan tetap memiliki makna tersebut.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Iya sebentar sebentar pertanyaannya adalah mendengarkan karena kita masih punya beberapa agenda dimana sebetulnya kalau menurut aturan jumlah anggota memang sudah kuorum sudah lebih dari setengah lebih 1 menurut aturan. Cuma karena ada 2 fraksi bukan fraksi maaf salah partai belum hadir makanya tadi kan kita mengambil keputusan cara dengan diperpanjang sorry di skors 30 menit. Kan begitu, ini ini kan semua sudah setuju. Skors sudah saya cabut untuk melanjutkan agenda dalam sidang paripurna ini. Nah jadi tentu harus dengan persetujuan anggota yang terhormat harus ada persetujuan apakah ini mau diperpanjang sampai selesai” (Anggota ada yang ingin lanjut dan ada yang ingin skors)

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat empat diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *agenda*, *kuorum*, *fraksi*, dan *skors*. Berdasarkan KBBI *agenda* memiliki arti tema yang dibicarakan dalam rapat politik. Kata *agenda* sudah dibakukan dalam KBBI bahwa kata *agenda* memiliki makna tersendiri dalam ranah

politik yaitu tema yang dibicarakan, bukan lagi suatu catatan ataupun acara. *Agenda* merupakan diksi denotatif karena kata *agenda* tidak memiliki makna lain selain makna tema dalam konteks tersebut.

Selanjutnya pada kata *kuorum*, *kuorum* merupakan akronim dari *kuota forum*. Akronim *kuorum* ini biasa digunakan untuk menunjukkan berapa banyak yang hadir dalam rapat. *Kuorum* dalam Sidang Paripurna dapat diselenggarakan apabila memenuhi setengah dari anggota DPR RI plus satu dan apabila jumlahnya kurang dari ketentuan maka rapat belum bisa dilaksanakan. Akronim *kuorum* ini apabila dijelaskan per kata yaitu *kuota* memiliki arti jumlah yang sudah ditentukan sedangkan *forum* merupakan lembaga atau badan. Jadi akronim *kuorum* memiliki makna yang sama dari referennya dan tidak memiliki makna ganda.

Fraksi sebenarnya sudah ada dalam KBBI yaitu memiliki arti kelompok dalam badan legislatif yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian. Kata *fraksi* hampir sama dengan penggunaan kata partai, namun kata *fraksi* digunakan sebagai nama partai setelah partai tersebut menjadi anggota DPR RI yang sah. Selain itu, fraksi dapat terdiri atas lebih dari dua partai.

Selanjutnya kata *skors* berdasarkan KBBI memiliki arti menghentikan sementara waktu. Kata *skors* biasanya diimbuhi dengan akhiran {-ing} dalam penggunaannya, yaitu menjadi *skorsing*. Diksi *skors* dalam persidangan DPR RI digunakan untuk menghentikan rapat sementara. Penentuan *skors* biasanya berdasarkan kesepakatan bersama forum. Namun, dalam Tatib DPR waktu paling lama untuk *skors* adalah 30 menit. *Skors* merupakan istilah politik yang biasa diartikan penundaan rapat. Dalam Tatib DPR, *skors* sama halnya disebut dengan penundaan rapat. Kata *skors* merupakan diksi denotatif karena dalam pemakaian kata *skors* dalam persidangan ini tidak menimbulkan makna ganda.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.
PDIP : “Pimpinan dari PDIP mengenai paripurna ini lebih pengambilan keputusan itu lebih pada hak anggota jadi apabila saudara

menyampaikan bahwa persetujuan perpanjangan per fraksi mohon maaf itu kurang tepat sebaiknya itu diambil melalui hak anggota terimakasih.”

Anggota : “Iya, yang setuju berdiri dan yang nggak setuju berdiri voting. Yang setuju berdiri.”

PS (Popong): “Baik baik ya sekarang mau tanya fraksi atau partai, nah saya tanya Partai Golkar.”

Anggota : “Pimpinan, waktunya sudah lebih dari yang diatur dalam Tatib.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tiga diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *hak anggota*, *voting*, dan *Tatib*. Ketiga diksi ini merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan maknanya sesuai dengan konteksnya. Yang pertama diksnggi *hak anggota*, diksi ini berbentuk frasa yang terdiri dari kata hak dan anggota. *Hak* memiliki arti kekuasaan atau kewenangan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan *anggota* memiliki arti masuk dalam suatu anggota. Apabila digabung menjadi frasa *hak anggota* yaitu memiliki makna hak yang dimiliki oleh anggota untuk berbuat sesuatu. Frasa *hak anggota* yang digunakan dalam persidangan sudah diatur dalam tata tertib persidangan, misalnya hak untuk melakukan interupsi, hak untuk berbicara dan sebagainya.

Selanjutnya kata *voting* sering digunakan pada persidangan DPR RI bahkan sudah menjadi salah satu istilah politik. Apabila dilihat dari penggunaannya, *voting* memiliki arti suara dalam konteks pemilihan. Diksi *voting* sudah terdapat dalam KBBI dan memiliki makna yang sama dengan konteks tersebut. Diksi *voting* atau *vote* atau *votum* ini sudah menjadi salah satu istilah yang menjadi bagian dari peraturan terakhir dalam pengambilan keputusan persidangan.

Selanjutnya diksi *Tatib*, sebenarnya diksi ini merupakan akronim dari *tata tertib*. Pada persidangan DPR RI ada yang menggunakan akronim *Tatib* dan ada juga yang menggunakan frasa *tata tertib*. Berdasarkan KBBI *tata tertib* memiliki arti peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. *Tatib* merupakan peraturan pokok dalam Sidang Paripurna. Mulai dari tugas dan wewenang anggota dewan hingga proses pengambilan keputusan, semuanya diatur dalam *Tatib*. *Tatib* DPR RI sering

juga disebut dengan MD3. Dilihat dari fungsi *Tatib* yang sangat penting terutama dalam pengambilan keputusan, maka *Tatib* memiliki peran penting dalam Sidang Paripurna.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Menurut partai sudah, menurut partai sudah. sekarang pengesahan jadwal acara rapat masa persidangan 1 bahwa sekarang ini.”

Anggota : “Interupsiinterupsi (tiba-tiba ruang persidangan jadi ricuh).”

PS (Popong): “Supaya tau, kenapa itu mic mic jadi mati (pimpinan diskusi dengan salah satu anggota dewan mengenai mic) saya hanya ingin mengingatkan di dalam tata tertib anggota tidak diperkenankan naik ke pimpinan sidang. Walaupun sambil nyium Popong tetap tidak boleh begitu ya. Mangga baik baik sekarang lanjut kepada acara ke mata acara pengesahan jadwal acara terlebih dahulu yaitu sekarang paripurna yang pertama dalam masa persidangan 1 sekarang ini adalah paripurna yang kedua setelah tadi. Ini paripurna yang kedua setuju?”

Anggota : “Setuju”

PS (Popong): “Sekarang penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI ini jadwalnya seperti ini dan sudah disepakati dalam Rapat Konsultasi begitu.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tiga diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *masa persidangan* dan *Rapat Konsultasi*. Kedua diksi ini merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan. Diksi yang pertama yaitu *masa persidangan*, frasa masa persidangan merupakan gabungan kata *masa* dan *persidangan*. Berdasarkan KBBI *masa* memiliki arti waktu, sedangkan *persidangan* memiliki arti pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Jadi *masa persidangan* merupakan kurun waktu tertentu dalam persidangan. DPR RI memiliki dua masa yaitu masa persidangan dan masa reses. Masa reses merupakan masa di mana anggota DPR RI melakukan kegiatan di luar sidang untuk mencari informasi atau permasalahan masyarakat. Sedangkan masa persidangan yaitu masa di mana anggota DPR RI melakukan berbagai persidangan mulai dari sidang komisi, fraksi, sampai paripurna.

Selanjutnya frasa *Rapat Konsultasi*, frasa ini merupakan nama dari salah satu rapat yang dilaksanakan DPR RI untuk berdiskusi mengenai kapan akan diselenggarakan Sidang Paripurna ataupun diskusi lainnya antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi. *Rapat konsultasi* biasa juga disebut Bamus atau Badan Musyawarah. Berdasarkan KBBI *konsultasi* memiliki arti pertukaran pemikiran untuk mendapatkan kesimpulan, sedangkan *rapat* merupakan suatu pertemuan untuk membicarakan sesuatu.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PKS : “Yang terhormat pimpinan DPR sementara dan para anggota parlemen yang saya hormati Partai Keadilan Sejahtera dengan nama fraksi partai keadilan sejahtera disingkat FPKS dengan pimpinan Dr. Hidayat Nurwahid dengan jumlah 60 anggota. Terimakasih assalamualikum wr.wb.”

PS (Popong): “waalaikumsalam wr.wb.”

Anggota : “Pimpinan interupsi pimpinan interupsi tolong rapat ini sudah tidak kondusif lagi pimpinan tolong diberikan kesempatan kepada anggota untuk bicara”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tiga diksi yang menunjukkan diksi denotatif, yaitu *parlemen*, *interupsi*, dan *kondusif*. Ketiga diksi ini merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan tersebut. Diksi *parlemen* berdasarkan KBBI memiliki arti badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara. Diksi *parlemen* biasa ditujukan untuk mengartikan lembaga anggota dewan yaitu DPR.

Selanjutnya kata *interupsi*, kata tersebut tidak digunakan dalam bahasa keseharian. Diksi ini memang khusus digunakan pada saat persidangan. *Interupsi* adalah bentuk istilah untuk meminta izin sebelum berbicara dalam persidangan. *Interupsi* apabila dalam kelas atau perkuliahan adalah mengacungkan tangan sebelum berbicara. Kata *interupsi* ini wajib diucapkan apabila ingin berpendapat dalam persidangan.

Diksi *kondusif*, apabila dilihat dari konteks tersebut memiliki arti bahwa suatu keadaan yang mendukung atau tidak terjadi kegaduhan dalam suatu acara. Namun, apabila dilihat berdasarkan KBBI *kondusif* memiliki arti memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung. Apabila dilihat dari maknanya memang makna *kondusif* dalam konteks tersebut sama dengan makna KBBI yaitu sama-sama mendukung.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 01.59–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Dari lobi ini tentu perlu kami laporkan yaitu bahwa sidang ini tetap lanjut (sebagian anggota DPR bertepuk tangan) karena tadi itu kita skors supaya apakah ini lanjut atau tidak (sebagian menyuarakan lanjut) lanjut, terimakasih itu lah hasil lobi kami dan dihadiri oleh perwakilan dari parpol-parpol jadi walaupun tidak semua, jadi sidang ini lanjut. (Popong ketok palu satu kali). Baik mangga makasi (sebagian bertepuk tangan) yang dimaksud lanjut yaitu tentu adalah melanjutkan mata acara. Mata acaranya penyampaian setelah pembentukan fraksi-fraksi tadi penyampaian usul paket calon pimpinan DPR RI oleh, oleh partai melalui fraksinya secara tertulis karena fraksi tadi sudah disampaikan jadi demikian (ada salah satu anggota yang interupsi tapi tidak didengarkan) saya mohon kepada” (interupsi oleh Abdul Kadir dari PKB).

PKB (Abdul Kadir): “Ibu tolong didengarkan assalamualaikum wr.wb. tadi pada forum lobi kami dari PKB meminta dengan hormat kepada seluruh fraksi agar ini dapat ditunda sampai jam 10 pagi ini dengan banyak pertimbangan saya kira (sebagian menyuarakan kata lanjut) dengarkan saya kira keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah lebih elegan, keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah mencerminkan DPR yang bermartabat, keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah menunjukkan bahwa DPR ini punya marwah di depan rakyat kita.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tiga dikis yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *lobidan paket calon*. Kedua diksi ini merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan tersebut. Berdasarkan KBBI lobi memiliki arti kegiatan yang dilakukan oleh orang untuk menmpengaruhi. Lobi dalam sidang paripurna ini termasuk dalam tahap

pengambilan keputusan apabila terdapat pendapat yang berbeda dengan melakukan lobiing atau lobi politik.

Selanjutnya frasa *paket calon*, dalam DPR RI mengenal istilah *paket calon* untuk menentukan pimpinan. *Paket calon* berisi nama-nama calon yang akan menjadi calon pimpinan DPR RI. Tidak hanya satu calon saja, melainkan dijadikan satu paket yaitu terdiri atas pimpinan dan wakil. Berdasarkan KBBI *paket* memiliki arti sejumlah barang atau jatah, sedangkan *calon* memiliki arti orang yang akan menjadi. Frasa *paket calon* terbentuk dari Tatib DPR tahun 2014. Frasa *paket calon* dimaksudkan untuk menunjukkan nama-nama calon pimpinan DPR. Satu paket terdiri atas lima perwakilan fraksi, masing-masing fraksi satu perwakilan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 01.59–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Saya lanjutkan dulu, saya lanjutkan dulu mata acara yang ini. Yang ketiga eh yang keempat adalah Partai Demokrat, silahkan. Tunggu lagi bicara dulu.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukan diksi denotatif yaitu *mata acara*. Berdasarkan KBBI *mata acara* memiliki arti bagian dari acara. Frasa *mata acara* ini bukan bermakna acara yang ada matanya melainkan bagian dari suatu acara dan frasa itu sudah terdapat dalam KBBI. Jadi frasa *mata acara* ini sudah baku dan dapat digunakan dalam forum resmi.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PAN : “...Kami menginginkan bangsa Indonesia yang kemandirian ekonomi dan perpajak pada kaki sendiri oleh karena kepentingan politik khususnya legislatif harus senafas dengan semangat ini. Kalau tidak sekarang kapan lagi kalau bukan kita siapa lagi wassalamualikum wr.wb (selama PAN berbicara ada 2 orang yang terus ngamuk di depan ibu Popong)...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat dua diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *kemandirian ekonomi*. Diksi tersebut merupakan diksi denotatif karena

diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan maknanya sesuai dengan konteksnya. Diksi pertama yaitu *kemandirian ekonomi* berbentuk frasa yang terbentuk dari kata *kemandirian* dan *ekonomi*. Berdasarkan KBBI *kemandirian* memiliki arti hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Sedangkan *ekonomi* memiliki arti tata kehidupan perekonomian suatu negara. Apabila dua kata tersebut digabung menjadi satu frasa yaitu *kemandirian ekonomi*, bermakna suatu negara yang tata kehidupan perekonomiannya tidak bergantung dengan sesuatu.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PKB : “karena ada kediktatoran dalam sidang ini dan tidak boleh terjadi”

PS (Popong): “Maaf bapak, saya tidak mempersilahkan bapak.”

PKB : “Adanya kediktatoran mayoritas kepada hasil-hasil sidang dengan ini partai kebangkitan bangsa menyatakan sikap untuk melakukan walk out dan tidak bertanggung jawab atas seluruh hasil paripurna yang sangat tidak adil. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih wassalamualaikum wr.wb. PKB dengan ini menyatakan walk out...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat dua diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *kediktatoran* dan *walk out*. Kedua diksi ini merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan tersebut. Kedua diksi tersebut sangat jarang digunakan pada kehidupan sehari-hari dan hanya ditemukan di bahasa-bahasa ranah politik. Diksi pertama yaitu *kediktatoran*, berdasarkan KBBI *kediktatoran* memiliki arti sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang diktator (kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak, biasanya diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis). Diksi yang kedua yaitu *walk out*, diksi tersebut merupakan diksi yang sudah biasa digunakan di dalam persidangan. *Walk out* artinya keluar atau tidak bertanggung jawab terhadap hasil yang akan dihasilkan dalam persidangan. *Walk out* apabila dicari dalam KBBI memang tidak ada, karena itu merupakan kata serapan bahasa Inggris. Namun, diksi *walk out* ini sudah menjadi bagian dari istilah politik

dalam persidangan. Diksi *walk out* dapat digantikan dengan frasa *tidak bertanggung jawab pada keputusan persidangan*.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. Aria Bima (PDIP): “Saya mewakili, agar tidak mengganggu, karena kita sudah tidak diberi hak untuk bicara dalam forum ini, maka bersama ini Fraksi PDIP hanya ingin menginginkan bagaimana pemilihan pimpinan ini berjalan secara legaliter, namun mengambil caracara yang tidak sesuai dengan Tatib, pimpinan tidak adil dalam memberi kesempatan kita bicara, kita tidak diberi waktu untuk kita bicara.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat dua diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *forum* dan *legaliter*. Kedua diksi ini merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan tersebut. Diksi yang pertama yaitu *forum*, berdasarkan KBBI *forum* memiliki arti tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas. Sedangkan *legaliter* apabila dimaksudkan dari konteks tersebut *legaliter* bermakna sesuatu yang sah atau legal. Kata *legaliter* berasal dari kata *legal* yang artinya sesuai perundang–undangan atau hukum. Apabila ingin disesuaikan dengan KBBI seharusnya menggunakan kata *legalitas* bukan *legaliter*. Namun, kata *legaliter* sudah banyak digunakan oleh para anggota dewan tersebut dan sudah dijadikan istilah politik.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. Fausi hardianto (Hanura) :“...Kami melihat tidak ada proses demokrasi. Kami melihat tidak ada lagi aspirasi yang kami dengar. Awal yang pertama sekali kita sidang paripurna ini semua proses tidak di dengar oleh pimpinan sidang...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat dua diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *proses demokrasi* dan *aspirasi*. Kedua diksi ini merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan tersebut. Diksi yang pertama berbentuk frasa yaitu *proses demokrasi*. Frasa tersebut terbentuk dari kata *proses* dan *demokrasi*. Berdasarkan KBBI *proses*

memiliki arti tuntutan perubahan (peristiwa) atau perkembangan sesuatu. Sedangkan *demokrasi* memiliki arti pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya atau bisa disebut pemerintahan rakyat. Jadi frasa *proses demokrasi* merupakan suatu proses dimana pemerintahan dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih dengan cara terbuka. Diksi yang kedua yaitu *aspirasi*, berdasarkan KBBI *aspirasi* memiliki arti harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Kata *aspirasi* sering digunakan pada ranah politik, karena kata *aspirasi* itu mewakili semua kata dari keinginan, harapan dan tujuan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PDIP : “Pimpinan, bapak ibu sekalian yang saya hormati mencermati dinamika gelagat dan perkembangan yang ibu pimpin mulai rapat konsultasi tadi tentunya fraksi PDIP yang merupakan dari partai kita ingin menjunjung kedaulatan rakyat tanpa mengurangi rasa hormat masing masing fraksi punya pertimbangan punya sikap politik oleh karena itu izinkan dari PDIP untuk tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan pada mala mini, sekian terima kasih waalaikum salam wr.wb.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tiga diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *dinamika gelagat*, *kedaulatan rakyat*, dan *sikap politik*. Ketiga diksi ini merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan tersebut. Diksi yang pertama yaitu *dinamika gelagat*, diksi tersebut berbentuk frasa. Frasa *dinamika gelagat* berasal dari kata *dinamika* dan *gelagat*. Berdasarkan KBBI *dinamika* memiliki arti pergerakan, sedangkan *gelagat* memiliki arti gerak gerik atau tingkah laku. Jadi frasa tersebut maksudnya sesuatu pergerakan tingkah laku. Diksi tersebut jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Diksi yang kedua yaitu *kedaulatan rakyat*, diksi tersebut berbentuk frasa. Frasa *kedaulatan rakyat* sering diutarakan oleh mahasiswa yang demo ataupun saat menyuarakan tentang rakyat. Timbulnya diksi *kedaulatan rakyat* karena berdampingan dengan pemerintahan demokrasi. Berdasarkan KBBI *kedaulatan*

memiliki arti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara atau daerah. Sedangkan *rakyat* memiliki arti penduduk suatu negara. Jadi *kedaulatan rakyat* merupakan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

Diksi yang ketiga yaitu *sikap politik*, diksi tersebut berbentuk frasa. Masa reformasi tidak mengenal yang namanya negarawan lagi dan diganti dengan politisi yang berasaskan atas politik. Berdasarkan KBBI *sikap* memiliki arti perilaku, sedangkan *politik* memiliki arti pengetahuan mengenai pemerintahan atau kenegaraan. Jadi *sikap politik* merupakan suatu perilaku yang dilandaskan oleh kepentingan politik. Sudah dijelaskan sebelumnya masa reformasi lebih suka menggunakan *sikap politik* bukan *sikap negarawan*, karena diksi yang dipilih mencerminkan suatu keadaan pada masa sekarang.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Nasdem : “Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati pimpinan sementara DPR RI yang saya hormati para anggota dewan yang terhormat. Kami dari partai Nasdem pertama kali hadir di dewan yang terhormat ini. Kami duduk melihat senior senior partai kami membuat sebuah langkah yang menurut kami mencederai jalannya demokrasi bangsa ini. Tentunya ini menjadi pelajaran buruk buat sejarah pembangunan demokrasi Indonesia. Apa yang telah kami sampaikan tadi pagi pada rapat konsultasi yang sebenarnya tidak sempat ditutup sebenarnya itu. Sayalah yang bertannya bagaimana dengan pengesahan tata tertib dpr ini. Itulah yang disambut oleh pimpinan ini setelah semuanya mengatakan setuju setuju tidak diagendakan terus langsung keluar. Itu realita seperti itu, kita boleh bergerak apapun, kita boleh berbuat apapun tapi tidak boleh berbohong. Sebagai politisi dengan semangat untuk membangaun bangsa ini maka kebohongan harus dijauhkan dari diri kita sendiri. karena itu dengan cita-cita yang mulia teman-teman semua yang akan menjadi mungkin saja yang akan menjadi pimpinan lembaga ini. Ini adalah lembaga terhormat kita tentunya menempatkan orang-orang terbaik kader-kader bangsa terbaik ditempat ini untuk memimpin kita.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat empat diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *senior*, *realita*, *politisi*, dan *kader*. Keempat diksi ini merupakan diksi

denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan tersebut. Diksi pertama yaitu *senior*, berdasarkan KBBI *senior* memiliki arti lebih tinggi dalam pangkat dan jabatan kedinasan. Kata *senior* biasa digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan. Di dalam suatu pekerjaan orang yang lama berkelut di bidang tertentu dinamakan *senior*, sedangkan yang baru menggeluti bidang tertentu dinamakan *junior*. Begitu pula dalam ranah politik, akan terlihat *senior*, *senior* akan memiliki kekuasaan dan lebih kuat.

Diksi yang kedua yaitu *realita*, berdasarkan KBBI *realita* memiliki arti kenyataan. Diksi *realita* apabila kita runtut berasal dari bahasa Inggris *reality*, kemudian di sesuaikan dengan EYD menjadi *realita*. Dalam konteks ini, para anggota dewan lebih suka menggunakan diksi *realita* daripada kenyataan. Diksi yang ketiga yaitu *politisi*. Diksi *politisi* merupakan suatu sebutan oleh orang yang berkelut di bidang politik. Namun, sebenarnya dalam KBBI kata untuk menggambarkan orang yang berkelut di bidang politik merupakan *politikus*. Diksi yang keempat yaitu *kader*, berdasarkan KBBI *kader* memiliki arti rang yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam pemerintahan, partai, dan sebagainya. Pada bidang politik lebih banyak menggunakan diksi *kader* daripada *generasi penerus bangsa*.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Komisi III: "...perlu menerbitkan perpu yang isinya membiarkan syarat kosong calon pimpinan KPK sehingga berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK yang lainnya. Sehingga KPK terpilihnya tersebut diangkat bersama 4 pimpinan KPK lainnya diakhir tahun 2015..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *syarat kosong*. Diksi syarat kosong merupakan frasa yang terbentuk dari kata *syarat* dan *kosong*. Berdasarkan KBBI *syarat* memiliki arti segala sesuatu yang harus dimiliki atau disiapkan. Sedangkan *kosong* memiliki arti tidak berisi atau tidak berpengaruh. Jadi diksi *syarat kosong* tersebut bermakna sama halnya tidak ada syarat. Penggunaan diksi *syarat kosong* karena syarat ini akan dimasukkan dalam UU, jadi walaupun tidak ada syarat tetap dikatakan *syarat kosong*.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Komisi III: "...Komisi III DPR RI sesegera mungkin guna untuk melengkapi struktur pimpinan KPK selama 5 orang. Selanjutnya fraksi partai amanat nasional, berpendapat bahwa pemilihan dan penetapan salah seorang calon pengganti saudara Yusro dilakukan secara bersamaan pada penetapan 4 anggota komisioner pada KPK terpilih..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat dua diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *struktur pimpinan*. Diksi tersebut merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan tersebut. Diksi yang pertama berbentuk frasa yaitu *struktur pimpinan*. Berdasarkan KBBI *struktur* memiliki arti susunan, sedangkan *pimpinan* memiliki arti hasil memimpin. Berdasarkan konteks tersebut *struktur pimpinan* bermakna susunan pemimpin suatu organisasi politik yaitu DPR RI. Namun, sebenarnya orang yang memimpin disebut *pemimpin* bukan *pimpinan*. Kata *pimpinan* bermakna hasil dari seseorang memimpin.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Demokrat (K. Harman):”...5 pimpinan KPK wajib hukumnya untuk dipenuhi, dalam bahasa kami ini adalah manatori rule, apa artinya dengan sengaja pembuat UU KPK menegaskan bahwa 5 itu wajib hukumnya untuk dipenuhi dengan konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi 5 maka tidak boleh diambil keputusan apapun oleh pimpinan KPK yang mempunyai konsekuensi hukum akibatnya adalah keputusan keputusan pimpinan KPK yang tidak dilakukan oleh 5 pimpinan KPK mempunyai akibat hukum tidak sahnya keputusan itu. Inilah yang menjadi alasan pokok mengapa kami meminta supaya dilakukan pemilihan untuk memenuhi kewajiban adanya 5 pimpinan KPK itu dengan demikian pimpinan bapak ibu anggota dewan yang sangat kami hormati. Yang tadi mengikuti logika yang dijelaskan oleh pimpinan komisi III dan putusan komisi III, maka dengan keputusan ini nanti diambil maka KPK sejak pimpinannya hanya 5 komisioner kehilangan legalitasnya untuk melakukan 4 untuk melakukan tindakan hukum. Terutama tindakan hukum yang punya dampak represif...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat lima diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *manatori rule*, *konsekuensi hukum*, *komisioner*, *legalitas*, dan *represif*. Kedua diksi tersebut merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan tersebut. Diksi yang pertama berbentuk frasa yaitu *manatori rule*. Diksi tersebut sepenuhnya berasal dari bahasa asing yang dibuat oleh kelompok tertentu. Diksi *manatori rule* bermakna hukum atau peraturan yang harus dipenuhi.

Diksi yang kedua yaitu *konsekuensi hukum*, diksi tersebut berupa frasa yang terbentuk dari kata *konsekuensi* dan *hukum*. Berdasarkan KBBI *konsekuensi* memiliki

arti akibat, sedangkan *hukum* memiliki arti peraturan yang mengikat. Jadi *konsekuensi hukum* bermakna akibat yang akan ditimbulkan apabila melanggar hukum. Diksi yang ketiga yaitu *komisioner*, berdasarkan KBBI *komisioner* memiliki arti orang yang bertugas melaksanakan penjualan barang dagangan milik pemerintah atau orang lain dengan menerima imbalan dari keuntungan. Namun, apabila dilihat dari konteksnya *komisioner* di sini yang dimaksud adalah orang yang menjabat sebagai pemimpin KPK. Diksi yang keempat yaitu *legalitas*, berdasarkan KBBI *legalitas* memiliki arti sah atau legal. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa anggota dewan ada yang menggunakan diksi *legaliter* ada juga yang menggunakan diksi *legalitas*. Diksi kelima yaitu *represif*, berdasarkan KBBI *represif* memiliki arti menekan, menahan, mengekang atau menindas. Diksi *represif* sering digunakan dalam bidang hukum dan politik.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

PS: "...tentunya hal tersebut sudah dibahas secara mendalam dalam kaitan di internal komisi III dan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan keputusan yang dikaitkan keputusan yang di dalam komisi III tentunya bersifat institusional, kualiti kuatifial dan juga dalam kesempatan kali ini kita hormati, kita tampung kita apresiasi dalam kaitan menyampaikan pendapat dengan catatan tidak lepas dari bagian yang akan diputuskan..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat dua diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *institusional* dan *kualiti kuatifial*. Kedua diksi tersebut merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan tersebut. Diksi yang pertama yaitu *institusional*,

berdasarkan KBBI institusional memiliki arti mengenai lembaga atau bersifat kelembagaan. Kata *institusional* sering dikaitkan dengan pemerintahan ataupun organisasi. Diksi yang kedua yaitu *kualiti kuantifial*, diksi tersebut jarang digunakan oleh masyarakat umum. Biasanya untuk menggambarkan konteks tersebut sering menggunakan diksi *kualitas atau kualiti*. Diksi *kualiti kuantifial* bermakna kualitas dan terpilih.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, fraksi partai Golkar 65 anggota dari 90 anggota, fraksi partai Gerindra 57 orang dari 73 anggota, fraksi Partai Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, fraksi partai amanat nasional 35 orang dari 48 anggota, fraksi partai kebangkitan bangsa 35 orang dari 47 anggota. Fraksi partai keadilan sejahtera 27 orang dari 47 anggota, fraksi partai persatuan pembangunan 20 orang dari 39 anggota. Fraksi partai Nasdem 30 orang dari 36 anggota, fraksi Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Komisi III: "...Pimpinan anggota dewan dan hadirin yang kami hormati komisi III DPR RI memahami dan menyadari bahkan kecakapan dan integritas calon kapolri merupakan syarat mutlak menjadi calon kapolri..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *integritas*. Berdasarkan KBBI *integritas* memiliki arti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Diksi *integritas* sering digunakan di hampir berbagai bidang untuk menggambarkan sifat seseorang mengenai mutu yang dimilikinya.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu

PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Nasdem (Viktor): "...Mereka telah bekerja dengan baik dan tentunya dalam sistem berpolitik tentu ada yang setuju dan tidak setuju. Pada rapat tingkat 2 pada saat ini, paripurna hanya menanyakan ada setuju atau tidak setuju. Kalau mayoritas setuju ya disahkan saja tidak perlu lagi ada konsultasi lagi, tidak perlu konsultasi lagi. Kita tidak perlu cukup lama untuk itu. Karena begitu kita masuk agenda pembahasan agenda ketiga itu tentunya tidak perlu lagi, jangan lagi kita mengeliminir putusan yang telah dilakukan oleh teman teman kita..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tiga diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *sistem berpolitik*, *mayoritas*, dan *mengeliminir putusan*. Kedua diksi tersebut merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan tersebut. Diksi yang pertama berbentuk frasa yaitu *sistem berpolitik*. Berdasarkan KBBI *sistem* memiliki arti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, sedangkan *berpolitik* memiliki arti menjalankan (menganut paham) politik atau ikut serta dalam urusan politik. Jadi *sistem berpolitik* merupakan sistem yang menganut paham politik. Penggunaan diksi *sistem berpolitik* membenarkan bahwa apa yang dijalankan dalam roda pemerintahan sedikit banyaknya menggunakan sistem politik tidak demokrasi.

Diksi yang kedua yaitu *mayoritas*, berdasarkan KBBI *mayoritas* memiliki arti jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain yang tidak memperlihatkan ciri itu. Dalam beberapa bidang misalnya pemerintahan, politik, pendidikan dan sebagainya lebih memilih menggunakan diksi *mayoritas* dibandingkan *lebih banyak* ataupun *lebih sedikit*. Diksi yang ketiga yaitu *mengeliminir putusan*, berdasarkan konteksnya *mengeliminir putusan* merupakan mempengaruhi hasil putusan. Kata *aliminir* di dalam KBBI belum ada dan ini merupakan suatu istilah baru dalam dunia politik.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR

PS : "...Kedua surat dari presiden RI no. R59/pres/2014/9 oktober 2014 perihal tentang rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara RI dengan Republik sosial Vietnam."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *ekstradisi*. Perjanjian *Ektradisi* merupakan perjanjian tentang penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta. Diksi ekstradisi dalam KBBI memiliki makna yang sama dengan apa yang dimaksudkan dengan perjanjian tersebut.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR.

Ahmad ali (Nasdem): "Ahmad ali dari partai Nasdem, pimpinan yang terhormat, anggota DPR yang terhormat paripurna hari ini adalah merupakan lanjutan pada paripurna pada tanggal 16 kemaren. Jadi pada paripurna tanggal 16 terjadi perdenbatan yang begitu sengit , begitu panjang hingga pada akhirnya salah satu menjadi permasalahan yang krusial yang kita bahas pada saat itu adalah bahwa kita belum bisa masuk pada penetapan nama-nama anggota pada waktu itu karena kita sangat terkait dan menunggu tentang komposisi kabinet yang namanya kemitraan komisi. Nah tanpa mengabaikan hasil konsultasi pimpinan dengan pimpinan fraksi maka saya ingin mengingatkan kepada pimpinan bahwa konsistensi pada paripurna hari ini juga tentunya ingin kita pertahankan terimakasih pimpinan."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukkan dinotatif yaitu *krusial*, *komposisi kabinet*, *kemitraan komisi*, dan *konsisten*. Keempat diksi tersebut merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan tersebut. Diksi yang pertama yaitu *krusial*, berdasarkan KBBI *krusial* memiliki arti gawat atau genting. Diksi *krusial* sering digunakan anggota dewan untuk menggambarkan peristiwa yang sangat gawat atau genting.

Diksi yang kedua berbentuk frasa yaitu *komposisi kabinet*. Berdasarkan KBBI *komposisi* memiliki arti susunan, sedangkan *kabinet* memiliki arti badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas para menteri. Jadi *komposisi kabinet* merupakan susunan atau jajaran menteri–menteri. Diksi *kabinet* merupakan diksi yang digunakan pada era Reformasi yang sekarang disebut *Kabinet Indonesia Bersatu*. Diksi yang ketiga berbentuk frasa yaitu *kemitraan komisi*. Berdasarkan KBBI *kemitraan* perihal hubungan (jalinan kerja sama sebagai mitra, sedangkan *komisi* memiliki arti sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu. Jadi *kemitraan komisi* merupakan jalinan kerjasama yang dilakukan oleh komisi dengan mitra tertentu. Di dalam DPR RI terdiri atas beberapa komisi yang memiliki tugas dan fungsi masing–masing. Diksi keempat yaitu *konsisten*, berdasarkan KBBI *konsisten* memiliki arti tetap (tidak berubah-ubah). Diksi *konsisten* sudah sering digunakan di berbagai bidang untuk menggantikan kata tetap.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR.

Sukiman (PAN): “...Dan kinerja kedewanan juga bisa, bisa berjalan juga dengan alat alat kelengkapan. Maka tidak ada pilihan lain maka kita harus pada hari ini penetapannya...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *kedewanan*. Diksi *kedewanan* terbentuk dari kata dewan. Berdasarkan KBBI dewan memiliki arti majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal dan sebagainya dengan jalan berunding. Dalam KBBI tidak ditemukan kata *kedewanan*, namun apabila dilihat dari konteksnya *kedewanan* memiliki arti jajaran anggota dalam mengurus pemerintahan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR.

Hanura: “Terimakasih pak, saudara pimpinan setelah dan pada rapat konsultasi itu tidak tidak ada hubungan relevan kesannya kita menunggu a nomenfratur kementerian, karena malamini hanya penetapan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan tiap tiap fraksi....”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat dua diksi yang menunjukkan denotative yaitu *hubungan relevan* dan *nomenfratur kementrian*. Kedua diksi tersebut merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan tersebut. Diksi yang pertama berbentuk frasa yaitu *hubungan relevan*. Berdasarkan KBBI *hubungan* memiliki arti keadaan berhubungan, sedangkan *relevan* memiliki arti saling terkait atau berguna secara langsung. Jadi *hubungan relevan* merupakan suatu keadaan dalam berhubungan yang saling terkait dan tidak saling terpisahkan. Diksi yang kedua berbentuk frasa yaitu *nomenfratur kementrian*. *Nomenfratur kementrian* bermakna jajaran yang ada dalam kementrian atau jajaran para menteri atau eksekutif.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR.

Hendrawan: “...Ini merupakan modal yang luar biasa, kepada dunia kita telah mendirikan demokrasi yang hebat kita berbangga karena sebagai Negara demokrasi ke-3 terbesar di dunia kita telah menunjukkan tradisi kenegarawanan yang luar biasa.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *tradisi kenegarawanan*. Diksi tersebut merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan tersebut. Berdasarkan KBBI *tradisi* memiliki arti suatu adat kebiasaan yang turun-temurun dan masih dijalankan dalam masyarakat tertentu. Sedangkan *kenegarawanan* memiliki arti hal yang berhubungan dengan orang-orang yang mengurus suatu negara. Jadi *tradisi kenegarawanan* merupakan tradisi yang berhubungan dengan urusan negara.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR.

Hendrawan: "...Oleh sebab itu, marilah kita memiliki prinsip *the right man on the right place on the right time*, itu sebabnya pimpinan praktis saja saya mengharapakan rapat konsultasi dilakukan lagi tapi sekalai lagi harus solutif, antisipatif, akomodatif..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi denotatif yaitu *solutif*, *antisipatif*, dan *akomodatif*. Ketiga diksi tersebut merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan maknanya sesuai dengan konteksnya. Diksi yang pertama yaitu *solutif*, berdasarkan KBBI kata *solutif* tidak ditemukan. Kata *solutif* dapat bermakna suatu tindakan yang menemukan solusi. Berdasarkan KBBI *solusi* memiliki arti penyelesain atau pemecahan suatu masalah. Diksi yang kedua yaitu *antisipatif*, berdasarkan KBBI *antisipatif* memiliki arti bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang (akan) terjadi. Diksi yang ketiga yaitu *akomodatif*, berdasarkan KBBI *akomodatif* memiliki arti suatu sifat yang dapat menyesuaikan diri.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR

Farid: "...Mohon maaf pak di ruangan ini pernah ada gambar presiden (semua tepuk tangan) gambar presiden itu minta diturunkan karena nuansa interpretasi eksekutif memang ditiadakan digedung ini. Jadi ini penting yang digarisbawahi, yang kedua sebetulnya karena forum ini sudah quorum konsennya banyaknya kami dipimpinan menerima begitu banyak surat yang harus di follow up oleh alat kelengkapan, karena Negara tidak berhenti. Presiden hanya berganti tapi negara tidak berhenti, surat dari negara lain harus kita jawab, surat dari lembaga lain harus kita jawab, negara tidak berhenti pak..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *interpretasi eksekutif* dan *follow up*. Ketiga diksi tersebut merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan tersebut. Diksi yang pertama berbentuk frasa yaitu *interpretasi eksekutif*. Berdasarkan KBBI *eksekutif* memiliki arti pejabat tingkat tinggi yang bertanggung jawab kepada direktur utama atau pemimpin tertinggi dalam perusahaan atau organisasi. Apabila dalam ranah politik dan pemerintahan eksekutif

ditujukan kepada presiden dan menteri-menterinya. Sedangkan kata *interpretasi* dalam KBBI tidak ditemukan, namun apabila dilihat dari konteksnya interpretasi bermakna tekanan atau pengaruh. Jadi *interpretasi eksekutif* merupakan pengaruh atau tekanan yang berasal dari eksekutif (presiden dan menteri). Diksi yang kedua yaitu *follow up*, kata *follow up* tidak ditemukan dalam KBBI. Diksi *follow up* merupakan diksi yang berasal dari bahasa asing. *Follow* artinya mengikuti, namun dalam konteks tersebut *follow up* bermakna ditanggung atau dihandlel.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

PAN : “Agar keputusan dewan terhormat dan dihormati oleh lembaga lembaga yang lain termasuk presiden. Demikianlah pandangan fraksi PAN kiranya dapat dimengerti, dan kami berterimakasih atas pandangan saudara. Terimakasih wassalamualaikum wr.wb.”

PS : “Baik terimakasih kami sampaikan kepada fraksi PAN, berikutnya kami persilahkan pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, apakah langsung disetujui?”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukkan diksi denotatif yaitu *pandangan fraksi*. Diksi tersebut merupakan diksi denotatif karena diksi tersebut tidak memiliki makna ganda dan sudah jelas makna yang ada dalam tuturan tersebut. Diksi tersebut berupa frasa yang terdiri atas dua kata yaitu *pandangan* dan *fraksi*. Berdasarkan KBBI *pandangan* memiliki arti pendapat. Sedangkan *fraksi* memiliki arti kelompok dalam badan legislatif yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian. Jadi apabila digabung menjadi frasa *pandangan fraksi* bermakna pendapat dari fraksi. Berdasarkan makna tersebut, diksi

tersebut tidak memiliki kejanggalan. Namun, apabila kita melihat konteks diksi pandangan fraksi tidak tepat penggunaannya. Penggunaan diksi *pandangan fraksi* menunjukkan bahwa anggota dewan dalam berpendapat masih membawa fraksi atau partai yang membawanya. Padahal apabila kita melihat anggota dewan dipilih dari Dapil-Dapil seluruh Indonesia, untuk menyuarakan aspirasi rakyat baik itu dari daerah ia dipilih maupun rakyat secara umum.

4.1.2 Konotatif

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pengambilan sumpah janji Anggota DPR RI, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 11.45–selesai, dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet, Duta Besar (yang selanjutnya disingkat Dubes), Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI Anggota DPD, dan undangan.

PS (Popong): “Saya haturkan assalamualaikum wr. wb.selamat pagi dan salam sejahtera.Yang terhormat saudara presiden, yang terhormat saudara wakil presiden, yang terhormat saudara pimpinan lembaga negara, yang terhormat para menteri kabinet Indonesia bersatu yang mulia para duta besar kepala perwakilan negara sahabat, yang terhormat saudara pimpinan partai politik, para anggota DPD RI, para anggota DPR RI dan para undangan serta para hadirin hadiroti yang sangat kami hormati....”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat lima diksi yang menunjukkan jenis diksi konotatif, yaitu *haturkan*, *yang terhormat*, *Menteri Kabinet Indonesia Bersatu*, *negara sahabat*, *kami hormati*. Di dalam pernyataan yang diutarakan oleh PS yaitu Popong, merupakan bentuk bahasa yang disesuaikan dengan situasi, keadaan, dan status sosial penutur dan yang disapa. Yang pertama kata *haturkan* merupakan jenis diksi konotatif, pemilihan diksi ini dikarenakan pada saat itu PS dalam forum tertinggi yaitu Sidang Paripurna DPR RI yang dihadiri oleh Presiden RI dan berbagai pejabat negara. PS merupakan anggota DPR RI yang akan dilantik, dan ia merasa status sosialnya lebih rendah dari para tamu undangan. Kata *haturkan* ini memiliki makna atau berkonotasi dengan kata *sampaikan*.

Diksi *yang terhormat* dan *kami hormati* merupakan jenis diksi kedua dan ketiga dalam pernyataan PS. PS membedakan kata sapaan untuk anggota dikarenakan PS melihat status sosial yang disapanya. Pada diksi *yang terhormat* disebutkan sebanyak lima kali untuk menyapa. *Yang terhormat* disampaikan untuk presiden, wakil presiden, pimpinan lembaga negara, menteri kabinet Indonesia bersatu, duta besar kepala perwakilan negara sahabat, pimpinan partai politik, anggota DPR RI, anggota DPD. Dapat dilihat status presiden dan wakil presiden merupakan posisi pemerintah pertama dan kedua, pimpinan lembaga negara dan menteri kabinet merupakan jajaran pejabat pemerintahan, duta besar perwakilan negara merupakan tamu undangan dari negara-negara yang bekerjasama dengan Indonesia, Pimpinan DPR RI, anggota DPR RI, anggota DPD adalah pejabat negara yang memiliki posisi yang tinggi dalam forum itu dan merupakan tuan rumah serta apabila digabung anggota DPR RI dan anggota DPD menjadi satu maka lembaga ini disebut MPR. Sedangkan untuk diksi *kami hormati* merupakan bentuk diksi yang ditujukan oleh para hadirin selain yang disebutkan sebelumnya, karena menurut PS tamu undangan lain seperti sekretaris jenderal, ahli agama dan sebagainya memiliki status sosial yang dibawahnya atau setara dengannya. Maka PS memilih dua diksi yaitu *yang terhormat* yang ditujukan kepada yang paling dihormati dan *kami hormati* yang ditujukan kepada orang yang sederajat atau dibawahnya dilihat dari status sosialnya. *Yang terhormat* dan *kami hormati* merupakan kata yang berasal dari *hormat*. *Hormat* memiliki makna menghargai atau perbuatan yang menandakan rasa khidmat/takzim.

Diksi *menteri kabinet Indonesia bersatu* merupakan jenis diksi konotatif. Apabila diuraikan maknanya satu persatu kata menjadi berikut: *menteri* memiliki makna pembantu kepala negara untuk melakukan urusan negara, *kabinet* memiliki makna dewan pemerintahan yang terdiri atas menteri, *Indonesia* memiliki makna negara di kepulauan Asia, *bersatu* memiliki makna bergabung menjadi satu. Apabila digabung dalam satu artian, diksi ini memiliki makna bahwa jajaran kabinet ini berasal dari perwakilan daerah-daerah Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Frasa

menteri kabinet Indonesia bersatu merupakan suatu istilah yang digunakan pada masa Presiden Jokowi saat ini.

Diksi *negara sahabat*, merupakan jenis diksi yang konotatif. Kata *sahabat* dapat diartikan kawan, teman yang akrab. Untuk penyebutan Dubes negara yang bekerjasama dengan Indonesia ini, merupakan suatu sanjungan dan merekatkan dua negara atau lebih menjadi semakin baik. *Negara sahabat* memiliki makna negara yang sudah lama bekerjasama dengan Indonesia baik dibidang politik, ekonomi dan sebagainya. Penggunaan istilah tersebut digunakan untuk menyatukan atau mengakrabkan kedua belah pihak.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. Nasdem : “Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati pimpinan sementara DPR RI yang saya hormati para anggota dewan yang terhormat. Kami dari partai Nasdem pertama kali hadir di dewan yang terhormat ini. Kami duduk melihat senior senior partai kami membuat sebuah langkah yang menurut kami mencederai jalannya demokrasi bangsa ini. Tentunya ini menjadi pelajaran buruk buat sejarah pembangunan demokrasi Indonesia.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukkan diksi konotatif yaitu diksi *pembangunan* dalam frasa *sejarah pembangunan demokrasi Indonesia*. Kata *pembangunan* memiliki arti suatu proses kemajuan pada bidang politik dengan demokrasi. Diksi *pembangunan* dipilih untuk menggantikan kata kemajuan. Diksi pembangunan bukan suatu tatanan bangunan atau perumahan melainkan proses kemajuan suatu negara.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR

Nadia (PKS): “...tata tertib kita tidak cukup kuat payungnya untuk membuat mereka berdii di posisi yang yang tepat sementara kita menginginkan agar DPR ini memiliki supporting system yang kuat dan itu sudah ada di renstra kita.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukkan diksi konotatif yaitu *payung*. Berdasarkan KBBI *payung* memiliki arti alat pelindung badan

supaya tidak terkena panas matahari atau hujan. Berdasarkan konteksnya kata *payung* memiliki arti tidak hanya pelindung dari panas atau hujan, namun pelindung yang berkonotasi pada hukum atau aturan yang mengikat.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

PAN: "...dengan seksama mengikuti perkembangan politik dan hukum serta dengan sungguh sungguh mendengarkan suara masyarakat bahwa Fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan, satu PAN menghormati hak prerogatif presiden untuk mengajukan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukkan diksi konotatif yaitu *suara masyarakat*. Berdasarkan KBBI *suara* memiliki arti bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia, sedangkan *masyarakat* memiliki arti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Diksi *suara masyarakat* tidak bermakna suara yang dikeluarkan masyarakat. Diksi *suara masyarakat* memiliki arti keinginan, pendapat, harapan dari masyarakat.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota,

PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

PAN (Kuswianto): "...tentunya kita bersama-sama akan lebih bijak akan lebih arif kalau kita lebih hati-hati di dalam mengambil keputusan ini. Karena Kapolri ini nanti akan bertugas salah satunya adalah penegakan hukum. Kita sangat setuju dengan pernyataan presiden RI ketika mengangkat Kapolri pejabat negara lainnya harus betul-betul hati-hati dan harus komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan diksi konotatif yaitu *pemerintahan yang bersih*. Tuturan tersebut dikatakan diksi konotatif karena tuturan tersebut mengandung makna yang tidak sebenarnya atau ada makna yang lain secara implisit. Berdasarkan KBBI bersih memiliki arti bebas dari kotoran. Namun, dalam konteks tuturan tersebut, kata *bersih* berkonotasi terhadap sesuatu yang sesuai dengan peraturan dan tidak adanya tindak kejahatan. Tuturan pemerintahan yang bersih berkonotasi terhadap suatu keadaan pemerintah yang jauh dari KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme).

4.1.3 Polisemi

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripurnan DPR RI dengan topik bahasan pengambilan sumpah janji Anggota DPR RI, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 11.45–selesai, dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet, Duta Besar (yang selanjutnya disingkat Dubes), Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI Anggota DPD, dan undangan.

PS (Popong) : "...MD3 yang berbunyi anggota DPR yang sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji secara bersama-sama yang akan dipandu oleh Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPR..."

MA : "Sebelum memangku jabatan anggota DPR saudara-saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama masing-masing."

Berdasarkan kutipan tersebut mengandung diksi polisemi, karena terdapat kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi dengan kata yang sama. Frasa *memangku jabatan* merupakan jenis diksi polisemi, karena pada kata *memangku*

berdasarkan KBBI memiliki arti menaruh sesuatu di atas pangkal paha dan lutut sedangkan arti *memangku* pada frasa tersebut selama menjabat sebagai anggota DPR RI, jadi membentuk diksi yang baru yaitu polisemi.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

PAN: "...Dan setelah *fit and proper test* fraksi pan menilai Komjen Pol. Budi Gunawan mempunyai kemampuan dan layak menduduki jabatan Kapolri tersebut..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukkan polisemi yaitu *menduduki jabatan*. Frasa *menduduki jabatan* tersebut mengandung diksi polisemi, karena terdapat kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi dengan kata yang sama. *Menduduki* berasal dari kata dasar duduk, yang bermakna duduk di tempat yang digunakan untuk duduk. Sedangkan frasa *menduduki jabatan* bermakna mengemban suatu jabatan atau tanggung jawab tertentu. Sehingga kata *menduduki* berpolisemi dengan kata *menduduki* dalam arti duduk di tempat duduk.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR.

Aria Bima: "...Mohon kepada pimpinan, itu juga bisa dimasukkan bagian dari paket lobi kita untuk kira-kira apakah kita perlu mengajukan kursi tambahan itu adalah hal yang sangat dianamis..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukkan diksi polisemi yaitu kursi dalam frasa *kursi tambahan*. Frasa *kursi tambahan* tersebut

mengandung diksi polisemi, karena terdapat kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi dengan kata yang sama. Frasa *kursi tambahan* memiliki arti sebenarnya kursi (tempat duduk) perlu adanya tambahan. Namun, dalam konteks tersebut *kursi* bukan diartikan sebagai tempat duduk melainkan jabatan atau anggota baru. Jadi *kursi tambahan* bermakna perlu adanya penambahan keanggotaan dalam jabatan tertentu. Sehingga kata kursi berpolisemi dengan kata kursi dalam arti tempat duduk.

4.1.4 Sinonimi

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Komisi III: "...komisi III DPR RI telah lebih dahulu melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan beberapa ahli dan meminta saran serta masukan terhadap calon pengganti pimpinan KPK yang diusulkan oleh presiden dan apabila pimpinan KPK yang diusulkan tersebut digabungkan dengan pemilihan calon pimpinan KPK lainnya yang akan berakhir pada masa jabatan pada tahun 2015 sehingga pemilihan dan penetapan dilaksanakan dan dilakukan terhadap 5 calon KPK secara bersamaan. Selain dengan para pakar bagaimana dengan hal tersebut komisi III juga meminta saran dan masukan kepada penengak hukum lainnya diberbagai daerah dan ketiga pada hari ke 26 November 2014 komisi III melaksanakan rapat pleno komisi III dalam rangka mendengarkan pandangan dan pendapat fraksi fraksi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon pimpinan KPK..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat kata yang menunjukkan diksi sinonimi yaitu *ahli* bersinonimi *pakar*, *kelayakan* bersinonimi dengan *kepatutan*. Diksi tersebut dikatakan bersinonimi karena diksi tersebut menunjukkan kata yang memiliki makna yang sama. Sinonimi yang pertama yaitu *ahli* dan *pakar*. Berdasarkan KBBI *ahli* memiliki arti orang yang mahir, paham sekali di suatu ilmu. Sedangkan *pakar* memiliki arti orang yang ahli atau spesialis. Kata *ahli* dan *pakar*

memiliki makna yang sama yaitu sama-sama orang yang ahli dibidangnya. Jadi diksi *ahli* dan *pakar* merupakan bentuk sinonimi. Sinonimi yang kedua yaitu *kepatutan* dan *kelayakan*. Berdasarkan KBBI *kelayakan* memiliki arti perihal layak (patut,pantas), kepantasan, kepatutan terhadap sesuatu. Sedangkan *kepatutan* memiliki arti baik, layak, pantas. Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama yaitu pantas, patut, sesuai dengan hal yang baik. Jadi diksi *kelayakan* dan *kepatutan* merupakan bentuk sinonimi.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota,PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota,Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Demokrat: "...Budi Gunawan sebagai Kapolri dan Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas, pengalaman, dan kompetensi sebagai kapolri...."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukkan diksi sinonimi yaitu *kapasitas* bersinonimi dengan *pengalaman* dan *kompetensi*. Diksi tersebut dikatakan bersinonimi karena diksi tersebut menunjukkan kata yang memiliki makna yang sama. Berdasarkan KBBI kata *kapasitas* memiliki arti kemampuan, *pengalaman* memiliki arti sesuatu yang pernah dilakukan dan merujuk pada kemampuan yang dimilikinya selama bekerja sebelumnya, *kompetensi* memiliki arti kemampuan. Jadi ketiga kata tersebut yaitu *kapasitas*, *pengalaman*, dan *kompetensi* merupakan sinonimi yang bermakna yang sama yaitu kemampuan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR.

Hanura: “Terimakasih pak, saudara pimpinan setelah dan pada rapat konsultasi itu tidak ada hubungan relevan kesannya kita menunggu a nomenfraktur kementerian, karena malami hanya penetapan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan tiap tiap fraksi....”

Ahmad Ali (Nasdem): “...penetapan nama-nama anggota pada waktu itu karena kita sangat terkait dan menunggu tentang komposisi kabinet yang namanya kemitraan komisi....”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat diksi yang menunjukkan sinonimi yaitu *nomenfraktur kementerian* dan *komposisi kabinet*. Diksi tersebut dikatakan bersinonimi karena diksi tersebut menunjukkan kata yang memiliki makna yang sama. Diksi *nomenfraktur kementerian* berbentuk frasa. *Nomenfraktur kemitraan* bermakna jajaran yang ada dalam kementerian atau jajaran para menteri. Diksi yang kedua berbentuk frasa yaitu *komposisi kabinet*. Berdasarkan KBBI *komposisi* memiliki arti susunan, sedangkan kabinet memiliki arti badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas para menteri. Jadi *komposisi kabinet* merupakan susunan atau jajaran menteri–menteri. Jadi kedua diksi *nomenfraktur kementerian* dan *komposisi kabinet* saling bersinonimi dengan makna yang sama yaitu jajaran atau susunan menteri.

4.2 Penggunaan Gaya Bahasa Anggota Dewan

Data yang sudah ditranskripsi dari video rekaman Sidang Paripurna DPR RI periode 2014–2019 pada tahun sidang 2014–2015. Dapat diuraikan bahwa para anggota DPR RI menggunakan banyak gaya bahasa. Penggunaan diksi tersebut terdapat berbagai jenis dan maknanya. Data yang menunjukkan gaya bahasa, dapat berupa frasa, kalimat, atau wacana.

4.2.1 Gaya Bahasa Eufemisme

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. PS (Popong): “Nanti dulu nanti dulu. supaya adil supaya adil kan ceritanya ingin adil saya ingin tanya nanti dan yang menjawab hanya perwakilan saya

ingin tanya tiap partai begitu. Kan gampang nah tiap partai bisa memberikann pandangan apakah ini akan diperpanjang, saya rasa apa yang harus diinterupsikan.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan adanya gaya bahasa eufemisme yaitu *kan ceritanya ingin adil*. Tuturan tersebut diutarakan oleh PS. PS yang berusaha untuk meyakinkan anggota yang lain bahwa Sidang Paripurna harus adil. Namun, apabila dilihat dari gaya bahasanya kata *kan ceritanya* dapat diartikan konon ceritanya atau tradisinya. Kata *kan ceritanya* tidak menggambarkan adanya ketegasan bahwa forum tertinggi DPR RI harus tegas dan masih adanya kata *konon katanya ceritanya ingin adil*. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada keadilan yang sebenarnya dalam forum tertinggi tersebut.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PAN : “Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati pimpinan sementara dan anggota dewan perwakilan rakyat yang terhormat republik Indonesia bersama ini kami sampaikan anggota fraksi partai amanat nasional DPR RI periode 2014-2019 berjumlah 48 anggota 39 laki-laki 9 perempuan dengan pendidikan S-3 3 orang S-2 18 orang dan selebihnya berpendidikan sarjana dengan komposisi ketua yaitu saudara Catur Sapto sekretaris oleh saudara teguh dan bendahara oleh Dewi Kurniawati. Kami menginginkan bangsa Indonesia yang kemandirian ekonomi dan perpajak pada kaki sendiri oleh karena kepentingan politik khususnya legislatif harus senafas dengan semangat ini. Kalau tidak sekarang kapan lagi kalau bukan kita siapa lagi wassalamualikum wr.wb” (selama PAN berbicara ada 2 orang yang terus ngamuk di depan ibu Popong).

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan gaya bahasa eufemisme yaitu pada tuturan *kami menginginkan bangsa Indonesia yang kemandirian ekonomi dan perpajak pada kaki sendiri oleh karena kepentingan politik khususnya legislatif harus senafas dengan semangat ini. Kalau tidak sekarang kapan lagi kalau bukan kita siapa lagi*. Tuturan tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi PAN saat menyampaikan nama fraksi. Tuturan *menginginkan bangsa Indonesia yang*

kemandirian ekonomi dan perpajak pada kaki sendiri merupakan bentuk harapan yang diinginkan oleh Fraksi PAN. Dari tuturan tersebut terdapat maksud sendiri yaitu menyakinkan masyarakat bahwa Fraksi PAN ingin adanya kemandirian ekonomi tanpa ada penjajahan lagi dari pihak manapun. Selain untuk menyakinkan masyarakat, dengan tuturan selanjutnya yaitu *Kalau tidak sekarang kapan lagi kalau bukan kita siapa lagi* menunjukkan ada eufemisme dengan maksudnya untuk menunjukkan bahwa Fraksi PAN layak untuk menjalankan roda pemerintahan saat ini.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PKB (abdul kadir): “Ibu tolong didengarkan assalamualaikum wr.wb. tadi pada forum lobi kami dari PKB meminta dengan hormat kepada seluruh fraksi agar ini dapat ditunda sampai jam 10 pagi ini dengan banyak pertimbangan saya kira (sebagian menyuarakan kata lanjut) dengarkan saya kira keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah lebih elegan, keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah mencerminkan DPR yang bermartabat, keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah menunjukkan bahwa DPR ini punya marwah di depan rakyat kita.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa eufemisme yaitu *keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah lebih elegan, menunjukkan DPR yang bermartabat dan marwah di depan rakyat kita*. Tuturan tersebut dituturkan oleh Abdul Kadir dari Fraksi PKB yang ditujukan kepada semua peserta Sidang Paripurna. Tuturan tersebut dikatakan gaya bahasa eufemisme karena tuturan tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan dan maksud dibalik tuturan tersebut. Tuturan tersebut digunakan untuk menyakinkan kepada peserta sidang yang lain untuk menunda sidang sampai pukul 10 pagi keesokan harinya. Sehingga Fraksi PKB mengutarakan agar sebaiknya keputusan yang diambil oleh DPR adalah keputusan yang elegan, bermartabat, dan punya marwah. Fraksi PKB berusaha untuk menyelubungi kepentingannya dengan menggunakan bahasa propaganda agar peserta sidang mulai berpikir bahwa persidangan seharusnya mengamambil keputusan yang elegan, bermartabat, dan punya marwah dan dapat mengundurkan persidangan hingga

besok. Tuturan tersebut menunjukkan adanya ungkapan yang samar dan berputar-putar serta untuk menyelubungi kepentingannya dengan dalih menyakinkan masyarakat yang mendengar dan peserta sidang.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “...Bukan kami tidak menghargai berdua, malah tadi mimpinya harusnya adalah cucu saya, tapi itulah yang bisa kami lakukan untuk yang terbaik, ya dari semua yang baik. Semua baik, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa demi katanya demokrasi. Kalau demokratis itu kan harus harus ikut yang banyak atuh, baik maaf saya lanjutkan dengan acara yang selanjutnya.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa eufemisme yaitu *bahwa demi katanya demokrasi*. Tuturan tersebut dituturkan oleh PS yang ditujukan kepada peserta Sidang Paripurna. Tuturan tersebut dikatakan gaya bahasa eufemisme karena tuturan tersebut menunjukkan bahwa adanya makna yang tersembunyi dibalik tuturan tersebut. Tuturan tersebut memiliki makna yang samar-samar. Tuturan *demi katanya demokrasi*, kata *demi katanya* apabila dilihat dari maknanya dapat diartikan *tidak serius hanya bayangan*. PS menuturkan *demi katanya* dapat diartikan bahwa demokrasi yang ada di Indonesia tidak demokrasi yang sebenarnya hanya sebatas *katanya*. Tuturan tersebut menunjukkan adanya ungkapan yang samar dan berputar-putar serta untuk menyelubungi maksud yang sebenarnya.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PKB : “Adanya kediktatoran mayoritas kepada hasil-hasil sidang dengan ini Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan sikap untuk melakukan *walk out* dan tidak bertanggung jawab atas seluruh hasil paripurna yang sangat tidak adil. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih wassalamualaikum wr.wb. PKB dengan ini menyatakan *walk out* .”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa eufemisme yaitu *Adanya kediktatoran mayoritas kepada hasil-hasil sidang*. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota dewan dari Fraksi PKB ditujukan kepada

semua peserta sidang dan seluruh masyarakat yang mendengarnya. Tuturan tersebut dikatakan gaya bahasa eufemisme karena tuturan tersebut menunjukkan bahwa adanya makna yang tersembunyi dibalik tuturan tersebut. Tuturan tersebut memakai ungkapan yang samar-samar yaitu dengan menuturkan *kediktatoran mayoritas kepada hasil-hasil sidang*. Tidak disebutkan kediktatoran yang seperti apa dan membuat masyarakat menilai sendiri hasil dari sidang tersebut. Selain itu, PKB berusaha meyakinkan kepada rakyat bahwa PKB tidak ikut dalam kediktatoran tersebut dengan menyatakan *walk out*.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PDIP : “Pimpinan, bapak ibu sekalian yang saya hormati mencermati dinamika gelagat dan perkembangan yang ibu pimpin mulai rapat konsultasi tadi tentunya Fraksi PDIP yang merupakan dari partai kita ingin menjunjung kedaulatan rakyat tanpa mengurangi rasa hormat masing masing fraksi punya pertimbangan punya sikap politik oleh karena itu izinkan dari PDIP untuk tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan pada malamini, sekian terima kasih waalaikum slm wr.wb.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan gaya bahasa eufemisme yaitu dari *partai kita ingin menjunjung kedaulatan rakyat, dinamika gelagat dan perkembangan yang ibu pimpin*. Tuturan *partai kita ingin menjunjung kedaulatan rakyat* merupakan tuturan yang dituturkan oleh anggota Fraksi PDIP. Tuturan tersebut dikatakan gaya bahasa eufemisme karena tuturan tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan dan maksud dibalik tuturan tersebut. Tuturan *partai ingin menjunjung kedaulatan rakyat*, dapat berupa gaya bahasa eufemisme bahwa Fraksi PDIP membela rakyat dan berusaha meyakinkan rakyat bahwa Fraksi PDIP tidak akan meninggalkan rakyat.

Tuturan selanjutnya yaitu *dinamika gelagat dan perkembangan yang ibu pimpin* merupakan bentuk gaya bahasa eufemisme. Tuturan tersebut dikatakan gaya bahasa eufemisme karena tuturan tersebut menunjukkan adanya maksud dibalik tuturan tersebut dan menggunakan ungkapan yang samar-samar. *Dinamika gelagat*

dan perkembangan merupakan ungkapan samar yang ditujukan atau menggambarkan kepemimpinan PS. Fraksi PDIP berusaha menggunakan bahasa yang berputar-putar dan samar untuk menggambarkan bahwa kepemimpinan PS yang tidak adil.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Nasdem : “Adanya cacat dalam pengurusan prosedural mengurus Tatib ini, oleh karena itu dari fraksi partai Nasdem, sebagai ketua fraksi partai Nasdem sangat terharu dengan kondisi demokrasi bangsa hari ini.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan adanya gaya bahasa eufemisme yaitu *sangat terharu dengan kondisi demokrasi bangsa hari ini*. Kalimat dengan *kondisi demokrasi bangsa hari ini*, menunjukkan adanya maksud dari pernyataan tersebut. Fraksi Partai Nasdem menggunakan bahasa yang samar–samar dalam mengungkapkan tentang kondisi demokrasi. Sebelumnya ada kalimat adanya cacat dalam pengurusan procedural, kemudian diikuti dengan kalimat terharu dengan kondisi demokrasi bangsa hari ini. Tuturan tersebut mengungkap bahwa sekarang kondisi demokrasi Indonesia ada yang cacat dalam prosedural.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama –nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR

Aria Bima: “...Ini adalah suatu paket yang tidak dapat terpisahkan, politik ini begitu dinamisnya maka saya berharap kepada kawan kawan yang terhormat dan juga pimpinan saya mohon untuk dilakukan langkah langkah lobi kembali.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa eufemisme yaitu *politik ini begitu dinamisnya*. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota dewan yaitu Aria Bima ditujukan kepada semua peserta sidang dan seluruh masyarakat yang mendengarnya. Tuturan tersebut dikatakan gaya bahasa eufemisme karena tuturan tersebut menunjukkan bahwa adanya makna yang tersembunyi dibalik tuturan tersebut.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80-anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Demokrat (K. Harman): “...Kalau memang ini sudah menjadi keputusan kami pun tunduk pada keputusan itu. Hanya kami ingatkan itulah resikonya, sekian terimakasih banyak...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan eufemisme yaitu *kalau memang ini sudah menjadi keputusan kami pun tunduk pada keputusan itu*. Hanya kami ingatkan itulah resikonya. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota Fraksi Demokrat. Dari tuturan *kami tunduk pada keputusan itu* mencerminkan bahwa Fraksi Demokrat merupakan partai yang siap menerima semua keputusan dan menghargai jalannya demokrasi. Selain itu, Demokrat juga menunjukkan bahwa Demokrat berusaha menyakinkan kepada anggota dan masyarakat yang menonton persidangan tersebut bahwa Demokrat adalah partai yang memikirkan sebab dan akibat dari semua keputusan yang diambil.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, fraksi partai Golkar 65 anggota dari 90 anggota, fraksi partai Gerindra 57 orang dari 73 anggota, fraksi Partai Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, fraksi partai amanat nasional 35 orang dari 48 anggota, fraksi partai kebangkitan bangsa 35 orang dari 47 anggota. Fraksi partai keadilan sejahtera 27 orang dari 47 anggota, fraksi partai persatuan pembangunan 20 orang

dari 39 anggota. Fraksi partai Nasdem 30 orang dari 36 anggota, fraksi Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Nasdem (Viktor): "...jangan lagi kita mengelimenir putusan yang telah dilakukan oleh teman teman kita. Karena itu adalah utusan fraksi fraksi di komisi III bukan utusan siapa-siapa. dan tentunya tidak perlu kita bertannya, terimakasih..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan adanya gaya bahasa eufemisme yaitu *karena itu adalah utusan fraksi fraksi di komisi III bukan utusan siapa-siapa*. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota Fraksi Nasdem, dari tuturan *utusan fraksi fraksi di komisi III bukan utusan siap-siapa*, apabila dilihat dari bahasanya adanya hal yang diungkap melalui tuturan tersebut, bahwa semua keputusan yang diambil itu utusan setiap fraksi yang ada di komisi bukan melalui musyawarah demi mendapatkan hasil yang objektif dan untuk kepentingan rakyat. Walaupun tuturan tersebut terlihat berputar-putar dan samar, karena memang itu ciri khas dari eufemisme. Namun, dapat diketahui bahwa anggota Fraksi Nasdem mengingatkan kepada anggota fraksi lainnya bahwa apapun yang sudah diputuskan tidak lepas dari pengaruh semua fraksi yang berkuasa.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): "Saya mohon kepada anggota yang terhormat untuk berdiri bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia raya. Baik ya saya mohon sedikit bahwa ini adalah terbuka untuk umum. Baik kita bersama-sama, dengan hikmat kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa eufemisme yaitu *terbuka untuk umum*. Tuturan tersebut dituturkan oleh Popong sebagai PS. Tuturan *terbuka untuk umum* merupakan suatu tuturan peringatan kepada anggota dewan bahwa Sidang Paripurna dibuka dan dapat dilihat secara umum. Dari tuturan tersebut memiliki makna bahwa karena sidang ini terbuka untuk umum, maka persidangan ini kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan dengan hikmat. Makna tersebut dapat dilihat dari tuturan berikutnya yaitu *baik kita bersama-sama dengan hikmat menyanyikan lagu kebangsaan*.

4.2.2 Gaya Bahasa Erotesis (Pertanyaan Retoris)

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PAN : “Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati pimpinan sementara dan anggota dewan perwakilan rakyat yang terhormat republik Indonesia bersama ini kami sampaikan anggota fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI periode 2014-2019 berjumlah 48 anggota 39 laki-laki 9 perempuan dengan pendidikan S-3 3 orang S-2 18 orang dan selebihnya berpendidikan sarjana dengan komposisi ketua yaitu saudara Catur Sapto sekretaris oleh saudara teguh dan bendahara oleh Dewi Kurniawati. Kami menginginkan bangsa Indonesia yang kemandirian ekonomi dan perpajak pada kaki sendiri oleh karena kepentingan politik khususnya legislatif harus senafas dengan semangat ini. Kalau tidak sekarang kapan lagi kalau bukan kita siapa lagi wassalamualikum wr.wb” (selama PAN berbicara ada 2 orang yang terus ngamuk di depan ibu Popong).

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan adanya gaya bahasa erotesis yaitu *Kalau tidak sekarang kapan lagi kalau bukan kita siapa lagi*. Tuturan tersebut dikatakan gaya bahasa erotesis karena gaya bahasa yang dipergunakan dalam tuturan tersebut tidak memerlukan jawaban. Tuturan *Kalau tidak sekarang kapan lagi kalau bukan kita siapa lagi* sebuah tuturan tanpa adanya jawaban pendengar akan mengetahui bahwa kapan dan siapa yang pantas untuk mengemban tugas sebagai anggota DPR RI.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Aria Bima (PDIP): “Bukan suasana yang seperti ini yang kita inginkan, apakah suasana yang seperti ini yang kita inginkan, kita cerminkan kepada lembaga tinggi negara kita.”

PAN : “Berkenaan dengan surat saudara”

Aria Bima (PDIP): “Apakah ini sumpah jabatan yang kita bicarakan, apakah seperti ini yang kita inginkan.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan adanya gaya bahasa erotisme. Tuturan tersebut dikatakan gaya bahasa erotesis karena gaya bahasa yang dipergunakan dalam tuturan tersebut tidak memerlukan jawaban.

Tuturan pertama *apakah suasana seperti ini yang kita inginkan*. Tuturan tersebut tidak memerlukan jawaban, karena pada situasi Aria Bima bertanya kondisi ruangan sedang dalam keadaan gaduh dan banyak interupsi. Tuturan selanjutnya *apakah ini sumpah jabatan yang kita bicarakan*. Tuturan tersebut disampaikan kepada para anggota yang hadir dalam persidangan tersebut. Kedua tuturan tersebut tidak memerlukan suatu jawaban karena pada awal kalimat sudah dijawab *bukan seperti ini yang kita inginkan*.

4.2.3 Gaya Bahasa Koreksi atau Epanortosis

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Saya lanjutkan dulu, saya lanjutkan dulu mata acara yang ini. Yang ketiga eh yang keempat adalah Partai Demokrat, silahkan. Tunggu lagi bicara dulu.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan gaya bahasa koreksi yaitu *Yang ketiga eh yang keempat adalah Partai Demokrat*. Tuturan tersebut dikatakan gaya bahasa koreksi karena adanya perbaikan pada pengucapan. Ditemukannya penggunaan gaya bahasa koreksi, dapat menunjukkan bahwa PS yang merupakan anggota dewan tidak selalu fokus pada permasalahan yang dibicarakan dan dapat menunjukkan bahwa tidak ada ketegasan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “...Dengan alasan-alasan yang sangat kami mengerti oleh karenaitu maka kami persilahkan kepada partai yang akan menyampaikan paket. Ah ya partai ya fraksi ah sama bae atuh.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan gaya bahasa koreksi yaitu *kami persilahkan kepada partai yang akan menyampaikan paket. Ah ya partai ya fraksi*. Tuturan tersebut dikatakan gaya bahasa koreksi karena adanya perbaikan pada pengucapan. Ditemukannya penggunaan gaya bahasa

koreksi, dapat menunjukkan bahwa PS yang merupakan anggota dewan tidak selalu fokus pada permasalahan yang dibicarakan dan dapat menunjukkan bahwa tidak ada ketegasan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Kita lanjutkan karena ini mata acara sudah selesai yang menyampaikan nggak ada lagi kan? Sudah menyampaikan sesuai dengan mata acara yang ketiga. Nah karena setelah kami baca semua ternyata dari 7 pembicara itu isinya semua sama. Ada 6 yang sama 1 berbeda, maaf karena saya tidak baca, jadi sebetulnya ada 6 semuanya sama. Dengan demikian hanya ada satu paket, kalau ada satu paket apa perlu dipilih lagi?”

Anggota : “tidak”

PS (Popong): “Tidakan? Ya baik, karena hanya ada 1 paket kemudian diajukan oleh 6 partai, jadi, eh 6 fraksi maka saya ea ae eta diketok maka saya akan menyatakan bahwa paket ini supaya lebih jelas calon yang akan diketok yaitu.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan gaya bahasa koreksi yaitu *6 partai, jadi, eh 6 fraksi*. Tuturan tersebut dikatakan gaya bahasa koreksi karena adanya perbaikan pada pengucapan. Ditemukannya penggunaan gaya bahasa koreksi, dapat menunjukkan bahwa PS yang merupakan anggota dewan tidak selalu fokus pada permasalahan yang dibicarakan dan dapat menunjukkan bahwa tidak ada ketegasan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Baik saya lanjutkan agendanya, kalau ada yang mau nambah agenda nanti. Agendanya yang ketiga. Eh yang kedua. Agenda yang kedua adalah agenda yang kedua.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan gaya bahasa koreksi yaitu *agendanya yang ketiga. Eh yang kedua*. Tuturan tersebut dikatakan gaya bahasa koreksi karena adanya perbaikan pada pengucapan. Ditemukannya penggunaan gaya bahasa koreksi, dapat menunjukkan bahwa PS

yang merupakan anggota dewan tidak selalu fokus pada permasalahan yang dibicarakan dan dapat menunjukkan bahwa tidak ada ketegasan.

4.2.4 Gaya Bahasa Oksimoron

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Demokrat: “...Fraksi Partai Demokrat mendukung sepenuhnya pencalonan komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri (semua tepuk tangan). Kami mendukung sepenuhnya. Yang ketiga namun (semua tertawa) fraksi partai demokrat pak ketua, Bapak ibu anggota dewan yang kami hormati sungguh sungguh dikejutkan seperti tsunami, seperti petir disiang bolong, ndak ada angin ndak ada hujan tiba-tiba diumumkan komjen Pol. Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi. Mengapa tadi kami katakan tsunami di luar dugaan, tidak pernah disangka sebelumnya....”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan gaya bahasa oksimoron yaitu *Budi Gunawan sebagai Kapolri kami mendukung, tiba-tiba Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka*. Tuturan tersebut dikatakan gaya bahasa oksimoron karena tuturan tersebut mengandung pendapat atau pendirian terhadap sesuatu tetapi juga mengandung hal-hal yang bertentangan. Kalimat pertama menunjukkan dukungan terhadap Komjen Pol. Budi Gunawan, namun kalimat selanjutnya dipatahkan dengan penyebutan Budi Gunawan sebagai tersangka. Rangkaian kalimat ini di mana terdapat hal positif dan kemudian diikuti dengan negatif atau mematahkan pendapat tersebut, maka tuturan tersebut dinamakan gaya bahasa oksimoron.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

PAN: "...Pan menghormati hak prerogatif presiden untuk mengajukan komjen pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Dan setelah *fit and proper test* fraksi pan menilai Komjen Pol. Budi Gunawan mempunyai kemampuan dan layak menduduki jabatan kapolri tersebut. Kedua fraksi pan menghormati proses hukum di Negara Indonesia ini, bahwa dengan status hukum yang melekat pada calon pan saat ini, maka DPR seharusnya melakukan proper dalam mengambil keputusan, berkenaan dengan hal tersebut fraksi pan menyarankan kiranya pimpinan dewan untuk mengadakan rapat konsultasi antara DPR dan presiden secepat mungkin, sebelum mengambil keputusan..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan gaya bahasa oksimoron yaitu *Budi Gunawan mempunyai kemampuan dan layak menduduki jabatan Kapolri, bahwa dengan status hukum yang melekat*. Tuturan tersebut dikatakan gaya bahasa oksimoron karena tuturan tersebut mengandung pendapat atau pendirian terhadap sesuatu tetapi juga mengandung hal-hal yang bertentangan. Kalimat pertama menunjukkan hal yang positif mengenai Budi Gunawan bahwa Budi Gunawan mempunyai kemampuan dan layak sebagai calon Kapolri. Namun pada kalimat selanjutnya mematahkan kalimat tersebut yaitu dengan pernyataan *bahwa dengan status hukum yang melekat*. Tuturan tersebut mematahkan dan bertentangan dengan kalimat pertama dengan makna bahwa Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. Aria Bima PDIP: “Saya mewakili, agar tidak mengganggu, karena kita sudah tidak diberi hak untuk bicara dalam forum ini, maka bersama ini Fraksi PDIP hanya ingin menginginkan bagaimana pemilihan pimpinan ini berjalan secara lialiter, namun mengambil cara cara yang tidak sesuai dengan Tatib, pimpinan tidak adil dalam memberi kesempatan kita bicara, kita tidak diberi waktu untuk kita bicara.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan gaya bahasa oksimoron yaitu *hanya ingin menginginkan bagaimana pemilihan pimpinan ini berjalan secara lialiter, namun mengambil cara cara yang tidak sesuai dengan Tatib*. Tuturan tersebut dikatakan gaya bahasa oksimoron karena tuturan tersebut mengandung pendapat atau pendirian terhadap sesuatu tetapi juga mengandung hal-hal yang bertentangan. Awal kalimat pada tuturan tersebut menjelaskan bahwa pemilihan berjalan secara lialiter atau sah. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang bermakna bertentangan yaitu *namun mengambil cara yang tidak sesuai*, tuturan tersebut bertentangan dengan kalimat awal yang menunjukkan pemilihan secara sah.

4.2.5 Gaya Bahasa Resmi

Bahasa yang digunakan pada Sidang Paripurna DPR RI seharusnya menggunakan bahasa resmi karena Sidang Paripurna merupakan forum resmi. Namun setelah dikaji dan diteliti ada juga yang tidak menggunakan bahasa resmi. Maka untuk menunjukkan bahwa Sidang Paripurna ini juga menggunakan bahasa resmi, maka dijelaskan juga seberapa banyak para anggota dewan menggunakan bahasa resmi. Gaya bahasa resmi ditemukan saat PS membuka dan menutup persidangan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pengambilan sumpah janji Anggota DPR RI, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 11.45–selesai, dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet, Duta Besar (yang selanjutnya disingkat Dubes), Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI Anggota DPD, dan undangan.

PS (Popong): “Sidang yang kami hormati anggota DPR RI masa bakti 2014–2019 bersama-sama telah mengucapkan sumpah janji dan dalam waktu yang bersamaan serah terimakan memori DPR RI masa bakti 2009–2014. Maka mulai hari ini dan hari hari yang akan datang selama lima tahun kedepan kita dapat mewujudkan harapan dan amanah yang dipercayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kita cita-cita bangsa dan negara dan tercapai melalui pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang DPR RI dengan demikian selesailah sudah acara dalam Sidang Paripurna DPR RI dengan pokok acara adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR RI masa bakti 2014-2019. Izinkanlah kami menutup Sidang Paripurna dewan pada pagi hari ini dengan mengucapkan bilahitaufik wassalamualaikum wr. wb.” (mengetokpalu 3 kali)

Tuturan tersebut apabila dilihat dari bentuk gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa yang dipakai adalah gaya bahasa resmi. Tuturan tersebut merupakan penutupan Sidang Paripurna DPR RI, PS menggunakan bahasa resmi dalam menutup acara ini dan memberikann pesan kepada anggota dewan.

4.2.6 Gaya Bahasa Klimaks

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pengambilan sumpah janji Anggota DPR RI, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 11.45–selesai, dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet, Duta Besar (yang selanjutnya disingkat Dubes), Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI Anggota DPD, dan undangan.

Sekjen : “Petikan Keputusan Presiden RI no.92/p/tahun 2014 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan dan menetapkan pertama meresmikan dalam keanggotaan DPR masa jabatan tahun 2014-2019...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang dilihat dari struktur kalimatnya merupakan gaya bahasa klimaks, karena kalimat tersebut bersifat periodik dan mengandung urutan-urutan pikiran meningkat kepentingannya dari gagasan sebelumnya. *Menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan dan menetapkan pertama meresmikan* memiliki urutan yang pertama dilakukan adalah

menimbang lalu dilanjut *mengingat* kemudian *memutuskan* setelah itu *menetapkan* dan yang terakhir *meresmikan*. Dari kelima kata tersebut menunjukkan tingkatan atau proses pengambilan keputusan dan berakhir pada klimaks pengambilan keputusan yaitu peresmian.

4.2.7 Gaya Bahasa Repetisi

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Anggota : “Lanjut lanjut.”

PS (Popong): “Lanjut lanjut lanjut?” (hampir mengetok palu).

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa repetisi yaitu *lanjut lanjut*. Gaya bahasa dalam Sidang Paripurna ini sangat banyak hal ini disebabkan karena gaya bahasa repetisi digunakan untuk penekanan. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota dewan yang setuju untuk Sidang paripurna ini dilanjutkan. Anggota dewan berusaha menekankan bahwa persidangan ini harus dilanjut hingga hampir PS menyetujui dan mengetok palu tanda penegasan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Duduk dulu, tidak saya minta duduk dulu. Iya duduk dulu kalau belum kalau tidak duduk sambil berdiri saya nggak akan kasih. Duduk dulu, iya.”

Anggota : “*interupsi pimpinan interupsi pimpinan*”

PS (Popong): “Yang kedua.”

Anggota : “*Interupsi pimpinan interupsi.*”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa repetisi yaitu *interupsi pimpinan interupsi pimpinan*. Tuturan tersebut termasuk repetisi dengan jenis *epizeuksis* yaitu kata yang dulang secara berturut-turut. Tuturan tersebut dituturkan kepada anggota dewan yang ingin mengajukan interupsi. Di dalam tuturan tersebut terdapat gaya bahasa repetisi dikarenakan adanya penekanan bahwa anggota tersebut sungguh menginginkan interupsi.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. PS (Popong): “Tidak ada? Tidak setuju, biarin ini baru satu yang tidak setuju ini mah a (semua bersorak). Partai Hanura? Partai Hanura? Baik. Jadi menurut catatan yang ada pada saya apakah ini dilanjutkan apa tidak. Diperpanjang atau tidak menurut catatan pada saya adalah dilanjutkan. Nanti, nanti persoalan yang lain tu nanti...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa repetisi yaitu *nanti, nanti persoalan yang lain nanti*. Tuturan tersebut termasuk repetisi dengan jenis *epizeusis* yaitu kata yang dulang secara berturut-turut. Tuturan tersebut dituturkan oleh Popong sebagai PS. PS berusaha menekankan bahwa apabila ada persoalan yang lain kecuali yang sudah diagendakan akan dibicarakan nanti. Pengulangan pada tuturan tersebut memberi penekanan dan membujuk pendengar untuk mempercayainya.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. Anggota : “Pimpinan interupsi pimpinan interupsi tolong rapat ini sudah tidak kondusif lagi pimpinan tolong diberikan kesempatan kepada anggota untuk bicara...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa repetisi yaitu *pimpinan interupsi pimpinan interupsi*. Tuturan tersebut termasuk repetisi dengan jenis *epizeusis* yaitu kata yang dulang secara berturut-turut. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota dewan, anggota tersebut berusaha meminta perhatian PS untuk diberi kesempatan untuk interupsi sehingga menggunakan pengulangan kata. Penutur menggunakan kata interupsi sebelum berbicara agar penutur diberi kesempatan untuk berbicara. Tidak hanya sekali penutur mengucapkan kata interupsi melainkan lebih dari satu kata dan terdapat pengulangan. Hal ini disebabkan penutur ingin memberi penekanan dan didengar oleh PS.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Saya peringatkan ada aturan kalau peserta rapat itu, kalau peserta kalau peserta kalau peserta rapat itu...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa repetisi yaitu *kalau peserta rapat itu, kalau peserta rapat itu, kalau peserta rapat itu*. Tuturan tersebut termasuk repetisi dengan jenis *epizeuksis* yaitu kata yang diulang secara berturut-turut. Tuturan tersebut dituturkan oleh PS ditujukan kepada peserta Sidang Paripurna. PS berusaha memberi penekanan dan peringatan kepada peserta sidang untuk mengikuti aturan. Pengulangan kata yang dilakukan PS selain untuk memberi penekanan, juga untuk menarik perhatian peserta agar memperhatikannya dan mendengarkannya.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripurnan DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PKB (Abdul Kadir) : “Sebentar sebentar ibu saya punya hak bicara tolong saya diberi kesempatan saya anggota DPR no. 55 oleh karena itu alangkah baiknya teman-teman yang tidak bersepakat, teman-teman yang tidak bersepakat diberi ruang bicara untuk menanggapi hasil lobi yang ada. Terimakasih wassalamualaikum wr.wb.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa repetisi yaitu *Sebentar sebentar, teman-teman yang tidak bersepakat, teman-teman yang tidak bersepakat*. Kedua tuturan tersebut termasuk repetisi dengan jenis *epizeuksis* yaitu kata ulang secara berturut-turut. Tuturan pertama dituturkan oleh anggota dewan, anggota tersebut berusaha meminta perhatian kepada PS agar mendengarkan pendapatnya dengan cara mengulang kata *sebentar*. Tuturan kedua dituturkan oleh anggota dewan, anggota tersebut berusaha menekankan keinginannya dengan cara mengulang kalimat tersebut.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripurnan DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PKB (Abdul Kadir): “Ibu tolong didengarkan assalamualaikum wr.wb. tadi pada forum lobi kami dari PKB meminta dengan hormat kepada seluruh fraksi agar ini dapat ditunda sampai jam 10 pagi ini dengan banyak pertimbangan saya kira (sebagian menyuarakan kata lanjut) dengarkan

saya kira keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah lebih elegan, keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah mencerminkan DPR yang bermartabat, keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah menunjukkan bahwa DPR ini punya marwah di depan rakyat kita.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa repetisi yaitu *keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah*. Tuturan tersebut termasuk repetisi dengan jenis Anafora yaitu berwujud perulangan kata pertama tiap abris atau kalimat berikutnya. Pendapat yang disampaikan merupakan bentuk lisan, maka terdapat banyak repetisi yang seharusnya dapat disingkat apabila dalam bentuk tulisan. Tuturan tersebut dituturkan oleh Anggota Dewan Dari Fraksi PKB yaitu Abdul Kadir. Penutur berusaha menekankan seharusnya keputusan seperti apa yang harus diambil oleh DPR dengan menggunakan pengulangan di setiap baris kalimat.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. PKB (Ana): “Apabila diragukan, ini dapat diputar, pimpinan pimpinan tolong hormati saya bicara, pimpinan tolong hormati saya bicara, pimpinan tolong hormati saya bicara, tolong hormati saya bicara, saya menghormati ibunda, saya menghormati ibunda jadi tolong saya dihormati ya ibunda. Jadi tolong apabila ada waksawangka dari data yang saya miliki artinya dari persidangan yang tidak betul. Kami mendapatkan data ini asli dari persidangan. Tolong ibu, tolong hormati saya, ibu tolong hormati saya.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa repetisi yaitu *pimpinan tolong hormati saya bicara, ibu tolong hormati saya*. Kedua tuturan tersebut termasuk repetisi dengan jenis *epizeuksis* yaitu berwujud kata ulang secara berturut-turut. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota dewan dari Fraksi PKB yaitu ana. Tuturan pertama yaitu *pimpinan tolong hormati saya bicara*, menunjukkan penutur berusaha meminta perhatian PS dengan mengulang kalimat tersebut hingga enam kali. Pengulangan tersebut digunakan untuk menekankan bahwa penutur ingin diperhatikan. Tuturan kedua tidak jauh beda maksudnya dengan tuturan pertama yaitu penutur meminta perhatian PS dengan menuturkan *ibu tolong*

hormati saya. Penutur menekankan bahwa penutur ingin dihormati seperti penutur menghormati PS dan menekannya dengan melakukan pengulangan kalimat tersebut.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. Fausi Hardianto (Hanura) :“Pimpinan yang terhormat kami dari partai Hanura, terakhir pak terakhir. Saya Fausi Hardianto dari Sumsel 1. Pimpinan minta waktu 5 menit saja. Bahwa kami dari fraksi partai Hanura yang pertama tidak bertanggung jawab terhadap proses kepemimpinan, proses pemilihan pimpinan DPR RI. Kami melihat tidak ada proses demokrasi. Kami melihat tidak ada lagi aspirasi yang kami dengar...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa repetisi yaitu *kami melihat tidak ada*. Tuturan tersebut termasuk repetisi dengan jenis Anafora yaitu berwujud perulangan kata pertama tiap abris atau kalimat berikutnya. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota dewan dari Fraksi Hanura yaitu Hardianto. Penutur berusaha menekankan bahwa jalannya Sidang Paripurna DPR tidak ada demokrasi dan aspirasi yang di dengar. Pendapat yang disampaikan merupakan bentuk lisan, maka terdapat banyak repetisi yang seharusnya dapat disingkat apabila dalam bentuk tulisan. Tuturan tersebut menunjukkan adanya penekanan disetiap isi kalimatnya dan ingin menyakinkan kepada peserta sidang bahwa jalannya Sidang Paripurna sudah tidak demokratis dan aspiratif.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. Ansori siregar (PKS) :“Pimpinan saya saksi hidup bahwa ibu sudah menutup dan saya lebih dekat dari bapak yang baru itu, saya menyaksikan Ansori Siregar buk dari pks.saya menyaksikan ibu menutup rapat konsultasi dengan mengetok 3 kali buk, dengan mengetok tiga kali. Berarti mereka yang bohong, mereka yang bohong, mereka yang bohong”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa repetisi yaitu *mereka yang bohong*. Tuturan tersebut termasuk repetisi dengan jenis *epizeusis* yaitu berwujud kata ulang secara berturut-turut. Tuturan tersebut

dituturkan oleh anggota dewan dari Fraksi PKS yaitu Ansori. Penutur berusaha menekankan bahwa yang dituju penutur sedang berbohong. Kalimat tersebut terus diulang untuk menekan pernyataannya dan agar semua peserta mendengar.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR

Agus Kurniawan (Gerindra): "...Tetapi hingga hari ini mohon maaf pimpinan kita baru melaksanakan tugas tugas paripurna saja, hari ini paripurna ke-5. Padahal kita sudah 21 hari kita diambil sumpah dan janji dan kemarin sama kita saksikan bahwa bapak presiden kita mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja, bekerja, dan bekerja."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa repetisi yaitu bekerja, bekerja, dan bekerja. Tuturan tersebut termasuk repetisi dengan jenis *epizeuxis* yaitu berwujud kata ulang secara berturut-turut. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota dewan dari Fraksi Gerindra yang dikutip dari pernyataan Presiden Jokowi. Dilihat dari pernyataan penutur ingin mengingatkan bahwa DPR harus bekerja, bekerja, dan bekerja. Apabila dilihat dari pernyataan yang dituturkan oleh Presiden Jokowi, Presiden ingin menekankan bahwa pemerintahan pada periodenya harus selalu bekerja, bekerja, dan bekerja. Kata bekerja diulang tiga kali untuk memberi penekanan bahwa hal itu wajib dan harus serius.

4.2.8 Gaya Bahasa Personifikasi

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pengambilan sumpah janji Anggota DPR RI, pada tanggal 1 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 11.45–selesai, dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet, Duta Besar (yang selanjutnya disingkat Dubes), Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI Anggota DPD, dan undangan.

PS (Popong) : "...Sidang yang kami muliakan telah kita dengar bersama-sama petikan Keputusan Presiden RI oleh saudara sekjen DPR RI, untuk itu kami sampaikan terimakasih. Selanjutnya sesuai pasal 77 ayat 1 UU no.14 tahun 2014 MPR, DPD, DPR, dan DPRD yang biasa kita dengar singkatannya MD3 yang berbunyi anggota DPR yang sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji

secara bersama-sama yang akan dipandu oleh Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPR...”

Kutipan tersebut terdapat gaya bahasa personifikasi yaitu pada pernyataan *sidang yang kami muliakan dan memangku jabatan*. Kata *sidang* memiliki arti pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Sedangkan pada pernyataan PS *sidang yang kami muliakan*, merupakan bentuk penghormatan kepada tamu undangan dan untuk mengajak para tamu undangan memanjatkan puja dan puji syukur. Disini terdapat perbandingan, *sidang* yang memiliki makna sebenarnya pertemuan, sedangkan yang dimaksud adalah tamu undangan.

Frasa *memangku jabatan* merupakan jenis gaya bahasa personifikasi, karena pada kata *memangku* berdasarkan KBBI memiliki arti menaruh sesuatu di atas pangkal paha dan lutut sedangkan arti *memangku* pada frasa tersebut selama menjabat sebagai anggota DPR RI. Jadi frasa tersebut terjadi perbandingan memangku dibandingkan dengan kegiatan memangku dan mengemban tanggung jawab.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, fraksi partai Golkar 65 anggota dari 90 anggota, fraksi partai Gerindra 57 orang dari 73 anggota, fraksi Partai Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, fraksi partai amanat nasional 35 orang dari 48 anggota, fraksi partai kebangkitan bangsa 35 orang dari 47 anggota. Fraksi partai keadilan sejahtera 27 orang dari 47 anggota, fraksi partai persatuan pembangunan 20 orang dari 39 anggota. Fraksi partai Nasdem 30 orang dari 36 anggota, fraksi Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

PAN: “...Dan setelah *fit and proper test* fraksi pan menilai Komjen Pol. Budi Gunawan mempunyai kemampuan dan layak menduduki jabatanKapolri tersebut...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat kalimat yang menunjukkan gaya bahasa personifikasi yaitu *menduduki jabatan*. Hampir sama dengan memaknai *memangku jabatan*. Frasa *menduduki jabatan* tidak memiliki makna sebenarnya

duduk. Kata *menduduki* memiliki perbandingan dengan kegiatan menjabat atau mengemban tanggung jawab sebagai pejabat. Jadi frasa *menduduki jabatan* merupakan gaya bahasa personifikasi yang memiliki makna bahwa seseorang yang memiliki tanggung jawab atau mengemban di jabatan tertentu.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama –nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR

Aria Bima: “...Mohon kepada pimpinan, itu juga bisa dimasukkan bagian dari paket lobi kita untuk kira-kira apakah kita perlu mengajukan kursi tambahan itu adalah hal yang sangat dianamis...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat kalimat yang menunjukkan gaya bahasa personifikasi yaitu *kursi tambahan*. Frasa *kursi tambahan* memiliki arti yang berbeda dengan makna yang sebenarnya yaitu kursi tempat duduk. Kata *kursi* pada frasa *kursi tambahan* bermakna manusia atau anggota. Jadi *kursi tambahan* merupakan gaya personifikasi yang bermakna penambahan anggota.

4.2.9 Gaya Bahasa Ironi, Sinisme, dan Sarkasme

A. Gaya Bahasa Ironi

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Iya sudah ditetapkan. Sekarang tinggal ya, kan kudu disumpah marin pak. Nah tadi sudah runding sama pak Ade bahwa bagian nanti pengumuman ucapan sumpah janji dan sebagainya saya akan serahkan pipinan kepada Bapak Ade ya, entong sok bagian didinya tape. Baik ya, jadikan tinggal sumpah janji atuh tidak susah. Mangga ini saya cabut lagi di skors dulu de harus ada ketua MA tapi beliau sudah *stand by* dari pagi maka diskor dulu (tok 1 kali) sebentar. Sudah? Mangga tunggu MA sabarlah saya juga sabar dari pagi.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjuka gaya bahasa sindiran yaitu *sabarlah saya juga sabar dari pagi*. Tuturan tersebut disampaikan PS ditujukan kepada anggota yang ada di dalam ruang persidangan. Situasi di dalam ruangan sudah agak ramai dan pukul sudah menunjukkan pukul

02.00 dini hari hingga PS mengeluarkan pernyataan *sabarlah saya juga sabar dari pagi*. PS menyindir anggota dengan pernyataan sabar ya saya juga sabar dari pagi maksudnya PS yang sudah tua dan mengalami tekanan sebagai PS sejak pagi saja sabar, masak anggota tidak sabar.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Komisi III: "...Perlu kami sampaikan kami selaku pimpinan komisi III DPR RI, di dalam rapat pleno komisi III baik yang pertama, kedua, dan ketiga seluruh pandangan fraksi telah menyetujui dan menyepakati. Adapun pandangan Fraksi PAN yang meminta Rapat Konsultasi dan Fraksi Partai Demokrat meminta Rapat Konsultasi tidak pernah diungkap dalam Rapat Pleno komisi III (tepuk tangan). Jadi saya selaku ketua rapat pimpinan Rapat Pleno komisi III tidak pernah menerima usulan ataupun pandangan secara lisan ataupun tertulis di dalam Rapat Pleno...."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa sindiran yaitu *tidak pernah menerima usulan ataupun pandangan secara lisan ataupun tulisan*. Tuturan tersebut dituturkan oleh komisi III kepada Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat. Komisi III menyindir setelah kedua fraksi menyampaikan pandangannya mengenai pencalonan Kapolri, komisi III menyindir bahwa pandangan yang diutarakan tersebut tidak pernah disampaikan kepada komisi III baik lisan maupun tertulis pada saat rapat pleno sebelum Sidang Paripurna diadakan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama –nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR.

Agus Kurniawan (Gerindra): "...Tetapi hingga hari ini mohon maaf pimpinan kita baru melaksanakan tugas tugas paripurna saja, hari ini paripurna ke-5. Padahal kita sudah 21 hari kita diambil sumpah dan janji dan kemarin sama kita saksikan bahwa bapak presiden kita mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja, bekerja, dan bekerja. Apa yang harus kita kerjakan kalau hingga hari ini kita belum tau kita ditempatkan dimana dan bagaimna pertanggungjawaban kita bagi rakyat kemudian sekitar satu Oktober pengambilan sumpah, saya kira gaji tunjangan kita sudah dihitung padahal karya kita belum ada. Mohon pimpinan saya kira kami menghimbau sekali lagi kita sukseskan ini dengan menyelesaikan apa yang menjadi agenda tunggal kita hari ini dan mohon kepada pimpinan kemudian untuk memimpin persidangan ini secara arif bijaksana dan pada saatnya tentu tegas adalah sikap bijaksana..."

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan gaya bahasa sindiran yaitu *apa yang harus kita kerjakan kalau hingga hari ini kita belum tau kita ditempatkan dimana dan bagaimna pertanggungjawaban kita bagi rakyat, mohon kepada pimpinan kemudian untuk memimpin persidangan ini secara arif bijaksana dan pada saatnya tentu tegas adalah sikap bijaksana*. Tuturan pertama *apa yang harus kita kerjakan kalau hingga hari ini kita belum tau kita ditempatkan dimana dan bagaimna pertanggungjawaban kita bagi rakyat*, merupakan tuturan yang diungkapkan anggota kepada seluruh anggota yang ada dalam persidangan tersebut. Anggota tersebut menyindir apa yang harus dilakukan kalau mereka belum tau dimana mereka ditempatkan, sindiran tersebut ditujukan kepada anggota khususnya anggota yang belum menyerahkan nama-nama anggota fraksi dalam alat kelengkapan dewan. Dalam sindiran tersebut juga mengandung kalimat persuasif untuk mengajak anggota yang belum melaporkan nama-nama anggota fraksi dalam AKD untuk segera menyerahkan. Sindiran selanjutnya pada kalimat *bagaimana pertanggungjawaban kita kepada rakyat*, tuturan tersebut menyiratkan bahwa fraksi yang sudah menyetorkan nama-nama anggota fraksi sudah bertanggung jawab sedangkan yang belum tidak belum bertanggung jawab kepada rakyat. Tuturan yang kedua yaitu *mohon kepada pimpinan kemudian untuk memimpin persidangan ini secara arif bijaksana dan pada saatnya tentu tegas adalah sikap bijaksana*,

dituturkan anggota kepada PS. Anggota menyindir dengan keras agar PS lebih tegas dan bijaksana dalam memimpin.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama –nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR.

Nadia (PKS): “...kita memang tidak perlu menunggu dari apakah nanti nomenfraktur kementerian akan seperti apa oleh bapak presiden kita, tetapi yang paling penting adalah pembidangan karena tugas kita sesungguhnya bukan semata-mata *chek and ballence* aja dengan kemeterian melainkan kepada sejumlah regulasi yang sudah ada termasuk UU yang sudah terbentuk apakah itu sudah komunikasi dengan baik atau tidak...”

Berdasarkan kutipan tersebut menunjukkan adanya gaya bahasa sindiran yaitu *tugas kita sesungguhnya bukan semata-mata *chek and ballence* aja dengan kemeterian melainkan kepada sejumlah regulasi yang sudah ada termasuk UU*. Tuturan tersebut dituturkan kepada anggota ditujukan kepada semua anggota khususnya anggota yang belum melaporkan nama–nama anggota fraksi dalam AKD. Anggota tersebut menyindir secara halus bahwa anggota yang belum menyetorkan nama-nama anggota fraksi dalam AKD hanya menunggu nomenfraktur kementerian terbentuk. Anggota tersebut juga mengingatkan bahwa tugas DPR RI tidak hanya *chek and ballence* terhadap kementerian. Anggota fraksi PKS ini menganggap bahwa dirinya sudah paham akan tugas DPR RI sedangkan yang belum mengumpulkan laporan belum memahami tugas DPR RI yang sebenarnya.

B. Gaya Bahasa Sinisme

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “...30 menit dengan catatan, ya dengan catatan kita hubungi dulur dulur kita, saudara-saudara kita dari 2 partai supaya sudah jadi saya (berbicara dengan sekjen) sudah ada yang, tidak apa-apa 30 menit asal jangan ngantuk kita, saya skors 30 pukul menit (mengetok palu 1 kali dan ruangan menjadi ricuh dan para anggota berkeliaran karena sidang di skors)...”

Tuturan di atas dilihat dari gaya bahasa yang berdasarkan gaya bahasa kiasan. Tuturan *asal jangan ngantukkita* yang dituturkan oleh PS merupakan gaya bahasasindiran yang termnasuk sinisme. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 22.30 lebih, sedangkan Sidang Paripurna DPR RI belum bisa dilanjutkan disebabkan ada dua partai yang belum datang. Maka PS sebelum menskors persidangan menuturkan agar para anggota dewan tidak mengantuk selama sidang diskors. Oleh sebab itu tuturan tersebut dapat dikatakan gaya bahasa sindiran tidak menuturkan langsung bahwa anggota tidak boleh tidur atau mengantuk tapi lebih menggunakan tuturan *asal jangan ngantuk kita*.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. PS (Popong): “Iya mangga tapi sambil duduk bicaranya, iya mangga mau lobi mangga tapi duduk dulu atuh. Malu dilihat ini terbuka.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan adanya gaya bahasa sindiran yaitu *malu dilihat ini terbuka*. Tuturan tersebut dituturkan oleh Popong sebagai PS. Tuturan tersebut dituturkan oleh PS karena terdapat anggota yang sedang protes di depan meja pimpinan. PS berusaha menenangkan agar anggota yang protes untuk duduk di tempat duduknya masing-masing. Namun, anggota yang protes tersebut tidak mau untuk mendengar. Tuturan *malu dilihat ini terbuka* merupakan bentuk sindiran kepada anggota yang protes, bahwa anggota yang protes dan tidak mau duduk, tidak mempunyai rasa malu. Padahal, sidang paripurna ini dilihat oleh masyarakat umum.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Anggota : “Yang depan iu duduk dulu ngerti nggak.”

PS (Popong): “Bukan, duduk dulu nanti kita bicarakan.”

Anggota : “Duduk dulu yang ngerti duduk.”

PS (Popong): “Iya mangga tapi sambil duduk bicaranya, iya mangga mau lobi mangga tapi duduk dulu atuh. Malu dilihat ini terbuka.”

Anggota : “Mantap sudah duduk kawan” (akhirnya semua duduk).

Anggota : “Kualat lo sama orang tua.”

PS (Popong): “Sudah duduk mangga. Baik maaf tadi ada kesalahan seharusnya bukan 11.30 harusnya dari 22.30 tadi sudah harus sudah waktunya habis. Nah tapi kemudian saya diberi izin untuk menskors 30 menit untuk menunggu kawan kawan kita yang belum hadir kan tadi begitu jalan keluarnya. Nah yak an seperti itu, nah kan enak bicaranya kalau seperti ini daripada ribut. Mangga ya, nah jadi dalam tata tertib ini itu a batas waktu rapat apa sidang apa itu sidang fraksi atau sidang apa 22.30 itu. Nah sekarang kan kita kan sudah lebih dari 22.30 itu sudah lebih tapi, sebentar sebentar karena tadi tidak ada yang memprotes saat saya bilang.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa sindiran mulai dari sindiran halus hingga sindiran kasar, yaitu *kualat lo sama orang tua*, *nah kan enak bicaranya kalau seperti ini daripada ribut*. Kalimat yang pertama *kualat lo sama orang tua* merupakan kalimat yang diucapkan oleh anggota dewan yang duduk di kursi dewan kepada anggota dewan yang sedang protes terhadap PS. Anggota dewan yang protes sedang meneriaki dan menunjuk PS untuk melakukan yang diinginkan anggota yang protes tersebut yaitu untuk menghentikan rapat ini dan ditunda besok pagi. Sehingga muncullah ungkapan *kualat lo sama orang tua*, perlu diketahui PS merupakan anggota DPR RI tertua. Sindiran itu ditujukan kepada anggota yang protes, karena apabila kita meneriaki bahkan menunjuk–nunjuk orang tua, maka anak yang lebih muda akan kualat.

Selanjutnya pada kalimat *nah kan enak bicaranya kalau seperti ini daripada ribut* merupakan kalimat yang diucapkan oleh PS setelah semua anggota yang protes duduk di tempat masing–masing dan rapat dilanjutkan. PS menyindir kepada anggota yang protes tersebut bahwa apabila dari tadi yang protes ini tidak rebut maka pembicaraan atau Sidang Paripurna dapat berjalan dengan baik dan komunikasi dapat berjalan dengan lancar.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripurnan DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Partai gerindra, ?perpanjang. Demokrat? Perpanjang, partai amanah nasional? Perpanjang, dengerin atuh tuh, partai kebangkitan

bangsa tidak ada. Ada tidak? Tidak ada. Partai keadilan sejahtera? Setuju. Tuh dengerin tuh, partai persatuan pembangunan? Setuju. Partai nasional Demokrat? Ada? Nasdem?”

Anggota : “Tidak setuju”

PS (Popong): “Tidak ada? Tidak setuju, biarin ini baru satu yang tidak setuju ini mah a(semua bersorak). Partai Hanura? Partai Hanura? Baik. Jadi menurut catatan yang ada pada saya apakah ini dilanjutkan apa tidak. Diperpanjang atau tidak menurut catatan pada saya adalah dilanjutkan. Nanti, nanti persoalan yang lain tu nanti. Sekarang ini hanya diperpanjang atau tidak sekarang jumlahnya sudah lebih banyak (tiba-tiba mengetok 1 kali) diperpanjang.”

Anggota : “Tidak tidak tidak.”

PS (Popong): “Baik saya lanjutkan agendanya, kalau ada yang mau nambah agenda nanti. Agendanya yang ketiga. Eh yang kedua. Agenda yang kedua adalah agenda yang kedua.”

Anggota : “Interupsi”

PS (Popong): “Apa yang harus diinterupsi, kalau sudah hanya ada menambah waktu. Nanti kalau sudah selesai.”

Anggota : “Jangan bercanda memimpin rapat ibu”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa sindiran yaitu *tuh dengerin tuh, biarin ini baru satu yang tidak setuju ini mah a, jangan bercanda memimpin rapat ibu*. Pada kalimat pertama *tuh dengerin tuh* merupakan kalimat yang diucapkan oleh PS untuk fraksi yang menyatakan tidak setuju bahwa rapat ini tidak dilanjutkan. Kalimat tersebut merupakan bentuk sindiran agar mereka yang tidak setuju mendengarkan fraksi yang setuju. Kalimat tersebut juga terkesan PS memihak kepada fraksi yang setuju. Terbukti dengan kalimat selanjutnya yaitu *biarin ini baru satu yang tidak setuju ini mah a*. Kalimat tersebut bermakna bahwa tidak masalah ada fraksi yang tidak setuju, kan baru satu yang tidak setuju. Kalimat tersebut mengandung makna sindiran kepada fraksi yang tidak setuju bahwa tidak masalah kalian para fraksi yang tidak setuju, masih banyak fraksi yang menyatakan setuju.

Selanjutnya pada kalimat *jangan bercanda ibu memimpin rapat*, kalimat tersebut menggambarkan sindiran sinisme. *Jangan bercanda ibu memimpin rapat* merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh anggota kepada PS. Tingkah laku PS

yang salah terus dalam menyebutkan hal misalnya Agendanya yang ketiga. Eh yang kedua, kemudian memakai bahasa daerah disela-sela dalam memimpin serta penunjukan sikap bahwa PS memihak pihak yang setuju dengan pernyataan-pernyataan yang sudah disebutkan sebelumnya. Perilaku PS yang seperti itu, yang membuat anggota sampai mengutarakan pernyataan jangan bercanda ibu memimpin rapat. Pernyataan tersebut mengandung sindiran yang keras kepada PS.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripurnan DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Supaya tau, kenapa itu mic mic jadi mati (pimpinan diskusi dengan salah satu anggota dewan mengenai mic) saya hanya ingin mengingatkan di dalam tata tertib anggota tidak diperkenankan naik ke pimpinan sidang. Walaupun sambil nyium Popong tetep tidak boleh begitu ya. Mangga baik baik sekarang lanjut kepada acara ke mata acara pengesahan jadwal acara terlebih dahulu yaitu sekarang paripurna yang pertama dalam masa persidangan 1 sekarang ini adalah paripurna yang kedua setelah tadi. Ini paripurna yang kedua setuju?”

Anggota : “Setuju”

PS (Popong): “Sekarang penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI ini jadwalnya seperti ini dan sudah disepakati dalam rapat konsultasi begitu.”

Anggota : “Interupsiinterupsi.”

PS (Popong): “Untuk pembentukan fraksi fraksi sayang sekali sayang sekali untuk berurutan sebentar sebentar.”

Anggota : “Pimpinan pimpinan memimpin rapat 506 orang.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat kalimat yang menunjukkan gaya bahasa personifikasi yaitu *saya hanya ingin mengingatkan di dalam tata tertib anggota tidak diperkenankan naik ke pimpinan sidang, walaupun sambil nyium Popong tetep tidak boleh begitu ya. Pimpinan pimpinan memimpin rapat 506 orang.* Kalimat pertama yaitu *saya hanya ingin mengingatkan di dalam tata tertib anggota tidak diperkenankan naik ke pimpinan sidang, walaupun sambil nyium Popong tetep tidak boleh begitu ya,* menunjukkan adanya sindiran yang dilakukan PS kepada salah satu anggota yang maju menghampiri PS. PS menyatakan di dalam tata tertib anggota tidak diperkenankan naik ke pimpinan sidang, itu merupakan sindiran PS kepada

anggota bahwa anggota yang naik ke tempat pimpinan tidak mengetahui tata tertib persidangan. Selanjutnya pernyataan *walaupun nyium Popong tetap tidak boleh*, pernyataan tersebut merupakan sindiran kepada anggota karena sebelum anggota meninggalkan meja Popong, anggota tersebut mencium Popong. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Popong sebagai PS tidak mudah disogok dan menyindir bahwa anggota tersebut gagal dalam menyogok PS.

Selanjutnya kalimat *pimpinan memimpin rapat 506 orang* merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh anggota kepada PS. Tingkah laku PS yang selalu bercanda dalam memimpin seperti ada adegan anggota mencium PS dan PS menanggapi. Hal itu membuat anggota melakukan sindiran *pimpinan memimpin rapat 506 orang*. Makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut bahwa PS memimpin 506 orang yang mempunyai pemikiran berbeda, berasal dari wilayah berbeda dan fraksi berbeda jadi jangan bervanda dalam memimpin rapat. Dengan pernyataan tersebut anggota melakukan sarkasme atau sindiran keras kepada PS untuk serius dalam memimpin rapat apalagi dengan topik bahasan memilih pimpinan DPR RI periode 2014–2019.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.
PS (Popong): “Terimakasih” (perwakilan gerindra mencium tangan Popong)
Anggota : “Hati-hati airnya tumpah buk”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat kalimat yang menunjukkan gaya bahasa sindiran yaitu *hati-hati airnya tumpah buk*. Kalimat tersebut merupakan pernyataan yang dituturkan oleh anggota kepada PS, karena salah satu anggota dari Fraksi Gerindra mencium tangan PS setelah menyerahkan laporan fraksi. Dari perbuatan yang dilakukan anggota tersebut muncullah tuturan *hati-hati airnya tumpah buk*. Tuturan tersebut untuk menyindir anggota Fraksi Gerindra bahwa tindakan mencium PS tidak lazim. Kata airnya dimaksudkan dengan air liur anggota Gerindra.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.
 Anggota : “...Yang mengganggu sidang bisa dikeluarkan ibu ketua, yang mengganggu sidang bisa dikeluarkan di Tatib itu bisa. Yang mengganggu jalannya sidang bisa dikeluarkan...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan gaya bahasa sindiran yaitu *yang mengganggu sidang bisa dikeluarkan ibu ketua*. Tuturan *yang mengganggu sidang bisa dikeluarkan*, dimaksudkan kepada anggota yang mulai maju ke meja pimpinan untuk protes. Tuturan tersebut ditujukan kepada anggota tersebut, karena yang dilakukan anggota yang protes tersebut mengganggu jalannya persidangan. Pernyataan *bisa dikeluarkan di Tatib bisa*, tuturan tersebut bermakna bahwa PS tidak tegas dan tidak mengetahui isi Tatib bahwa anggota yang mengganggu persidangan dapat dikeluarkan dalam persidangan. Selain itu juga menyindir anggota yang protes bahwa yang mengganggu jalannya persidangan dapat dikeluarkan berdasarkan Tatib dan berarti anggota yang protes tersebut tidak mengetahui Tatib persidangan. Selanjutnya tuturan *bisa dikeluarkan* merupakan suatu sindiran yang keras untuk anggota yang protes bahwa tindakan mereka salah dengan maju ke meja pimpinan dan membuat jalannya persidangan terganggu.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Duduk dulu, tidak saya minta duduk dulu. Iya duduk dulu kalau belum kalau tidak duduk sambil berdiri saya nggak akan kasih. Duduk dulu, iya.”

Anggota : “Pimpinan assalamualaikum wr.wb.”

Anggota : “Kasih tau buk anak-anaknya suruh duduk buk.”

PS (Popong): “iya jadi.”

Anggota : “Nggak ada yang bisa maksakan kehendak duduk.”

PS (Popong): “Lanjut, jadi harus dilanjutkan sampai selesai, sampai selesai, lanjut sampai selesai tolong duduk dulu.”

Anggota : “Lima menit lag waktu sidang kita sudah selesai pimpinan pasal 226 ayat 1 huruf b.”

PS (Popong): “Tolong duduk dulu, kalau tidak duduk saya tidak akan jawab. Duduk dulu, duduk dulu.”

Anggota : “Yang mengerti peraturan duduk. Duduk duduk duduk”

Tuturan pada percakapan di atas terdapat gaya bahasa Ironi atau sindiran. Gaya bahasa tersebut ditunjukkan pada dua tuturan yaitu *kasih tau buk anak-anaknya suruh duduk buk, yang mengerti peraturan duduk duduk duduk duduk*. Pada tuturan *kasih tau buk anak-anaknya suruh duduk buk* diucapkan oleh salah satu anggota DPR yang ada di kursi DPR RI dan ditunjukkan oleh PS yang dikerumuni oleh anggota DPR RI yang sedang protes. Sebenarnya terdapat sindiran dari anggota DPR RI yang mengucapkan tersebut kepada anggota DPR RI yang lagi protes yaitu PS yang sudah tua untuk menasehati anggota DPR RI tersebut yang seperti anaknya untuk duduk.

Tuturan *yang mengerti peraturan duduk duduk duduk duduk* dituturkan oleh anggota DPR yang ada di forum ditunjukkan kepada anggota DPR RI lainnya yang sedang protes mengerumuni PS. Penutur menuturkan bahwa yang mengerti aturan lebih baik duduk, itu tidak ditunjukkan oleh salah satu orang saja melainkan ditunjukkan kepada semua anggota DPR RI yang sedang protes untuk duduk. Penutur beranggapan yang protes tersebut tidak mengerti aturan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. PS (Popong): “...Bukan kami tidak menghargai berdua, malah tadi mimpinya harusnya adalah cucu saya, tapi itulah yang bisa kami lakukan untuk yang terbaik, ya dari semua yang baik. Semua baik, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa demi katanya demokrasi. Kalau demokratis itukan harus harus ikut yang banyak atuh, baik maaf saya lanjutkan dengan acara yang selanjutnya.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan gaya bahasa sindiran yaitu *bahwa demi katanya demokrasi. Kalau demokratis itukan harus harus ikut yang banyak atuh*. Tuturan tersebut dituturkan oleh PS yang ditunjukkan kepada anggota terutama anggota yang tadi sedang protes. Tuturan *Kalau demokratis itukan harus harus ikut yang banyak atuh* bermakna bahwa anggota yang protes karena persidangan tetap dilanjutkan tidak mengetahui dengan apa yang dinamakan

demokrasi dan PS menganggap PS sangat tau apa yang dimaksud dengan demokrasi. PS juga menyindir bahwa anggota yang minoritas harap mengikuti hasil yang mayoritas.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “...barangkali masih ada untuk menyampaikan mengenai fraksinyasilahkan kamimasih memberikann kesempatan. Dari PDI perjuangan, dari PKB,(anggota PKB maju) mangga”

PKB (ana maulana) :“assalammualaikum wr.wb. saya ana maulana dari partai kebangkitan bangsa pimpinan sementara yang saya hormati, bapak ibu anggota DPR RI yang kami hormati pertama-tama saya ingin dalam forum ini menyampaikan beberapa hal yaitu tadi semenjak rapat tadi di skors dari jam 22.30 mungkin sudah 99 kali mengajukan instrupsi ibu pimpinan tapi mohon maaf tapi kesempatan itu belum pernah ada.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan adanya gaya bahasa sindiran yaitu *mungkin sudah 99 kali mengajukan instrupsi ibu pimpinan tapi mohon maaf tapi kesempatan itu belum pernah ada*. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota dewan dari Fraksi PKB ditujukan kepada PS. PS sebelumnya bertutur *barangkali masih ada untuk menyampaikan mengenai fraksinya silahkandan* akhirnya Fraksi PKB diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian Ana dari Fraksi PKB menyindir PS dengan menuturkan *mungkin sudah 99 kali mengajukan interupsi ibu pimpinan tapi mohon maaf kesempatan itu belum ada*. Tuturan *sudah 99 kali* menunjukkan Ana berusaha menyindir PS bahwa Ana sudah dari tadi interupsi tetapi tidak pernah diberi kesempatan oleh PS.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Dwi (PDIP): “Pimpinan yang terhormat dibuka dulu itu, pimpinan yang terhormat bersikap adil dalam persidangan ini. Pimpinan yang terhormat dari PDIP perjuangan tolong adil dalam musyawarah ini dalam memimpin persidangan ini, tolong sekjen micnya dinyalakan.”

PS (Popong): “Tidak usah pak, tidak usah saya tadi sudah menutup 3 kali ketok palu.”

Dwi (PDIP): “ini bukan forum antara guru dan murid. Pimpinan yang terhormat batalkan ketok palunya buk. pimpinan yang terhormat ini bukan forum guru dengan murid atau nenek dengan cucunya.”

PS (Popong): “Kalau sudah ketok palu apa namanya?”

Anggota : “Ditutup.”

Dwi (PDIP): “Pimpinan yang terhormat ini.”

PS (Popong): “Baik, saya lanjutkan.”

Ike : “Ini sidang paripurna DPR bukan urusan nenek dan cucu.”

Dwi (PDIP): “Pimpinan yang terhormat ini permintaan kami resmi buka itu.”

Anggota : “Ibu ibu ibu tegas sedikit buk.”

Kutipan tersebut menggambarkan suasana yang tidak kondusif di dalam persidangan, di mana terdapat banyak interupsi dan diabaikan oleh PS. Terdapat tuturan yang menunjukkan gaya bahasa sindiran yaitu *tolong adil dalam musyawarah ini dalam memimpin persidangan ini, ini bukan forum antara guru dan murid, ini sidang paripurna DPR bukan urusan nenek dan cucu, ibu tegas sedikit buk*. Tuturan pertama dan keempat yaitu *tolong adil dalam musyawarah ini dalam memimpin persidangan ini* dan *ibu tegas sedikit buk*, merupakan tuturan yang dituturkan oleh anggota Fraksi PDIP kepada PS. Anggota menyindir PS tidak adil dalam memimpin persidangan karena ada beberapa anggota interupsi tetapi tidak diberi kesempatan. Anggota juga menyindir bahwa PS kurang tegas dalam memimpin hingga munculah tuturan *ibu tegas sedikit buk*. Menurut anggota PS tidak tegas dan saat ada anggota yang protes ke depan meja pimpinan pun PS tidak dapat menertibkan.

Selanjutnya tuturan *ini bukan forum antara guru dan murid, ini sidang paripurna DPR bukan urusan nenek dan cucu* merupakan bentuk gaya bahasa sindiran keras atau sarkasme. Dua tuturan tersebut sebenarnya memiliki makna yang sama namun dengan pernyataan yang berbeda. Guru dan murid dalam sekolahan memiliki kekuasaan dan strata yang berbeda. Guru memiliki kekuasaan dan strata yang lebih tinggi dibandingkan murid. Pernyataan tersebut dituturkan anggota untuk menyindir PS yang memimpin persidangan seakan PS sedang mengajari muridnya dan bertingka-laku seenaknya dengan menggunakan bahasa-bahasa misalnya

menggunakan bahasa daerah dan menggunakan sindiran-sindiran. Kemudian kedua dikuatkan lagi dengan tuturan ini persidangan DPR RI bukan urusan nenek dan cucu. Perlu diketahui bahwa PS adalah anggota tertua dalam DPR sedangkan wakilnya adalah anggota termuda dalam DPR. PS selalu memanggilnya dengan sebutan “cucu saya”, sehingga anggota menyindir PS untuk bersikap seperti PS bukan seperti layaknya nenek kepada cucu.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Karena fraksi sudah terbentuk, silahkan kepada yang mau menyampaikan. Ini ada, dari mana?”

Anggota : “Nenek tua.”

Berdasarkan kutipan tersebut menunjukkan adanya gaya bahasa sindiran pada tuturan *nenek tua*. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota kepada PS. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa PS adalah anggota tertua di DPR RI periode 2014–2019. Tuturan *nenek tua* bermakna bahwa PS sudah nenek tua. *Nenek tua* dalam kehidupan sehari-hari selalu ditemui bahwa nenek pasti cerewet, merasa benar, dan tidak mau kalah. Tuturan tersebut merupakan sarkasme dengan maksud bahwa PS tidak mau kalah dan bergerak seenaknya sendiri. Anggota yang menuturkan tuturan tersebut adalah anggota yang melakukan interupsi namun belum diberi kesempatan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Aria Bima PDIP: “Saya mewakili, agar tidak mengganggu, karena kita sudah tidak diberi hak untuk bicara dalam forum ini, maka bersama ini fraksi PDIP hanya ingin menginginkan bagaimana pemilihan pimpinan ini berjalan secara ligaliter, namun mengambil caracara yang tidak sesuai dengan Tatib, pimpinan tidak adil dalam memberi kesempatan kita bicara, kita tidak diberi waktu untuk kita bicara.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan adanya gaya bahasa sindiran yaitu *mengambil caracara yang tidak sesuai dengan Tatib, pimpinan tidak adil dalam memberi kesempatan kita bicara, kita tidak diberi*

waktu untuk kita bicara. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota dewan dari Fraksi PDIP yang ditujukan kepada PS dan peserta sidang. Tuturan tersebut menyindir PS karena menggunakan cara yang tidak sesuai dengan Tatib dan tidak adil dalam memberi kesempatan berpendapat untuk semua peserta sidang dan PDIP adalah salah satu yang merasakan ketidakadilan tersebut.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripurnan DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. Fauzi hardianto (Hanura) :“Pimpinan yang terhormat kami dari partai Hanura, terakhir pak terakhir. Saya fauzi hardianto dari sumsel 1. Pimpinan minta waktu 5 menit saja. Bahwa kami dari fraksi partai Hanura yang pertama tidak bertanggung jawab terhadap proses kepemimpinan, proses pemilihan pimpinan DPR RI. Kami melihat tidak ada proses demokrasi. Kami melihat tidak ada lagi aspirasi yang kami dengar. Awal yang pertama sekali kita sidang paripurna ini semua proses tidak di dengar oleh pimpinan sidang. Oleh sebab itu kami dari Fraksi Partai Hanura menyatakan diri tidak bertanggung jawab terhadap hasil-hasil dalam proses pemilihan pimpinan DPR dan kami menyatakan diri *walk out* dari sidang paripurna ini”

PS (Popong): “Silahkan pak, terimakasih.”

Fauzi (Hanura): “Semoga dosa-dosanya dimaafkan oleh allah Amin.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan sindiran yaitu *semoga dosa-dosanya dimaafkan oleh allah Amin*. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota DPR dari Fraksi Hanura. Hanura menyatakan *walk out* karena merasa tidak ada demokrasi dalam persidangan kali ini. Anggota tersebut tidak hanya menyindir PS melainkan semua anggota yang masih tinggal dalam ruangan tersebut. Anggota menyindir dengan tuturan *semoga dosa-dosanya dimaafkan oleh allah Amin*. Tuturan tersebut dimaksudkan bahwa anggota yang masih tinggal diruangan tersebut berdosa dan anggota tersebut mendoakan supaya diampuni dosa-dosanya. Anggota dari Fraksi Hanura ini menganggap dirinya tidak berdosa karena tidak mengikuti dan tidak bertanggung jawab dalam sidang paripurna tersebut.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR

Ridwan (Golkar): “Terimakasih pimpinan, assalamualaikum wr. wb.saya Ridwan dari Fraksi Partai Golongan Karya A316 dapil Sulawesi tenggara. Yang saya tau, tadi kami sudah mendengarkan bahwa sebagian teman teman sudah berperdapat, yang saya tau pula pimpinan rapat harus bisa mengendalikan rapat, mengarahkan, judul rapat kita kali ini adalah Sidang Paripurna tentang penetapan kelengkapan nama-nama fraksi. Fraksi adalah menjadi hak partai partai yang mengajukan masing-masing partai. Oleh karena itu, mungkin pak ketua sudah bisa mengambil langkah sikap yang tepat untuk hari ini. Cuma dua hal kalau boleh setelah mendengarkan syarat syarat teman-teman semua. Hal yang pertama perlu dilanjutkan atau tidak, hal kedua adalah kita lanjutkan dengan catatan bagi yang belum memasukan kita beri waktu satu atau dua hari. Supaya rapat kita tidak bertele-tele pimpinan.”

Berdasarkan kutipan tersebut menunjukkan adanya gaya bahasa sindiran yaitu *rapat kita tidak bertele-tele pimpinan*. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota Fraksi Partai Golkar ditujukan kepada pimpinan dan semua anggota yang ada dalam persidangan tersebut. Sebelum mengungkapkan pernyataan *tidak bertele-tele*, sudah menyebutkan bahwa opsi cuma ada dua yaitu lanjut atau tidak dan apabila lanjut bagaimana menyikapai fraksi yang belum melaporkan di dalam AKD. Anggota Fraksi Golkar tersebut menyindir bahwa rapat sedari tadi hanya bertele-tele dan tidak menemukan kejelasan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR.

Kardi : “...Pimpinan dan dewan yang terhormat, sebenarnya kalau kita merujuk pada paripurna yang sebelumnya kita sudah sepakat bahwa hari ini menyerahkan nama-nama untuk alat kelengkapan dewan dan saya kira kalau saja masih ada fraksi yang belum lengkap, tidak langsung menyandra fraksi yang lain yang sudah siap. Karena kalau kita berlarut larut pimpinan ini akan menunjukkan kesan negatif kepada rakyat terhadap lembaga yang kita hormati ini, bayangkan kalau kita tunda terus seolah olah kita tidak siap. Sementara presiden Jokowi sudah mengatakan kerja, kerja, dan kerja. Kenapa fraksi fraksi lain tidak siap itu justru yang harus kita pertanyakan. Padahal ini hanya penetapan nama-nama saja belum pada penetapan Pimpinan komisi dan lain lainnya...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan gaya bahasa sindiran yaitu *karena kalau kita berlarut larut pimpinan ini akan menunjukkan kesan negatif kepada rakyat terhadap lembaga yang kita hormati ini, bayangkan kalau kita tunda terus seolah olah kita tidak siap*. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota yang ditujukan kepada pimpinan dan semua anggota yang ada dalam ruang persidangan khususnya anggota fraksi yang belum melaporkan nama-nama anggota fraksi dalam AKD. Anggota tersebut menyindir bahwa yang belum melaporkan fraksinya hanya menyebabkan kesan negatif kepada DPR dan menunjukkan bahwa tidak siap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripurnan DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR

Farid: “..Sebetulnya dalam paripurna itu tidak ada debat itu menurut UU. Forum paripurna itu bukan forum debat jadi kalau kita membuka debat seperti yang disampaikan dari kawan PKB tadi kalau kita membuka debat memang tidak selesai...”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat tuturan yang menunjukkan gaya bahasa sindiran yaitu *paripurna itu bukan forum debat*. Tuturan tersebut dituturkan oleh pimpinan DPR yang ditujukan kepada semua anggota yang hadir dalam persidangan tersebut. Pimpinan DPR menyindir kepada anggota yang saling balas argumen seperti debat. Pimpinan menjelaskan bahwa Sidang Paripurna bukanlah ajang debat.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripurnan DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Kita skors begitu, beri waktu kemudian sambil ditelfon apakah mau hadir atau tidak begitukan? Itu lebih lebih adil pak karena saya juga harus mendengar lanjut karena lebih banyak yang minta lanjut tapi saya harus adil kepada yang tidak hadir.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa sindiran yaitu *beri waktu kemudian sambil ditelfon apakah mau hadir atau*

tidak?.Tuturan *apakah mau hadir atau tidak* dituturkan oleh PS yang ditujukan kepada peserta sidang paripurna. Tuturan tersebut merupakan sindiran kepada anggota dewan yang belum hadir yaitu terutama dari Fraksi PKB dan Fraksi PDIP. Tuturan tersebut menunjukkan bahwa bagi anggota dewan yang belum hadir, untuk segera mengkonfirmasi apakah mau hadir atau tidak. Kemudian, PS menyindir anggota yang belum hadir dengan tuturan selanjutnya *saya juga harus mendengar lanjut karena lebih banyak yang minta lanjut*. Tuturan tersebut dimaksudkan bahwa bagi yang belum hadir untuk segera mengkonfirmasi karena bagaimanapun banyak anggota dewan yang sudah mengatakankan untuk dilanjutkan sidang paripurnanya.

C. Gaya Bahasa Sarkasme

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Anggota : “Pimpinan mohon jangan arogan, interupsi.”

PS (Popong): “Saya akan memberikann, sebentar pak” (beberapa anggota dewan maju ke depan meja pimpinan untuk protes).

Anggota : “Jangan maju, mundur woi woi jangan mancing.”

Anggota : “Interupsi itu boleh, kita diatur mekanisme interupsi. Interupsi dan intruksi.”

Anggota : “Interupsi pimpinan interupsi berikan waktu dulu untuk interupsi, berikan kesempatan untuk interupsi pimpinan, pimpinan pimpinan berikan kesempatan untuk interupsi”

Anggota : “Silahkan mundur, mundur.”

Anggota : “Berikan kesempatan untuk interupsi pimpinan.”

PS (Popong): “Tolong duduk dulu.”

Anggota : “Saya setuju duduk duduk.”

PS (Popong): “Tolong duduk dulu.”

Anggota : “Berikan kesempatan untuk interupsi terlebih dahulu, jangan mengambil keputusan apapun.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan sindiran mulai dari sindiran secara halus sampai sindiran secara kasar yang ditujukan untuk PS maupun anggota lain. *Jangan maju, mundur woi woi jangan mancing* merupakan suatu sindiran yang dituturkan salah satu anggota kepada anggota lain yang maju ke meja pimpinan untuk protes. Kutipan tuturan tersebut menunjukkan

adanya sindiran secara kasar yang disebut sarkasme. *Mundur woi woi jangan mancing* ini merupakan bentuk frasa yang dilontarkan oleh salah satu anggota yang duduk di kursi anggota, karena merasa geram dengan tindakan rekannya yang sedang protes dan maju ke tempat PS. Frasa *jangan mancing* dimaksudkan jangan sampai tindakan anggota yang protes tersebut menimbulkan kekrisuhan dan menimbulkan emosi anggota yang lain.

Selanjutnya pada kalimat *Interupsi itu boleh, kita diatur mekanisme interupsi, berikan kesempatan untuk interupsi pimpinan, berikan kesempatan untuk interupsi pimpinan, berikan kesempatan untuk interupsi terlebih dahulu, jangan mengambil keputusan apapun*. Dari semua kalimat yang dimiringkan menunjukkan adanya sindiran, namun untuk membahas lebih detail penulis akan memaparkan satu persatu kalimat. Pertama, pada kalimat *Interupsi itu boleh, kita diatur mekanisme interupsi*, yang diutarakan oleh salah satu anggota DPR RI untuk meminta interupsi, karena menurutnya interupsi boleh dilakukan oleh setiap anggota DPR RI tanpa terkecuali. Mekanisme interupsi diatur dalam Tatib persidangan, di mana setiap anggota berhak interupsi. Kalimat tersebut menunjukkan adanya sindiran kepada PS kalau PS tidak mengetahui mekanisme interupsi dan memberitahu bahwa interupsi diperbolehkan.

Kedua, pada kalimat *berikan kesempatan untuk interupsi pimpinan, berikan kesempatan untuk interupsi pimpinan, berikan kesempatan untuk interupsi terlebih dahulu, jangan mengambil keputusan apapun* merupakan kalimat yang dilontarkan oleh salah satu anggota yang duduk di kursi anggota. Kalimat *berikan kesempatan untuk interupsi pimpinan, berikan kesempatan untuk interupsi pimpinan* diulang beberapa kali disetiap kesempatan anggota, karena PS tidak menghiraukan interupsi yang dilontarkan para anggot. PS tengah berkomunikasi dengan anggota yang protes di depan meja pimpinan. Pada saat kalimat *jangan mengambil keputusan apapun* PS sempat akan mengetok palu karena dibujuk oleh anggota dewan yang protes. Namun, anggota dewan yang duduk di kursi mengatakan *jangan mengambil keputusan*

apapun, hal ini menunjukkan adanya suatu provokasi terhadap PS dan terdapat sindiran khususnya sarkasme kepada PS agar tidak mengambil keputusan apapun sebelum adanya kesepakatan bersama.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Nasdem : “Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati pimpinan sementara DPR RI yang saya hormati para anggota dewan yang terhormat. Kami dari partai Nasdem pertama kali hadir di dewan yang terhormat ini. Kami duduk melihat senior senior partai kami membuat sebuah langkah yang menurut kami mencederai jalannya demokrasi bangsa ini. Tentunya ini menjadi pelajaran buruk buat sejarah pembangunan demokrasi Indonesia. Apa yang telah kami sampaikan tadi pagi pada Rapat Konsultasi yang sebenarnya tidak sempat ditutup sebenarnya itu. Sayalah yang bertannya bagaimana dengan pengesahan tata tertib dpr ini. Itulah yang disambut oleh pimpinan ini setelah semuanya mengatakan setuju setuju tidak diagendakan terus langsung keluar. Itu realita seperti itu, kita boleh bergerak apapun, kita boleh berbuat apapun tapi tidak boleh berbohong. Sebagai politisi dengan semangat untuk membangaun bangsa ini maka kebohongan harus dijauhkan dari diri kita sendiri. karena itu dengan cita-cita yang mulia teman-teman semua yang akan menjadi mungkin saja yang akan menjadi pimpinan lembaga ini. Ini adalah lembaga terhormat kita tentunya menempatkan orang orang terbaik kader-kader bangsa terbaik ditempat ini untuk memimpin kita.”

PS (Popong): “Bapak, maaf saya mempersilahkan untuk untuk paket”

Nasdem : “sebentar pimpinan sebentar pimpinan”

PS (Popong): “maaf pak”

Nasdem : “karena itu menurut kami sangat tidak adil dalam menjalankan tatacara Tatib seperti ini, dari pasal pasal yang kita baca bagaimana memilih manusia manusia dengan cara paket macam barang saja ini, jadi ini yang keliru.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan sindiran yaitu *tentunya ini menjadi pelajaran buruk buat sejarah pembangunan demokrasi Indonesia, Itu realita seperti itu, kita boleh bergerak apapun, kita boleh berbuat apapun tapi tidak boleh berbohong, memilih manusia manusia dengan cara paket macam barang saja ini, jadi ini yang keliru.* Tuturan pertama yaitu *tentunya ini menjadi pelajaran buruk buat sejarah pembangunan demokrasi Indonesia*, tuturan

tersebut dituturkan oleh anggota dari Fraksi Nasdem. Anggota Fraksi Nasdem menyindir kepada anggota yang masih duduk dalam ruangan tersebut bahwa yang diputuskan nanti dalam sidang Paripurna ini akan mencederai dan pelajaran buruk dalam sejarah pembangunan demokrasi Indonesia. Anggota fraksi Nasdem menganggap dengan cara *walk out* adalah cara yang benar untuk tidak ikut mencederai demokrasi.

Selanjutnya tuturan yang kedua yaitu *Itu realita seperti itu, kita boleh bergerak apapun, kita boleh berbuat apapun tapi tidak boleh berbohong*, tuturan tersebut disampaikan anggota Fraksi Nasdem kepada semua anggota DPR RI yang masih ada dalam ruangan persidangan bahwa anggota lain sedang berbohong dan Fraksi Nasdem tak terlibat di dalamnya serta tidak ikut berbohong. Tuturan tersebut bentuk sindiran secara halus yang ditujukan kepada anggota yang lain. Selanjutnya tuturan *Ini adalah lembaga terhormat kita tentunya menempatkan orang orang terbaik kader kader bangsa terbaik ditempat ini untuk memimpin kita*, Fraksi Nasdem menyindir bahwa calon-calon yang dicalonkan tidak merupakan kader terbaik. Dengan menuturkan *ini adalah lembaga terhormat kita tentunya menempatkan kader terbaik*, dimaksudkan bahwa kader-kader yang dicalonkan tidak baik dan tidak tepat. Selanjutnya tuturan *memilih manusia dengan cara paket ini keliru*, anggota Fraksi Nasdem menyindir sistem yang ada dalam persidangan bahwa memilih pimpinan tidak boleh secara paket karena seperti paket barang. Fraksi Nasdem merasa benar dengan melakukan *walk out*.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuraan DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Ansori siregar (PKS) :“Pimpinan saya saksi hidup bahwa ibu sudah menutup dan saya lebih dekat dari bapak yang baru itu, saya menyaksikan ansori siregar buk dari PKS.saya menyaksikan ibu menutup rapatkonsultasi dengan mengetok 3 kali buk, dengan mengetok tiga kali. Berarti mereka yang bohong, mereka yang bohong, mereka yang bohong”

PS (Popong): “Baik pak, terimakasih”

Anggota : “Yang bohong yang keluar dari ruangan”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa sindiran yaitu *yang berbohong yang keluar dari ruangan*. Tuturan tersebut dituturkan oleh anggota yang masih ada di dalam ruang persidangan. Tuturan tersebut ditujukan kepada anggota yang *walk out* atau keluar dari persidangan. Anggota yang di dalam ruangan membalas pernyataan dari anggota yang keluar sebelumnya dengan pernyataan *yang bohong yang keluar ruangan*, karena sebelumnya anggota yang *walk out* mengeluarkan pernyataan sindiran bahwa yang masih dalam persidangan itu berbohong. Sekarang anggota yang di dalam ruangan lempar pernyataan lagi dengan menyebutkan anggota yang keluar dari persidangan berarti anggota tersebut berbohong dan yang masih di dalam ruangan tidak berbohong. Selanjutnya Ansori juga menyindir bahwa yang menyebut bahwa Rapat Konsultasi belum ditutup itu berbohong dan ia menjadi saksi hidup. Ia menguatkan dengan pernyataan bahwa ia lebih dekat tempat duduknya dengan pimpinan dibandingkan yang *walk out*.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1–2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. Anggota : “Bisa dilakukan lobi dan konsultasi lagi, Sekjen tidak boleh ikut mempengaruhi.”

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan adanya gaya bahasa sindiran yaitu *Sekjen tidak boleh mempengaruhi*. Tuturan tersebut merupakan sindiran sarkasme yang ditujukan kepada Sekjen. Selama persidangan berlangsung PS selalu berkomunikasi dengan sekjen dan hal itu membuat anggota dewan beranggapan bahwa keputusan PS dipengaruhi oleh Sekjen. Tuturan tersebut merupakan sindiran kepada Sekjen untuk tidak ikut campur dalam keputusan PS, karena PS harus *independen* dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI

sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Benny (Demokrat): ...Pertimbangan yang pertama pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan oleh presiden RI akan mencoreng sejarah republik ini, karena untuk pertama kalinya presiden RI mengangkat seorang tersangka menjadi Kapolri (semua tepuk tangan)...

Berdasarkan kutipan tersebut terdapat gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa sindiran yaitu *presiden RI akan mencoreng sejarah republik ini, karena untuk pertama kalinya presiden RI mengangkat seorang tersangka menjadi Kapolri*. Tuturan tersebut dituturkan oleh Benny K. Harman dari Fraksi Partai Demokrat yang ditujukan kepada presiden RI. Tuturan tersebut merupakan sindiran yang secara halus, karena bahasa yang digunakan Benny K. Harman masih dalam taraf seandainya. Namun, tuturan tersebut dapat diartikan sindiran kepada Presiden RI bahwa presiden telah mencoreng sejarah RI dengan merekomendasikan pengangkatan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri. Walaupun, tuturan tersebut masih dalam taraf seandainya namun dengan pernyataan tersebut dapat membuat persepsi negatif untuk Presiden RI.

4.3 Maksud Dan Tujuan Penggunaan Diksi dan Gaya Bahasa Dengan Analisis Wacana Kritis

4.3.1 Sidang Pemilihan Pimpinan DPR

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. PS (Popong): “Partai Gerindra, ?perpanjang. Demokrat? Perpanjang, partai Amanah Nasional? Perpanjang, dengerin atuh tuh, partai kebangkitan bangsa tidak ada. Ada tidak? Tidak ada. Partai Keadilan Sejahtera? Setuju. Tuh dengerin tuh, partai persatuan pembangunan? Setuju. Partai Nasional Demokrat? Ada? Nasdem?”

Anggota : “Tidak setuju.”

PS (Popong): “Tidak ada? Tidak setuju, biarin ini baru satu yang tidak setuju ini mah a (semua bersorak). Partai Hanura? Partai Hanura? Baik. Jadi menurut catatan yang ada pada saya apakah ini dilanjutkan apa tidak. Diperpanjang atau tidak menurut catatan pada saya adalah dilanjutkan. Nanti, nanti persoalan yang lain tu nanti. Sekarang ini hanya diperpanjang atau tidak sekarang jumlahnya sudah lebih banyak.” (tiba-tiba mengetok 1 kali) diperpanjang.

PS adalah posisi yang strategis dalam hal menguasai, karena PS lah yang mengatur jalannya persidangan. PS dapat memilih mana yang dapat didahulukan dan mana yang ditinggalkan. Popong adalah PS pertama setelah DPR periode 2014–2019 terpilih. Popong merupakan anggota dewan tertua pada periode ini. Dilihat dari dialek yang dipakai saat berbicara, Popong berasal dari Jawa Barat yaitu kental dengan bahasa Sunda. Kata-kata yang sering digunakan untuk menunjukkan identitasnya adalah *mangga*, *mah a*, *atuh* dan sejenisnya. Dengan dilihat dari cara berkomunikasi saat Popong berargumentasi dapat dilihat bahwa pengetahuan mengenai politik, bagaimana berpolitik kurang. Popong hanya mengetahui mana lawan dan mana kawan.

Tabel 4.2 Tuturan Popong

Tuturan	Partai keadilan sejahtera? Setuju. <u>Tuh dengerin tuh</u> , partai persatuan pembangunan? Setuju.
Popong	Tidak ada? Tidak setuju, <u>biarin ini baru satu yang tidak setuju ini mah a</u> (semua bersorak).

Pada tuturan tersebut membuktikan, Popong secara terbuka memberi tahu kepada rakyat bahwa ia membela fraksi yang ingin lanjut. Pada saat terdapat fraksi yang mengatakan setuju, Popong langsung menuturkan *tuh dengerin tuh*. Sedangkan pada saat ada fraksi yang mengatakan tidak setuju, ia menuturkan *biarin ini baru satu yang tidak setuju ini mah a*. Berdasarkan fraksi, Popong merupakan anggota dari Fraksi Partai Golkar. Fraksi Partai Golkar merupakan fraksi yang tergabung dalam

KMP. Fraksi Partai Golkar setuju untuk Sidang Paripurna tersebut dilanjutkan. Popong merupakan anggota dari Fraksi Partai Golkar sudah pasti mengikuti sikap partainya.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PS (Popong): “Saya lanjutkan dulu, saya lanjutkan dulu mata acara yang ini. Yang ketiga eh yang keempat adalah Partai Demokrat, silahkan. Tunggu lagi bicara dulu.”

PS (Popong): “...Dengan alasan-alasan yang sangat kami mengerti oleh karenanya maka kami persilahkan kepada partai yang akan menyampaikan paket. Ah ya partai ya fraksi ah sama bae atuh.”

PS (Popong): “Kita lanjutkan karena ini mata acara sudah selesai yang menyampaikan nggak ada lagi kan? Sudah menyampaikan sesuai dengan mata acara yang ketiga. Nah karena setelah kami baca semua ternyata dari 7 pembicara itu isinya semua sama. Ada 6 yang sama 1 berbeda, maaf karena saya tidak baca, jadi sebetulnya ada 6 semuanya sama. Dengan demikian hanya ada satu paket, kalau ada satu paket apa perlu dipilih lagi?”

PS (Popong): “Baik saya lanjutkan agendanya, kalau ada yang mau nambah agenda nanti. Agendanya yang ketiga. Eh yang kedua. Agenda yang kedua adalah agenda yang kedua.”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh Popong selaku PS. Tuturan yang digaris bawahi tersebut merupakan gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa koreksi. Selain Popong tidak bisa menyembunyikan bahwa ia mendukung fraksi yang menyatakan setuju untuk dilanjut persidangannya. Namun, Popong juga tidak memiliki ketegasan dalam memimpin persidangan. Dilihat dari berbagai kesalahan pengucapan dan menambahinya dengan bahasa Sunda dengan nada bercanda apabila ada kesalahan. Berdasarkan Tatib mengenai tata cara pemilihan Pimpinan DPR pada pasal 28 poin 2 dan 3 menyebutkan bahwa: (2) Pimpinan Sementara DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari Anggota yang tertua dan termuda dari Fraksi yang berbeda; (3) Pimpinan Sementara DPR bertugas memimpin Sidang Paripurna DPR pertama kali untuk memilih pimpinan DPR. Dengan adanya Tatib yang demikian, akan

memberikann kesempatan emas untuk Fraksi Partai Golkar, karena kader tertua yang ada di DPR periode 2014–2019 adalah dari fraksi Partai Golkar. Sehingga fraksi-fraksi yang lain yang tergabung dalam KMP akan memiliki kekuatan lebih untuk melakukan lobi politik dengan fraksi-fraksi yang lain guna memperkuat posisi dan kekuasaan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PKB (Abdul Kadir): “Ibu tolong didengarkan assalamualaikum wr.wb. tadi pada forum lobi kami dari PKB meminta dengan hormat kepada seluruh fraksi, agar ini dapat ditunda sampai jam 10 pagi ini dengan banyak pertimbangan saya kira (sebagian menyuarakan kata lanjut) dengarkan saya kira keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah lebih elegan, keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah mencerminkan DPR yang bermartabat, keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah menunjukkan bahwa DPR ini punya marwah di depan rakyat kita.”

PS (Popong) : “maaf bapak”

PKB (Abdul Kadir) : “Sebentar sebentar ibu saya punya hak bicara tolong saya diberi kesempatan saya anggota DPR no. 55 oleh karena itu alangkah baiknya teman-teman yang tidak bersepakat, teman-teman yang tidak bersepakat diberi ruang bicara untuk menanggapi hasil lobi yang ada. Terimakasih wassalamualaikum wr.wb.”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh anggota dewan dari Fraksi PKB. Tema yang disampaikan Abdul Kadir adalah keinginannya selaku perwakilan dari Fraksi PKB, ingin Sidang Paripurna tersebut ditunda sampai keesokan harinya. Dalam penyampaian pendapat Abdul Kadir, dapat diungkap maksud dan tujuan Fraksi PKB dilihat dari berbagai elemen. Salah satunya dilihat dari elemen kata ganti yang digunakan yaitu *kita*. Elemen kata ganti digunakan untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Pemakaian kata ganti jamak *kami/kita* mempunyai implikasi menumbuhkan solidaritas, aliansi, perhatian publik, dan menghilangkan kritik oposisi. Pemakaian kata ganti *kita* menciptakan komunitas antara anggota dewan tersebut dengan pendengar. Apa yang

menjadi sikap anggota dewan tersebut seolah-olah juga menjadi sikap anggota. Padahal ada kemungkinan tidak semua anggota atau pendengar memiliki pendapat atau sikap seperti yang ditujukan kepada anggota dewan tersebut. Pemakaian kata ganti *kita* menciptakan perasaan bersama antara anggota dewan dan pendengar serta menunjukkan tidak adanya batas antara anggota dewan dengan pendengar.

Tabel 4.3 Elemen Kata Ganti (1)

Kata ganti “kita”	<p>Keputusan-keputusan yang <i>kita</i> ambil haruslah lebih elegan.</p> <p>Keputusan-keputusan yang <i>kita</i> ambil haruslah mencerminkan DPR yang bermartabat.</p> <p>Keputusan-keputusan yang <i>kita</i> ambil haruslah menunjukkan bahwa DPR ini punya marwah di depan rakyat <i>kita</i>.</p>
-------------------	---

Gaya bahasa yang dipakai lebih mengarahkan pada gaya bahasa eufimisme, dimana Abdul Kadir dari Fraksi PKB menggunakan ungkapan yang lembut dan samar untuk mempertahankan kepentingannya dan mempengaruhi anggota DPR yang lain untuk mendukung dirinya.

Dilihat dari tata bahasa dan kohesi, perbendaharaan kata yang dipakai dan pemaknaan kata cenderung memberi gambaran Fraksi PKB tidak memihak rakyat, tetapi memihak DPR RI agar dipandang baik dan bermartabat oleh rakyat. Hampir tidak ada diskripsi mengenai akibat yang akan terjadi untuk rakyat apabila keputusan-keputusan itu diambil secara tergesa-gesa. Jadi dapat disimpulkan bahwa Fraksi PKB memihak pada DPR RI agar DPR dianggap elegan, bermartabat, dan memiliki marwah di depan rakyat. Kemudian dilihat dari struktur pemerintahan dan koalisi, Fraksi PKB merupakan fraksi yang bukan Koalisi Merah Putih (seterusnya disingkat KMP). Secara historis KMP yang beranggotakan Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, dan Gerindra telah mengusung Prabowo sebagai Presiden RI. Ternyata hasil pemilihan umum Prabowo gagal sebagai presiden dan KMP sudah memiliki hasil paket Pimpinan DPR pada malam itu, sehingga Fraksi PKB yang tidak termasuk

KMP merasa harus menunda persidangan hingga keesokan harinya, agar fraksinya dapat melakukan lobi politik. Oleh sebab itu Fraksi PKB menuturkan *teman-teman yang tidak bersepakat diberi ruang bicara untuk menanggapi hasil lobi*, Fraksi PKB berusaha untuk menunda pemilihan pimpinan DPR RI. Kemudian menggunakan tuturan *Keputusan-keputusan DPR RI yang kita ambil haruslah lebih elegan, mencerminkan DPR yang bermartabat, menunjukkan bahwa DPR ini punya marwah di depan rakyat kita* untuk alasan bahwa DPR seharusnya tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa dengan menjadikan alasan seperti ini Fraksi PKB akan dilihat oleh rakyat bahwa ia mendukung rakyat.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripurnan DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019. PKB : “Adanya kediktatoran mayoritas kepada hasil-hasil sidang dengan ini partai kebangkitan bangsa menyatakan sikap untuk melakukan *walk out* dan tidak bertanggung jawab atas seluruh hasil paripurna yang sangat tidak adil. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih wassalamualaikum wr.wb. PKB dengan ini menyatakan *walk out*.”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh Fraksi PKB. Dari awal Sidang Paripurna ini dimulai, tepatnya setelah Rapat Konsultasi. Kondisi ruang persidangan sudah tidak kondusif. Banyak interupsi berdatangan, hal ini disebabkan oleh PS yang kurang tegas dalam memimpin dan tidak siapnya beberapa fraksi dalam penyampaian materi paket calon. Kesimpulan bahwa PS kurang tegas sudah dijelaskan pada analisis sebelumnya yaitu PS kurang pengetahuan terhadap politik dan lebih menggunakan kosa kata yang memancing peserta sidang untuk adu pendapat. Kemudian kesimpulan kedua, permasalahan bahwa ada beberapa fraksi yang kurang siap dalam penyampaian paket calon, salah satunya adalah Fraksi PKB. Fraksi PKB yang berusaha untuk menyampaikan pendapat bahwa Sidang Paripurna ini harus ditunda sampai keesokan harinya tidak didengar. Sehingga muncul diksi *kediktatoran mayoritas* dan *walk out* dari pernyataan PKB. PKB menganggap bahwa pada Sidang Paripurna tersebut tidak berjalan adil dan terdapat kediktatoran dalam memimpin sidang. Dengan demikian jalan keluar menurut Fraksi PKB benar adalah

dengan *walk out*. Tindakan *walk out* ini merupakan suatu bentuk pencitraan baik di mata masyarakat terhadap Fraksi PKB. Masyarakat akan berpikir bahwa fraksi yang masih dalam forum tersebut dengan suasana gaduh dan tidak adil merupakan fraksi yang hanya mementingkan kepentingan fraksinya saja. Sedangkan Fraksi PKB yang melakukan *walk out*, merupakan fraksi yang tidak seperti itu. Namun, sebenarnya di setiap tindakan politik dari setiap fraksi lakukan memiliki maksud tersendiri, dapat dilihat secara implisit.

Tabel 4.4 Elemen Maksud

Eksplisit	Adanya kediktatoran mayoritas kepada hasil-hasil sidang dengan ini PKB menyatakan sikap untuk melakukan <i>walk out</i> dan tidak bertanggung jawab atas seluruh hasil paripurna yang sangat tidak adil.
Implisit	Adanya kediktatoran mayoritas kepada hasil-hasil sidang dengan ini PKB menyatakan sikap untuk melakukan <i>walk out</i> dan tidak bertanggung jawab atas seluruh hasil paripurna yang sangat tidak adil. Sikap <i>walk out</i> merupakan salah satu cara untuk menghindar dan tidak ada kesiapan nama paket calon pimpinan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Aria Bima PDIP: “Saya mewakili, agar tidak mengganggu, karena kita sudah tidak diberi hak untuk bicara dalam forum ini, maka bersama ini fraksi PDIP hanya ingin menginginkan bagaimana pemilihan pimpinan ini berjalan secara ligaliter, namun mengambil cara-cara yang tidak sesuai dengan Tatib, pimpinan tidak adil dalam memberi kesempatan kita bicara, kita tidak diberi waktu untuk kita bicara.”

Aria Bima (PDIP): “Bukan suasana yang seperti ini yang kita inginkan, apakah suasana yang seperti ini yang kita inginkan, kita cerminkan kepada lembaga tinggi negara kita.”

PAN : “Berkenaan dengan surat saudara”

Aria Bima (PDIP): “Apakah ini sumpah jabatan yang kita bicarakan, apakah seperti ini yang kita inginkan.”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh Aria Bima anggota dewan dari Fraksi PDIP. Tema yang ingin disampaikan Fraksi PDIP yaitu suasana Sidang Paripurna yang sudah tidak benar. Dalam penyampaian pendapat Aria Bima, dapat diungkap maksud dan tujuan Fraksi PDIP dilihat dari berbagai elemen. Salah satunya dilihat dari elemen kata ganti yang digunakan yaitu *kita*. Elemen kata ganti digunakan untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Pemakaian kata ganti jamak *kami/kita* mempunyai implikasi menumbuhkan solidaritas, aliansi, perhatian publik, dan menghilangkan kritik oposisi. Pemakaian kata ganti *kita* menciptakan komunitas antara anggota dewan tersebut dengan peserta sidang. Apa yang menjadi sikap anggota dewan tersebut seolah-olah juga menjadi sikap semua peserta sidang. Padahal ada kemungkinan tidak semua peserta sidang memiliki pendapat atau sikap seperti yang ditujukan kepada anggota dewan tersebut. Pemakaian kata ganti *kita* menciptakan perasaan bersama antara anggota dewan dan pendengar serta menunjukkan tidak adanya batas antara anggota dewan dengan pendengar.

Tabel 4.5 Elemen Kata Ganti (2)

Kata Ganti “Kita”	<p><i>Kita</i> sudah tidak diberi hak untuk bicara.</p> <p>Pimpinan tidak adil dalam memberi kesempatan <i>kita</i> bicara.</p> <p><i>Kita</i> tidak diberi waktu untuk <i>kita</i> bicara.</p> <p>Bukan suasana yang seperti ini yang <i>kita</i> inginkan.</p> <p>Apakah suasana yang seperti ini yang <i>kita</i> inginkan, <i>kita</i> cerminkan.</p> <p>Apakah ini sumpah jabatan yang <i>kita</i> bicarakan.</p> <p>Apakah seperti ini yang <i>kita</i> inginkan.</p>
-------------------	---

Di dalam wacana tersebut terdapat elemen pengingkaran yaitu di awal kalimat Fraksi PDIP berusaha meyakinkan rakyat bahwa Fraksi PDIP menginginkan Sidang Paripurna ini berjalan secara adil dan legaliter. Kemudian di akhir kalimat,

Aria Bima menuturkan *namun mengambil cara-cara yang tidak sesuai dengan Tatib, pimpinan tidak adil dalam memberi kesempatan kita bicara*. Kata *namun* sebagai perlawanan dari kalimat sebelumnya. Maksud dari pengingkaran tersebut adalah yang ingin disampaikan bahwa Sidang Paripurna saat itu tidak berjalan secara adil dan legaliter. Fraksi PDIP juga melakukan pencitraan baik terhadap dirinya, bahwa Fraksi PDIP menginginkan forum Sidang Paripurna yang adil. Hal ini, dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan pendukung yaitu *bukan suasana yang seperti ini yang kita inginkan, apakah ini sumpah jabatan yang kita bicarakan, apakah seperti ini yang kita inginkan*. Pernyataan pendukung tersebut akan memperkuat posisi Fraksi PDIP di mata rakyat, bahwa Fraksi PDIP adalah wakil rakyat yang sangat mementingkan kepentingan rakyat. Fraksi PDIP menggunakan strategi komunikasi dengan menyampaikan pesan politik tersebut. Namun, apabila dilihat dari praktik kekuasaan pada Sidang Paripurna tersebut, Fraksi PDIP kekurangan suara pendukung dari fraksi-fraksi. Fraksi PDIP yang tergabung dalam KIH, sedangkan posisi KIH pada Sidang Paripurna saat itu sedang terancam kalah. Pada Sidang Paripurna tersebut praktik kekuasaan tertinggi pada saat itu adalah KMP. Posisi kekuasaan tersebut yang sebenarnya menjadi dasar kenapa Fraksi PDIP dengan terang-terangan mengkritik bahwa Sidang Paripurna tersebut tidak berjalan secara adil dan legaliter.

Fraksi PDIP merupakan fraksi yang memiliki jumlah kursi terbanyak dalam DPR. Namun, hal tersebut tidak memberikann pengaruh pada saat pemilihan pimpinan DPR. Berdasarkan Tatib bagian kedua pimpinan paragraf 1 tata cara pemilihan pimpinan pada Pasal 28 disebutkan bahwa *calon ketua dan wakil ketua DPR diusulkan oleh Fraksi kepada pimpinan sementara DPR secara tertulis dalam satu paket calon pimpinan DPR yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua DPR dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan DPR dalam Sidang Paripurna DPR*. Dengan demikian Fraksi PDIP seharusnya dapat mengusulkan satu paket calon pimpinan DPR, karena kemungkinan besar Fraksi PDIP dapat menduduki kursi pimpinan DPR dengan

jumlah kursi anggota terbanyak dalam DPR dari kader Fraksi PDIP. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Fraksi PDIP yang tergabung dalam KIH pada Sidang Paripurna tersebut tidak memiliki kekuatan kekuasaan yang tinggi. Jadi, dengan pernyataan *bukan suasana yang seperti ini yang kita inginkan, apakah ini sumpah jabatan yang kita bicarakan, apakah seperti ini yang kita inginkan* bukan merupakan sikap Fraksi PDIP yang benar-benar mementingkan rakyat. Namun, karena adanya maksud tersendiri untuk kepentingan Fraksi PDIP. Setiap wacana politik yang disampaikan anggota dewan tidak semua memiliki maksud dan tujuan yang seperti di lihat dari wacana secara teks saja. Namun, konteks kekuasaan yang dimiliki anggota dewan dapat mempengaruhi pesan politik apa yang disampaikan oleh anggota dewan tersebut.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Fausi Hardianto (Hanura): “Pimpinan yang terhormat kami dari partai Hanura, terakhir pak terakhir. Saya fausi hardianto dari sumsel 1. Pimpinan minta waktu 5 menit saja. Bahwa kami dari fraksi partai Hanura yang pertama tidak bertanggung jawab terhadap proses pemilihan, proses pemilihan pimpinan DPR RI. Kami melihat tidak ada proses demokrasi. Kami melihat tidak ada lagi aspirasi yang kami dengar. Awal yang pertama sekali kita sidang paripurna ini semua proses tidak di dengar oleh pimpinan sidang. Oleh sebab itu kami dari Fraksi Partai Hanura menyatakan diri tidak bertanggung jawab terhadap hasil-hasil dalam proses pemilihan pimpinan DPR dan kami menyatakan diri *walk out* dari sidang paripurna ini”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh Fausi Hardianto dari Fraksi Partai Hanura. Tema yang ingin disampaikan oleh Fausi sebagai wakil Fraksi Partai Hanura adalah pernyataan *walk out* karena menurut Fraksi Partai Hanura Sidang Paripurna pada saat itu tidak berjalan adil. Dalam penyampaian pendapat Fausi, dapat diungkap maksud dan tujuan Fraksi Partai Hanura dilihat dari berbagai elemen. Salah satunya dilihat dari elemen kata ganti yang digunakan yaitu *kami*. Elemen kata ganti digunakan untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan

suatu komunitas imajinatif. Pemakaian kata ganti jamak *kami/kita* mempunyai implikasi menumbuhkan solidaritas, aliansi, perhatian publik, dan menghilangkan kritik oposisi. Selain itu, kata ganti *kami* juga menciptakan jarak dan memisahkan antara pihak *kami* dan mereka. Pihak *kami* dimaksudkan untuk pihak yang bersependapat, sedangkan pihak *mereka* dimaksudkan untuk pihak yang tidak bersependapat. Kata *kami* dimaksudkan untuk fraksi-fraksi yang melakukan *walk out*, sedangkan kata *mereka* dimaksudkan untuk fraksi-fraksi yang masih terdapat dalam forum Sidang Paripurna tersebut.

Tabel 4.6 Elemen Kata Ganti (3)

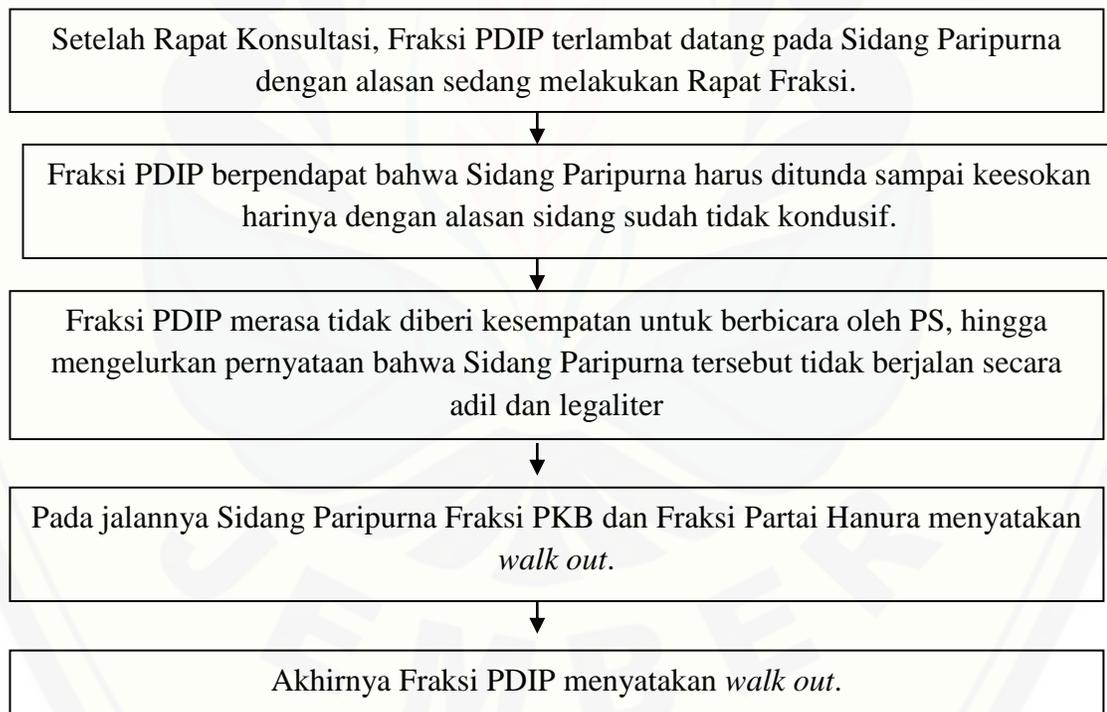
Kata Ganti “Kami”	<p><i>Kami</i> melihat tidak ada proses demokrasi.</p> <p><i>Kami</i> melihat tidak ada lagi aspirasi yang kami dengar.</p>
-------------------	---

Pemakaian kata ganti *kami* dapat dimaksudkan juga bahwa *kami* benar sedangkan mereka *salah*. Fraksi Partai Hanura beranggapan bahwa tindakan politik yaitu *walk out* adalah tindakan yang benar. Tindakan tersebut benar karena Fraksi Partai Hanura tidak terlibat dalam forum Sidang Paripurna yang dianggapnya tidak ada proses demokrasi. Hal itu dapat membuat citra positif terhadap Fraksi Partai Hanura karena fraksi tersebut tidak merupakan bagian dari fraksi-fraksi yang masih bertahan dalam sidang tersebut. Namun, apabila dilihat dari praktik kekuasaan pada Sidang Paripurna tersebut, Fraksi Partai Hanura yang merupakan fraksi junior belum punya kekuasaan tinggi. Jumlah kursi yang dimiliki Fraksi partai Hanura sekitar 16 kursi. Ditambah Fraksi Partai Hanura tidak masuk dalam KMP. Dimana, pada Sidang Paripurna saat itu praktik kekuasaan tertinggi terdapat pada KMP. Hingga jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri dan tetap mendapatkan pencitraan positif di mata rakyat. Fraksi Partai Hanura memanfaatkan situasi Sidang Paripurna yang lagi kacau tersebut dan menyatakan *walk out*.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

PDIP: “Pimpinan, bapak ibu sekalian yang saya hormati mencermati dinamika gelagat dan perkembangan yang ibu pimpin mulai rapat konsultasi tadi tentunya Fraksi PDIP yang merupakan dari partai kita ingin menjunjung kedaulatan rakyat tanpa mengurangi rasa hormat masing masing fraksi punya pertimbangan punya sikap politik oleh karena itu izinkan dari PDIP untuk tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan pada malam ini.”

Kutipan tersebut dituturkan oleh anggota dewan dari Fraksi PDIP. Tema yang disampaikan perwakilan dari Fraksi PDIP adalah sikap politik untuk menyatakan *walk out*. Pernyataan *walk out* dari fraksi-fraksi tertentu terus berdatangan. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah fraksi-fraksi yang menyatakan *walk out*, cari aman atau ada strategi politik dibalik semua itu. Apabila dirunut dari Gambar atau alur pendapat Fraksi PDIP dan situasi politik pada Sidang Paripurna dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.4 Alur Pendapat Fraksi PDIP dan Situasi Politik

Berdasarkan alur atau Gambar pendapat Fraksi PDIP dan situasi politik tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Fraksi PDIP masih menunggu adanya

suara untuk Fraksi PDIP dari fraksi yang lain. Fraksi PDIP memiliki jumlah kursi anggota sekitar 109 kursi. Fraksi PDIP memiliki kursi terbanyak pada DPR RI periode ini. Namun, pada Sidang Paripurna tersebut Fraksi PDIP kekurangan suara dari fraksi-fraksi yang lain. Fraksi PDIP sebenarnya masih menunggu fraksi-fraksi yang masih bimbang untuk masuk ke dalam koalisi misalnya PPP. Namun, karena Fraksi PPP ternyata sudah maju untuk menyampaikan nama paket calon pimpinan DPR dan tergabung dalam KMP. Maka Fraksi PDIP sudah tidak ada harapan untuk memenangkan kursi pimpinan. Selain itu, Fraksi Partai Hanura dan Fraksi PKB yang sejak awal sependapat dengan Fraksi PDIP sudah melakukan *walk out* sebelumnya. Jadi, Fraksi PDIP meskipun bertahan dalam sidang tersebut sudah tidak mungkin mendapatkan kursi pimpinan. Hal ini dapat dilihat dari nama-nama paket calon yang merupakan gabungan dari lima fraksi yang berkoalisi yaitu terdapat Fraksi Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS. Sedangkan anggota Fraksi PPP tidak masuk dalam jajaran pimpinan karena hanya lima kursi pimpinan yang dibutuhkan dan Fraksi PPP tidak memiliki kekuasaan yang terlalu tinggi dalam DPR RI. Fraksi PPP hanya ikut dalam KMP dan lobi-lobi politik yang dilakukan KMP dapat diterima oleh PPP. Jadi suatu pernyataan yang ada pada ranah politik, tidak selamanya memiliki maksud yang sama dengan wacana yang dituturkan, karena dalam ranah politik suatu partai memiliki strategi komunikasi yang berbeda. Strategi komunikasi yang dapat dilihat dari wacana Fraksi PDIP adalah Fraksi PDIP mengambil hati rakyat dengan memberi pernyataan bahwa Fraksi PDIP menjunjung kedaulatan rakyat dan bukan merupakan fraksi yang mementingkan kepentingan fraksi saja. Sehingga pada Sidang Paripurna Fraksi PDIP dengan tegas menyatakan keluar dari sidang dan dengan terang-terangan mengkritik jalannya sidang. Padahal ada maksud dibalik wacana tersebut, itulah strategi politik yang terjadi di Indonesia.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Nasdem: “Kami dari partai Nasdem pertama kali hadir di dewan yang terhormat ini. Kami duduk melihat senior senior partai kami membuat sebuah langkah yang menurut kami mencederai jalannya demokrasi bangsa ini. Tentunya ini menjadi pelajaran buruk buat sejarah pembangunan demokrasi Indonesia. Apa yang telah kami sampaikan tadi pagi pada rapat konsultasi yang sebenarnya tidak sempat ditutup sebenarnya itu. Sayalah yang bertannya bagaimana dengan pengesahan tatatertib DPR ini. Itulah yang disambut oleh pimpinan ini setelah semuanya mengatakan setuju setuju tidak diagendakan terus langsung keluar. Itu realita seperti itu, kita boleh bergerak apapun, kita boleh berbuat apapun tapi tidak boleh berbohong. Sebagai politisi dengan semangat untuk membangaun bangsa ini maka kebohongan harus dijauhkan dari diri kita sendiri. karena itu dengan cita-cita yang mulia teman-teman semua yang akan menjadi mungkin saja yang akan menjadi pimpinan lembaga ini. Ini adalah lembaga terhormat kita tentunya menempatkan orang orang terbaik kader kader bangsa terbaik ditempat ini untuk memimpin kita.”

Nasdem : “Karena itu menurut kami sangat tidak adil dalam menjalankan tatacara Tatib seperti ini, dari pasal pasal yang kita baca bagaimana memilih manusia manusia dengan cara paket macam barang saja ini, jadi ini yang keliru.”

(Anggota berteriak turun turun turun)

Nasdem : “Dan karena itu, Partai Nasdem melihat.”

PS (Popong): “Tapi pak pak pak.”

Nasdem : “Adanya cacat dalam pengurusan prosedural mengurus Tatib ini, oleh karena itu dari Fraksi Partai Nasdem, sebagai ketua Fraksi Partai Nasdem sangat terharu dengan kondisi demokrasi bangsa hari ini.”

Nasdem :” untuk itu kami akan keluar dari rapat ini.”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh anggota dewan dari Fraksi Nasdem. Tema yang disampaikan perwakilan dari Fraksi Partai Nasdem adalah pernyataan walk out karena Sidang Paripurna tersebut sudah tidak adil. Fraksi Partai Nasdem merupakan partai baru dalam dunia politik. Maka dalam pernyataannya tersebut Fraksi Partai Nasdem menyebut senior dan junior. Dengan semua yang disampaikan Fraksi Partai Nasdem adalah suatu bentuk strategi politik. Fraksi Partai Nasdem yang dianggap masih junior menuturkan *kami duduk melihat senior senior partai kami membuat sebuah langkah yang menurut kami mencederai jalannya demokrasi bangsa ini*. Pernyataan tersebut merupakan pesan politik yang disampaikan kepada rakyat bahwa Nasdem yang masih junior dan belum mengetahui banyak mengenai politik Indonesia dan beranggapan bahwa senior-senior yang sudah

banyak pengalaman mencederai jalannya demokrasi Indonesia. Pesan politik tersebut digunakan untuk mendapatkan pencitraan positif dari rakyat terhadap Fraksi Partai Nasdem. Dilihat dari praktik kekuasaannya, Fraksi Partai Nasdem tidak memiliki kekuasaan yang tinggi. Fraksi Partai Nasdem hanya memiliki 35 kursi dalam DPR. Fraksi Partai Nasdem tidak tergabung dalam KMP. Jadi sudah melihat Fraksi PKB, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi PDIP *walk out*. Akhirnya Fraksi Partai Nasdem mengambil langkah politik untuk melakukan *walk out* juga, karena fraksi yang masih bertahan dalam ruangan tersebut sudah memiliki satu paket calon yang sama. Alasan keempat fraksi yang *walk out* sama yaitu sudah tidak adanya keadilan dan demokrasi dalam sidang tersebut. Dengan mengatasnamakan keadilan dan kedaulatan rakyat keempat fraksi tersebut salah satunya Fraksi Partai Nasdem melakukan sikap politik yaitu *walk out*.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014–2019, pada tanggal 1-2 Oktober 2014 di Gedung DPR, pada pukul 22.30–selesai, dihadiri oleh anggota DPR RI periode 2014–2019.

Ansori siregar (PKS): “Pimpinan saya saksi hidup bahwa ibu sudah menutup dan saya lebih dekat dari bapak yang baru itu, saya menyaksikan Ansori Siregar buk dari PKS. Saya menyaksikan ibu menutup rapat konsultasi dengan mengetok 3 kali buk, dengan mengetok tiga kali. Berarti mereka yang bohong, mereka yang bohong, mereka yang bohong.”

PS (Popong): “Baik pak, terimakasih”

Anggota : “Yang bohong yang keluar dari ruangan”

Selama persidangan berlangsung Fraksi Demokrat, Golkar, PAN, PKS, PKB, dan PPP tidak terlalu mengeluarkan pendapat guna menanggapi pendapat-pendapat yang menjatuhkan dari Fraksi PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem. Walaupun ada pernyataan perlawanan atau menyanggah pendapat dari fraksi yang tergabung dalam KIH tersebut, namun hanya sekedar pernyataan biasa tidak ada wacana-wacana yang menyudutkan koalisi lawan. Fraksi yang tergabung dalam KMP tersebut, hanya mengeluarkan pernyataan *setuju* secara bersama-sama ketika PS memberi pilihan untuk melanjutkan persidangan tersebut. Selain itu, terdapat juga pernyataan sindiran seperti yang dituturkan oleh anggota dari Fraksi PKS *saya menyaksikan ibu menutup*

rapat konsultasi dengan mengetok 3 kali buk, dengan mengetok tiga kali. Berarti mereka yang bohong, mereka yang bohong, mereka yang bohong. Tuturan tersebut merupakan tuturan untuk membalas sindiran yang dilakukan oleh Fraksi Partai Nasdem. Sebelumnya Fraksi Partai Nasdem menuturkan bahwa yang ada di dalam ruangan persidangan adalah bohong. Kemudian pernyataan tersebut dibalas oleh Fraksi PKS dengan tuturan *saya menyaksikan ibu menutup rapat konsultasi dengan mengetok 3 kali Buk, dengan mengetok tiga kali. Berarti mereka yang bohong, mereka yang bohong, mereka yang bohong.* Tindakan untuk perlawanan politik yang dilakukan oleh KMP hanya sebatas perlawanan ringan saja, tidak ada wacan-wacana penentang dari wacana atau pesan politik yang disampaikan oleh KIH. Sikap politik yang seperti ini, dapat menimbulkan berbagai pertanyaan, kenapa fraksi yang tergabung dalam KMP memilih untuk tidak terlalu untuk melakukan perlawanan. Bukan berarti fraksi yang tergabung dalam KMP berlapang dada dengan sindiran-sindiran yang dilakukan oleh fraksi dari KIH. Pasti terdapat maksud dan tujuan tertentu dari sikap politik yang demikian.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa KMP merupakan koalisi yang memiliki kekuasaan tertinggi pada Sidang Paripurna tersebut. Berdasarkan Tata cara pemilihan Pimpinan DPR RI pasal 28 poin d dan e menyebutkan bahwa (d) paket calon pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR; (e) dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tercapai, paket calon pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara. Fraksi yang tergabung dalam KMP mengusung satu paket calon yang sama yaitu terdiri atas H. Setya Novanto, S.E.. Dari Fraksi Partai Golkar, wakil ketua: Fadli Zon, S.S., M.Sc.dari Fraksi Partai Gerindra, wakil ketua: Dr. Agus Hermantodari Fraksi Partai Demokrat, Wakil ketua: Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M. dari Fraksi PAN, wakil ketua: Fahri Hamzah, S.E.dari Fraksi PKS. Dari paket calon yang sama, kelima fraksi yang tergabung dalam calon Pimpinan DPR tersebut sudah pasti mendukung paket calon tersebut. Ditambah dengan Fraksi PPP yang mendukung paket calon tersebut. Dengan mutlak paket calon yang diusung oleh enam

fraksi akan menjadi Pimpinan DPR RI pada periode 2014-2019. Maka, keenam fraksi yang tergabung dalam KMP, memilih tidak mengambil tindakan yang merugikan dirinya. KMP lebih memilih untuk diam dan bersikap biasa dalam menanggapi pendapat-pendapat yang memojokan dan menjatuhkan dirinya. Hal tersebut dikarenakan KMP dengan memiliki koalisi enam fraksi akan pasti menang dalam pemilihan pimpinan DPR tersebut. Walaupun nantinya keempat fraksi tersebut tidak *walk out* hingga dilangsungkan pemungutan suara, paket calon yang diusung oleh keenam fraksi tersebut tetap menang. Berikut jumlah suara yang dimungkinkan akan diperoleh oleh KMP dan KIH.

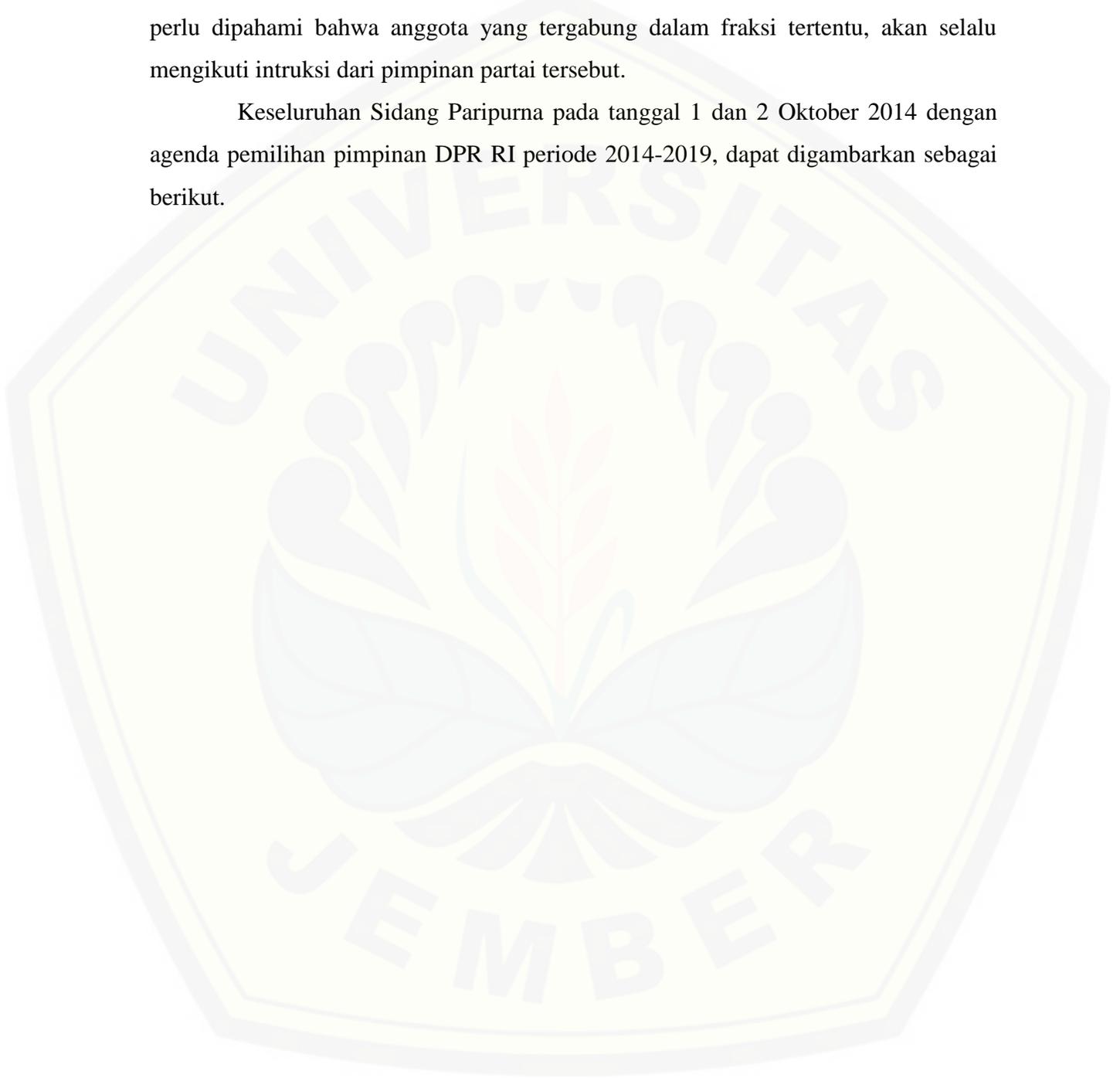
Tabel 4.7 Kemungkinan Perolehan Suara Pemilihan Pimpinan DPR

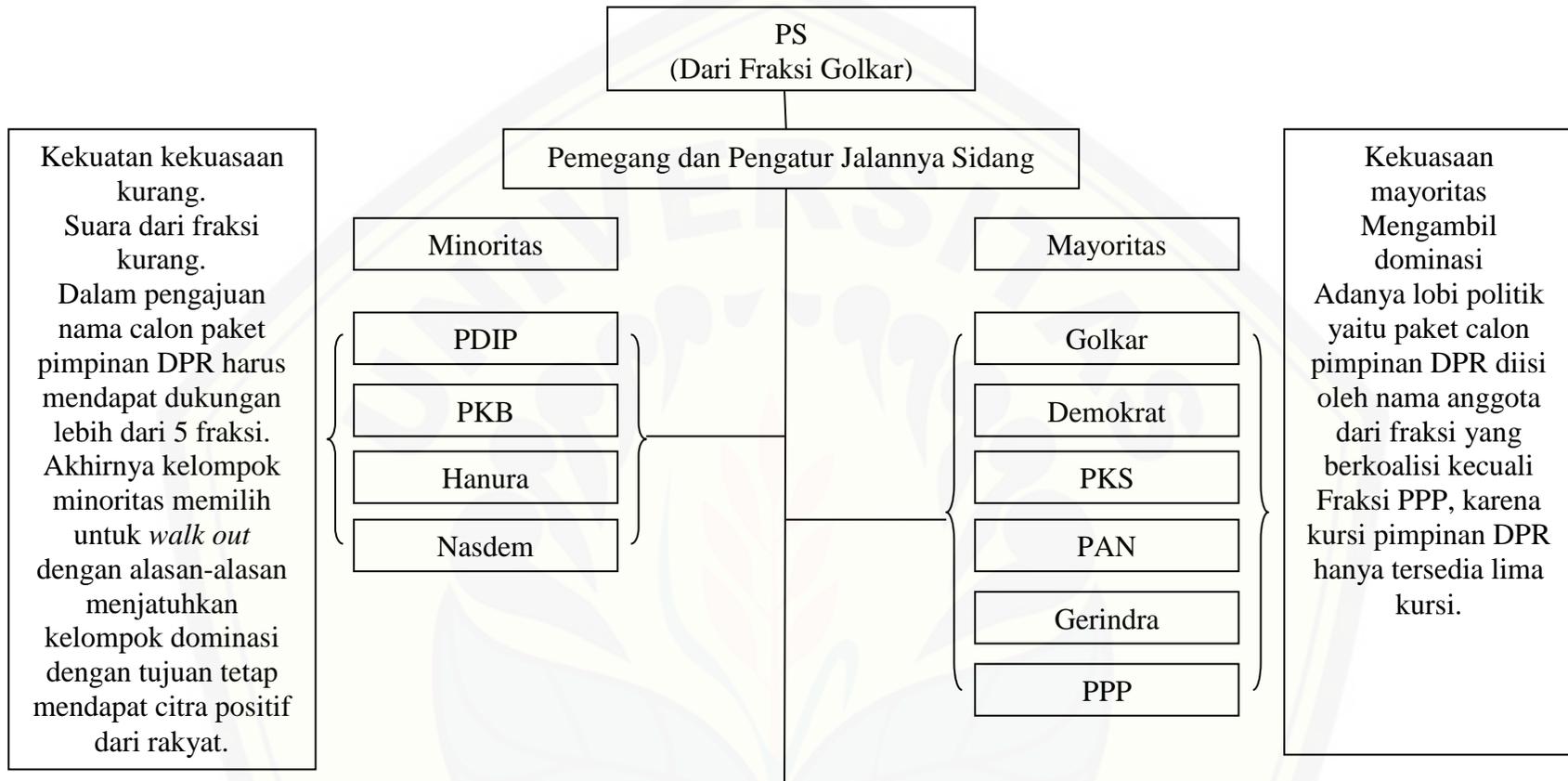
No.	Nama Fraksi	KMP	KIH
1.	Fraksi Partai Golkar	91	
2.	Fraksi Partai Gerindra	73	
3.	Fraksi Partai Demokrat	61	
4.	Fraksi PAN	49	
5.	Fraksi PKS	40	
6.	Fraksi PPP	39	
7.	Fraksi PDIP		109
8.	Fraksi PKB		47
9.	Fraksi Nasdem		35
10	Fraksi Hanura		16
Jumlah		353	207

Tabel tersebut berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing fraksi yang ada di DPR. Jadi walaupun fraksi PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura tidak *walk out*, paket calon yang diusung oleh fraksi yang tergabung dalam KMP akan tetap menang. Dapat dilihat dari jumlah kursi keenam fraksi tersebut, apabila dijumlahkan memperoleh suara 353 suara. Dibandingkan dengan keempat fraksi

yang tergabung dalam KIH hanya memperoleh suara 207 suara. Walaupun sistematika pemungutan suara adalah yang memilih anggota bukan fraksi. Namun, perlu dipahami bahwa anggota yang tergabung dalam fraksi tertentu, akan selalu mengikuti intruksi dari pimpinan partai tersebut.

Keseluruhan Sidang Paripurna pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2014 dengan agenda pemilihan pimpinan DPR RI periode 2014-2019, dapat digambarkan sebagai berikut.





Pemegang kekuasaan tertinggi yaitu PS, karena PS yang mengatur jalannya persidangan. PS dapat memilih mana yang dapat dipersilahkan bicara dan tidak. Hal ini menguntungkan koalisi dominan, karena PS merupakan anggota dari Fraksi Golkar. Kekuatan kekuasaan mayoritas dapat mendominasi kekuatan kekuasaan minoritas. Dalam bidang politik yang paling utama adalah kekuasaan dan kepercayaan. Kelompok mayoritas meyakinkan dan menggunakan kekuasaannya untuk mendominasi hingga koalisi tersebut dapat memenangkan pemilihan. Sedangkan kelompok minoritas tidak dapat menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan pilihan, tapi menggunakan wacana politik untuk memenangkan hati rakyat dan kepercayaan rakyat melalui citra politik. Kedua koalisi tersebut menggunakan strategi politik masing-masing untuk saling menjatuhkan lawan dengan wacana politik.

Gambar 4.5 Alur Keseluruhan Sidang Paripurna Pemilihan Ketua DPR

Keterangan:

1. Kekuatan kekuasaan minoritas terdiri atas Fraksi PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura. Minoritas dalam Gambar ini ditunjukkan pada fraksi koalisi yang memiliki kekuasaan lebih kecil.
2. Kekuatan kekuasaan mayoritas terdiri atas Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan PPP. Mayoritas dalam Gambar ini ditunjukkan pada fraksi koalisi yang memiliki kekuatan lebih tinggi.

4.3.2 Sidang Penetapan Nama-Nama Fraksi dalam Alat Kelengkapan Dewan

Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan pembidangan berdasarkan fungsi dan tugasnya. Berdasarkan Tatib BAB V Alat Kelengkapan Bagian Kesatu Pasal 22, AKD terdiri atas: (i) pimpinan; (ii) Badan Musyawarah; (iii) komisi; (iv) Badan Legislasi; (v) Badan Anggaran; (vi) Mahkamah Kehormatan Dewan; (vii) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen; (viii) Badan Urusan Rumah Tangga; (ix) panitia khusus. Setiap AKD memiliki Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing dan dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan Tupoksi tersebut. Misalnya Presiden Jokowi mengirim surat berkenaan dengan usulan pengangkatan Kapolri, untuk mendapatkan keputusan DPR surat tersebut ditindaklanjuti oleh komisi yang berkenaan dengan pengamanan yaitu Komisi III. Dilihat dari Tupoksi tersebut, siapa yang ada dalam AKD itu sangat penting, karena akan berhubungan dengan pengambilan keputusan dan penindaklanjutan. Pembahasan AKD pada periode 2014–2019 tidak berjalan dengan lancar, banyak adu pendapat dan saling sindir dari anggota dewan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama –nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR.

Ahmad Ali (Nasdem): “Ahmad Ali dari Partai Nasdem, pimpinan yang terhormat, anggota DPR yang terhormat paripurna hari ini adalah merupakan lanjutan pada paripurna pada tanggal 16 kemarin. Jadi pada paripurna tanggal 16 terjadi perdebatan yang begitu sengit , begitu panjang hingga pada akhirnya salah satu menjadi permasalahan yang krusial yang kita bahas pada saat itu adalah bahwa kita belum bisa masuk pada penetapan nama-nama anggota pada waktu itu karena kita sangat terkait dan menunggu tentang komposisi kabinet yang namanya kemitraan komisi. Nah tanpa mengabaikan hasil konsultasi pimpinan dengan pimpinan fraksi

maka saya ingin mengingatkan kepada pimpinan bahwa konsistensi pada paripurna hari ini juga tentunya ingin kita pertahankan terimakasih pimpinan.”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh Ahmad Ali dari Fraksi Partai Nasdem. Dengan pernyataan Ahmad Ali, menandakan bahwa Fraksi Partai Nasdem tidak setuju dengan penetapan AKD berlangsung sebelum komposisi kabinet diumumkan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya AKD merupakan hal yang sangat penting karena penentuan anggota fraksi sebagai perwakilan fraksi berada pada posisi apa. Pernyataan dari Fraksi Nasdem tersebut, memancing komentar dari fraksi-fraksi lain yang sudah memberikan nama-nama anggota fraksi pada AKD. Perlu diketahui bahwa Fraksi Partai Nasdem merupakan fraksi yang tergabung dalam KIH dan melakukan *walk out* pada sidang pemilihan pimpinan DPR. Ketidaksetujuan Fraksi Partai Nasdem untuk penentuan nama-nama fraksi pada AKD ada hubungannya dengan sikap *walk out* dari pemilihan pimpinan DPR. Semakin tinggi jabatan maka kekuasaan yang didapat untuk fraksi akan semakin tinggi. Dikarenakan tidak ada perwakilan Fraksi Partai Nasdem yang ada pada posisi pimpinan DPR. Maka, jalan untuk mendapatkan kekuasaan dengan mendapatkan posisi di AKD yang sesuai dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Fraksi Partai Nasdem. Oleh sebab itu, Fraksi Partai Nasdem menginginkan penetapan nama-nama anggota fraksi pada AKD menunggu terbentuknya komposisi kabinet. Dimana komposisi kabinet nanti yang akan menentukan dengan siapa ia bekerja sama.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama –nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR.

Hanura : “Dan hal ini kemudian yang harus dipertegas, dipertanyakan dan kemudian latar belakang, saya kira semuanya bisa maklum dalam hal ini. Oleh karena itu, saya kira perlu ada rapat konsultasi, sela sela paripurna ini untuk kembali mempertegas apakah gerangan yang kemudian kita muncul ini sebuah komunikasi yang buntu, maka jelas baru 4 fraksi. Maka tentu ini yang menjadi masalah, saya kira pimpinan harus bijak terhadap hal ini untuk tidak melanjutkan paripurna ini pada saat persoalan-persoalan nama ini belum disampaikan oleh fraksi. Akhirnya ini perlu dibreak dulu

kemudian diberikan kesempatan untuk pimpinan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi.”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh anggota dewan dari Fraksi Partai Hanura. Seperti halnya dengan Fraksi Partai Nasdem, keinginan dari Fraksi Partai Hanura secara implisit adalah agar sidang tersebut untuk tidak dilanjutkan. Walaupun alasan yang disampaikan berbeda, Fraksi Partai Hanura menuturkan agar dilakukan Rapat Konsultasi ulang untuk menanyakan pimpinan fraksi-fraksi atas permasalahan tersebut. Sebenarnya Fraksi Partai Hanura hanya ingin mengulur waktu, karena Rapat Konsultasi sudah dilakukan sebelum diadakannya Sidang Paripurna yaitu pada tanggal 16 Oktober 2014. Alasan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Hanura ingin menepis tanggapan dari Fraksi Partai Nasdem yang menuturkan bahwa penetapan nama-nama anggota fraksi pada AKD menunggu Komposisi Kabinet. Hal yang dituturkan oleh Fraksi Partai Hanura dapat menciptakan pencitraan positif terhadap fraksinya. Dengan alasan bahwa harus adanya Rapat Konsultasi ulang untuk membahas permasalahan dibalik fraksi yang belum melaporkan nama-nama fraksi, akan dilihat bahwa Fraksi Partai Hanura ingin menciptakan suasana yang terbuka. Sehingga perdebatan mengenai AKD ini tidak berlarut. Padahal dibalik pernyataan tersebut ada maksud tersendiri yang hampir sama dengan maksud Fraksi Partai Nasdem, karena Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Partai Nasdem merupakan satu kesatuan.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR.

Hendrawan (PDIP): “...saya agak sedikit kecewa karena mestinya kalau sudah rapat konsultasi maka hal-hal yang dibahas itu sudah cukup matang, rapat konsultasi pada tata tertib kita dimaksudkan untuk mencari solusi yang antisipatif dan akomodatif kalau sampai hari ini ada sejumlah fraksi yang belum menyerahkan itu artinya ada beberapa hal yang pada rapat konsultasi belum dituntaskan. Itu sebabnya ada baiknya kalau rapat ini kita beri waktu yang lebih banyak lagi pimpinan. Karena memang saya tau dan memahami tidak mudah untuk menetapkan orang-orang dalam komisi yang sesuai dengan kompetensi sesuai dengan harapan dari anggota masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki prinsip *the right man on the right place on the right time*, itu sebabnya pimpinan praktis saja saya

mengharapkan rapat konsultasi dilakukan lagi tapi sekalai lagi harus solutif, antisipatif, akomodatif...”

Aria Bima: “...Pimpinan mengenai jumlah komisi yang sudah kita tetapkan, jumlah belum nama-nama komisi dan kelengkapan nama-nama anggota fraksi dalam alat kelengkapan dan komposisi pimpinan komisi yang ada segera kita lakukan. Ini adalah suatu paket yang tidak dapat terpisahkan, politik ini begitu dinamisnya maka saya berharap kepada kawan kawan yang terhormat dan juga pimpinan saya mohon untuk dilakukan langkah langkah lobi kembali. Kalau ini terus kita lakukan penetapan, memang bisa bagi kawan kawan yang sudah memasukan di alat kelengkapan di fraksi-fraksi yang ada. Bisa kita tetapkan hari ini dan bagi yang belum masih ada jeda waktu. Itu realistiknya memang demikian. Namun kalau boleh saya usulkan bahwa pada saat kemarin waktu Pak Farid memimpin rapat terkait dengan jumlah komisi juga belum disampaikan tentang nama-nama atau bidang bidang komisi yang ada. Sangat dimungkinkan bahwa jumlah komisi yang sudah ditetapkan, kita melihat perbedaan perbedaan yang ada itu karena a kondisi ruang lingkup yang begitu luas. Mohon kepada pimpinan, itu juga bisa dimasukkan bagian dari paket lobi kita untuk kira-kira apakah kita perlu mengajukan kursi tambahan itu adalah hal yang sangat dianamis. Untuk itu saya mohon kebesaran jiwa hati rekan-rekan sekalian supaya kinerja awal kita ini ke depan kondusif sesuai dengan tugas dan fungsi kita.”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh Hendrawan dan Aria Bima dari Fraksi PDIP. Tuturan Hendrawan menyebutkan bahwa Rapat Konsultasi yang sudah dilakukan sebelumnya, tidak membuahkan hasil apa pun. Menurut Hendrawan apabila dalam Rapat Konsultasi dapat membuahkan hasil yang solutif, aspiratif, dan akomodatif pasti dalam pelaksanaan Sidang Paripurna pagi itu berjalan dengan lancar. Pernyataan yang disampaikan oleh hendrawan merupakan sebuah sindiran untuk pimpinan sidang bahwa rapat yang dilakukan sebelumnya tidak menghasilkan apapun. Namun, dari pernyataan yang dituturkan oleh Hendrawan, dapat diungkap maksud dan tujuan Fraksi PDIP yang sebenarnya. Fraksi PDIP merupakan fraksi yang tergabung dalam KIH bersama dengan fraksi Hanura, Nasdem, dan PKB. Dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan perwakilan Fraksi PDIP, Fraksi Hanura, dan Fraksi Nasdem hampir sama, yaitu sama-sama ingin penetapan nama-nama fraksi ditunda hingga komposisi kabinet terbentuk.

Selanjutnya, diperkuat dengan pernyataan Fraksi PDIP yang menjelaskan mengenai jumlah kursi komisi. Fraksi PDIP melalui perwakilan Aria Bima mengusulkan untuk diadakannya Rapat Konsultasi atau lobi kembali untuk menyeimbangkan jumlah kursi dalam komisi dan pimpinan komisi. Pernyataan yang dituturkan oleh Aria Bima mengenai posisi pimpinan komisi membuat pencitraan yang negative terhadap Fraksi PDIP. Dari pernyataan Fraksi Nasdem bahwa harus konsisten terhadap hasil awal yaitu menunggu komposisi kabinet. Kemudian, Fraksi Partai Hanura berpendapat bahwa perlu adanya rapat konsultasi lagi agar mendapatkan solusi untuk partai yang belum menyetor nama-nama fraksi. Dari pernyataan-pernyataan yang berputar-putar di akhir Fraksi PDIP menyebut mengenai komposisi pimpinan komisi. Padahal, yang perlu dilakukan setiap fraksi adalah menyetorkan nama-nama anggota fraksi ke dalam komisi apa, tidak perlu membahas mengenai pimpinan komisi. Dikarenakan pimpinan komisi akan dibahas oleh masing-masing komisi yang bersangkutan. Pernyataan Aria Bima dan fraksi koalisinya menginginkan posisi yang lebih tinggi dalam komisi. Seperti sebelumnya, bahwa kekuasaan yang dimiliki KIH tidak terlalu baik karena posisi Pimpinan DPR sudah diambil alih oleh KMP.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap fraksi, pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR.

Agus Kurniawan (Gerindra): “...Pimpinan dan Sidang Paripurna yang terhormat kita hari ini 21 satu hari sudah mengambil menyatakan sumpah dan janji. Intinya janji kita ingin kemudian dijalankan tugas konstitusi kita secara baik. Tetapi hingga hari ini mohon maaf pimpinan kita baru melaksanakan tugas tugas paripurna saja, hari ini patipurna ke-5. Padahal kita sudah 21 hari kita diambil sumpah dan janji dan kemarin sama kita saksikan bahwa bapak presiden kita mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja, bekerja, dan bekerja....”

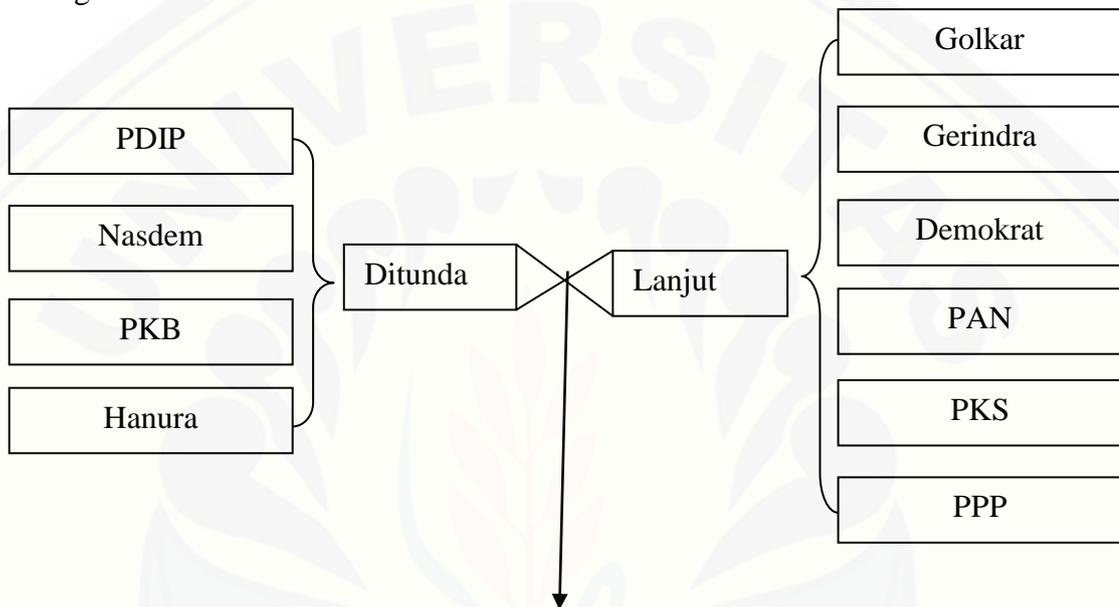
Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh Agus Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra. Fraksi Partai Gerindra merupakan salah satu partai yang sudah melaporkan nama-nama fraksi ke dalam AKD. Fraksi yang sudah mengumpulkan nama-nama anggota fraksi dalam AKD adalah Fraksi Partai Gerindra, PAN, Demokrat, Golkar, dan PKS. Fraksi yang sudah melaporkan nama-nama fraksi merupakan koalisi dari KMP. Perlu diketahui bahwa, posisi

Pimpinan DPR diduduki oleh kelima fraksi tersebut. Pemilihan Pimpinan DPR dan penetapan AKD merupakan dasar terbentuknya kekuasaan di DPR. Fraksi yang tergabung dalam KMP merupakan fraksi yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibanding fraksi lain. Sedangkan fraksi yang tergabung dalam KIH yaitu yang melakukan *walk out* pada pemilihan Pimpinan DPR dapat dikatakan memiliki kekuasaan lebih rendah dibandingkan dengan KMP. KMP yang memiliki kekuatan kekuasaan yang lebih tinggi, pada sidang penetapan AKD tidak mengekhawatirkan mengenai penetapan AKD, karena posisi pimpinan DPR sudah dimilikinya.

Pernyataan dari Fraksi Partai Gerindra merupakan salah satu pernyataan yang menyudutkan fraksi yang belum mengumpulkan nama-nama fraksi dalam AKD. Pernyataan *Tetapi hingga hari ini mohon maaf pimpinan kita baru melaksanakan tugas tugas paripurna saja, padahal kita sudah 21 hari kita diambil sumpah dan janji, kita saksikan bahwa bapak presiden kita mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja, bekerja, dan bekerja* merupakan bentuk sindiran yang tajam untuk para fraksi yang belum melaporkan nama-nama fraksi dalam AKD. Pernyataan tersebut membuat citra negatif untuk empat fraksi yang Fraksi PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura. Sedangkan untuk PPP yang juga belum melaporkan nama-nama fraksi dalam AKD tidak terlalu membuat citra negatif karena dalam forum sidang, Fraksi PPP menyatakan setuju untuk ditetapkan segera AKD. Kemudian untuk kelima fraksi yang ada pada jajaran Pimpinan DPR membuat citra positif, rakyat akan beranggapan bahwa kelima fraksi tersebut merupakan contoh fraksi yang tidak ingin makan gaji buta. Dengan pernyataan seperti itu, menggambarkan bahwa yang membuat lama kinerja dari DPR adalah mereka para fraksi yang belum melaporkan nama-nama fraksi dalam AKD. Padahal, dari setiap pernyataan fraksi atau pandangan fraksi yang dikeluarkan memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Fraksi yang tergabung dalam KMP, merasa sudah memiliki kekuatan kekuasaan yang besar dengan menjadi pimpinan DPR. Kemudian untuk Fraksi PPP, walaupun belum melaporkan nama-nama fraksi dalam AKD, fraksi tersebut merasa aman dengan menyatakan setuju untuk menetapkan AKD segera, karena Fraksi PPP sudah termasuk KMP. Sedangkan

Fraksi yang tergabung dalam KIH memiliki kekuatan kekuasaan yang kurang. Maka jalan satu-satunya adalah menguasai pimpinan komisi dengan cara mengusulkan penundaan penetapan dengan jalan pengunduran waktu hingga terbentuknya komposisi Kabinet.

Keseluruhan Sidang Paripurna pada tanggal 21 Oktober 2014 dengan agenda penetapan nama-nama anggota fraksi dalam AKD, dapat digambarkan sebagai berikut.



Kedua koalisi tersebut memiliki sikap politik yang berbeda. KIH (PDIP, Nasdem, PKB, Hanura) memilih untuk menunda sidang penetapan nama-nama fraksi dalam AKD. Dengan terang-terangan diungkap oleh Nasdem bahwa seharusnya menunggu komposisi kabinet terbentuk. Selain itu fraksi lain juga mengungkap alasan agar sebaiknya dilakukan Rapat Konsultasi ulang agar tidak ada permasalahan di kedepannya lagi. Sedangkan sikap politik KMP (Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, PKS, PPP) memilih untuk mengikuti intruksi pimpinan yaitu melaporkan nama-nama fraksi dalam AKD oleh Pimpinan Dewan. Sikap politik yang dilakukan KIH menjadi sasaran KMP untuk menyindir bahwa mereka yang belum melaporkan nama-nama fraksi pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus.

Gambar 4.6 Alur Keseluruhan Sidang Paripurna Penetapan AKD

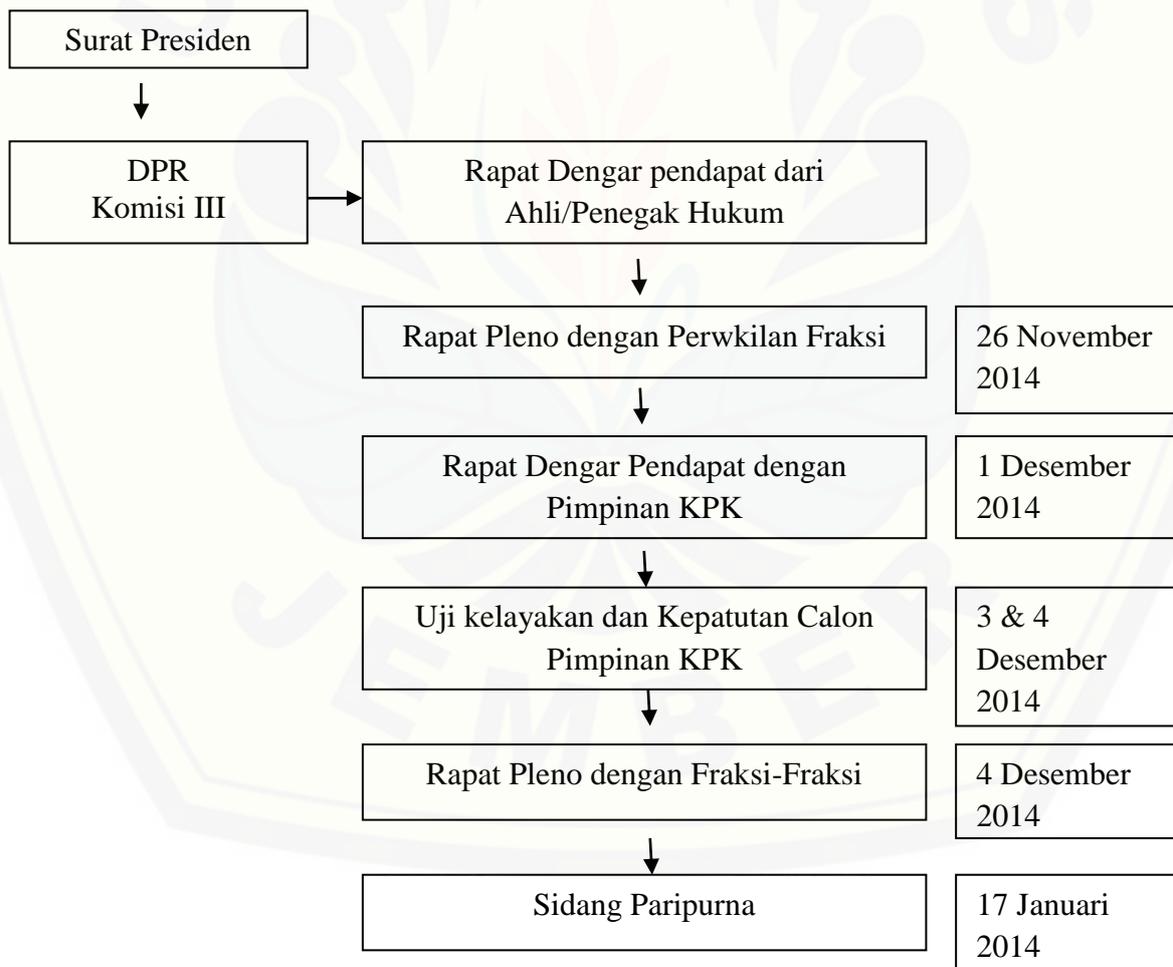
4.3.3 Sidang Penetapan Ketua KPK dan Kapolri

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Komisi III: "Pertama fraksi partai PDIP berpendapat bahwa penetapan calon pimpinan KPK, penggantian wakil ketua saudara Yusro agar hingga sampai dengan Desember 2015 dan dilakukan secara serentak bersama dan sekaligus pemilihan dan penetapan empat orang pimpinan KPK lainnya. Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa proses pemilihan dan penetapan calon pimpinan KPK tidak dapat diteruskan pada masa sidang ini dan mengusulkan 2 calon KPK yang telah lolos pada panitia seleksi digabungkan pemilihannya dengan 8 calon pimpinan KPK lainnya pada masa sidang berikutnya dipilih sekaligus lima calon pimpinan KPK. Yang ketiga Fraksi Partai Gerindra berpendapat agar komisi III DPR RI tetap memilih satu dari 2 nama calon pengganti pimpinan KPK yang diajukan oleh presiden dan ditetapkan sebagai calon terpilih namun presiden RI perlu menerbitkan perpu yang isinya membiarkan syarat kosong calon pimpinan KPK sehingga berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK yang lainnya. Sehingga KPK terpilihnya tersebut diangkat bersama 4 pimpinan KPK lainnya diakhir tahun 2015. Yang ketiga D fraksi Partai Demokrat setuju untuk melanjutkan kepada rapat selanjutnya. Nah untuk pemilihan dan penetapan pimpinan KPK di Komisi III DPR RI sesegera mungkin guna untuk melengkapi struktur pimpinan KPK selama 5 orang. Selanjutnya fraksi partai amanat nasional, berpendapat bahwa pemilihan dan penetapan salah seorang calon pengganti saudara Yusro dilakukan secara bersamaan pada penetapan 4 anggota kondisioner pada KPK terpilih yang nantinya akan dilakukan proses pemilihan untuk mengganti masa jabatan orang 4 orang KPK yang sekarang ini masa jabatannya akan berakhir segera. Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan bangsa berpendapat melahirkan sumber sumber daya yang terbaik dibidang pencegahan dan pemberantasan di bidang tindak pidana pemberantasan korupsi. Dengan demikian komisi III DPR

RI mengenai 3 hasil uji kelayakan dan kepatutan dan pemilihan terhadap calon pimpinan KPK.”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh pemimpin dari Komisi III. Tema yang disampaikan Komisi III merupakan laporan mengenai Calon Pimpinan KPK. Dalam penyampaian laporan tersebut, dapat ditangkap maksud yang tersembunyi dibalik wacana tersebut. Pimpinan Komisi III yaitu Samsudin menyampaikan apa saja yang dilakukan oleh Komisi III setelah mendapatkan kewenangan untuk menindaklanjuti surat presiden no. R62/Pres/10/2014 mengenai penyampaian calon pimpinan KPK. Dalam penyampaian laporan tersebut, disebutkan Komisi III telah melakukan beberapa rapat-rapat sebelum Sidang Paripurna, berikut dapat digambarkan dengan Gambar.



Gambar 4.7 Alur Pengambilan Keputusan Komisi III

Dilihat dari proses rapat sebelum diadakannya Sidang Paripurna, Komisi III berusaha meminta berbagai pendapat dari ahli dan perwakilan fraksi untuk membahas permasalahan tersebut. Dalam teori AWK terdapat elemen detil, elemen detil berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang. Detil yang lengkap dan panjang lebar merupakan penonjolan secara sengaja untuk menciptakan citra tertentu kepada khalayak. Dalam tuturan tersebut, hal yang dipaparkan secara lengkap adalah apa saja yang dilakukan oleh Komisi III sebelum diadakannya Sidang Paripurna. Dapat dilihat dengan Gambar sebelumnya, rapat-rapat yang dilakukan Komisi III sebelum Sidang Paripurna. Penjelasan mengenai rapat tersebut dijelaskan tanggal pelaksanaan, dengan siapa rapat diadakan dan ada beberapa hasil rapat yang disampaikan. Rapat Dengar pendapat dari berbagai ahli dan penegak hukum digunakan untuk meminta saran dan masukan. Namun, dalam tuturan tersebut tidak ada penjelasan apapun yang disampaikan oleh para ahli dan penegak hukum mengenai pencalonan tersebut. Sedangkan mengenai pandangan fraksi dijelaskan secara detail pendapatnya.

Tabel 4.8 Elemen Detil

Tanpa Detil	Komisi III DPR RI telah lebih dahulu melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan beberapa ahli dan meminta saran serta masukan terhadap calon pengganti pimpinan KPK yang diusulkan oleh presiden.
Detil	<p>Pertama fraksi partai PDIP berpendapat bahwa penetapan calon pimpinan KPK, penggantian wakil ketua saudara Yusro agar hingga sampai dengan Desember 2015 dan dilakukan secara serentak bersama dan sekaligus pemilihan dan penetapan empat orang pimpinan KPK lainnya.</p> <p>Fraksi partai Golkar berpendapat bahwa proses pemilihan dan penetapan calon pimpinan KPK tidak dapat diteruskan pada masa sidang ini dan mengusulkan 2 calon KPK yang telah lolos pada panitia seleksi digabungkan pemilihannya dengan 8 calon pimpinan KPK lainnya pada masa sidang berikutnya dipilih sekaligus lima calon pimpinan KPK.</p>

<p>Yang ketiga Fraksi Partai Gerindra berpendapat agar komisi III DPR RI tetap memilih satu dari 2 nama calon pengganti pimpinan KPK yang diajukan oleh presiden dan ditetapkan sebagai calon terpilih namun presiden RI perlu menerbitkan perpu yang isinya membiarkan syarat kosong calon pimpinan KPK sehingga berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK yang lainnya. Sehingga KPK terpilihnya tersebut diangkat bersama 4 pimpinan KPK lainnya diakhir tahun 2015.</p> <p>Yang ketiga Fraksi Partai Demokrat setuju untuk melanjutkan kepada rapat selanjutnya. Nah untuk pemilihan dan penetapan pimpinan KPK di Komisi III DPR RI sesegera mungkin guna untuk melengkapi struktur pimpinan KPK selama 5 orang.</p> <p>Selanjutnya Fraksi PAN, berpendapat bahwa pemilihan dan penetapan salah seorang calon pengganti saudara Yusro dilakukan secara bersamaan pada penetapan 4 anggota kondisioner pada KPK terpilih yang nantinya akan dilakukan proses pemilihan untuk mengganti masa jabatan orang 4 orang KPK yang sekarang ini masa jabatannya akan berakhir segera.</p> <p>Selanjutnya Fraksi PKB berpendapat melahirkan sumber sumber daya yang terbaik dibidang pencegahan dan pemberantasan di bidang tindak pidana pemberantasan korupsi.</p>

Hal ini menunjukkan adanya informasi yang ditonjolkan dan ada informasi yang dilemahkan. Komisi III menonjolkan informasi yaitu pandangan mengenai fraksi-fraksi, hal ini membuktikan bahwa yang diutamakan dalam pengambilan keputusan adalah pendapat fraksi dan pendapat dari para ahli hanya sebagai formalitas dan salah satu bukti DPR memperhatikan dan mencari pendapat dari berbagai sudut pandang.

Dilihat dari struktur kosa kata yang digunakan, dalam AWK terdapat istilah nominalisasi (membesarkan atau memperkecilkan jumlah). Nominalisasi dalam hal tertentu dapat berdampak baik, tetapi dalam kasus-kasus tertentu dapat mengaburkan masalah. Pemilihan frasa *pandangan fraksi* dibandingkan *pandangan anggota/ individu* dapat memiliki makna yang berbeda. Dalam wacana tersebut ditemukan tidak ada penanyaan mengenai pendapat masing-masing anggota, yang ditanyakan adalah pandangan dari fraksi. Yang perlu ditanyakan DPR ini merupakan perwakilan rakyat yang dipilih dari berbagai daerah pilihan atau perwakilan fraksi. Di setiap permasalahan yang dibahas dalam Sidang Paripurna PS selalu memberi kesempatan untuk perwakilan fraksi berpendapat sebagai perwakilan anggota DPR yang masuk ke fraksi tersebut. Berdasarkan wacana tersebut penggunaan frasa *pandangan anggota/individu* tidak ada, berikut dapat dilihat dari table tersebut.

Tabel 4.9 Intensitas Penggunaan Kata

	Intensitas/Jumlah Penggunaan Kata
<i>Pandangan Fraksi</i>	1
<i>Pandangan Anggota</i>	0

Frasa *pandangan fraksi* dalam wacana tersebut dapat ditemukan hanya satu, namun kosa kata yang menunjukkan pandangan fraksi ada enam frasa yaitu *Fraksi PDIP berpendapat, Fraksi Golkar berpendapat, Fraksi Gerindra berpendapat, Fraksi Partai Demokrat berpendapat, Fraksi PKB berpendapat, Fraksi PAN berpendapat*. Dengan demikian dapat disimpulkan anggota DPR masih dijalankan oleh setiap fraksi/partai masing-masing. Anggota DPR yang sudah diangkat sebagai anggota dewan masih harus berjalan sesuai dengan visi dan misi serta kepentingan fraksi masing-masing bukan kepentingan rakyat. Selanjutnya, pada Rapat Pleno terdapat empat fraksi yang tidak menyampaikan pendapat yaitu Fraksi PPP, Hanura, PKS, dan Nasdem. Hal tersebut membuktikan bahwa Komisi III mengambil kesimpulan atau putusan sementara tidak melihat semua fraksi berpendapat.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Harman (Demokrat): "...kami dari Fraksi Partai Demokrat ingin menegaskan dua hal. Yang pertama di dalam rapat pengambilan keputusan ditingkat komisi kami mengajukan kami mengajukan keberatan, kami mengajukan pendapat supaya dilakukan pemilihan satu dari dua dengan alasan yang utama dan yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa menurut pandangan Partai Demokrat ketentuan dalam UU KPK 5 pimpinan KPK wajib hukumnya untuk dipenuhi, dalam bahasa kami ini adalah manatori rule, apa artinya dengan sengaja pembuat UU KPK menegaskan bahwa 5 itu wajib hukumnya untuk dipenuhi dengan konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi 5 maka tidak boleh diambil keputusan apapun oleh pimpinan KPK yang mempunyai konsekuensi hukum akibatnya adalah keputusan keputusan pimpinan KPK yang tidak dilakukan oleh 5 pimpinan KPK mempunyai akibat hukum tidak sahnya keputusan itu. Inilah yang menjadi alasan pokok mengapa kami meminta supaya dilakukan pemilihan untuk memenuhi kewajiban adanya 5 pimpinan KPK itu dengan demikian pimpinan bapak ibu anggota dewan yang sangat kami hormati. Yang tadi mengikuti logika yang dijelaskan oleh pimpinan komisi III dan putusan komisi III, maka dengan keputusan ini nanti diambil maka KPK sejak pimpinannya hanya 5 komisioner kehilangan legalitasnya untuk melakukan 4 untuk melakukan tindakan tindakan hukum. Terutama tindakan hukum yang punya dampak represif. Ini kami sampaikan kami ingatkan pak ketua pimpinan dewan, bapak ibu anggota yang kami hormati dengan demikian sampai dengan 10 bulan ini KPK dengan demikian bukan soal efektifitas, 2 3 4 pimpinan KPK sih bisa efektif, tapi masalah penegakan hukum bukan masalah efektifitas tetapi masalah leglitas. Oleh sebab itu kami memberikann pandangan tetap 5 pimpinan KPK. Oleh sebab itu kita harus semisal satu dari dua yang telah diajukan oleh pemerintah. Apabila ini tidak dipenuhi maka yang akan terjadi adalah pandangan kami 4 pimpinan KPK tidak punya kewenangan

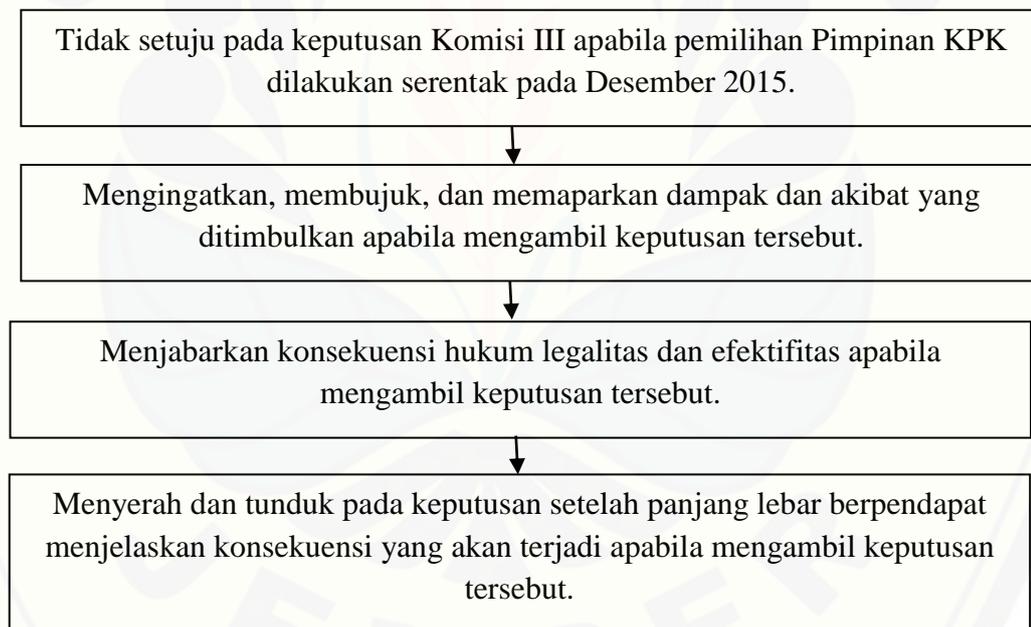
lagi untuk langkah langkah penindakan kecuali langkah langkah pencegahan ini akibatnya dan ini yang kami ingatkan pada bapak ibu anggota dewan yang kami hormati, ini catatan kami pak ketua pimpinan sidang. Kalau memang ini sudah menjadi keputusan kami pun tunduk pada keputusan itu. Hanya kami ingatkan itulah resikonya, sekian terimakasih banyak.”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh Benny K. Harman. Benny merupakan anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat. Tema yang ingin disampaikan Benny adalah pandangan Fraksi Partai Demokrat mengenai alasan ketidaksetujuan Fraksi Partai Demokrat apabila calon pimpinan KPK dipilih Desember 2015 secara serentak. Dalam penyampaian pendapat Benny, dapat diungkap maksud dan tujuan Fraksi Demokrat dilihat dari berbagai elemen. Ditemukan lagi, bukti bahwa konsepsi hak suara para anggota dewan bukan semata-mata suara anggota murni melainkan suara fraksi atau dapat disebut *pandangan fraksi*. Benny sebagai perwakilan Fraksi Partai Demokrat menuturkan *kami dari Fraksi Partai Demokrat ingin menegaskan, menurut pandangan Partai Demokrat*. Tuturan tersebut membuktikan bahwa anggota dewan sebanyak 61 anggota yang termasuk dalam Partai Demokrat disuarakan oleh satu orang yaitu Benny K. Harman. Dapat dilihat dari elemen kata ganti yang digunakan yaitu *kami*. Elemen kata ganti digunakan untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Pemakaian kata ganti jamak *kami* mempunyai implikasi menumbuhkan solidaritas, aliansi, perhatian publik, dan menghilangkan kritik oposisi. Selain itu, kata ganti *kami* juga menciptakan jarak dan memisahkan antara pihak *kami* dan mereka. Pihak kami dimaksudkan untuk pihak yang bersependapat, sedangkan pihak *mereka* dimaksudkan untuk pihak yang tidak bersependapat. Kata kami dimaksudkan untuk semua anggota Fraksi Partai Demokrat sedangkan pihak mereka dimaksudkan untuk anggota yang tidak setuju terhadap pendapat Fraksi Partai Demokrat.

Tabel 4.10 Elemen Kata Ganti (4)

Kata ganti “ <i>kami</i> ”	<i>kami</i> dari Fraksi Partai Demokrat <i>kami</i> mengajukan keberatan <i>kami</i> mengajukan pendapat bahasa <i>kami</i> ini adalah manatori rule <i>kami</i> meminta supaya dilakukan pemilihan Ini <i>kami</i> sampaikan kami ingatan <i>kami</i> pun tunduk pada keputusan itu
----------------------------	--

Berdasarkan elemen alur atau Gambar mengenai penjelasan Benny K. Harman sebagai perwakilan Fraksi Partai Demokrat mulai dari awal sampai akhir, memiliki maksud tersendiri secara implisit. Berikut alur atau Gambar Benny K. Harman dalam berpendapat.

**Gambar 4.8 Alur Pendapat Fraksi Demokrat**

Fraksi Partai Demokrat dalam penyampaian pendapat hanya mencari pencitraan yang positif di mata rakyat. Pola strategi komunikasi yang digunakan Demokrat, dimana di akhir menuturkan *kalau memang itu sudah menjadi keputusan kami pun tunduk pada keputusan itu* menunjukkan Fraksi Partai Demokrat hanya melakukan pencitraan positif. Rakyat akan menilai positif bahwa

Fraksi Partai Demokrat memikirkan akibat dan dampak yang akan terjadi dengan keputusan tersebut. Fraksi Partai Demokrat juga menunjukkan bahwa Demokrat sangat mengerti mengenai UU KPK. Pola seperti itu juga dapat membuktikan bahwa sebenarnya Fraksi Partai Demokrat sudah menerima dan tunduk pada keputusan yang sudah diambil. Namun, Fraksi Partai Demokrat hanya berputar-putar dan memainkan *argument* dan dapat dilihat seolah-olah Fraksi Partai Demokrat tidak setuju padahal sudah setuju.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Komisi III: “Berdasarkan Rapat Pleno tersebut komisi III DPRI RI melalui pandangan fraksi-fraksi komisi III menyetujui untuk mengangkat komisararis jenjral Drs. Budi Gunawan S.H. M.Si., sebagai kapolri dan selanjutnya komisi IIIDPR RI menyetujui untuk memberhentikan Komisararis Jendral Arman sebagai kapolri. Pimpinan anggota dewan dan hadirin yang kami hormati komisi III DPR RI memahami dan menyadari bahkan kecakapan dan intergritas calon kapolri merupakan syarat mutlak menjadi calon kapolri. Oleh sebab itu komisi III DPR RI menyetujui dan mengangkat calon Kapolri dengan harapan calon Kapolri sungguh sungguh dapat mampu meningkatkan citra dan lembaga Kapolri sebagai alat negara yang berperan pengamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban negeri.”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh Pimpinan Komisi III yaitu Samsudin. Tema yang disampaikan Komisi III yaitu laporan Komisi III mengenai pencalonan Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri. Dalam penyampaian laporan tersebut, dapat ditangkap maksud yang tersembunyi dibalik

wacana tersebut. Pimpinan Komisi III menyampaikan apa saja yang dilakukan oleh Komisi III setelah mendapatkan kewenangan untuk menindaklanjuti surat presiden no. R/01/Pres/01/2015 mengenai penyampaian calon pimpinan Kapolri. Dalam penyampaian laporan tersebut, disebutkan Komisi III telah melakukan beberapa rapat-rapat sebelum Sidang Paripurna yaitu rapat Bamus, Rapat Pleno, Uji Keputusan dan kelayakan. Kemudian yang terakhir adalah Sidang Paripurna, Sidang Paripurna merupakan sidang tingkat II, dimana keputusan terakhir diambil atau diputuskan pada Sidang Paripurna. Dalam laporan Komisi III sudah dijelaskan bahwa komisi III sudah melakukan berbagai rapat sebelum melaporkannya dalam Sidang Paripurna. Hal yang mengganjal adalah Komjen Pol. Budi Gunawan hadir pada saat Sidang Paripurna tersebut dibuktikan dengan tuturan *yang kami hormati bapak calon kapolri serta hardirin hadirod yang kami mulyakan*. Disebutkan bahwa Komjen Pol. Budi Gunawan akan diresmikan atau disahkan pengangkatannya setelah sidang tersebut. Yang perlu ditanyakan adalah apakah sudah pasti Komjen Pol. Budi Gunawan akan menjadi Kapolri, padahal Sidang Paripurna belum memutuskan apa pun. Dengan kehadiran Komjen Pol. Budi Gunawan pada saat persidangan, dapat disimpulkan bahwa Komjen Pol. Budi Gunawan sudah pasti akan diangkat. Walaupun rapat-rapat sebelumnya dihadiri oleh perwakilan fraksi, namun yang menjadi pertanyaan apakah anggota DPR hanya perwakilan fraksi saja. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa proses dalam DPR dikotak-kotakan dalam fraksi-fraksi. Kemudian fraksilah yang menggerakkan anggota, bukan menyuarakan suara rakyat melainkan suara fraksi.

Dilihat dari kutipan selanjutnya yaitu mengenai harapan Komisi III terhadap Komjen Pol. Budi Gunawan *meningkatkan citra dan lembaga kapolri sebagai alat negara yang berperan pengamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban negeri*. Peletakan kata dan pemilihan kata yang digunakan untuk menggambarkan harapan Komisi III sangat mempengaruhi dengan apa yang sebenarnya diinginkan Komisi III. Kata *citra* digunakan diawal kalimat dan tidak terlalu diberi elemen detail. Hal ini dapat menggambarkan Komisi III harapannya peningkatan citra

kepolisian yang selama ini buruk di mata masyarakat. Komisi III tidak memberi detail dan menggunakan makna implisit untuk menggambarkan hal tersebut. Sedangkan untuk penggambaran harapan secara umum digunakan detail yang panjang.

Konteks: Kutipan dari Sidang Paripuran DPR RI dengan topik bahasan yaitu: (i) laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan KPK; (ii) laporan komisi III dan pengambilan keputusan calon pimpinan Kapolri; (iii) penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2015 pukul 10.00 di Gedung DPR, dihadiri oleh anggota DPR RI sebanyak 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80 anggota dari 106 anggota, Golkar 65 anggota dari 90 anggota, Gerindra 57 orang dari 73 anggota, Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, PAN 35 orang dari 48 anggota, PKB 35 orang dari 47 anggota, PKS 27 orang dari 47 anggota, PPP 20 orang dari 39 anggota, Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Hanura 15 orang dari 16 anggota, dan Calon Kapolri beserta rombongan.

Benny (Demokrat): “Yang pertama Fraksi Partai Demokrat sungguh sungguh menghormati dan mendukung hak prerogratif presiden untuk mengangkat dan memberhentikan kapolri sesuai dengan pasal 11 UU no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Yang kedua Fraksi Partai Demokrat juga sungguh menghargai usulan presiden yang telah mencalonkan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri dan Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas, pengalaman, dan kompetensi sebagai kapolri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Yang kedua apabila komjen Pol. Budi Gunawan dipaksakan menjadi kapolri dengan status tersangka maka diyakini tidak akan mendapatkan kepercayaan rakyat, apalagi Polri juga dituntut untuk secara aktif menegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi....Pertimbangan yang pertama pengangkatan Komjen polisi Budi Gunawan oleh presiden RI akan mencoreng sejarah republik ini, karena untuk pertama kalinya presiden RI mengangkat seorang tersangka menjadi kapolri (semua tepuk tangan).”

Kutipan tersebut merupakan tuturan yang dituturkan oleh Benny K. Harman dari Fraksi Partai Demokrat. Tema yang disampaikan Benny K. Harman mengenai pencalonan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebelum peneliti memaparkan maksud dibalik wacana tersebut, perlu peneliti jelaskan histori atau sejarah politik sebelumnya. Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PDIP memiliki jalan politik yang panjang. Pada masa jabatan SBY menjadi presiden

dua periode yang lalu, Fraksi PDIP selalu menjadi barisan terdepan untuk menentang kebijakan yang dikeluarkan SBY. Kemudian, pada periode sekarang Presiden Jokowi yang diusung Fraksi PDIP menjadi presiden. Peristiwa yang seperti ini menjadi peluang emas untuk Fraksi Demokrat guna menjatuhkan Jokowi. Fraksi Partai Demokrat menggunakan strategi komunikasi yang dapat dibenarkan oleh masyarakat umum yang mendengarnya yaitu mengungkapkan dengan gaya bahasa eufemisme dan secara implisit dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan dan akibat yang terjadi apabila Komjen Pol. Budi Gunawan diangkat sebagai Kapolri.

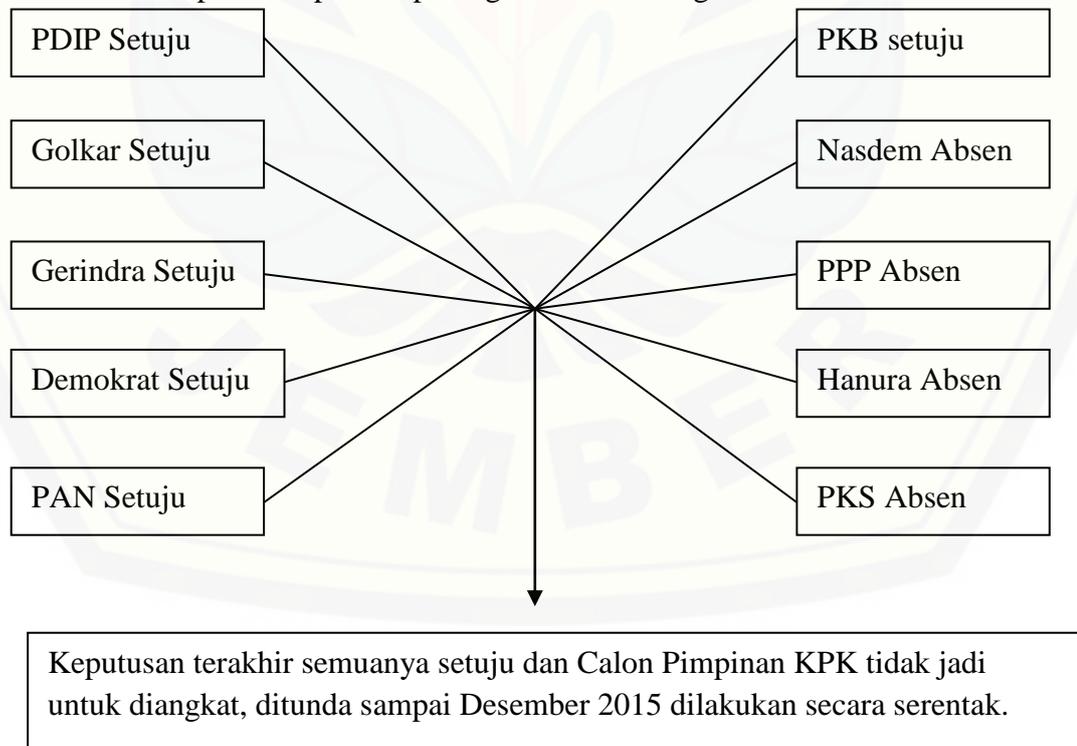
Tabel 4.11 Elemen Penjelas

Penjelas Positif	Fraksi Partai Demokrat sungguh sungguh menghormati dan mendukung hak prerogatif presiden untuk mengangkat dan memberhentikan kapolri sesuai dengan pasal 11 UU no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Yang kedua Fraksi Partai Demokrat juga sungguh menghargai usulan presiden yang telah mencalonkan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri dan Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas, pengalaman, dan kompetensi sebagai Kapolri.
Penjelas Negatif	Pertimbangan yang pertama pengangkatan Komjen polisi Budi Gunawan oleh presiden RI akan mencoreng sejarah republik ini, karena untuk pertama kalinya presiden RI mengangkat seorang tersangka menjadi Kapolri.

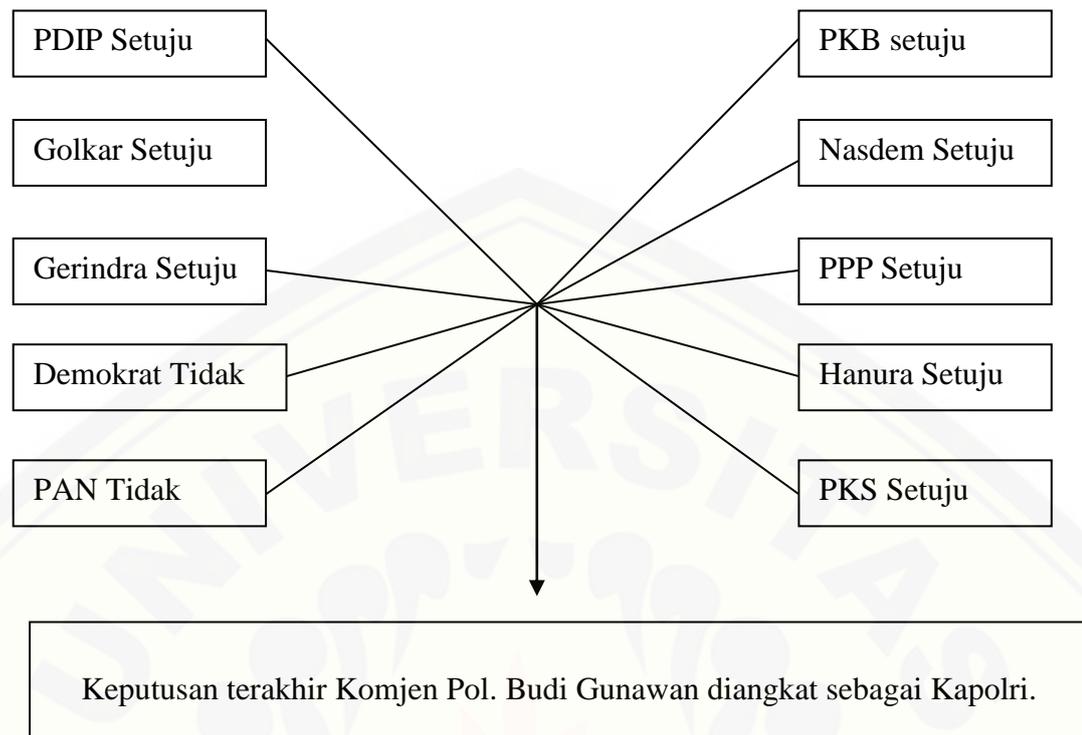
Kedua penjelas tersebut memiliki makna yang berbeda namun memiliki satu maksud yang sama yaitu mengkritik Presiden Jokowi. Penjelas yang diberikan pada wacana akan memberikann efek kepada rakyat. Dalam penjelas pertama, seakan rakyat diajak untuk setuju bahwa keputusan pengangkatan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri memang tepat. Sedangkan pada penjelas yang kedua seakan rakyat diajak untuk menolak keputusan Presiden Jokowi. Tidak hanya menolak, namun pernyataan bahwa hal itu dapat mencoreng

sejarah RI dapat memberikann kesan negatif terhadap Presiden Jokowi. Strategi komunikasi yang digunakan oleh Fraksi Partai Demokrat membuat kesan bahwa Fraksi Partai Demokrat menginginkan yang terbaik buat Indonesia. Pada awal penyampaian Demokrat menunjukkan sikap hormat kepada Presiden Jokowi, namun pada penjelas berikutnya Fraksi Partai Demokrat mengeluarkan sindiran yang besar kepada Presiden Jokowi yaitu bahwa Presiden Jokowi mencoreng sejarah RI dan tidak pikir panjang atau tidak mempertimbangkan secara matang dalam mengambil keputusan. Elemen pengingkaran juga terdapat dalam wacana tersebut. Pengingkaran menunjukkan seolah-olah Fraksi Partai Demokrat menyetujui, padahal ia tidak setuju dengan memberikann argumentasi atau fakta yang menyangkal persetujuan tersebut. Dari kedua penjelas tersebut termasuk dalam elemen pengingkaran juga, karena adanya maksud bahwa yang diungkapkan di awal akhirnya disangkal dengan bentuk penolakan terhadap pendapat yang di awal pernyataan.

Keseluruhan jalannya Sidang Paripurna pada tanggal 17 Januari 2015 dengan mengagendakan pengambilan keputusan mengenai Calon Pimpinan KPK dan Calon Pimpinan Kapolri dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.9 Alur Keputusan Mengenai Calon Pimpinan KPK



Gambar 4.10 Alur Keputusan Mengenai Calon Kapolri

Berdasarkan dua kasus yaitu pengambilan keputusan mengenai calon Pimpinan KPK dan calon Pimpinan Kapolri. Dalam pengambilan keputusan masih berdasarkan pandangan setiap fraksi bukan pandangan secara individu masing-masing anggota. Walaupun dalam wacana anggota dewan menjelaskan bahwa ia berasal dari Dapil tertentu, namun selalu diikuti dari Fraksi apa. Hal ini membuktikan bahwa apa pun permasalahan yang akan diputuskan akan sulit mendapatkan suara yang benar-benar dari suara rakyat yang dilihat dari Dapil masing-masing anggota. Anggota dewan akan selalu ditunggangi kepentingan fraksi masing-masing karena frasa *pandangan fraksi* ataupun *sikap politik fraksi* masih terus digunakan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Melalui kajian wacana lisan pada Sidang Paripurna DPR RI periode 2014–2019, diperoleh penggunaan diksi dan gaya bahasa yang beragam. Diksi yang digunakan anggota dewan pada saat persidangan memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebut dapat dilihat dari istilah-istilah politik yang jarang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Istilah-istilah ini terbentuk memang karena bahasa ini sudah menjadi tradisi dari penggunaan istilah saat persidangan. Tetapi ada juga istilah-istilah politik yang digunakan sesuai dari penguasa pada masa Reformasi ini. Suatu istilah juga dapat dipengaruhi oleh histori dan kekuasaan.

Ditinjau dari analisis diksi melalui analisis semantis, dengan menggunakan KBBI, peneliti mengetahui makna yang sebenarnya dan makna kiasan. Diksi yang digunakan anggota dewan beragam. Pengelompokan diksi berdasarkan jenisnya ditemukan ada empat jenis diksi yang digunakan oleh anggota DPR RI, yaitu diksi denotatif, konotatif, polisemi, dan sinonimi. Penggunaan keempat diksi tersebut dapat menunjukkan bahasa yang digunakan anggota dewan sudah tepat atau belum dan menunjukkan apakah bahasa anggota dewan sopan atau kasar.

Diksi denotatif yang digunakan anggota dewan pada saat Sidang Paripurna menunjukkan ciri khas daripada istilah-istilah pada bidang lain. Istilah-istilah yang digunakan menunjukkan bahasa yang berkembang dalam dunia politik pada era Reformasi ini. Contoh penggunaan diksi yang menunjukkan diksi denotatif seperti: *kader, politisi, legalitas, komisioner, skors, walk out, pandangan fraksi* dan sejenisnya. Dari diksi denotatif yang ditemukan, penggunaan bahasa oleh anggota dewan masih belum tepat. Selain itu, ditemukan adanya kata-kata serapan bahasa asing untuk menggambarkan sikap politik misalnya *walk out*. Apabila dilihat dari maksud dan konteks, penggunaan diksi denotatif tersebut menunjukkan bahwa anggota dewan merupakan anggota dewan yang

mengatasnamakan fraksi dan lebih memilih menggunakan unsur politisi dibandingkan unsur negarawan.

Diksi konotatif menunjukkan makna lain yang tersirat dari kata tersebut dan tidak sesuai dengan makna yang aslinya apabila merujuk pada KBBI. Diksi konotatif yang digunakan pada saat Sidang Paripurna menunjukkan bahwa Sidang Paripurna DPR RI yang merupakan rapat tertinggi DPR RI masih menggunakan bahasa-bahasa yang berkonotasi dengan makna yang lain. Contoh penggunaan diksi yang menunjukkan diksi konotatif seperti: *pemerintahan yang bersih, suara masyarakat* dan sejenisnya. Diksi konotatif digunakan pada saat anggota dewan ingin menggambarkan bagaimana seharusnya anggota dewan yang sebenarnya di mata rakyat. Penggunaan diksi konotatif digunakan salah satunya untuk mendapat citra positif dari rakyat.

Diksi polisemi untuk menggambarkan sesuatu dengan menggunakan susunan kata yang lain sehingga membentuk makna yang baru. Diksi polisemi banyak ditemukan khususnya untuk menggambarkan jabatan. Diksi polisemi yang digunakan anggota dewan menunjukkan bahwa anggota dewan masih mengungkapkan suatu maksud dengan menggunakan kata yang tidak sesuai dengan KBBI, walaupun apa yang dimaksudkan anggota dewan sudah dapat dimengerti oleh pendengar, karena diksi tersebut sudah tidak asing. Contoh penggunaan diksi yang menunjukkan diksi polisemi seperti: *memangku jabatan, menduduki jabatan* dan sejenisnya.

Diksi sinonimi dalam Sidang Paripurna DPR RI menunjukkan bahwa ada peristilahan yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Contoh penggunaan diksi yang menunjukkan diksi polisemi seperti: *ahli dan pakar, kelayakan dan kepatutan*. Ditemukan penggunaan diksi sinonimi merupakan salah satu aspek penilaian bahwa bahasa anggota dewan masih belum tepat, karena menggunakan bahasa yang mubazir atau berlebihan berdasarkan makna.

Diksi yang digunakan pada saat Sidang Paripurna DPR RI menunjukkan bagaimana keadaan politik Indonesia saat ini. Sesuai dengan istilah *bahasa menunjukkan bangsa*. Bahasa yang digunakan para politisi Indonesia dilihat dari

penggunaan bahasa anggota DPR RI menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan masih belum tepat.

Diksi selalu berdampingan dengan gaya bahasa, dengan mengetahui diksi yang digunakan akan menentukan gaya bahasa seperti apa yang anggota dewan gunakan. Gaya bahasa yang digunakan anggota dewan sangat beragam. Gaya bahasa yang dapat ditemukan adalah gaya bahasa eufemisme, erotesis, koreksi, oksimoron, resmi, klimaks, repetisi, personifikasi, dan sindiran.

Gaya bahasa eufemisme yang ditemukan, misalnya pada saat para anggota dewan mencoba mempertahankan kepentingannya dengan usaha untuk meyakinkan masyarakat, bahwa tanpa pemerintahan yang dipimpin olehnya (atau kelompoknya), negara akan mengalami persengketaan nasional atau mengalami kekalutan politik yang tidak akan berakhir. Penggunaan gaya bahasa eufemisme menunjukan bahwa anggota dewan dalam penyampaian pendapatnya ada yang disembunyikan, disamarkan maksud dan tujuan. Contoh penggunaan gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa eufemisme seperti: *sangat terharu dengan kondisi demokrasi bangsa hari ini*.

Penggunaan gaya bahasa erotesis dapat menunjukkan bahwa anggota dewan dalam berpendapat selalu meyakinkan pendengarnya. Contoh penggunaan gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa erotesis seperti: *apakah ini sumpah jabatan yang kita bicarakan, apakah seperti ini yang kita inginkan*.

Penggunaan gaya bahasa koreksi dapat menunjukkan bahwa anggota dewan tidak selalu fokus pada permasalahan yang dibicarakan dan menunjukkan ketidaktegasan. Contoh penggunaan gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa koreksi seperti: *kami persilahkan kepada partai yang akan menyampaikan paket. Ah ya partai ya fraksi*.

Penggunaan gaya bahasa oksimoron dapat menunjukkan bahwa bahasa anggota dewan berbelit-belit yang sebenarnya bertujuan untuk menjatuhkan lawan bicara. Contoh penggunaan gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa oksimoron seperti: *fraksi Partai Demokrat mendukung sepenuhnya pencalonan komjen Pol. Budi Gunawan sebagai kapolri (semua tepuk tangan). Kami*

mendukung sepenuhnya, namun Komjen Pol. Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi.

Sebanarnya Sidang Paripurna merupakan forum resmi, jadi bahasa yang digunakan terdapat gaya bahasa resmi walaupun disamping itu terdapat bermacam-macam gaya bahasa yang lain. Penggunaan gaya bahasa resmi menunjukkan bahwa Sidang Paripurna tetap merupakan forum resmi. Contoh penggunaan gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa oksimoron seperti: *cita-cita bangsa dan negara dan tercapai melalui pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang DPR RI.*

Data yang diteliti merupakan data lisan maka gaya bahasa klimaks sangat minim dan keruntutan dilihat dari makna kalimat tersebut. Penggunaan gaya bahasa klimaks menunjukkan bahwa penyampaian pemikiran anggota dewan runtut. Contoh penggunaan gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa oksimoron seperti: *menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan dan menetapkan pertama meresmikan.*

Penggunaan gaya bahasa repetisi menunjukkan bahwa anggota dewan menggunakan bahasa menekan agar dapat dipercaya. Contoh penggunaan gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa oksimoron seperti: *teman-teman yang tidak bersepakat, teman-teman yang tidak bersepakat.*

Penggunaan gaya bahasa personifikasi menunjukkan bahwa adanya bahasa kiasan yang digunakan pada forum resmi. Contoh penggunaan gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa oksimoron seperti: *memangku jabatannya.*

Gaya bahasa sindiran dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Dari ketiga jenis sindiran tersebut, yang paling banyak digunakan adalah sinisme. Gaya bahasa sindiran yang digunakan oleh anggota DPR RI digunakan untuk menjatuhkan lawan fraksi, menjatuhkan pendapat lawan fraksi, membalas pernyataan lawan fraksi atau hanya untuk bercandaan. Penggunaan gaya bahasa sindiran menunjukkan anggota dewan berani terang-terangan untuk melawan lawan politiknya dengan gaya menyindir. Contoh penggunaan gaya bahasa yang menunjukkan gaya bahasa sindiran seperti: *Pimpinan pimpinan memimpin rapat 506 orang, hati-hati buk airnya tumpah.*

Berdasarkan diksi dan gaya bahasa yang digunakan oleh anggota dewan dapat disimpulkan adanya maksud dan tujuan tersendiri dari anggota dewan. Maksud dan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) kepentingan-kepentingan yang diutamakan oleh anggota dewan tersebut, kebanyakan adalah kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan politik, namun mengatasnamakan kepentingan untuk rakyat; (2) terdapat propaganda-propaganda melalui wacana yang diutarakan oleh setiap perwakilan fraksi; (3) adanya pencitraan dari setiap fraksi untuk dinilai mendukung rakyat; (4) adanya saling tuduh dan saling tuding dari setiap fraksi dengan gaya bahasa sindiran dengan maksud mengunggulkan kepentingan pribadi dan kelompok, namun tetap mengatasnamakan kepentingan rakyat; (5) berusaha menyembunyikan kepentingan-kepentingan politik dengan gaya bahasa eufemisme; (6) anggota dewan atau fraksi yang memiliki kekuasaan tertinggi akan mendominasi keputusan.

Bahasa dan kekuasaan merupakan dua aspek yang berkaitan. Seseorang menggunakan bahasa untuk mendapatkan kekuasaan. Melalui bahasa-bahasa persuasif dan propaganda untuk mempengaruhi dan membuat opini publik, seseorang menciptakan kekuasaan. Namun, orang yang memiliki kekuasaan juga dapat mempengaruhi bahasa. Dengan nama kuasa, dengan mudah seseorang yang memiliki kekuasaan mempengaruhi massa untuk mengikuti menggunakan bahasa tersebut.

5.2 Saran

Penelitian ini baru mengungkap secara struktural yaitu makna dan jenis diksi dan gaya bahasa secara semantis. Selanjutnya diungkapkan wacana dari penggunaan diksi dan gaya bahasa tersebut dengan dianalisis maksud dan tujuannya dengan teori AWK. Terdapat banyak aspek lagi yang dapat dianalisis dari bahasa politik untuk mengungkap maksud dan tujuan dengan teori-teori yang lebih dalam. Disarankan agar dilakukan penelitian bahasa politik secara lebih dalam dan luas untuk mengungkap pengaruh bahasa dalam dunia politik, karena politik adalah bagian dari kehidupan kita. Melalui bahasa, kekuasaan dapat diperoleh dan dijadikannya politik. Maka sebagai akademisi perlu adanya

penelitian bahasa politik dengan objek kajian yang lain, agar sebagai warga negara kita tidak dapat dibodohi oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan kepentingan rakyat demi tercapainya kepentingan pribadi serta tidak gampang masuk dalam propaganda-propaganda politik melalui wacana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Anwar. *Komunikasi Politik (Filsafat – Paradigma – Teori – Tujuan – Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cangara. 2011. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Bahasa.
- Eriyanto. 2003. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta.
- Iriantara dan Malik. 1994. *Komunikasi Persuasif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jorgensen dan Phillips. 2010. *Analisis Wacana Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keraf, Gorys. 1996. *Diksi dan Gaya Bahasa Komposisi Lanjutan I*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Latif dan Ibrahim, 1996. *Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Parera, Daniel. 2004. *Teori Semantik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rani, Abdul. 2004. *Analisis Wacana: Sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Shoelhi, Mohammad. 2012. *Propaganda dalam Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Tarigan, Henry Guntur. 1987. *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember

Artikel/Skripsi

Amin, Mohammad. 2012. Penyimpangan Bahasa Indonesia di Kalangan Pejabat Negara. Blora: Sekolah Tinggi Agama Islam. <http://alikhlasberan.blogspot.com/2012/11/penyimpangan-bahasa-indonesia-di.html>. Diunduh pada [12 Januari 2015].

Barnes, Melanie. 2004. Bahasa dan Politik: Wacana Politik dan Plesetan. Malang: ACICIS & Universitas Muhammadiyah Malang. <http://www.acicis.edu.au/wp-content/uploads/2015/03/BARNES-Melanie.pdf>. Diunduh pada [12 Januari 2015].

Haryatmoko. 2014. Analisis Wacana Kritis. Jember: Seminar Universitas Jember.

Ibrahim, Gufran Ali. 2005. Idiom Kegamangan dalam Bahasa Politik Kita. Ternate: Universitas Khairun. http://repository.gunadarma.ac.id/270/1/IDIOM%20KEGAMANGAN%20DALAM%20BAHASA%20POLITIK%20KITA_UG.pdf. Diunduh pada [12 Januari 2015].

Kasih, Nur Cahyaning. 2008. Tindak Tutur Kelakar dalam acara Empat Matadi TRANS 7. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Jember: Universitas Jember.

Khusnul, D. Hajar Khuluq. 2012. Analisis Diksi, Gaya Bahasa, dan Gramatikal Pada Lirik Lagu-Lagu Opick. Jember: Universitas Jember.

Nugroho, Agus Setyo. 2009. Diksi dan Gaya Bahasa dalam Rubrik *Celathu Butet*. Semarang: Universitas Diponegoro. eprints.undip.ac.id/4261/1/SKRIPSI_MAHASISWA.doc. Diunduh pada [12 Januari 2015].

Sofyan, Akhmad. 2001. Bahasa dan Realitas Pergolakan Sosio-Politis: Kasus Bahasa Indonesia pada Era Orde Baru, Pergerakan Reformasi, dan Era Gus Dur: JIBS (Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra) Vol. 1/ Nomor 2

Tri, Lestari Mardiana. 2014. "Analisis Diksi dan Stilistika Genetis Pada Lirik Lagu Ebiet G. Ade". Jember: Universitas Jember.

Waljafri. 2011. Peran Bahasa dalam Hegemoni Politik, Sosial, dan Budaya: Jurnal Vol. 16/ Nomor 1. <http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/akademi-ka/article/view/26>. Diunduh pada [12 Januari 2015].

Internet

Youtube. 2014. Video Sidang Paripurna Pelantikan DPR RI Periode 2014–2019. http://m.youtube.com/watch?v=sxc_x08spTo. Diunduh pada [12 Januari 2015].

Youtube. 2014. Video Sidang Pemilihan Pimpinan DPR RI Periode 2014–2019. <http://m.youtube.com/watch?v=fFEA4ysDoeQ>. Diunduh pada [12 Januari 2015].

Youtube. 2014. Video Sidang Pemilihan Pimpinan DPR RI Periode 2014–2019. <http://m.youtube.com/watch?v=RF9DLd2M7s8>. Diunduh pada [12 Januari 2015].

Youtube. 2014. Video Sidang Paripurna Penetapan Alat Kelengkapan Dewan Tiap Tiap Fraksi <https://www.youtube.com/watch?v=d3VU0K2GvYang>. Diunduh pada [12 Januari 2015].

Youtube. 2015. Video Sidang Paripurna DPR RI Penetapan Ketua KPK dan Kapolri. <https://www.youtube.com/watch?v=9MWkC8FoGtQ>. Diunduh pada [25 Januari 2015].

Website. 2014. DPR RI. <http://www.dpr.go.id/>. Diunduh pada [15 Januari 2015].

LAMPIRAN A. DAFTAR ISTILAH POLITIK PERSIDANGAN DPR RI PERIODE 2014–2019 MASA SIDANG 2014/2015

- Daerah Pemilihan : Proses memilih perwakilan rakyat yang berlangsung di daerah atau wilayah tertentu yang ada di Indonesia.
- Keputusan Presiden : Keputusan yang diambil oleh presiden atau kepala negara yang sudah melalui pertimbangan.
- Pimpinan Sementara : Pemimpin yang menjabat selama ketua DPR RI belum terpilih atau tidak selamanya.
- Masa Bakti : Kurun waktu anggota DPR RI menjabat sebagai anggota DPR RI.
- Memori : Catatan masa lampau mengenai kinerja anggota DPR RI periode 2009–2014.
- Konstitusional : Bersangkutan dengan konstitusi suatu negara
- Agenda : Tema yang dibicarakan, bukan lagi suatu catatan ataupun acara.
- Kuorum : Akronim kuorum ini biasa digunakan untuk menunjukkan berapa banyak yang hadir dalam rapat.
- Fraksi : Kata fraksi hampir sama dengan penggunaan kata partai, namun kata fraksi digunakan sebagai nama partai setelah partai tersebut menjadi anggota DPR RI yang sah. Selain itu, fraksi dapat terdiri atas lebih dari dua partai.
- Skors : Dalam persidangan DPR RI digunakan untuk menghentikan rapat sementara.
- Hak anggota : Memiliki makna hak yang dimiliki oleh anggota untuk berbuat sesuatu.
- Voting : Kata voting atau vote ini sudah menjadi salah satu istilah yang menjadi bagian dari peraturan terakhir dalam pengambilan keputusan persidangan.
- Tata Tertib : Peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan.

- Masa Persidangan : Kurun waktu tertentu dalam persidangan.
- Rapat Konsultasi : Nama dari salah satu rapat yang dilaksanakan DPR RI untuk berdiskusi mengenai kapan akan diselenggarakan sidang paripurna ataupun diskusi lainnya antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi.
- Parlemen : Badan yg terdiri atas wakil-wakil rakyat yg dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara.
- Intrupsi : Bentuk istilah untuk meminta izin sebelum berbicara dalam persidangan. Intrupsi apabila dalam kelas atau perkuliahan adalah mengacungkan tangan sebelum berbicara.
- Kondusif : Suatu keadaan yang mendukung atau tidak terjadi kegaduhan dalam suatu acara.
- Lobi : Kegiatan yang dilakukan oleh orang untuk mempengaruhi.
- Paket Calon : Untuk menunjukkan nama-nama calon pimpinan dpr, satu paket terdiri atas lima perwakilan fraksi, masing-masing fraksi satu perwakilan.
- Partai Politik : Perkumpulan (segolongan orang) yang seazas, sehaluan, dan setujuan dalm ranah politik.

LAMPIRAN B. TRANSKRIPSI DATA

B.1 Sidang Paripurna DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2014–2015, Tanggal 1 Oktober 2014, (Pukul 11.40–selesai)

(pertama menyanyikan lagu Indonesia raya dan mengheningkan cipta)

PS (Popong): Saya haturkan assalamualaikum wr. wb. selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat saudara presiden, yang terhormat saudara wakil presiden, yang terhormat saudara pimpinan lembaga negara, yang terhormat para menteri kabinet Indonesia bersatu yang mulia para duta besar kepala perwakilan negara sahabat, yang terhormat saudara pimpinan partai politik, para anggota DPD RI, para anggota DPR RI dan para undangan serta para hadirin hadirati yang sangat kami hormati. Dengan diawali kalam ilahi bismillahirohmanirohim perkenankan kami berdua selaku pimpinan sementara DPR RI membuka Rapat Paripurna DPR RI yang pertama masa persidangan ke-1 tahunan sidang 2014/2015, Hari ini rabu tanggal 1 Oktober 2014 jam 11.40 dan kami nyatakan terbuka untuk umum (ketok 1kali dan semua bertepuk tangan). Sidang yang kami muliakan mari kami memanjatkan puji syukur kehadirat illahi ya robbi atas berkah, rahmat, dan karunianya kepada kita semuanya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan keadaan sehat walafiat. Adapun acara pokok pada Rapat Paripurna kali ini adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR RI masa bakti 2014-2019. Sebelum dimulai pengucapan sumpah dan janji para anggota DPR RI kami persilahkan kepada saudara sekretaris jendral DPR RI untuk membacakan petikan keputusan presiden RI kami persilahkan saudara sekretaris jendral.

Sekjen : Petikan keputusan presiden RI no.92/p/tahun 2014 dengan rahmat tuhan yang maha esa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan dan menetapkan pertama meresmikan dalam keanggotaan DPR masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama: satu Prof. Dr. Bahtiar Ali, M.A. mewakili Partai Nasdem daerah pemilihan Aceh 1 dan seterusnya sampai dengan no. 36 saudara Sulaiman L. Hamzah mewakili Partai Nasdem daerah pemilihan Papua. No. 37 saudara H. Irmawan, S.sos, M.M. mewakili Partai Kebangkitan Bangsa daerah pemilihan Aceh 1 dan seterusnya sampai dengan 83 saudara Pegi mewakili Partai Kebangkitan Bangsa daerah pemilihan papua. No 84 saudara M. Nasir Jamil mewakili Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Aceh 1 dan seterusnya sampai dengan no. 123 saudara Mohammad Yudi mewakili Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Papua. No.

124 saudara Ir. Tadore Abu bakar mewakili PDIP dan seterusnya sampai dengan no. 229 saudara Toni Wardoyo mewakili PDIP daerah pemilihan papua. No. 230 saudara H.M. Salim Fahri mewakili partai Golkar daerah pemilihan Aceh 1 dan seterusnya sampai dengan no. 319 saudara Yoses mewakili partai Golkar daerah pemilihan papua Barat. No. 320 saudara Fadluallah mewakili partai Gerindra daerah pemilihan Aceh 1 dan seterusnya samapai dengan no. 392 saudara Robet Rau mewakili paratai Gerindra daerah pemilihan papua. No. 393 saudara Tengku mewakili partai Demokrat mewkili daerah pemilihan aceh 1 dan seterusnya sampai dengan no. 452 saudara maicle mewakili partai Demokrat daerah pemilihan Papua barat. No. 453 saudara H. Muslim Hayub mewakili Partai Amat Nasional daerah pemilihan Aceh 1 dan seterusnya sampai dengan no. 500 saudara H. Jamaludi Jafar mewakili Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Papua. No. 501 saudara Drs. H. Anwar Idris mewakili Partai PPP daerah pemilihan aceh 2 dan seterusnya sampai dengan no. 539 saudara Dr. Mz amirul Tamim mewakili partai PPP daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. No. 540 saudara Ir. Nurdin Tangkubolon mewakili Partai Hanura daerah pemilihan Sumatera 1 dan setrusnya sampai dengan no. 555 saudara H. Limpo mewakili partai Hanura daerah pemilihan Sulawesi selatan 1 kedua dan setrusnya ketiga dan seterusnya keempat keputusan presiden mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah janji salinan dan seterusnya ketikan keputusan presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Ditetapkan Jakarta, 30 September 2014 presiden RI tertanda Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

PS (Popong): Sidang yang kami muliakan telah kita dengah bersama-sama petikan keputusan presiden RI oleh saudara sekjen DPR RI , untuk itu kami sampaikan terimakasih. Selanjutnya sesuai pasal 77 ayat 1 UU no.14 tahun 2014 MPR, DPD, DPR, dan DPRD yang biasa kita dengar singkatannya MD3 yang berbunyi anggota DPR yang sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji secara bersama-sama yang akan dipandu oleh Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna DPR. Untuk itu kami memohon dengan hormat kepada saudara ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah dan janji dan perkenankanlah kami berdua untuk meninggalkan sementara meja pimpinan ini untuk bergabung dengan rekan rekan kami yang lain (semua bertepuk tangan) terimakasih. Guna mengikuti pengucapan sumpah dan janji sebagai janji sebagai anggota DPR, kami mohon izin kepada pak presiden.

MC : Pimpinan sementara DPR kembali menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPR. Para wakil kelompok sumpah janji anggota DPR silahkan menempati tempat

- yang telah ditentukan. Para rohaniwan silahkan menempati tempat yang telah ditentukan ketua Mahkamah Agung dipersilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota DPR terpilih dimohon berdiri, hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji dipandu oleh ketua Mahkamah Agung.
- MA : Sebelum memangku jabatan anggota DPR saudara-saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama masing masing. Apakah saudara saudara bersedia disumpah menurut agama saudara.
- Anggota : Siap (serentak)
- MA : Patut saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan Negara RI tanggungjawab memelihara dan mengingatkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. Saya harap saudara saudara mengikuti lafal sumpah atau janji yang akan saya pandu.
- (pengucapan sumpah janji)
- MC : Persiapan penandatanganan berita acara sumpah janji secara simbolik, kepada wakil kelompok sumpah janji dan para rohaniwan dipersilahkan maju ke tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung dipersilahkan maju ke tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan sumpah janji secara simbolis. Ketua Mahkamah Agung, para wakil kelompok sumpah janji, dan para rohaniwan, dipersilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin dimohon duduk kembali. Para anggota DPR dipersilahkan secara bersama-sama menandatangani berita acara sumpah janji dan membubuhkan tanda tangan pada formulir yang telah diletakan di meja masing masing. Pimpinan sementara DPR dipersilahkan kembali menempati kursi pimpinan.
- PS : Sidang yang kami mulyakan dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin acara pengucapan sumpah janji telah terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu pada kesempatan ini perkenankanlah kami berdua mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat saudara ketua mahkamah agung dan saudara saudara rohaniwan atas pelaksanaan pengucapan sumpah dan janji para anggota DPR RI masa bakti tahun 2014-2019, dalam kesempatan hari ini pimpinan DPR RI periode 2009-2014 akan menyerahkan memori DPR RI 2009-2014 kepada DPR RI masa bakti 2014-2019 yang akan diterima oleh kami berdua selaku pimpinan sementara. Memori termaksud memuat laporan kinerja dan inventarisasi baik yang sudah dan belum terselesaikan oleh DPR RI masa bakti 2009-2019 untuk dapat tentu saja dipergunakan sebagai bahan masukan bagi DPR RI masa bakti 2014-2019. Dalam rangka melaksanakan tugas konstitusionalnya.
- MC : Pimpinan DPR RI masa bakti 2009-2014 dan pimpinan sementara DPR RI dipersilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Penyerahan memori oleh pimpinan DPR RI masa bakti 2009-2014 kepada pimpinan sementara DPR RI, dilanjutkan kepada

penandatanganan berita acara serah terima. Pimpinan DPR RI masa bakti 2009-2014 dipersilahkan kembali ke tempat semula. Pimpinan sementara DPR RI dipersilahkan kembali menempati kursi pimpinan.

PS

: Sidang yang kami hormati anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 bersama-sama telah mengucapkan sumpah janji dan dalam waktu yang bersamaan serah terimakan memori DPR RI masa bakti 2009-2014. Maka mulai hari ini dan hari hari yang akan datang selama lima tahun kedepan kita dapat mewujudkan harapan dan amanah yang dipercayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kita cita-cita bangsa dan negara dan tercapai melalui pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang DPR RI dengan demikian selesailah sudah acara dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan pokok acara adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR RI masa bakti 2014-2019. Izinkanlah kami menutup Rapat Paripurna dewan pada pagi hari ini dengan mengucapkan bilahitaufik wassalamualaikum wr. wb. (mengetok palu 3 kali)

B.2 Sidang Paripurna DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2014–2015, Tanggal 1–2 Oktober 2014, (Pukul 22.30–selesai), Agenda Pemilihan Pimpinan DPR RI

PS (Popong) : Kita skors begitu, beri waktu kemudian sambil ditelfon apakah mau hadir atau tidak begitukan? Itu lebih lebih adil pak karena saya juga harus mendengar lanjut karena lebih banyak yang minta lanjut tapi saya harus adil kepada yang tidak hadir.

Anggota : Terimakasih pimpinan.

PS (Popong): Kita apakah setuju kita skors berapa lama? (Anggota bersorak ada yang bilang 5 menit ada yang bilang 10 menit).

PS (Popong): Kita skors, baik ya baik jadi keputusannya kita skors memberikan waktu, namun namun ya kita harus tetap menghargai ya cara-cara paripurna. Di dalam Rapat Paripurna kalau sudah dibuka apakah itu nanti dilanjutkan atau tidak pada saat pembukaan itu berdasarkan pasal 59 ayat 1 huruf D UU no. 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara pembukaan paripurna MPR jadi saya mohon kepada anggota yang terhormat untuk berdiri bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia raya. Baik ya saya mohon sedikit bahwa ini adalah terbuka untuk umum. Baik kita bersama-sama, dengan hikmat kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Di dalam UU tentang bahasa sudah jelas bahwa kalau kita sedang menyanyikan lagu kebangsaan kita tidak ada yang bergerak dan dalam arti semua ikut nyanyi kecuali warga negara asing. Baik (menyanyikan lagu Indonesia raya dengan diiringi musik). Terimakasih silahkan duduk kembali, baik sidang yang terhormat saya ingin mengulangi tadi yang sudah disampaikan bahwa kita sudah menyepakati kita skors ya selama berapa? 30 menit dengan catatan, ya dengan catatan kita hubungi dulur dulur kita, saudara-saudara kita dari 2 partai supaya sudah jadi saya (berbicara dengan sekjen) sudah ada yang, tidak apa-apa 30 menit asal jangan ngantuk kita, saya skors 30 pukul menit (mengetok palu 1 kali dan ruangan menjadi ricuh dan para anggota berkeliaran karena sidang di skors).

PS (Popong): Acara selanjutnya adalah penetapan fraksi fraksi DPR RI (Interupsi terus terjadi oleh anggota dewan).

Anggota : Pimpinan mohon jangan arogan, interupsi.

PS (Popong): Saya akan memberikan, sebentar pak (beberapa anggota dewan maju ke depan meja pimpinan untuk protes).

Anggota : Jangan maju, mundur woi woi jangan mancing.

Anggota :Interupsi itu boleh, kita diatur mekanisme interupsi. Interupsi dan intruksi.

- Anggota : Interupsi pimpinan interupsi berikan waktu dulu untuk interupsi, berikan kesempatan untuk interupsi pimpinan, pimpinan berikan kesempatan untuk interupsi
- Anggota : Silahkan mundur, mundur.
- Anggota : Berikan kesempatan untuk interupsi pimpinan.
- PS (Popong): Tolong duduk dulu.
- Anggota : Saya setuju duduk duduk.
- PS (Popong): Tolong duduk dulu.
- Anggota : Berikan kesempatan untuk interupsi terlebih dahulu, jangan mengambil keputusan apapun.
- PS (Popong): Yak tolong duduk dulu, apa yang harus diketok? Apa yang harus diketok.
- Anggota : Jangan mengambil keputusan terlebih dahulu.
- PS (Popong): Bahwa lanjut?
- Anggota : Lanjut lanjut.
- PS (Popong): Lanjut lanjut lanjut? (hampir mengetok palu).
- Anggota : Jangan mengambil keputusan terlebih dahulu.
- PS (Popong): Bapak apa bisa duduk, nanti saya akan minta pandangan per partai tolong duduk dulu.
- Anggota : Perhatikan interupsi terlebih dahulu
- PS (Popong): Tolong duduk dulu, tolong duduk, nanti kalau bicaranya. Apa bisa duduk nggak?
- Anggota : Nggak usah pancing pancing kawan
- PS (Popong): Duduk dulu, tidak saya minta duduk dulu. Iya duduk dulu kalau belum kalau tidak duduk sambil berdiri saya nggak akan kasih. Duduk dulu, iya.
- Anggota : Pimpinan assalamualaikum wr. wb.
- Anggota : Kasih tau buk anak-anaknya suruh duduk buk.
- PS (Popong): iya jadi.
- Anggota : Nggak ada yang bisa maksakan kehendak duduk.
- PS (Popong): Lanjut, jadi harus dilanjutkan sampai selesai, sampai selesai, lanjut sampai selesai tolong duduk dulu.
- Anggota : Lima menit lag waktu sidang kita sudah selesai pimpinan pasal 226 ayat 1 huruf b.
- PS (Popong) : Tolong duduk dulu, kalau tidak duduk saya tidak akan jawab. Duduk dulu, duduk dulu.
- Anggota : Yang ngerti peraturan duduk. Duduk duduk duduk
- PS (Popong): Apa yang dicabut? Yang dicabut itu apa ? iya ketok apa? Sudah sudah dicabut skornya. Terus diperpanjang. Banyak yang sudah ngomong banyak setuju.
- Anggota : Ini yang baru datang tidak ngerti persoalan, yang baru datang nggak ngerti persoalan duduk duduk.
- PS (Popong): Mangga duduk dulu duduk dulu. apa yang dicabut? Perpanjangan? Apa?
- Anggota : Duduk duduk duduk, nggak usah naik naik kawan. Jangan sok jagoan.

- PS (Popong): Tapi saya minta duduk dulu.
- Anggota : Beri kesempatan pimpinan sidang bicara.
- PS (Popong): Duduk duduk duduk dulu. Tapi duduk dulu atuh, ah duduk dulu naonan na yang kudu dicabut? Tapi yang lain setuju? Makanya duduk dulu nanti kita bicarakan baik baik. Duduk dulu.
- Anggota : Dicabut dulu buk, dicabut dulu.
- PS (Popong): Iya silahkan duduk.
- Anggota : Yang depan iu duduk dulu ngerti nggak.
- PS (Popong): Bukan, duduk dulu nanti kita bicarakan.
- Anggota : Duduk dulu yang ngerti duduk.
- PS (Popong): Iya mangga tapi sambil duduk bicaranya, iya mangga mau loby mangga tapi duduk dulu atuh. Malu dilihat ini terbuka.
- Anggota : Mantap sudah duduk kawan (akhirnya semua duduk).
- Anggota : Kualat lo sama orang tua.
- PS (Popong): Sudah duduk mangga. Baik maaf tadi ada kesalahan seharusnya bukan 11.30 harusnya dari 22.30 tadi sudah harus sudah waktunya habis. Nah tapi kemudian saya diberi izin untuk menskors 30 menit untuk menunggu kawan kawan kita yang belum hadir kan tadi begitu jalan keluarnya. Nah yak an seperti itu, nah kan enak bicaranya kalau seperti ini daripada ribut. Mangga ya, nah jadi dalam tata tertib ini itu a batas waktu rapat apa sidang apa itu sidang fraksi atau sidang apa 22.30 itu. Nah sekarang kan kita kan sudah lebih dari 22.30 itu sudah lebih tapi, sebentar sebentar karena tadi tidak ada yang memprotes saat saya bilang.
- Anggota : Memprotes buk.
- Anggota : Ayo buk lanjut.
- PS (Popong): Sedangkan kita masih punya beberapa agenda, kita masih punya beberapa agenda. Pertanyaannya adalah.
- Anggota : Lanjutkan besok.
- PS (Popong): Iya sebentar sebentar pertanyaannya adalah dengarkan karena kita masih punya beberapa agenda dimana sebetulnya kalau menurut aturan jumlah anggota memang sudah kuorum sudah lebih dari setengah lebih 1 menurut aturan. Cuman karena ada 2 fraksi bukan fraksi maaf salah partai belum hadir makanya tadi kan kita mengambil keputusan cara dengan diperpanjang sorry di skors 30 menit. Kan begitu, ini ini kan semua sudah setuju. Skors sudah saya cabut untuk melanjutkan agenda dalam sidang paripurna ini. Nah jadi tentu harus dengan persetujuan anggota yang terhormat harus ada persetujuan apakah ini mau diperpanjang sampai selesai (Anggota ada yang ingin lanjut dan ada yang ingin skors)
- PS (Popong): Nanti dulu nanti dulu. supaya adil supaya adil kan ceritanya ingin adil saya ingin tanya nanti dan yang menjawab hanya perwakilan saya ingin tanya tiap partai begitu. Kan gampang nah tiap partai bisa memberikan pandangan apakah ini akan diperpanjang, saya rasa apa yang harus diinterupsi.

- Anggota : Soal waktu pimpinan.
 PS (Popong): Ada aturannya, saya minta sekarang ada perwakilan partai hanya cukup untuk berdiri.
- Anggota : Interupsi dulu pimpinan, pimpinan.
 PS (Popong): Sebentar, nanti interupsi setelah saya meminta setiap partai perwakilan partai apakah diperpanjang atau tidak itu pertanyaannya pertama dari partai kalau ada partai demokrasi Indonesia perjuangan ada? Tidak ada? Ada? diperpanjang atau tidak?
- Anggota : Interupsi pimpinan interupsi pimpinan
 PS (Popong): Yang kedua.
 Anggota : Interupsi pimpinan interupsi.
 PS (Popong): Ada perwakilan dari PDI Perjuangan? Ada? Ada tidak? Ada? Silahkan? Silahkan bicara dari PDIP diperpanjang atau tidak? Iya saya mempersilahkan PDIP hanya untuk diperpanjang atau tidak (mic perwakilan PDIP mati).
- Anggota : Ini micnya mati semua pimpinan, sidang paripurna tidak bisa dilanjutkan mic nya mati semua.
 PDIP : Pimpinan dari PDIP mengenai paripurna ini lebih pengambilan keputusan itu lebih pada hak anggota jadi apabila saudara menyampaikan bahwa persetujuan perpanjangan per fraksi mohon maaf itu kurang tepat sebaiknya itu diambil melalui hak anggota terimakasih.
- Anggota : Iya, yang setuju berdiri dan yang nggak setuju berdiri votting. Yang setuju berdiri.
 PS (Popong): Baik baik ya sekarang mau tanya fraksi atau partai, nah saya tanya partai Golkar.
- Anggota : Pimpinan, waktunya sudah lebih dari yang diatur dalam tatib.
 Anggota : Makanya ditanya.
 Anggota : Iya pasal 226 maka dari itu pimpinan sebaiknya ditanyakan dulu apakah memang diperpanjang atau tidak waktunya.
- Anggota : Iya itulah pertanyannya, iya itulah yang dipersoalkan tadi.
 PS (Popong): Inikan sederhana pak, hanya untuk ya, persetujuan diperpanjang atau tidak. Kan hanya itu kenapa jadi riweh riweh. Nah saya sekarang mau bertanya kepada partai partai mereka punya hak untuk ditanya. Partai Golkar setuju diperpanjang? Iya.
- Anggota : Mekanismenya tidak seperti itu, biarkan setiap anggota untuk memberikannya.
 PS (Popong): Partai Gerindra, ? perpanjang. Demokrat? Perpanjang, partai amanah nasional? Perpanjang, dengerin atuh tuh, Partai Kebangkitan Bangsa tidak ada. Ada tidak? Tidak ada. Partai keadilan sejahtera? Setuju. Tuh dengerin tuh, Partai Persatuan Pembangunan? Setuju. Partai Nasional Demokrat? Ada? Nasdem?
- Anggota : Tidak setuju
 PS (Popong): Tidak ada? Tidak setuju, biarin ini baru satu yang tidak setuju ini mah a (semua bersorak). Partai Hanura? Partai Hanura? Baik. Jadi

menurut catatan yang ada pada saya apakah ini dilanjutkan apa tidak. Diperpanjang atau tidak menurut catatan pada saya adalah dilanjutkan. Nanti, nanti persoalan yang lain tu nanti. Sekarang ini hanya diperpanjang atau tidak sekarang jumlahnya sudah lebih banya (tiba-tiba mengetok 1 kali) diperpanjang.

Anggota : Tidak tidak tidak.

PS (Popong): Baik saya lanjutkan agendanya, kalau ada yang mau nambah agenda nanti. Agendanya yang ketiga. Eh yang kedua. Agenda yang kedua adalah agenda yang kedua.

Anggota : Interupsi

PS (Popong): Apa yang harus diinterupsi, kalau sudah hanya ada menambah waktu. Nanti kalau sudah selesai.

Anggota : Jangan bercanda memimpin rapat ibu

PS (Popong): Yang kedua adalah penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI . Nah saya tanya sekarang kepada partai kembali saya akan berurutan seperti tadi, Baik.

Anggota : Interupsi pimpinan.

PS (Popong): Saya diingatkan sama cucu saya, saya diingatkan bahwa yang harus disetujui dulu adalah

Anggota : Pimpinan micnya mati semua kecuali mic saya.

PS (Popong): Ini tadi, perpanjangan sudah setuju (tiba-tiba ada anggota dewan yang maju).

PS (Popong): Menurut partai sudah, menurut partai sudah. sekarang pengesahan jadwal acara rapat masa persidangan 1 bahwa sekarang ini.

Anggota : Interupsi interupsi (tiba-tiba ruang persidangan jadi ricuh).

PS (Popong): Supaya tau, kenapa itu mic mic jadi mati (pimpinan diskusi dengan salah satu anggota dewan mengenai mic) saya hanya ingin mengingatkan di dalam tata tertib anggota tidak diperkenankan naik ke pimpinan sidang. Walaupun sambil nyium Popong tetep tidak boleh begitu ya. Mangga baik baik sekarang lanjut kepada acara ke mata acara pengesahan jadwal acara terlebih dahulu yaitu sekarang paripurna yang pertama dalam masa persidangan 1 sekarang ini adalah paripurna yang kedua setelah tadi. Ini paripurna yang kedua setuju?

Anggota : Setuju.

PS (Popong): Sekarang penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI ini jadwalnya seperti ini dan sudah disepakati dalam rapat konsultasi begitu.

Anggota : Interupsi interupsi.

PS (Popong): Untuk pembentukan fraksi fraksi sayang sekali sayang sekali untuk berurutan sebentar sebentar.

Anggota : Pimpinan pimpinan memimpin rapat 506 orang.

Anggota : Interupsi pimpinan, pimpinan yang terhormat yang mulia.

PS (Popong): Baik saya lanjutkan.

Anggota : Pimpinan yang terhormat yang mulia.

- PS (Popong): Silahkan dari partai PDIP untuk menyampaikan mengenai pembentukan fraksi silahkan dari PDIP siapa ketuanya jumlahnya berapa namanya apa itu menurut jadwal yang sudah kita sepakati. Tidak ada? Tidak ada? Ada?
- Anggota : Interupsi, pimpinan pimpinan
- PS (Popong): Saya panggil satu kali lagi PDIP tidak ada? Tidak ada? Kalau begitu kita lewat dulu. Dari partai Golkar.
- Anggota : Ya allah ya robbi
- PS (Popong): Iya dari Golkar mangga, silahkan dibacakan. Silahkan pak dibaca pak. Pak ade kumarudin silahkan dibaca.
- Golkar : assalamualaikum wr.wb.
- PS (Popong): waalaikum salam wr.wb.
- Golkar : Pimpinan sementara dan seluruh anggota yang terhormat partai Golkar sampai dengan saat ini mempunyai anggota 91 anggota nama fraksinya fraksi partai golongan karya disingkat FPG nama-nama anggota tidak kami sebutkan satu persatu tetapi akan kami sampaikan kepada pimpinan susunan pimpinan saya sendiri ketua Fraksi partai Golkar . Yah wabilahitaufik walhiyah wassalamualaikum wr.wb.
- PS (Popong): Waalaikumsalam wr.wb. baik silahkan duduk dulu. saya lanjutkan kepada partai Gerindra. Silahkan ada?
- Gerindra : Assalamualaikum wr.wb. salam sejahtera nama fraksi Partai Gerindra DPR RI jumlah anggota 73 pimpinan fraksi Ketua Hj. Ahmad Muzani sekretaris Fani Dewan pusat pimpinan Gerindra Ketua umum Adi Prabowo Subiyanto Sekjen Hj. Ahmad Muzani terimakasih.
- PS (Popong): Terimakasih, (perwakilan Gerindra mencium tangan Popong).
- Anggota : Hati-hati airnya tumpah buk.
- PS (Popong): Saya lanjutkan dulu, saya lanjutkan dulu mata acara yang ini. Yang ketiga eh yang keempat adalah Partai Demokrat, silahkan. Tunggu lagi bicara dulu.
- Demokrat : Terimakasih pimpinan.
- Anggota : Ibu rapatnya belum ditutup.
- PS (Popong): Sudah silahkan sudah rekamannya ada rekamannya ada makasih hah.
- Demokrat : Assalamualaikum wr.wb.
- PS (Popong): Waalaikumsalam wr.wb.
- Demokrat : Yang terhormat pimpinan sidang sementara DPR RI dan para anggota dewan yang terhormat bersama ini saya sampaikan susunan pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI per. 14-19 dan partai Demokrat berjumlah 61 anggota dengan nama Fraksi Partai Demokrat atau FPD dengan ketua fraksi adalah Bpk. Edi Baskoro Yudoyono, sekretaris Didik Putrianto dan bendahara fraksi adalah bapak Anton Sukartono. Selanjutnya akan kami sampaikan kepada pimpinan.
- PS (Popong): Terimakasih.

PS (Popong): (berbagai interupsi dari anggota yang ada di tempat duduk bahwa rapat konsultasi belum ditutup) Sudah rekamannya ada, sekarang Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa tidak ada? Oh PAN silahkan PAN (ada anggota yang maju ke depan dan mengamuk).

PS (Popong): Sudah, ada rekamannya. Silahkan partai amanat nasional.

PAN : Assalamualaikum wr.wb.

PS (Popong): Aaalaikumsalam wr.wb.

PAN : Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati pimpinan sementara dan anggota dewan perwakilan rakyat yang terhormat republik Indonesia bersama ini kami sampaikan anggota fraksi partai amanat nasional DPR RI periode 14-19 berjumlah 48 anggota 39 laki-laki 9 perempuan dengan pendidikan S3 3 orang S2 18 orang dan selebihnya berpendidikan sarjana dengan komposisi ketua yaitu saudara Catur Sapto sekretaris oleh saudara teguh dan bendahara oleh Dewi Kurniawati. Kami menginginkan bangsa Indonesia yang kemandirian ekonomi dan perpijak pada kaki sendiri oleh karena kepentingan politik khususnya legislatif harus senafas dengan semangat ini. Kalau tidak sekarang kapan lagi kalau bukan kita siapa lagi wassalamualikum wr.wb (selama PAN berbicara ada 2 orang yang terus ngamuk di depan ibu cupopo).

PS (Popong): waalaikumsalam wr.wb. makasih

Anggota : Yang mengganggu sidang bisa dikeluarkan ibu ketua, yang mengganggu sidang bisa dikeluarkan ditatib itu bisa. Yang mengganggu jalannya sidang bisa dikeluarkan.

PS (Popong): Baik saya lanjutkan kepada partai keadilan sejahtera, silahkan. Kalau ketok 3 kali itu bukan tutup?

PKS : Bissmilahirohmanirohim assalamualaikum wr.wb.

PS (Popong): waalaikumsalam wr.wb.

PKS : Yang terhormat pimpinan DPR sementara dan para anggota parlemen yang saya hormati Partai Keadilan Ssejahtera dengan nama fraksi Partai Keadilan Sejahtera disingkat FPKS dengan pimpinan Dr. Hidayat Nurwahid dengan jumlah 60 anggota. Terimakasih assalamualikum wr.wb.

PS (Popong): waalaikumsalam wr.wb.

Anggota : Pimpinan interupsi pimpinan interupsi tolong rapat ini sudah tidak kondusif lagi pimpinan tolong diberikan kesempatan kepada anggota untuk bicara.

Anggota : Yang nggak ngerti aturan keluar (banyak anggota dewan yang maju dan mulai ingin memprovokasi pimpinan sidang).

PS (Popong): Sebentar sebentar ketua rapat memperingatkan.

Anggota : Rapat Konsultasi tadi belum selesai pimpinan tolong diskors dulu.

PS (Popong): Saya lanjutkan dulu saya lanjutkan PPP.

Anggota : Pimpinan pimpinan tolong diskors dulu rapat tidak kondusif dan rapat konsultasi tadi belum ditutup.

- PPP : Aassalamualaikum wr.wb. (PPP sambil membacakan pembentukan fraksi tempak duduk pimpinan sidang masih gaduh).
- PS (Popong): Waalaikumsalam wr.wb.
- PPP : PPP membentuk fraksi namanya adalah fraksi PPP disingkat FPPP jumlah anggota 39 orang dengan susunan pimpinan fraksi penasehat Moh. Muzi ketua Azil Aswar wakil ketua Saifullah sekretaris Ariyani wakil sekretaris Oky Asukawati bendahara Iskandar Zairu. Terimakasih wassalamualikum wr.wb.
- PS (Popong): Waalaikumsalam wr.wb.
- Anggota : Pimpinan tolong diskors dulu.
- Anggota : Lanjut ketua lanjut.
- Anggota : Diskors dulu tadi rapat konsultasi belum selesai.
- Cupopo : Baik, karena suasana sudah tidak kondusif partai yang lain kan hanya tinggal Nasdem sama Hanura yang lain semua sudah ya, sama PDIP. Baik karena sudah tidak kondusif jadi ini atas usul dari cucu saya.
- Anggota : Jangan dulu jangan dulu usul apa ini.
- Anggota : Lanjut buk lanjut.
- Anggota : Usul untuk di skors.
- Anggota : Pimpinan interupsi pimpinan bicara sama siapa pimpinan.
- Anggota : Karena sudah tidak kondusif maka sidang di skors.
- Anggota :Bisa dilakukan lobi dan konsultasi lagi, sekjen tidak boleh ikut mempengaruhi.
- PS (Popong): Mangga, dengarkan dulu dengarkan (semakin gaduh suasananya dan maju semua anggota dewan mengerumuni meja pimpinan).
- PS (Popong): Saya peringatkan ada aturan kalau peserta rapat itu, kalau peserta kalau peserta kalau peserta rapat itu.
- Anggota : Sidang di skors.
- PS (Popong):Ini tidak boleh kesini (semakin ricuh dan gaduh bahkan wajah pimpinan sidang sudah tidak terlihat karena dikerumuni oleh peserta sidang).
- Anggota : Ketok palu bu, agar sidang segera ditutup
- Anggota : Duduk duduk duduk heh palu ada maling palu kembali ke kursi masing masing, lanjut nenek
- Anggota : Kita diskors tanpa waktu berarti kita bisa pulang.
- PS (Popong): (tanpa diketok sidang menjadi gaduh dan langsung diskor) rapat di skor dulu.
- Anggota : Pimpinan skors tanpa waktu jadi kita boleh pulang, partai Nasdem boleh pulang kecuali pimpinan fraksi karena skors tanpa waktu (Pimpinan sidang sudah tidak ada ditempat untuk diamankan tetapi para anggota dewan ada yang tetap bergerombol di depan dan ada yang berbica di kursi dewan).
- Anggota :Sesuai pasal 270 tata tertib DPR ketua dapat meminta panja dan polisi untuk mengusir orang orang yang berdiri. Jika tidak bisa, kita bisa meminta Polri untuk menerapkan hukum acara.

(Sidang dibuka lagi pukul 01.59)

PS (Popong): Dari lobi ini tentu perlu kami laporkan yaitu bahwa sidang ini tetap lanjut (sebagian anggota DPR bertepuk tangan) karena tadi itu kita skors supaya apakah ini lanjut atau tidak (sebagian menyuarakan lanjut) lanjut, terimakasih itu lah hasil lobi kami dan dihadiri oleh perwakilan dari parpol-parpol jadi walaupun tidak semua, jadi sidang ini lanjut. (Popong ketok palu satu kali). Baik mangga makasi (sebagian bertepuk tangan) yang dimaksud lanjut yaitu tentu adalah melanjutkan mata acara. Mata acaranya penyampaian setelah pembentukan fraksi-fraksi tadi penyampaian usul paket calon pimpinan DPR RI oleh, oleh partai melalui fraksinya secara tertulis karena fraksi tadi sudah disampaikan jadi demikian (ada salah satu anggota yang interupsi tapi tidak didengarkan) saya mohon kepada (interupsi oleh Abdul Kadir dari PKB).

PKB (Abdul Kadir): Ibu tolong didengarkan assalamualaikum wr.wb. tadi pada forum lobi kami dari PKB meminta dengan hormat kepada seluruh fraksi agar ini dapat ditunda sampai jam 10 pagi ini dengan banyak pertimbangan saya kira (sebagian menyuarakan kata lanjut) dengarkan saya kira keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah lebih elegan, keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah mencerminkan DPR yang bermartabat, keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah menunjukkan bahwa DPR ini punya marwah di depan rakyat kita.

PS (Popong): Maaf bapak.

PKB (Abdul Kadir) : Sebentar sebentar ibu saya punya hak bicara tolong saya diberi kesempatan saya anggota DPR no. 55 oleh karena itu alangkah baiknya teman-teman yang tidak bersepakat, teman-teman yang tidak bersepakat diberi ruang bicara untuk menanggapi hasil lobi yang ada. Terimakasih wassalamualaikum wr.wb.

PS (Popong): Maaf bapak saya selaku pimpinan sudah menyampaikan bahwa hasil lobi sudah seperti itu dengan catatan dengan alasan-alasan yang kami terima dari itu yang mau lanjut baik itu yang tidak mau lanjut. Justru kami ini ingin supaya mendapatkan penghargaan yang mayoritas. Mayoritasnya adalah saya laporkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mayoritas dari lobi itu adalah lanjut, saya Cuma menyampaikan mau apa saya sendiri tidak punya suara?. Jadi saya menyampaikan hasil lobiing dengan permohonan maaf kepada yang kurang setuju, tidak lanjut. Bukan kami tidak menghargai berdua, malah tadi mimpinya harusnya adalah cucu saya, tapi itulah yang bisa kami lakukan untuk yang terbaik, ya dari semua yang baik. Semua baik, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa demi katanya demokrasi. Kalau demokratis itukan harus harus ikut yang banyak atuh, baik maaf saya lanjutkan dengan acara yang selanjutnya. Mana tadi matta acaranya yaitu penyampaian usul paket yang sudah saya katakana tadi. Saya informasikan lagi bahwa

tadi di dalam lobi itu dengan alasan sangat memberikan penghargaan kepada partai yang sekarang itu yang belum memberikan fraksinya. Dengan alasan-alasan yang sangat kami mengerti oleh karenaitu maka kami persilahkan kepada partai yang akan menyampaikan paket. Ah ya partai ya fraksi ah sama bae atuh. Jadi persilahkan sesuai dengan mata acara yang ketiga. (berdiskusi dengan sekretaris “Tentu berdasarkan urutan lagi ya”), Apakah ada yang tadi yang belum entah itu barangkali masih ada untuk menyampaikan mengenai fraksinya silahkan kami masih memberikan kesempatan. Dari PDI Perjuangan, dari PKB,(anggota PKB maju) mangga

PKB (ana maulana) : assalammualaikum wr.wb. saya ana maulana dari Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan sementara yang saya hormati, bapak ibu anggota DPR RI yang kami hormati pertama-tama saya ingin dalam forum ini menyampaikan beberapa hal yaitu tadi semenjak rapat tadi di skors dari jam 22.30 mungkin sudah 99 kali mengajukan interupsi ibu pimpinan tapi mohon maaf tapi kesempatan itu belum pernah ada. Sekarang mungkin saatnya kami sampaikan baik selaku pribadi anggota DPR RI maupun partai PKB hal pertama adalah saya ingin mengklarifikasi bahwa forum konsultasi untur pimpinan a pimpinan partai dengan pimpinan sementara kami a, sebelumnya saya minta maaf yak arena kami memiliki hak untuk bicara, nanti kalau anda ingin menyampaikan anda mempunyai forum sendiri jadi tolong hormati, saya lanjutkan pada rapat konsultasi tadi ada beberapa hal yang belum disepakai menurut pengamatan saya, yaitu yang pertyama yang mana rapat agenda paripurna ini belum ditentukan belum disepakati yang mana yang disodorkan oleh pimpinan yaitu 9 agenda yang salah satunya menurut pimpinan sedang berproses sampai sekarang. Kemudian rapat yang dibuka secara tertutup rapat konsultasi belum ditutup kembali. Saya mendapatkan FD ini adalah hasil rekaman dari pimpinan memimpin rapat dari A sampai Z. Hal yang pertama saya puter berkali-kali apakah ada hal atau kalimat bahwa rapat ditutup belum ada

Celotehan anggota lain: Ada,ada

PKB : Saya membuka ini adalah fd dar persidangan oleh sebab itu karena DPR adalah forum terhormat jika ini ada sesuatu yang disakwasakan. (00.09.41)

Cupopo : Maaf ibu mohon maaf (interupsi untuk dihentikan dan untuk diteruskan mengenai ucapan ana).

PKB : Apabila diragukan, ini dapat diputar, pimpinan pimpinan tolong hormati saya bicara, pimpinan tolong hormati saya bicara, pimpinan tolong hormati saya bicara, tolong hormati saya bicara, saya menghormati ibunda, saya menghormati ibunda jadi tolong saya dihormati ya ibunda. Jadi tolong apabila ada waksawangka dari data yang saya miliki artinya dari persidangan yang tidak

- betul. Kami mendapatkan data ini asli dari persidangan. Tolong ibu, tolong hormati saya, ibu tolong hormati saya.
- PS (Popong): Saya tadi imta untuk urusan fraksi bukan urusan lain.
- PKB : Saya intruksi ibu, saya interupsi.
- PS (Popong): Maaf maaf bapak ada tata tertib kalau ada yang ngariwehkeh, tolong tolong tolong bapak (tiba-tiba ada beberapa anggota DPR yang maju ke depan pimpinan sidang dan berteriak-teriak) ada aturannya bapak-bapak.
- Anggota : Pimpinan tidak hormati anggota.
- PS (Popong): Ada aturannya pak, saya minta tadi fraksi, kenapa tidak tadi waktu lobi?
- Anggota : Kami punya hak suara ibu pimpinan.
- PKB : Ibu pimpinan, saya tadi sudah menyampaikan, tadi jam 22.30 saya tidak diberi waktu untuk interupsi. Mohon maaf ibu, tolong hormati saya untuk bicara ibunda, tolong hormati saya untuk bicara ibunda. Tolong izinkan saya bicara ibunda, semenjak rapat di skors dari rapat konsultasi 99 kali mungkin saya ingin interupsi itu adalah hak anggota diatur dalam undang-undang, diatur dalam tata tertib semua mengetahui jadi saya selain saya menyampaikan pandangan fraksi izinkan saya mengklarifikasi tadi rapat konsultasi, belum pernah rapat itu ditutup. Yang ada adalah, mohon izin ibu, yang ada adalah rapat dibawa Rapat Paripurna tok tok tok. Tapi bukan ditutup, kemudian apa saja agendanya disitu saya menyampaikan dalam forum bahwa pimpinan meninggalkan tempat dengan sekjen yang tidak ada. Oleh sebab itu, ini dokumen resmi dari DPR saya dapatkan dari pimpinan sidang silahkan dibuka silahkan dicopy. Kalau tidak benar maka ini juga tidak benar itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi saya mendengarkan dari pimpinan sidang adanya adanya forum lobi. Lobi itu belum mengambil keputusan. Keputusan ada pada Rapat Paripurna tertinggi jadi saya anggap bahwa forum ini bisa dilaksanakan pandangan-pandangan fraksi kembali baik secara fraksi ataupun secara individu mempunyai hak untuk memilih hak untuk memilih walaupun proses ini akan dilangsungkan, oleh sebab itu, izinkan ini belum mengambil keputusan karena lobi masih jauh dibawah dari paripurna. Ini yang saya sampaikan sehingga buka rekaman perlu nggak ya? Baik atas permintaan teman-teman da asas demokrasi saya serahkan kepada pimpinan segera untuk dibuka demikian saya akhiri waasalamualaikum taala wr.wb.
- Anggota : Dibuka jangan diserahkan. Dari PDIP jangan diserahkan.
- Anggota : Saya bersaksi rapat ditutup.
- PS (Popong): Terima kasih ibu, tadi saya mendengar dari ibu sekjen, tolong ibu sekjen tadi ibu sekjen bilang kepada saya.
- Anggota : Pimpinan interupsi pimpinan tolong ibu sekjen mic dihidupkan supaya semua anggota punya hak bicara (gaduh anggota bilang untuk lanjut “adil pimpinan adil lanjut).

- PS (Popong): Ibu tadi saya sudah ketok palu 3 kali.
 PDIP : pimpinan pimpinan pimpinan yang saya hormati dwi harifah dari PDIP.
- PS (Popong): Saya sudah ketok palu 3 kali.
 Dwi (PDIP) : Pimpinan yang terhormat.
 Ike (PDIP) : Cabut ketok palunya cabut ketok palunya (Dwi belum selesai bicara disela oleh Ike).
- Dwi (PDIP) : Pimpinan yang terhormat dibuka dulu itu, pimpinan yang terhormat bersikap adil dalam persidangan ini. Pimpinan yang terhormat dari PDIP perjuangan tolong adil dalam musyawarah ini dalam memimpin persidangan ini, tolong sekjen micnya dinyalakan.
- PS (Popong): Tidak usah pak, tidak usah saya tadi sudah menutup 3 kali ketok palu.
 Dwi (PDIP): Ini bukan forum antara guru dan murid. Pimpinan yang terhormat batalkan ketok palunya buk. pimpinan yang terhormat ini bukan forum guru dengan murid atau nenek dengan cucunya.
- PS (Popong): Kalau sudah ketok palu apa namanya?
 Anggota : Ditutup
 Dwi (PDIP) : Pimpinan yang terhorma hormai ini.
 PS (Popong): Baik, saya lanjutkan.
 Ike : Ini sidang paripurna DPR bukan urusan nenek dan cucu.
 Dwi (PDIP) : Pimpinan yang terhormat ini permintaan kami resmi buka itu.
 Anggota : Ibu ibu ibu tegas sedikit buk.
 Dwi (PDIP) : Pimpinan pimpinan hormai kami, pimpinan yang terhormat ini bukan forum nenek dengan cucu. Bukan guru dengan murid.
- PS (Popong): Bagaimana lanjut? (nada keras).
 Anggota : Lanjut.
 PS (Popong): Lanjuttttttt, kumaha atuh?, baik saya lanjutkan.
 Anggota : Mana fdnya dibuka.
 PS (Popong): Silahkan yang paket.
 Dwi (PDIP) : Paket apa pimpinan?
 PS(Popong): Usulan usulan.
 Dwi (PDIP) : Pimpinan tolong didengar kita semua.
 PS (Popong): Karena fraksi sudah terbentuk, silahkan kepada yang mau menyampaikan. Ini ada, dari mana?
 Anggota : Nenek tua.
 PS (Popong): Silahkan dari Golkar, itu mah mau apa kesini (bicara dengan sekjen) mangga silahkan, dibaca, bacanya yang keras ya pak ya.
 Anggota : silahkan
 Golkar : Fraksi Golkar dewan perwakilan rakyat republic Indonesia perihal penyampaian nama calon pimpinan DPR RI periode 2014-2019 kepada yang terhormat pimpinan sementara DPR RI, menunjuk surat saudara pimpinan sementara tanggal 1 Oktober 2014 perihal permintaan nama calon pimpinan DPR RI periode 2014-2019 dengan ini kami sampaikan nama calon pimpinan DPR RI periode

2014-2019 adalah H. Setya Novanto, S.E.. Dari Fraksi Partai Golkar, wakil ketua: Fadli Zon, S.S., M.Sc.dari Fraksi Partai Gerindra, wakil ketua: Dr. Agus Hermantodari Fraksi Partai Demokrat, Wakil ketua: Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M.dari Fraksi PAN, wakil ketua: Fahri Hamzah, S.E.dari Fraksi PKS. Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih. Pimpinan fraksi Partai Golkar DPR RI Dr. Hj. Komadiri ketua ditandatangani.

PS (Popong): Terimakasih pak

Aria Bima : Pimpinan Aria Bima pimpinan.

PS (Popong): Baik kita lanjutkan ke fraksi gerinda silahkan.

Aria Bima (PDIP): Pimpinan Aria Bima pimpinan dari PDIP interupsi. Assalamualaikum wr.wb. saudara pimpinan interupsi saudara pimpinan

PS (Popong): Saya sedang mempersilahkan ini.

Gerindra : Fraksi partai gerinda, hal penyampain nama paket calon pimpinan DPR RI periode 14-19 kepada yang terhormat pimpinan sementara DPR RI di Jakarta, dengan hormat menunjuk surat anda pw/09786/DPR RI /10/2014 tertanggal 1 Oktober 2014 perihal permintaan nama calon pimpinan DPR RI periode 2014-19 dengan ini kami sampaikan paket calon pimpinan DPR RI 14-19 tersebut sebagai berikut. H. Setya Novanto, S.E.. Dari Fraksi Partai Golkar, wakil ketua: Fadli Zon, S.S., M.Sc.dari Fraksi Partai Gerindra, wakil ketua: Dr. Agus Hermantodari Fraksi Partai Demokrat, Wakil ketua: Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M.dari Fraksi PAN, wakil ketua: Fahri Hamzah, S.E.dari Fraksi PKS. Demikian surat ini kami sampaikan, kami ucapkan terimakasih pimpinan fraksi partai Gerindra DPR RI ketua Hj. Ahmad Muzani sekretaris Ir. Fahri.

Aria Bima (PDIP): Saudara pimpinan interupsi Aria Bima dari fraksi PDIP, saudara pimpinan

PS (Popong): Baik saya lanjutkan, dengan Fraksi Demokrat.

Aria Bima (PDIP): Pimpinan interupsi pimpinan.

Dwi (PDIP) : Interupsi pimpinan.

PS (Popong): Saya persilahkan untuk Fraksi Demokrat, saya persilahkan untuk Fraksi Demokrat.

Demokrat : Terimakasih pimpinan, kepada yang terhormat pimpinan sementara DPR RI di Jakarta. Dengan hormat menunjuk surat saudara no. pw 09786/DPR RI /10/2014 tertanggal 1 oktber 2014 perihal permintaan nama calon pimpinan DPR RI per, 14-19. Dengan ini kami fraksi partai Demokrat menyampaikan paket calon pimpinan DPR RI periode 14-19 tersebut sebagai berikut. H. Setya Novanto, S.E.. Dari Fraksi Partai Golkar, wakil ketua: Fadli Zon, S.S., M.Sc.dari Fraksi Partai Gerindra, wakil ketua: Dr. Agus Hermantodari Fraksi Partai Demokrat, Wakil ketua: Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M.dari Fraksi PAN, wakil ketua: Fahri

Hamzah, S.E.dari Fraksi PKS. Demikian surat ini kami sampaikan, kiranya ditindaklanjuti semestinya. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih pimpinan fraksi partai Demokrat ketua Edi Baskoro Yudoyono sekretaris Didik Mudrianto ditanda tangani.

PS (Popong): Terimakasih.

Aria Bima : Interupsi pimpinan, Aria Bima dari PDIP.

PS (Popong): Baik saya lanjutkan kepada fraksi PKS,silahkan.

PKB : Assalamualaikum wr.wb.

PS (Popong): Maaf maaf maaf fraksi PAN maaf mohon maaf.

PKB : Saya mohon maaf kepada sidang yang terhormat, saya juga mohon maaf kepada pimpinan.

PS (Popong): Silahkan, mohon maaf bapak, saya tidak mempersilahkan bapak untuk ke mimbar, maaf.

PKB : Karena ada ketitakdactoran dalam sidang ini dan tidak boleh terjadi.

PS (Popong): Maaf bapak, saya tidak mempersilahkan bapak.

PKB : Adanya ketitakdoran mayoritas kepada hasil-hasil sidang dengan ini Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan sikap untuk melakukan walk out dan tidak bertanggung jawab atas seluruh hasil paripurna yang sangat tidak adil. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih wassalamualaikum wr.wb. PKB dengan ini menyatakan *walk out*

PS (Popong): Maaf bapak maaf saya persilahkan PAN. Silahkan, silahkan pak yang dari PAN.

PAN .: Hatur nuhun ibu ketua, bismillahirohmanirohim, asalamualaikum wr.wb.

PS (Popong): Waalaikumsalam wr.wb.

Aria Bima (PDIP): Pak teguh, mohon maaf saya hanya menyampaikan hal yang penting.

PS (Popong): Lanjut pak, lanjut aja pak.

Aria Bima PDIP: Saya mewakili, agar tidak mengganggu, karena kita sudah tidak diberi hak untuk bicara dalam forum ini, maka bersama ini Fraksi PDIP hanya ingin menginginkan bagaimana pemilihan pimpinan ini berjalan secara lialiter, namun mengambil cara-cara yang tidak sesuai dengan tatib, pimpinan tidak adil dalam memberi kesempatan kita bicara, kita tidak diberi waktu untuk kita bicara.

PS (Popong): teruskan saja

PAN : Assalamualaikum wr.wb.

Aria Bima (PDIP): Bukan suasana yang seperti ini yang kita inginkan, apakah suasana yang seperti ini yang kita inginkan, kita cerminkan kepada lembaga tinggi negara kita.

PAN : Berkenaan dengan surat saudara

Aria Bima (PDIP): Apakah ini sumpah jabatan yang kita bicarakan, apakah seperti ini yang kita inginkan.

PAN :Dengan hormat menunjuk surat saudara no. Pw/09786/DPR RI /10/2014 tertanggal 1 oktber 2014 perihal permintaan nama calon

- pimpinan DPR RI masa bakti, 14-19. Kami mengajukan paket calon pimpinan DPR RI masa bakti 14-19 sebagaimana terlampir.
- Aria Bima (PDIP): Kami mohon pimpinan, kalau kita tidak diberi kesempatan untuk berbicara, untuk apa pak teguh?
- PAN : Paket calon DPR RI masa bakti 14-19 yang diusulkan oleh fraksi PAN, H. Setya Novanto, S.E.. Dari Fraksi Partai Golkar, wakil ketua: Fadli Zon, S.S., M.Sc.dari Fraksi Partai Gerindra, wakil ketua: Dr. Agus Hermantodari Fraksi Partai Demokrat, Wakil ketua: Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M.dari Fraksi PAN, wakil ketua: Fahri Hamzah, S.E.dari Fraksi PKS. Jakarta 1 oktober 2014 pimpinan fraksi amanat nas. DPR RI ditanda tangani ir. Hj. Catur Sapto Edi , ketua Teguh Juarno sekretaris. Assalamualaikum wr.wb.
- Anggota : Saudara pimpinan sekali lagi kami ingin sampaikan.
- Fausi hardianto (Hanura) : Pimpinan yang terhormat kami dari Partai Hanura, terakhir pak terakhir. Saya Fausi Hardianto dari Sumsel 1. Pimpinan minta waktu 5 menit saja. Bahwa kami dari fraksi Partai Hanura yang pertama tidak bertanggung jawab terhadap proses pemilihan, proses pemilihan pimpinan DPR RI . Kami melihat tidak ada proses demokrasi. Kami melihat tidak ada lagi aspirasi yang kami dengar. Awal yang pertama sekali kita sidang paripurna ini semua proses tidak di dengar oleh pimpinan sidang. Oleh sebab itu kami dari fraksi partai Hanura menyatakan diri tidak bertanggung jawab terhadap hasil-hasil dalam proses pemilihan pimpinan DPR dan kami menyatakan diri *walk out* dari sidang paripurna ini
- PS (Popong): Silahkan pak, terimakasih.
- Fauzi (Hanura): Semoga dosa-dosanya dimaafkan oleh allah Amin.
- PS (Popong): Terimakasih.
- Fausi Hanura: allah akbar allahuakbar allah akbar allahuakbar allah akbar allahuakbar.
- PS (Popong): Baik, mangga saya lanjutkan kepada partai keadilan sejahtera.
- PDIP : Ibu sekjen mau ngomong ibu, dengar (PDIP ngamuk ke depan mimbar dan berkata “kita dibayar tidak untuk berbohong)
- PS (Popong): Tidak usah marah-marah begitu bapak, pak maaf ini ada aturan. Tolong tolong.
- PDIP : Mohon izin ibu pimpinan, ibu pimpinan.
- PS (Popong): Tolong, kalau memang tidak setuju, silahkan. Saya
- PDIP : Mohon izin pimpinan
- PS (Popong): Silahkan silahkan.
- PDIP : Assalamualaikum wr.wb.
- PS (Popong): Waalaikum slam
- PDIP : Pimpinan, bapak ibu sekalian yang saya hormati mencermati dinamika gelagat dan perkembangan yang ibu pimpin mulai rapat konsultasi tadi tentunya Fraksi PDIP yang merupakan dari partai kita ingin menjunjung kedaulatan rakyat tanpa mengurangi rasa

hormat masing masing fraksi punya pertimbangan punya sikap politik oleh karena itu izinkan dari PDIP untuk tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan pada mala mini, sekian terima kasih waalaikum slm wr.wb.

PS (Popong): Silahkan, baik saya hormati sekali
PDIP : Merdeka merdeka merdeka.

PS (Popong): Sekarang kepada fraksi PKS silahkan.

PKS : Assalamualaikum wr.wb yang terhormat pimpinan sementara DPR RI salam keadilan dan kesejahteraan menunjuk surat saudara no. pw 09768/DPRRI/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 perihal pengajuan nama calon pimpinan DPR RI periode 2014-2019 dan sesuai dengan uu no. 17 thn 2014 ttng MPR DPR MPD dan DPD. Dengan ini kami sampaikan nama calon pimpinan DPR RI periode 2014-2019 usulan dari fraksi PKS DPR RI sebagai mana tersebut dibawah ini. H. Setya Novanto, S.E.. Dari Fraksi Partai Golkar, wakil ketua: Fadli Zon, S.S., M.Sc.dari Fraksi Partai Gerindra, wakil ketua: Dr. Agus Hermantodari Fraksi Partai Demokrat, Wakil ketua: Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M.dari Fraksi PAN, wakil ketua: Fahri Hamzah, S.E.Demikian surat ini, atas perhatiannya kami haturkan terimakasih. Fraksi partai keadilan sejhtera tertanda Dra. Nur Wahid dan H. Abdul Hakim wassalamualaikum Wr. Wb.

PS (Popong): Waalaikum slam wr.wb., baik kita lanjutkan kepada fraksi berikutnya yaitu dari PPP saya persilahkan.

PPP : Assalamualaikum Wr.wb.

PS (Popong): Walaikum slm wr.wb.

PPP : Pimpinan dan para anggota yang terhormat, bismillahirohmanirohim fraksi partai PPP dengan ini menyampaikan paket usulan paket pimpinan DPR RI periode 14-19. H. Setya Novanto, S.E. Dari Fraksi Partai Golkar, wakil ketua: Fadli Zon, S.S., M.Sc.dari Fraksi Partai Gerindra, wakil ketua: Dr. Agus Hermantodari Fraksi Partai Demokrat, Wakil ketua: Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M.dari Fraksi PAN, wakil ketua: Fahri Hamzah, S.E.dari Fraksi PKS. Demikian usulan dari fraksi paket usulan paket pimpinanDPR RI dari fraksi partai PPP. Jakarta 2 Oktober 2014 Ketua drs. H. Abdul aswar ditandatangani sekretaris Moh. Arwani ditandatangani. Berikut terimakasih waallahumafik wassalam. Wr.wb.

PS (Popong): Waalaikum slam wr.wb, baik yang terakhir tapi justru yang terpenting silahkan dari Nasdem silahkan.

Nasdem : Assalamualaikum wr.wb.

PS (Popong): Waalaikum wr.wb.

Nasdem : Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati pimpinan sementara DPR RI yang saya hormati para anggota dewan yang terhormat. Kami dari partai Nasdem pertama kali hadir di dewan yang terhormat ini. Kami duduk melihat senior senior partai kami

membuat sebuah langkah yang menurut kami mencederai jalannya demokrasi bangsa ini. Tentunya ini menjadi pelajaran buruk buat sejarah pembangunan demokrasi Indonesia. Apa yang telah kami sampaikan tadi pagi pada rapat konsultasi yang sebenarnya tidak sempat ditutup sebenarnya itu. Sayalah yang bertanya bagaimana dengan pengesahan tata tertib DPR ini. Itulah yang disambut oleh pimpinan ini setelah semuanya mengatakan setuju setuju tidak diagendakan terus langsung keluar. Itu realita seperti itu, kita boleh bergerak apapun, kita boleh berbuat apapun tapi tidak boleh berbohong. Sebagai politisi dengan semangat untuk membangaun bangsa ini maka kebohongan harus dijauhkan dari diri kita sendiri. karena itu dengan cita-cita yang mulia teman-teman semua yang akan menjadi mungkin saja yang akan menjadi pimpinan lembaga ini. Ini adalah lembaga terhormat kita tentunya menempatkan orang orang terbaik kader kader bangsa terbaik ditempat ini untuk memimpin kita.

PS (Popong): Bapak, maaf saya mempersilahkan untuk untuk paket.

Nasdem : Sebentar pimpinan sebentar pimpinan.

PS (Popong): Maaf pak.

Nasdem : Karena itu menurut kami sangat tidak adil dalam menjalankan tatacara tatib seperti ini, dari pasal pasal yang kit abaca bagaimana memilih manusia manusia dengan cara paket macam barang saja ini, jadi ini yang keliru.

(Anggota berteriak turun turun turun)

Nasdem : Dan karena itu, partai Nasdem melihat.

PS (Popong): Tapi pak pak pak.

Nasdem : Adanya cacat dalam pengurusan prosedural mengurus tatib ini, oleh karena itu dari fraksi Partai Nasdem, sebagai ketua fraksi partai Nasdem sangat terharu dengan kondisi demokrasi bangsa hari ini.

PS (Popong): Maaf pak, maksud saya adalah membacakan paket.

Nasdem : Untuk itu kami akan keluar dari rapat ini.

PS (Popong): Silahkan

Nasdem : Dan tidak bertanggung jawab lagi, sekian dan terimakasih wabillahitaufik walhidayah waasalamualaikum wr.wb.

PS (Popong): Waalaikumsalam wr.wb. terimakasih pak,

Ansori siregar (PKS) : Pimpinan saya saksi hidup bahwa ibu sudah menutup dan saya lebih dekat dari bapak yang baru itu, saya menyaksikan ansori siregar buk dari PKS. Saya menyaksikan ibu menutup rapat konsultasi dengan mengetok 3 kali buk, dengan mengetok tiga kali. Berarti mereka yang bohong, mereka yang bohong, mereka yang bohong.

PS (Popong): Baik pak, terimakasih.

Anggota : Yang bohong yang keluar dari ruangan.

PS (Popong): Kita lanjutkan karena ini mata acara sudah selesai yang menyampaikan nggak ada lagi kan? Sudah menyampaikan sesuai

dengan mata acara yang ketiga. Nah karena setelah kami baca semua ternyata dari 7 pembicara itu isinya semua sama. Ada 6 yang sama 1 berbeda, maaf karena saya tidak baca, jadi sebetulnya ada 6 semuanya sama. Dengan demikian hanya ada satu paket, kalau ada satu paket apa perlu dipilih lagi?

Anggota : Tidak

PS (Popong): Tidakan? Ya baik, karena hanya ada 1 paket kemudian diajukan oleh 6 partai, jadi, eh 6 fraksi maka saya ea ae eta diketok maka saya akan menyatakan bahwa paket ini supaya lebih jelas calon yang akan diketok yaitu.

Anggota : Adem adem

PS (Popong): Pertama ketua dari spg (berbicara dengan sekjen “iya spg itu teh”) yaitu Drs. Setianovanto, Ak. (Tok)

Anggota : Berdiri berdiri.

PS (Popong): Kemudian wakil ketua dari partai Gerindra Bapak H. Fadlizon S.S. MSc. Tok, wakil ketua dari partai Demokrat ini favorit saya Ir. Agus Hermanto M.M. tok fraksi pan wakil ketua Bapak Taufik Kurniawan tok, fraksi PKS wakil ketua bapak Fahri Hamzah S.E. tok, baik jadi dengan demikian Alhamdulillah para ketua dan wakil ketua terpilih itu sudah kita dengar bersama. Lanjutnya sekarang tak perlu dilantik marena, mana itunya. Baik mata acara selanjutnya adalah sudah pengumuman.

Anggota : Interupsi, belum diketok itu, buk interupsi buk.

PS (Popong): Mangga ada interupsi tapi inikan sudah satu paket, kan sudah satu paket berarti kan sudah dan sudah didukung oleh semua fraksi. Jadi ini adalah penetapan pimpinan DPR RI . Nah sudah didengar bersama tadi maka dengan demikian. Baik jadi setelah saya baca semua bapak bapak , apakah setuju?

Anggota : Setuju.

PS (Popong): Setuju, tok.

Anggota : Gitu buk.

PS (Popong): Iya sudah ditetapkan. Sekarang tinggal ya, kan kudu disumpah marin pak. Nah tadi sudah runding sama Pak Ade bahwa bagian nanti pengumuman ucapan sumpah janji dan sebagainya saya akan serahkan pipinan kepada Bapak Ade ya, entong sok bagian didinya tape. Baik ya, jadikan tinggal sumpah janji atuh tidak susah. Mangga ini saya cabut lagi di skors dulu de harus ada ketua MA tapi beliau sudah stand by dari pagi maka diskor dulu (tok 1 kali) sebentar. Sudah? Mangga tunggu MA sabarlah saya juga sabar dari pagi.

PS (Popong): Bapak bapak maaf Bapak MA akan datang 15 menit lagi jadi jangan keluar. Sabar tunggu sebentar. (54.33)

B.3 Sidang Paripurna Dpr Ri Masa Sidang I Tahun Sidang 2014–2015, 21 Oktober 2014, Agenda Penetapan Nama-Nama Alat Kelengkapan Dewan Tiap Tiap Fraksi

(Dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya)

PS : Diantara DPR RI dan pimpinan fraksi tanggal 16 oktober tahun 2014 yang lalu, maka acara paripurna dewan hari ini telah disepakati tentang penetapan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan, bapak ibu sekalian sebelum kami putuskan, kami sampaikan bahwa sidang dewan telah menerima 6 pucuk surat. Pertama dari surat presiden RI R58/pres/2014/9 Oktober 2014 perihal rancangan undang undang tentang perjanjian pengesahan ekstradisi (03.21) antara RI dan papua nugini. Kedua surat dari presiden RI no. R59/pres/2014/9 Oktober 2014 perihal tentang rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara RI dengan Republik sosial Vietnam. Ketiga surat dari presiden RI no. R60/pres/2014/15 Oktober 2014 perihal rancangan undang undang tentang pengesahan persetujuan anatara pemerintah RI dan pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan kerjasama dibidang pertahanan. Keempat surat dari presiden RI no. R61/pres/10/2014/tanggal 15 Oktober 2014 perihal rancangan UU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah RI dengan Timor Leste tentang aktivitas kerjasama di bidang pertahanan. Kelima surat dari presiden RI no. R62/pres/10/2014/tanggal 16 oktober 2014 perihal penyampaian calon pimpinan KPK. Keenam surat dari presiden RI no. R62/pres/10/2014/tanggal 18 Oktober 2014 perihal Caleg lembaga sensor film periode 2014/2018. Selanjutnay sesuai dengan peraturan DPR RI tata tertib surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sidang dewan yang saya hormati selanjutnya marilah kita masuki acara tunggal kita Rapat Paripurna dewan hari ini yaitu penetapan nama-nama anggota fraksi alat kelengkapan dewan tiap tiap fraksi. Perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini baru 4 fraksi yang telah menyampaikan nama-nama anggotanya untuk duduk di alat kelengkapan dewan yaitu fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, fraksi PKS, Fraksi Amanat Nasional. Mengingat beberapa fraksi belum menyerahkan nama-nama anggotanya untuk alat kelengkapan dewan, maka saya akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah penetapan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan akan disampaikan atau ada informasi menyusul pada fraksi-fraksi pada pagi hari ini atau ada masukan apapun yang terkait dengan beberapa hal atau yang terkait dengan hasil rapat konsultasi antara pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi pada tanggal 16 Oktober yang lalu, silahkan.

Ahmad Ali (Nasdem): Ahmad Ali dari partai Nasdem, pimpinan yang terhormat, anggota DPR yang terhormat paripurna hari ini adalah merupakan lanjutan pada paripurna pada tanggal 16 kemaren. Jadi pada paripurna tanggal 16 terjadi perdenbatan yang begitu sengit, begitu panjang hingga pada akhirnya salah satu menjadi permasalahan yang krusial yang kita bahas pada saat itu adalah bahwa kita belum bisa masuk pada penetapan nama-nama anggota pada waktu itu karena kita sangat terkait dan menunggu tentang komposisi kabinet yang namanya kemitraan komisi. Nah tanpa mengabaikan hasil konsultasi pimpinan dengan pimpinan fraksi maka saya ingin mengingatkan kepada pimpinan bahwa konsistensi pada paripurna hari ini juga tentunya ingin kita pertahankan terimakasih pimpinan.

PS : Baik terimakasih, jadi.

Sukiman (PAN): Pimpinan interupsi Sukiman, assalamualaikum wr. wb. salam sejahtera bagi kita semua, sukiman a498 daerah pemilihan Kalimantan Barat. Terimakasih pimpinan, tentu pertama saya ingin menyampaikan berkaitan dengan agenda kita pada hari ini adalah penetapan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan tiap tiap fraksi. Apa yang disampaikan teman-teman dulu saya fikir perlu dipertimbangkan tetapi perlu kita ketahui bahwa tugas dewan sudah ditunggu rakyat bagaimana kinerja dewan itu sendiri. Oleh karena itu kalau kita menunggu kepada komposisi struktur kabinet diumumkan saya pikir syukur kalau itu memang cepat diumumkan tetapi kalau itu lambat apakah DPR menunggu itu terus menerus. Oleh karena itu saya fikir dari paripurna ini kita perlu mengambil sikap tegas sehingga walaupun kita memberi kesempatan kepada fraksi fraksi yang belum menyampaikan nama-nama itu tetapi saya pikir perlu mengambil sebuah keputusan pimpinan supaya agenda kita ini tetap berjalan dan kinerja anggota dewan juga bisa berjalan juga. Dan kinerja kedewanan juga bisa, bisa berjalan juga dengan alat alat kelengkapan. Maka tidak ada pilihan lain maka kita harus pada hari ini penetapannya. Oleh karena itu pimpinan usulan bahwa agenda ini tetap dilaksanakan dan tentu kepada fraksi fraksi belum menyampaikan saya pikir sudah cukuplah waktu untuk memberii kesempatan itu.terimakasih pimpinan wassalamualaikum wr. wb.

PS : Silahkan kepada Partai Hanura.

Hanura : Terimakasih pak, saudara pimpinan setelah dan pada rapat konsultasi itu tidak tidak ada hubungan relevan kesannya kita menunggu a nomenfratur kementerian, karena mala mini hanya penetapan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan tiap tiap fraksi. Pembicaraan sudah kita lakukan kemudian hal hal h kita sudah kita siapkan, namun yang menjadi persoalan hari ini adalah ada beberapa fraksi yang, yang 6 fraksi itu belum mengajukan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan dari sebagaimana yang kita inginkan pada rapat konsultasi. Dan hal ini kemudian yang harus dipertegas, dipertanyakan dan

kemudian latar belakang, saya kira semuanya bisa maklum dalam hal ini. Oleh karena itu, saya kira perlu ada rapat konsultasi, sela sela paripurna ini untuk kembali mempertegas apakah gerangan yang kemudian kita muncul ini sebuah komunikasi yang buntu, maka jelas baru 4 fraksi. Maka tentu ini yang menjadi masalah, saya kira pimpinan harus bijak terhadap hal ini untuk tidak melanjutkan paripurna ini pada saat persoalan-persoalan nama ini belum disampaikan oleh fraksi. Akhirnya ini perlu dibreak dlu kemudian diberikan kesempatan untuk pimpinan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi. Terimakasih.

PS : Baik terimakasih, usulan dari anda. Jadi nanti demokratis. Silahkan pak hendrawan, sebelum Pak Hendrawan dari Demokrat dulu silahkan, atas izin Pak Hendrawan ya?

Demokrat : Terimakasih pimpinan, pimpinan yang terhormat dan seluruh bapak bapak ibu ibu anggota DPR RI yang terhormat. Sesuai dengan a hasil paripurna yang lalu bahwa hari ini memang agendanya yang sudah disepakati yaitu tentang nama-nama anggota disetiap alat kelengkapan. Kemudian sesuai dengan apa yang sudah disepakati kemarin yang kemudian dilanjutkan rapat rapat baku sebagai a rapat rapat pimpinann DPR dengan pimpinan fraksi sebagai hasil baku . Pada intinya pada pokoknya Demokrat sudah siap untuk menyerahkan nama-nama itu pada kesempatan kali ini dan itu memang sudah sesuai dengan kesepakatan waktu rapat pimpinan terimakasih pimpinan.

PS : Jadi mau menyerahkan sekarang? Silahkan oke kami persilahkan lanjut Pak Hendrawan.

Hendrawan : Terimkaasih pak Taufik Kurniawan, pimpinan dewan anggota dewan yang saya hormati selamat sore dan salam kebangsaan pada kita semua, sebelum saya berbicara tentang topik pembicaraan pada hali ini. Pertama-tama izinkanlah kami menyampaikan banyak terimakasih pimpinan dewan segenap anggota dewan yang telah berkontribusi sehingga acara pelantikan presiden RI ke-7 kemarin berjalan dengan baik. Ini merupakan modal yang luar biasa, kepada dunia kita telah mendirikan demokrasi yang hebat kita berbangga karena sebagai Negara demokrasi ke-3 terbesar di dunia kita telah menunjukkan tradisi kenegarawaan yang luar biasa. Itu sebabnya saya dari hati yang tulus kami ingin menyampaikan banyak terimakasih untuk ikut serta terhadap partisipasi dari segenap anggota dewan, kita tepuk tangan pimpinan (semua tepuk tangan). Yang kedua pimpinan tadi hanya menyebutkan hasil rapat konsultasi hanya menentukan tanggal pertemuan atau Rapat Paripurna berikutnya, saya agak sedikit kecewa karena mestinya kalau sudah rapat konsultasi maka hal-hal yang dibahas itu sudah cukup matang, rapat konsultasi pada tata tertib kita dimaksudkan untuk mencari solusi yang antisipatif dan akomodatif kalau sampai hari ini ada sejumlah fraksi yang belum menyerahkan itu artinya

ada beberapa hal yang pada rapat konsultasi belum dituntaskan. Itu sebabnya ada baiknya kalau rapat ini kita beri waktu yang lebih banyak lagi pimpinan. Karena memang saya tau dan memahami tidak mudah untuk menetapkan orang-orang dalam komisi yang sesuai dengan kompetensi sesuai dengan harapan dari anggota masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki prinsip *the right man on the right place on the right time*, itu sebabnya pimpinan praktis saja saya mengharapkan rapat konsultasi dilakukan lagi tapi sekalai lagi harus solutif, antisipatif, akomodatif. Saya kira itu saja pimpinan. Terimakasih salam kebangsaan untuk kita semua.

Anggota : Pimpinan Abdul Kadir Golkar.

PS : Iya sebentar, terimakasih Pak Hendrawan. Berikutnya Agus Kurniawan dari Gerindra.

Agus Kurniawan (Gerindra): Terimakasih pimpinan yang terhormat dan para anggota yang terhormat assalamualaikum wr. wb. Saya ingin mengajak kita semua untuk lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar dengan mensukseskan paripurna ini, yang saya fahami bahwa di dalam system dan tahapan pengamilan keputusan di dewan ini sudah sangat bagus. Sebelum ke paripurna ada rapat-rapat konsultasi, kebutuhan kami ikut di dalamnya 2x sudah konsultasi tanggal 14 dan tanggal 16 dan hari ini adalah kesepakatan di konsultasi tanggal 16 bahwa hari ini kita melakukan paripurna, sudah tawar menawar ada yang usul setelah pengambilan supah presiden hari senin jam 2 ada yang minta rabu, akhirnya disepakati hari selasa hari ini. Tentu yang saya fahami mestinya Rapat Paripurna ini tinggal mengambil keputusan. Pimpinan dan Rapat Paripurna yang terhormat kita hari ini 21 satu hari sudah mengambil menyatakan sumpah dan janji. Intinya janji kita ingin kemudian dijalankan tugas konstitusi kita secara baik. Tetapi hingga hari ini mohon maaf pimpinan kita baru melaksanakan tugas tugas paripurna saja, hari ini patipurna ke-5. Padahal kita sudah 21 hari kita diambil sumpah dan janji dan kemarin sama kita saksikan bahwa bapak presiden kita mengajak seluruh lembaga Negara untuk bekerja, bekerja, dan bekerja. Apa yang harus kita kerjakan kalau hingga hari ini kita belum tau kita ditempatkan dimana dan bagaimna pertanggungjawaban kita bagi rakyat kemudian sekitar satu oktober pengambilan sumpah, saya kira gaji tunjangan kita sudah dihitung padahal karya kita belum ada. Mohon pimpinan saya kira kami menghimbau sekali lagi kita sukseskan ini dengan menyelesaikan apa yang menjadi agenda tunggal kita hari ini dan mohon kepada pimpinan kemudian untuk memimpin persidangan ini secara arif bijaksana dan pada saatnya tentu tegas adalah sikap bijaksana. Terimakasih pimpinan assalamualaikum wr. wb.

- PS : Wassalamulaikum wr. wb., bapak ibu sekalian kita apresiasi semua dari 4 usulan atau masukan sebelum saya lanjutkan barangkali ada pertanyaan maupun usulan kembali kami perlu mengingatkan kepada seluruh anggota fraksi yang hadir pada paripurna hari ini. Mereviu kembali hasil rapat konsultasi yang telah dilaksanakan tanggal 16 oktober yang lalu. Saya bacakan bahwa dalam berkaitan dalam rapat konsultasi anantara seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan dewan, dihadiri oleh pimpinan-pimpinan fraksi pertama dari pimpinan fraksi PDIP saudara putut, saudara Anung Prabowo, saudara Ending Kurnia, saudara Alam Muryanto, saudara Kalikul. Kemudian yang kedua saudara fraksi Partai Golkar hadir saudara Ferdinasyah, saudara Ihsan Firdaus, saudara Bambang. Kemudian dari fraksi Partai Gerindra saudara Fani, saudara Saraswati Jaya, saudara M. Eka.
- Anggota : Pimpinan pimpinan.
- PS : Saya bacakan dulu pak, Kemudian dari fraksi Partai Demokrat
- Anggota : Hasilnya rapat konsul.
- PS : Saya bacakan dulu pak, kemudian dari Fraksi Amanat Nasional saudara Eva dan Safrudin, kemudian dari fraksi Partai PKB saudara Abdul Kadir dan Muamanah , Fraksi Partai Keadilan Sejahtera saudara Amalia. Dari fraksi partai PPP tidak hadir, kemudian pimpinan fraksi partai Nasdem saudara Jailudin, saudara Abdulah. Kemudian yang kesepuluh dari pimpinan fraksi Partai Hanura. Keputusan pada saat rapat konsultasi pimpinan pimpinan fraksi seluruh dan pimpinan dewan. Pertama rapat konsultasi atau pengganti rapat (09.50)memutuskan bahwa penetapan anggota fraksi fraksi pada alat kelengkapan dewan dijadwalkan pada hari selasa pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 14.00 WIB ditandatangani oleh pimpinan rapat Saudara Fani A. Pimpinan Dewan. Jadi inilah mereview sebentar barangkali belum ada yang tersampaikan keseluruhan anggota fraksi maka dari itu mohon ditelaah kemudian saya buka cermin kembali barang kali ada saran masukan atau pendapat. (ada yang mengacungkan) silahkan.
- Nadia (PKS) : Terimakasih pimpinan, assalamulaikum wr. wb. Saya Nadia Latifa dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera A908 daerah pemilihan Jawa Barat 1 kota Bandung Cimahi. Terimakasih pimpinan telah memberiikan kesempatan, saya ingin menyampaikan bahwa sebagaimana yang disampaikan dan disepakati pada rapat konsultasi dan pada Rapat Paripurna yang lalu bahwa kita memang tidak perlu menunggu dari apakah nanti nomenfraktur kementerian akan seperti apa oleh bapak presiden kita, tetapi yang paling penting adalah pembidangan karena tugas kita sesungguhnya bukan semata-mata *chek and ballence* aja dengan kementerian melainkan kepada sejumlah regulasi yang sudah ada termasuk UU yang sudah terbentuk apakah itu sudah komunikasi dengan baik atau tidak. Yang kedua pimpinan, jika kita tidak segera membentuk alat

kelengkapan dewan ada persoalan yang cukup krusial menurut pandangan saya yaitu nasib tenaga ahli kita, baik itu tenaga ahli anggota yang melekat kepada bapak ibu anggota maupun juga tenaga ahli komisi (semua bertepuk tangan) yang mereka ini bukan pegawai negeri sipil, mereka bukan pegawai negeri sipil. Tetapi karena di dalam MD3 dan tata tertib kita tidak cukup kuat payungnya untuk membuat mereka berdiri di posisi yang tepat sementara kita menginginkan agar DPR ini memiliki supporting system yang kuat dan itu sudah ada di renstra kita. Apabila kita tidak segera alat kelengkapan ini dibentuk termasuk di dalamnya yang membuat sangat penting adalah badan legislasi maka ini akan menjadi hambatan yang luar biasa karena tidak ada kesesuaian dengan yang ada di MD3 dan tatib terhadap UU ASN dan juga tatacara perecrutannya itu perlu upaya hukum peradilan DPR RI dan itu disusun oleh badan legislasi sementara sampai saat ini kita belum punya badan legislasi karena kita belum menetapkan alat kelengkapan dewannya. Oleh karena itu pimpinan, saya pikir ini bukan karena kita sendiri pribadi kita sebagai anggota tetapi ini sebagai sebuah institusi kita perlu memperhatikan bagaimana kita menjadi DPR yang lebih kuat dengan supporting system yang juga lebih kuat. Terimakasih pimpinan assalamualaikum wr. wb. (tepuk tangan semua)

PS : Iya, terimakasih. Baik silahkan Pak Teguh.

Teguh S. (PAN) :Terimakasih pimpinan, assalamualaikum wr. wb. pimpinan yang saya hormati dan anggota dewan yang saya hormati juga. Kami dari fraksi Partai Amanat Nasional sebagaimana pada Rapat Paripurna terdahulu telah menyampaikan secara tegas dalam kesempatan tersebut kami meminta waktu untuk agar penetapan komposisi anggota pada komisi ini dilakukan pada Rapat Paripurna berikutnya dengan tetap mengedepankan dengan semangat kebersamaan dan musyawarah di lembaga parlemen yang kita cintai ini. Sesuai kesepakatan atau keputusan yang tadi sudah dibacakan oleh pimpinan saya kira sudah menjadi sangat jelas bahwa kemarin kita bersama-sama menghormati mekanisme yang ada sehingga pada kesempatan paripurna ini kita bisa segera saja bagi seluruh fraksi yang memang sudah menyerahkan komposisi keanggotaan komisi yang sudah disampaikan melalui sekjen untuk segera saja dipaparkan atau ditampilkan dilayar sebagaimana dengan rapat rapat terdahulu, sekiranya ada teman-teman ataupun fraksi yang barangkali belum siap ya kita beri waktu sampai siapnya kapan gitu saja. Saya rasa ini bukan soal dulu-duluan atau cepet-cepetan tetapi kita sudah bersepakat dan kita juga sudah mendengar bahwa kementerian mengaku tidak banyak mengalami perubahan sesuai dengan bidang-bidang yang sudah kita sepakati, komisi juga sudah kita sepakati, tentunya tidak banyak perubahan dan kita mendorong kepada pimpinan untuk kita mengambil keputusan dan

- ditetapkan khususnya fraksi fraksi yang sudah siap kita kukuhkan pada kesempatan kali ini. Itu saja usulan kita kurang lebihnya mohon maaf wassalamulaikum wr. wb.
- Anggota : Interupsi pimpinan, pimpinan interupsi Yosep K.
PS : Oh iya silahkan pak yosep (banyak interupsi) iya saya data dulu ya, pertama pak yosep kemudian siapa, sebentar pak yosep saya data dulu.
- Yosep K. : Terimakasih pimpinan Yosef Kumarudin.
PS : Mana tadi, Pak Yosep sebentar ini kita data dulu.
Anggota : Terimakasih pimpinan nama saya Ridwan dari fraksi partai Golkar
- PS : Oke lanjut siapa lagi yang daftar.
Anggota : Supratman pak.
Yosep : Boleh pimpinan bicara?
PS : Iya lanjut pak yosep.
Yosep : Terimakasih pimpinan, pimpinan yang saya hormati dan seluruh rekan-rekan anggota dewan yang kami cintai assalamulaikum wr. wb.. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Nama yosef Kumarhadi no. A612 dari daerah pilihan Jawa Barat 8. Pimpinan dan rekan-rekan sekalian. Saya kira di dalam Rapat Paripurna yang lalu bahwa kita semua sudah mengikuti dengan seksama apa yang terjadi dan sudah banyak sekali masukan masukan dan juga interupsi yang muncul dimana di dalam masukan masukan yang sudah di tampung baik pimpinan dan anggota dewan yaitu dengan terkait dengan proses proses pengambilan keputusan yang selama ini yang telah kita sama-sama kuat dan telah kita kembangkan ke dalam sistem demokrasi kita yaitu adalah musyawarah dan mufakat. Tetapi rekan-rekan yang kemarin memberiikan masukan itu semua berbicara demikian tersampul dengan sangat baik. Saya melihat bahwa perkembangan yang terjadi akhir ini terutama pada paripurna sekarang ini masih ada setiap fraksi ada sekitar fraksi yang belum belum menyampaikan nama-nama. Tentu dari pihak saya pribadi, saya bisa memahami barangkali ada suatu pertimbangan-pertimbangan yang sangat penting di dalam menentukan keanggotaan yang terjadi, nah oleh karenanya saya ingin bertannya sejauh mana proses musyawarah yang kita sepakati yang kita laksanakan di waktu waktu yang singkat ini yang telah terjadi baik atau tidak. Seandainya itu memang belum pimpinan dapat menawarkan lagi kepada seluruh pimpinan fraksi yang ada kami dengan sangat sabar dan sangat siap untuk menunggu samapi pimpinan dewan dan pimpinan fraksi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan musyawarah mufakat ini, saya yakin pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Nah karena tadi saya bilang barangkali ada barangkali rapat ini kita skors barangkali beberapa saat untuk mempersiapkan kembali pimpinan dewan dan pimpinan fraksi untuk melakukan

musyawarah. Sehingga kita betul-betul akan mengawali tugas kita selama 5 tahun ke depan ini dengan sangat baik dengan kebersamaan dan kegotong royongan yang selama ini menjadi semangat asli dari kita sekalian. Jadi pimpinan kami berharap saya kira tidak dapat kita paksakan memang kita dapat memahami apa yang terjadi dalam fraksi fraksi yang belum menyerahkan nama-nama tersebut. Barangkali ada pertimbangan-pertimbangan yang telah sedang difikirkan secara masak dan matang tidak saja di dalam fraksinya namun juga akan menjalankan keanggotaan di dalam 5 tahun ke depan ini. Intinya kami mohon lebih baik kita skors sebentar untuk kita lakukan lobi dan musyawarah kembali antara pimpinan fraksi ataupun pimpinan dewan. Demikian pimpinan wassalamualaikum wr. wb.

PS : Terimakasih Pak Yosef, silahkan pak ridwan dari fraksi partai Golkar

Anggota : Pimpinan pimpinan.

PS : Sebentar Pak Ridwan terlebih dahulu.

Ridwan (Golkar): Terimakasih pimpinan, assalamualaikum wr. wb. saya Ridwan dari fraksi Partai Golongan Karya A316 dapil Sulawesi Tenggara. Yang saya tau, tadi kami sudah mendengarkan bahwa sebagian teman teman sudah berperapat, yang saya tau pula pimpinan rapat harus bisa mengendalikan rapat, mengarahkan, judul rapat kita kali ini adalah Rapat Paripurna tentang penetapan kelengkapan nama-nama fraksi. Fraksi adalah menjadi hak partai partai yang mengajukan masing-masing partai. Oleh karena itu, mungkin pak ketua sudah bisa mengambil langkah sikap yang tepat untuk hari ini, Cuma dua hal kalau boleh setelah mendengarkan syarat syarat teman-teman semua. Hal yang pertama perlu dilanjutkan atau tidak, hal kedua adalah kita lanjutkan dengan catatan bagi yang belum memasukan kita beri waktu satu atau dua hari. Supaya rapat kita tidak bertele-tele pimpinan. Terimakasih wassalamualaikum wr. wb.

PS : Silahkan Pak Supratman (banyak interupsi) silahkan mendaftar ya.

Supratman : Supratman A333 dapil Sulawesi tengah Partai Gerindra.

PS : Mohon maaf sebentar, yang mau mendaftar saya buka cermin lagi setelah pak Supratman. Silahkan pak supratman.

Supratman (Gerindra): assalamualaikum wr. wb., jadi sekali lagi merevie hasil paripurna kita yang lalu kita sudah mengganti bahwa rapat konsultasi yang sudah dilaksanakan memutuskan bahwa jadwal kita hari ini paripurna bersama nama-nama anggota fraksi dari tiap tiap fraksi.

PS : Pak Aria Bima dulu.

Aria Bima : Saya dulu.

Supratman : Jadi saya harap konsistensi dari pimpinan rapat hari ini, apa yang diusulkan dari teman teman dari fraksi PAN dan Golkar. Saya pikir kita konsisten saja, kan bukan sesuatu hal yang dilarang untuk

melakukan penyusunan nama-nama fraksi yang hari ini belum sempat memasukan nama-nama anggota a anggota komisi yang lain. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon pak, kepada pimpinan kita tegas saja hari ini, kita putuskan untuk melanjutkan Rapat Paripurna hari ini dengan agenda penetapan nama-nama anggota fraksi pada masing-masing alat kelengkapan yang ada. Bagi teman-teman fraksi yang lain yang belum sempat memasukan hari ini, kan boleh dijadwalkan untuk memasukan pada kesempatan yan lain. Demikian terimakasih pimpinan.

(Interupsi berdatangan)

Aria Bima : Assalamualaikum wr. wb., pimpinan dan kawan kawan anggota yang saya hormati, benar kalau penetapan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan itu kita agendakan pada Rapat Paripurna kali ini. Untuk bisa masuk dan diselesaikan, namun kenyataan fakta baru 4 fraksi yang memasukan nama-nama a 5 fraksi yang memasukan nama-nama. Pimpinan mengenai jumlah komisi yang sudah kita tetapkan, jumlah belum nama-nama komisi dan kelengkapan nama-nama anggota fraksi dalam alat kelengkapan dan komposisi pimpinan komisi yang ada segera kita lakukan. Ini adalah suatu paket yang tidak dapat terpisahkan, politik ini begitu dinamisnya maka saya berharap kepada kawan kawan yang terhormat dan juga pimpinan saya mohon untuk dilakukan langkah lanhhkah lobi kembali. Kalau ini terus kita lakukan penetapan, memang bisa bagi kawan kawan yang sudah memasukan di alat kelengkapan di fraksi fraksi yang ada. Bisa kita tetapkan hari ini dan bagi yang belum masih ada jeda waktu. Itu realistisnya memang demikian. Namun kalau boleh saya usulkan bahwa pada saat kemarin waktu Pak... (34.04) memimpin rapat terkait dengan jumlah komisi juga belum disampaikan tentang nama-nama atau bidang bidang komisi yang ada. Sangat dimungkinkan bahwa jumlah komisi yang sudah ditetapkan, kita meelihat perbedaan perbedaan yang ada itu karena a kondisi ruang lingkup yang begitu luas. Mohon kepada pimpinan, itu juga bisa dimasukkan bagian dari paket lobi kita untuk kira-kira apakah kita perlu mengajukan kursi tambahan itu adalah hal yang sangat dianamis. Untuk itu saya mohon kebesaran jiwa hati rekan-rekan sekalian supaya kinerja awal kita ini ke depan kondusif sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Karena kita ingin menciptakan suasana DPR yang lebih dinamis sesuai dengan bidang tugas kita. Mohon kepada pimpinan untuk diadakan a skors lobi lobi, tanpa mengurangi hormat saya kepada kawan kawan fraksi yang sudah memasukkan alat kelengkapan apakah itu langsung kita putuskan nama-nama itu. Tapi saya berharap nama-nama itu bisa kita putuskan dalam paripurna bersamaan setelah 10 fraksi itu ada. Demikian pimpinan saya harap dilakukan lobi

kemudian meteri lobi yang pertama mengenai a anggota anggota kelengkapan dan dimungkinkan 11 komisi itu setelah melihat dinamika apakah mau diturunkan jumlah komisi atau ditambahkan dan saya mohon itu juga masih kita bicarakan dan terakhir bagaimana a pimpinan pimpinan komisi ini kita terapkan ke dalam proses musyawarah mufakat. Makasi wassalamulaikum wr. wb.

(Interupsi mulai banyak)

PS : Baik saya daftar satu satu dulu bu reni ya pertama kemudian pak mulyadi terus lanjut, sebentar sebentar dari PKB siapa PKB. Oke sekarang bu Reni dulu kemudian pak kardi. Oke silahkan.

Reni : Terimakasih pimpinan, bismillahirohmanirohim. Assalamulaikum wr. wb. reni Farlinawati dapil jabar 4 no. anggota 516. Pimpinan saya kira kalau kita mencermati dari semua yang telah disampaikan tadi. Nampaknya ada suasana kebatinan yang harus pula dicermati oleh pimpinan. Oleh karena itu saya kira dari keseluruhan a apa yang masuk tadi bahwa sudah ada lima fraksi yang sudah siap dengan a nama-nama fraksi dan alat kelengkapan dewan lainnya sementara lima fraksi juga belum. Menurut hemat saya demi kebersamaan dan toh tidak mengganggu apapun, tidak juga berkorelasi a tidak signifikan dengan a apa penetapan cabinet. Maka baiknya ini ditunda untuk penetapan paripurna yang akan datang. Yang kedua pimpinan mohon maaf ada hal yang jauh lebih urgent adalah saya menambahkan lagi hak hak tenaga ahli menurut saya tidak hanya tenaga ahli di komisi atau dalam alat kelengkapan dewan lainnya bahkan tenaga ahli yang melekat kepada kitapun begitu, mereka mempunyai hak yang sama. Sementara sekarang sudah tanggal 21 dari kesekjenan hari ini kita belum diberikan formulir untuk pendataan tentang tenaga ahli kalau ini kemudian tidak dilakukan secepatnya lalu bagaimana hak hak mereka yang harus diperoleh begitu (semua tepuk tangan). Jadi, nah menurut saya pimpinan menurut saya hari ini adalah yang harus diutamakan mengenai hak hidup orang kemudian yang kedua saya kongkret saja, saya mengusulkan ada baiknya penetapan keseluruhan untuk menjaga kebersamaan maka kemudian penetapan a nama-nama anggota fraksi dan alat kelengkapan dewan dilakukan paripurna yang akan datang, tidak paripurna hari ini. Terimakasih wassalamulaikum wr. wb.

PS : Silahkan Pak Yandri kemudian bersiap siap pak mulyadi.

Kardi : Terimakasih pimpinan assalamulaikum wr. wb., Yandri Susanto no. anggota 494 dapil banten 2. Pimpinan dan dewan yang terhormat, sebenarnya kalau kita merujuk pada paripurna yang sebelumnya kita sudah sepakat bahwa hari ini menyerahkan nama-nama untuk alat kelengkapan dewan dan saya kira kalau saja masih ada fraksi yang belum lengkap, tidak langsung menyandra fraksi yang lain yang sudah siap. Karena kalau kita berlarut larut pimpinan ini akan menunjukkan kesan negative kepada rakyat

terhadap lembaga yang kita hormati ini, bayangkan kalau kita tunda terus seolah olah kita tidak siap. Sementara presiden Jokowi sudah mengatakan kerja, kerja, dan kerja. Kenapa fraksi fraksi lain tidak siap itu justru yang harus kita pertanyakan. Padahal ini hanya penetapan nama-nama saja belum pada penetapan Pimpinan komisi dan lain lainnya. Oleh karena itu pimpinan, saya kira pimpinan harus tegas. Paripurna ini harus ada hasil, yang tidak siap jangan menyandra yang sudah siap (semua bersorak dan bertepuk tangan). Yang perlu kita pertanyakan kenapa mereka tidak siap, rapat konsultasi sudah kita laksanakan oleh karena itu usul yang paling kongkret tadi sudah banyak diusulkan teman teman sah kan yang sudah siap, yang belum siap bisa menyusul. Artinya lembaga yang terhormat ini, rapat yang memakan biaya ini, ada hasilnya yang kita pertontonkan kepada rakyat Indonesia. Sekali lagi pimpinan harus tegas, yang sudah siap tetapkan saja, yang belum siap monggo menyusul. Oke terimakasih wassalamulaikum wr. wb..

PS

: Silahkan Pak Mulyadi.

Pak Mulyadi

: Terimakasih assalamulaikum wr. wb., yang saya hormati pimpinan serta seluruh anggota DPR RI .Pada kesempatan paripurna hari ini, perlu kita sepakati bahwa yang akan kita putuskan pada hari ini sebetulnya persoalan yang sederhana, jadi itu masing masing fraksi menyampaikan nama-nama di masing masing komisi, jadi mohon kiranya dinamika perebutan pimpinan alat kelengkapan tidak dikaitkan dengan penyampaian nama-nama dimasing masing di alat kelengkapan. Nama di alat kelengkapan adalah sesuatu yang perlu disegerakan dalam rangka melakukan persiapan apa yang harus dilakukan atau disiapkan oleh masing masing komisi. Dan saya rasa ini tidak ada kaitannya dengan dinamika pemilihan pimpinan DPR itu terjadi di paripurna. Tolong dilihat UU MD3 dan tatib. Karena itu adalah hak seluruh anggota DPR. Dinamika pemilihan pimpinan alat kelengkapan ada di alat kelengkapan. Jadi kalau kita ingin melakukan lobi atau dinamika itu terjadi itu seharusnya ada di masing masing alat kelengkapan. Tanpa kita menghambat kewenangan fraksi untuk menyampaikan masing masing nama anggota. Jadi ini sebetulnya tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya menyampaikan nama-nama di alat kelengkapan didinamika yang terjadi. Mohon kiranya kita cermati secara jeenih agar kedepan tugas tugas yang harus diemban oleh masing masing komisi itu betul betul dapat kita persiapkan, mungkin ada yang baru ada yang lama, tentu mereka yang sudah ada dalam satu komisi kita akan bersama-sama mempersiapkan sebaik mungkin, karena tujuan kita anggota DPR adalah bagaimana kita melakukan tiga fungsi tersebut secara optimal sementara apa yang disampaikan tadi bahwa, presiden saja sudah menyampaikan kita segera bekerja, bekerja, bekerja. Masak DPRnya masih menunda nunda, nama saja belum disampaikan di alat kelengkapan.

(semua bertepuk tangan) Ini kan menjadi pertanyaan banyak orang jadi mohon kiranya kita secara jernih tolong jangan dikaitkan pada persoalan persoalan yang sebetulnya menjadi yang menjadi kewenangan para dewan fraksi para dewan partai dengan menyampaikan nama-nama di alat kelengkapan. Jadi saya minta kepada Pak Taufik, pimpinan paripurna hari ini, tadi jadwal yang tadi belum disahkan silahkan disahkan diketok dipersilahkan masing masing fraksi. Disilahkan masing masing fraksi menyampaikan nama nama di alat kelengkapan bagi yang belum siap tentu kita tidak bisa kita paksa. Silahkan dirundingkan dengan pimpinan DPR. Terimakasih wassalamualaikum wr. wb.

PS : Silahkan, dari PKB. Sebelum itu saya sampaikan setelah ini kita akan mereview sekilas dari pimpinan oleh tim dari pimpinan DPR sekarang. Sehingga nanti harapannya semakin memberikan informasi yang sangat detail setelah itu kita ambil keputusan. Silahkan dari PKB.

PKB : Terimakasih pimpinan assalamualaikum wr. wb., pimpinan yang saya hormati dan anggota yang berbahagia. Ini kita puter terus pertama saya apresiasi dulu, ini pimpinan memimpin rapat sangat akomodatif. Dan saya harap ada keputusan yang sangat bijak diambil oleh pimpinan pada Rapat Paripurna ini. Daripada kita muter muter semua, ini ingin dilanjutkan atau tidak, lebih baik rapat ini lakukan lagi konsultasi rapat ini break dulu, antara pimpinan dan pimpinan fraksi (semua menyoraki). Kemudian setelah, nggak bisa juga ini ya dari satu pihak memaksakan kehendak karena ini terbentur kebijakan yang diambil ini kan bukan untuk kelompok tertentu tapi semua bangsa. Makanya saya usulkan pimpinan, saya usulkan tolong rapat ini skors dulu ambil dulu putusan dari pimpinan DPR dengan pimpinan pimpinan fraksi (semua menyoraki) untuk apakah rapat ini akan dilanjutkan atau ditunda. Sekian terimakasih wassalamualaikum wr. wb..

PS : Saya sudah memahami dari apa yang sudah disampaikan, dari pimpinan dewan kita sudah membahas secara kolektif kolektif, iya dari pimpinan dewan kami persilahkan kepada Pak Farid untuk menjelaskan beberapa hal yang mendetail kemarin yang berkaitan dengan rapat konsultasi. Saya tadi sudah saya sampaikan tetapi barangkali lebih afdol lagi silahkan dari pimpinan yang memimpin rapat konsultasi pimpinan fraksi dan pimpinan dewan. Saya persilahkan Pak Farid

Farid : Terimakasih, assalamualaikum wr. wb. para anggota dewan yang terhormat. Sebetulnya dalam paripurna itu tidak ada debat itu menurut UU. Forum paripurna itu bukan forum debat jadi kalau kita membuka debat seperti yang disampaikan dari kawan PKB tadi kalau kita membuka debat memang tidak selesai. Karena itulah sebelum paripurna selalu ada bangun atau pengganti bamus.

Kemudian ada pengganti bangus itu saya yang memimpin, jadi saya menyampaikan beberapa hal yang sebetulnya sudah menjadi konsep kita bahwa sebenarnya kita ingin cepat. Sebelum itu saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang menurut saya a kwatir yang nanti akan salah persepsi. Dalam system presidensial lembaga perwakilan atau legislatif atau parlemen itu independen dari eksekutif. Jadi tidak ada istilah menunggu pengumuman kabinet. Mohon maaf pak di ruangan ini pernah ada gambar presiden (semua tepuk tangan) gambar presiden itu minta diturunkan karena nuansa interpretasi eksekutif memang ditiadakan digedung ini. Jadi ini penting yang digarisbawahi, yang kedua sebetulnya karena forum ini sudah kuorum konsennya banyaknya kami dipimpinan menerima begitu banyak surat yang harus di *follow up* oleh alat kelengkapan, karena negara tidak berhenti. Presiden hanya berganti tapi negara tidak berhenti, surat dari negara lain harus kita jawab, surat dari lembaga lain harus kita jawab, negara tidak berhenti pak. Karena itulah kita harus segera membentuk alat kelengkapan sebab real pelaksanaan hari hari dewan itu alat kelengkapan. Menunda satu hari satu menit satu jam dari pembentukan alat kelengkapan itu adalah menyebabkan Negara dikelola secara timpang, karena ketidakhadiran legislatif di dalamnya. Jadi karena itu ini sudah quorum dan jadwal sidang sudah ditetapkan, satu satunya jadwal sidang hari ini adalah membentuk alat kelengkapan dan kita tidak boleh berhenti pak, tidak boleh kita menunda sidang ini membentuk sidang hari lain lagi untuk agenda yang sama, paling jauh kita skors tetapi karena kita ini sudah quorum berapapun fraksi yang menyetorkan kea lat kelengkapan itu harus disahkan (semua tepuk tangan menyatakan setuju). Jadi hati hati ini soal prosedur soal rule (hukum) soal ini kita bicarakan kemarin di bangus, jadi saya mengusulkan pimpinan kita skors setengah jam saya yakin teman teman yang lain juga sudah selesai. Ini soal sebetulnya yang membentuk AKD soal lobi saya juga ikut lobi dan saya mendengar lobi juga sudah ada hasilnya dan tidak ada kepentingan kita untuk menunda rapat ini. Begitu banyak orang yang menunggu hasil kerja kita, saya usul diskors 30 menit, kita masuk dibacakan anggotanya alat kelengkapan diketok alat kelengkapan terbentuk lalu kemudian komisi komisi dan alat kelengkapan dipersilahkan untuk dipilih pimpinannya dengan koordinasi dengan pimpinan dewan, saya kira usul saya terimakasih wassalamualaikum wr. wb. (tepu tangan semuanya)

PS : Terimakasih pak farid, saudara sekalian saya kira sudah cukup jelas kita mengaakomodir dari seluruh masukan usulan kita sepakati untuk skors setengah jam dengan catatan setelah masuk kita bacakan bagi fraksi yang akan menyampaikan susunan anggotanya. Saya skor 30 menit (ketok satu kali).

B.4 Sidang Paripurna DPR RI Masa Sidang II, Tahun Sidang 2014 – 2015, Tanggal 17 Januari 2015, Agenda Penetapan Ketua KPK dan Kapolri

(Menyanyikan lagu indonesia raya)

PS : Sidang dewan yang kami hormati sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi mengganti rapat Bamus DPR RI tanggal 13 januari 2015 acara Rapat Paripurna hari ini adalah: satu laporan pimpinan komisi 3 DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil keputusan calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi (KPK). Dua laporan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil pembahasan calon kepala kepolisian RI (Kapolri). Penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI . Untuk itu kita tanyakan kepada anggota dewan yang kami hormati apakah acara tersebut dapat disetujui.

Anggota : Setuju.

PS : (mengetok palu 1 kali) Sidang dewan yang kami hormati sebelum memulai pidato perlu kami sampaikan bahwa pimpinan dewan telah menerima 2 pucuk surat dari presiden yaitu satu no.surat R04/pres/ 1/2015 tanggal 12 januari 2015 perihal permohonan pertimbangan kewarganeraan RI atas nama saudara Jamar Andre Jonsen. Kedua no R05/pres/01/2015 tanggal 13 januari 2015 perihal rancangan UU atas perubahan UU no. 27 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan belanja Negara tahun anggaran 2015. Selanjutnya untuk surat pertama dan kedua sesuai dengan peraturan DPR RI no. 1 tahun 2014 tentang tata tertib surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sidang dewan yang kami hormati untuk mempersingkat waktu marilah kita memasuki acara yang pertama yaitu laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil pembahan calon pimpinan KPK kami persilahkan kepada pimpinan komisi III DPR RI yang terhormat saudara Dr. H. Samsudi untuk menyampaikan.

Komisi III : Bismilahirrohmanirohim, assalamulaikum wr. wb. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua homsuasiastu. Yang kami hormati yang kami banggakan bapak ibu pimpinan dewan, yang kami hormati bapak ibu anggota hadirin hadir pada kesempatan ini serta Bapak calon kapolri yang akan diambil pengesahannya pada hari ini beserta romobongan. Pertama-tama kami atas nama pimpinan dan segenap anggota komisi III DPR RI mengajak forum Rapat Paripurna ini untuyk memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberiiikan nikmat sehat walafiat guna pada gai hari ini kami komisi III DPR RI menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan test and proper calon pimpinan KPK. Pimpinan dan anggota dewan yang kami

hormati berdasarkan keputusan badan musyawarah DPR RI pada tanggal 6 november 2014 dan melalui surat ketua DPR RI no. PW/107969/DPR RI /XI/tanggal 7 November 2014 dengan surat presiden no. R62/pres/10/2014 tertanggal 16 November 2014 perihal penyampaian calon pimpinan KPK. Komisi III telah melakukan pembahasan mengenai pergantian calon pimpinan KPK yaitu terhadap satu yang terhormat Drs. Moh. Yusro M. S.H. M.Hum, yang kedua oleh saudara Rudi Arya Brata S.H. Pimpinan, anggota dewan, dan para hadirin yang kami hormati menindaklanjuti badan musyawarah dan surat presiden tersebut selanjutnya komisi III telah melakukan rangkaian kegiatan yaitu sebagai berikut yang pertama melaksanakan rangkaian persiapan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 2 calon pengganti pemimpin KPK, komisi III DPR RI telah lebih dahulu melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan beberapa ahli dan meminta saran serta masukan terhadap calon pengganti pimpinan KPK yang diusulkan oleh presiden dan apabila pimpinan KPK yang diusulkan tersebut digabungkan dengan pemilihan calon pimpinan KPK lainnya yang akan berakhir pada masa jabatan pada tahun 2015 sehingga pemilihan dan penetapan dilaksanakan dan dilakukan terhadap 5 calon KPK secara bersamaan. Selain dengan para pakar bagaimana dengan hal tersebut komisi III juga meminta sara dan masukan kepada penengak hukum lainnya diberbagai daerah dan ketiga pada hari ke 26 november 2014 komisi III melaksanakan rapat pleno komisi III dalam rangka mendengarkan pandangan dan pendapat fraksi fraksi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon pimpinan KPK. Yang keempat hari senin tanggal 1 desember 2014 komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK untuk dengar tanggapan pimpinan KPK terkait dengan proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK pada masa sidang ini. Tentunya KPK menyerahkan sepenuhnya dengan komisi III DPR RI . Pimpinan anggota dewan serta hadirin yang saya hormati. Komisi III DPR RI selanjutnya melaksanakan proses uji kelayakan dan kepatutan dua calon pimpinan KPK yang selanjutnya dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada tanggal 3 Desember 2014 hari rabu dan tanggal 4 desember 2014 komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap 2 calon pimpinan KPK secara bergiliran yaitu kepada satu saudara Dr. Yusro dan saudara Robi Arya brata. Selanjutnya pada tanggal 4 desember 2014 komisi III menggelar rapat pleno terkait dengan proses dan pemilihan penetapan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan KPK yang disepakati akan dibahas pada proses masa sidang berikutnya. Yang ketuju pada selaya tanggal 7 Januari 2015 masa sidang ke II 2014-2015 komisi III menggelar rapat pleno terkait proses pemilihan dan penetapan uji kelayakan dan kepatutan

terhadap calon pemimpin KPK yang pada intinya pandangan masing masing fraksi adalah sebagai berikut. Pertama fraksi partai PDIP berpendapat bahwa penetapan calon pimpinan KPK, penggantian wakil ketua saudara Yusro agar hingga sampai dengan Desember 2015 dan dilakukan secara serentak bersama dan sekaligus pemilihan dan penetapan empat orang pimpinan KPK lainnya. Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa proses pemilihan dan penetapan calon pimpinan KPK tidak dapat diteruskan pada masa sidang ini dan mengusulkan 2 calon KPK yang telah lolos pada panitia seleksi digabungkan pemilihannya dengan 8 calon pimpinan KPK lainnya pada masa sidang berikutnya dipilih sekaligus lima calon pimpinan KPK. Yang ketiga Fraksi Partai Gerindra berpendapat agar komisi III DPR RI tetap memilih satu dari 2 nama calon pengganti pimpinan KPK yang diajukan oleh presiden dan ditetapkan sebagai calon terpilih namun presiden RI perlu menerbitkan perpu yang isinya membiarkan syarat kosong calon pimpinan KPK sehingga berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK yang lainnya. Sehingga KPK terpilihnya tersebut diangkat bersama 4 pimpinan KPK lainnya diakhir tahun 2015. Yang ketiga D fraksi partai Demokrat setuju untuk melanjutkan kepada rapat selanjutnya. Nah untuk pemilihan dan penetapan pimpinan KPK di Komisi III DPR RI sesegera mungkin guna untuk melengkapi struktur pimpinan KPK selama 5 orang. Selanjutnya fraksi partai amanat nasional, berpendapat bahwa pemilihan dan penetapan salah seorang calon pengganti saudara Yusro dilakukan secara bersamaan pada penetapan 4 anggota kondisioner pada KPK terpilih yang nantinya akan dilakukan proses pemilihan untuk mengganti masa jabatan orang 4 orang KPK yang sekarang ini masa jabatannya akan berakhir segera. Selanjutnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat melahirkan sumber sumber daya yang terbaik dibidang pencegahan dan pemberantasan di bidang tindak pidana pemberantasan korupsi. Dengan demikian komisi III DPR RI mengenai 3 hasil uji kelayakan dan kepatutan dan pemilihan terhadap calon pimpinan KPK. Pada kesempatan ini perkenankan pula kami menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf untuk semua pihak baik secara langsung dan tidak langsung apabila ada hal yang kurang berkenan dalam proses pemilihan *test and proper* pimpinan KPK baik untuk rekan rekan media cetak, elektronik dan seluruh kepada masyarakat umum lainnya. Demikian saya ucapkan terimakasih atas nama pimpinan dan seluruh segenap pimpinan komisi III kami ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum wr.wb.

PS

: Baik terimakasih kami sampaikan kepada saudara M. Aziz Samsudin yang telah menyampaikan laporan pimpinan komisi III terhadap pembahasan calon pimpinan KPK. Sidang dewan yang terhormat, tentunya kalau kita menyimak bersama-sma apa yang

telah disampaikan dalam laoran ini, pimpinan komisi III mewakili seluruh komisi III berkesimpulan berdasarkan pandangan seluruh fraksi bagaimana disebut telah disampaikan bahwa disepakati bahwa proses pemilihan colon pimpinan KPK mengganti saudara Yusro ditunda dan dilakukan secara serentak bersamaan atau sekaligus dengan 4 pimpinan KPK lainnya. Untuk itu kami mau menanyakan kepada sidang yang terhormat ini apakah hasil kesimpulan dari komisi III ini dapat disetujui sebagai keputusan paripurna (mau mengetok palu ternyata ada yang belum setuju) silahkan pak Benny K Harman.

Harman (Demokrat) : Pimpinan sidang, bapak ibu anggota dewan yang kami banggakan assalamulaikum wr. wb. Sehubungan dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh pimpinan komisi III, kami dari fraksi Partai Demokrat ingin menegaskan dua hal. Yang pertama di dalam rapat pengambilan keputusan ditingkat komisi kami mengajukan kami mengajukan keberatan, kami mengajukan pendapat supaya dilakukan pemilihan satu dari dua dengan alasan yang utama dan yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa menurut pandangan partai Demokrat ketentuan dalam UU KPK 5 pimpinan KPK wajib hukumnya untuk dipenuhi, dalam bahasa kami ini adalah manatori rule, apa artinya dengan sengaja pembuat UU KPK menegaskan bahwa 5 itu wajib hukumnya untuk dipenuhi dengan konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi 5 maka tidak boleh diambil keputusan apapun oleh pimpinan KPK yang mempunyai konsekuensi hukum akibatnya adalah keputusan keputusan pimpinan KPK yang tidak dilakukan oleh 5 pimpinan KPK mempunyai akibat hukum tidak sahnya keputusan itu. Inilah yang menjadi alasan pokok mengapa kami meminta supaya dilakukan pemilihan untuk memenuhi kewajiban adanya 5 pimpinan KPK itu dengan demikian pimpinan bapak ibu anggota dewan yang sangat kami hormati. Yang tadi mengikuti logika yang dijelaskan oleh pimpinan komisi III dan putusan komisi III, maka dengan keputusan ini nanti diambil maka KPK sejak pimpinannya hanya 5 komisioner kehilangan legalitasnya untuk melakukan 4 untuk melakukan tindakan tindakan hukum. Terutama tindakan hukum yang punya dampak represif. Ini kami sampaikan kami ingatan pak ketua pimpinan dewan, bapak ibu anggota yang kami hormati dengan demikian sampai dengan 10 bulan ini KPK dengan demikian bukan soal efektifitas, 2 3 4 pimpinan KPK sih bisa efektif, tapi masalah penegakan hukum bukan masalah efektifitas tetapi masalah leglitas. Oleh sebab itu kami memberikan pandangan tetap 5 pimpinan KPK. Oleh sebab itu kita harus semisal satu dari dua yang telah diajukan oleh pemerintah. Apabila ini tidak dipenuhi maka yang akan terjadi adalah pandangan kami 4 pimpinan KPK tidak punya kewenangan lagi untuk langkah langkah penindakan kecuali langkah langkah pencegahan ini

akibatnya dan ini yang kami ingatkan pada bapak ibu anggota dewan yang kami hormati, ini catatan kami pak ketua pimpinan sidang. Kalau memang ini sudah menjadi keputusan kami pun tunduk pada keputusan itu. Hanya kami ingatkan itulah resikonya, sekian terimakasih banyak.

PS : Terimakasih kepada saudara Benny K Harman yang telah menyampaikan tambahan masukan dan pendapat dari fraksi partai Demokrat, tentunya hal tersebut sudah dibahas secara mendalam dalam kaitan di internal komisi III dan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan keputusan yang dikaitkan keputusan yang di dalam komisi III tentunya bersifat institusional, kualitas kualitatif dan juga dalam kesempatan kali ini kita hormati, kita tamping kita apresiasi dalam kaitan menyampaikan pendapat dengan catatan tidak lepas dari bagian yang akan diputuskan. Kembali kita sampaikan kepada sidang yang terhormat, tentunya dengan hal yang sudah disampaikan oleh catatan dari fraksi partai Demokrat tadi kami menanyakan dari meja pimpinan, apakah hasil laporan pimpinan komisi III DPR RI terhadap pembahasan calon pimpinan KPK dapat disetujui?

Anggota : Setuju (ketok palu satu kali).

PS : Baik bapak ibu sekalian terimakasih sehingga dengan demikian yang menjadi keputusan di dalam komisi III DPR RI sudah menjadi keputusan paripurna kita. Bapak ibu yang terhormat dalam kaitan agenda yang berikutnya ini adalah masih terkait dengan laporan pimpinan komisi III, untuk mempersingkat waktu marilah kita memasuki acara kedua paripurna ini yaitu laporan pimpinan komisi III DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil pembahasan calon kepolisian RI (kapolri) untuk itu kami persilahkan kembali pimpinan komisi II DPR RI yang terhormat saudara Dr. M. Aziz Samsudin untuk menyampaikan laporannya.

Samsudin : Bismilahirrohmanirohim assalamulaikum wr. wb., selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua homsiasiaistu bagi umat yang beragama yang kami hormati pimpinan dewan DPR RI , yang kami hormati bapak ibu anggota dewan, yang kami hormati bapak calon Kapolri serta hardirin hadirot yang kami mulyakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji kehadiran Allah SWT karena telah memberiikan rahmat dan hidayahnya Rapat Paripurna hari ini dalam kondisi sehat walafiat guna mendengarkan laporan komisi III DPR RI yang mengenai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon kepala kepolisian NKRI. Pimpinan bapak ibu dan para hadirin yang kami hormati. Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan surat kepada DPR RI dengan no. surat R/01/pres/01/2015 tertanggal 9 Januari 2015 perihal permintaan persetujuan DPR RI terhadap pemberhentian dan pengangkatan kepala kepolisian NKRI. Selanjutnya surat tersebut telah dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 12

januari 2015 berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat bamus dan musyawarah DPR RI tertanggal 13 Januari 2015 telah menugaskan kepada komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan surat tersebut. Menindaklanjuti keputusan rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah DPR RI dan ketentuan pasal 11 ayat 3 UU no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian republic Indonesia bahwa persetujuan atau penolakan DPR RI terhadap usulan presiden harus diberikan paling lambat dalam jangka waktu 20 hari terhitung sejak tanggal surat presiden diterima DPR RI . Oleh karena itu komisi III melaksanakan persiapan dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon kapolri. Pada tanggal 12 Januari 2015 dalam rapat pleno pertama komisi III DPR RI membentuk tim kecil yang bertugas mempersiapkan tahapan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri yang terdiri dari perwakilan fraksi fraksi yaitu yang pertama Dr. H. M. Samsudin ketua dari fraksi partai Golkar. Yang kedua yang terhormat saudara Junaidi dari fraksi partai Gerindra dari unsure pimpinan. Yang ketiga yang terhormat saudar Benny Karman dari fraksi Partai Demokrat dari unsure pimpinan. Yang keempat yang terhormat saudara Mulya Arab dari fraksi partai amanat nasional dalam unsure pimpinan dan beberapa anggota fraksi yang ada yang pertama yang terhormat saudara Junimat dari fraksi PDIP, yang terhormat saudara Aziz dari fraksi partai Golkar, yang terhormat ahmad dari fraksi partai Gerindra, yang terhormat Ruut Sitompul dari fraksi partai Demokrat, yang kelima saudara muslim dari fraksi partai amanat nasional, yang keenam yang terhormat Irmawan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, selanjutnya yang terhormat Abu bakar dari fraksi partai keadilan sejahtera, selanjutnya yang terhormat saudara Azrul Zani dari fraksi partai Persatuan Pembangunan, yang terhormat selanjutnya saudara Rio Kapela dari fraksi partai Nasdem, selanjutnya yang terhormat saudara sarifudin sudi dari fraksi partai Hanura. Komisi III DPR RI pada tanggal 13 Januari 2015 mengadakan rapat pleno yang kedua guna melaksanakan dan membahas lebih lanjut penugasan uji kelayakan calon kapolri melupi jerat rancangan jadwal, tata tertib, mekanisme dan surat pernyataan. Dalam rapat tersebut sempat terjadi perdebatan apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terkait dengan penetapan calon kapolri sebagai tersangka oleh KPK. Dalam perdebatan tersebut fraksi-fraksi di komisi III menyetujui untuk proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap saudara calon kapolri tetap dilanjutkan kecuali fraksi partai Demokrat tidak menyetujui untuk dilanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan ini. Selanjutnya hasil keputusan ini pada rapat pleno komisi III akan tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon kapolri dengan menyepakati beberapa hal yang terkait dengan

rangkaian pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan untuk menyetujui rancangan jadwal, tata tertib, mekanisme pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dan surat pernyataan. Selanjutnya setelah rapat pleno komisi III melakukan kunjungan pribadi ke kediaman calon kapolri sebagai rangkaian kegiatan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh komisi III DPR RI . Pimpinan, bapak ibu dan hadirin yang kami hormati pada tanggal 14 Januari 2015, komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap saudara calon kapolri komisaris Jendral drs. Budi Gunawan S.H., M.Si., proses uji kelayakan terhadap calon kapolri dimulai pukul 9.30 sampai pukul 14.00 dan kemudian diskors dan dilanjutkan kembali pukul 15.00. Uji kelayakan merupakan komitmen komisi III DPR RI dalam melakukan penilaian kesungguhan calon kapolri, dalam uji kelayakan dihadiri oleh 9 fraksi kecuali fraksi partai Demokrat, yang pada rapat pleno tanggal 13 Januari 2015 memutuskan untuk tidak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan pada pukul 15.00 komisi III DPR RI menggelar pleno komisi III terhadap pemilihan dan penetapan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon kapolri. Berdasarkan rapat pleno tersebut komisi III DPR RI melalui pandangan fraksi-fraksi komisi III menyetujui untuk mengangkat komisaris jenderal Drs. Budi Gunawan S.H. M.Si., sebagai kapolri dan selanjutnya komisi III DPR RI menyetujui untuk memberhentikan komisaris jenderal Arman sebagai kapolri. Pimpinan anggota dewan dan hadirin yang kami hormati komisi III DPR RI memahami dan menyadari bahkan kecakapan dan integritas calon kapolri merupakan syarat mutlak menjadi calon Kapolri. Oleh sebab itu komisi III DPR RI menyetujui dan mengangkat calon Kapolri dengan harapan calon Kapolri sungguh sungguh dapat mampu meningkatkan citra dan lembaga kapolri sebagai alat Negara yang berperan pengamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban negeri. Komisi III DPR RI juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada jenderal tinggi Drs. Sutarnan yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas demi terciptanya keamanan dan ketertiban negeri tercinta ini. Pimpinan, anggota dewan, dan hadirin yang kami hormati demikian laporan komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan dan pemberhentian atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri guna ditetapkan dalam sidang paripurna DPR RI pada hari ini dan selanjutnya disampaikan kepada presiden untuk disahkan sesuai peraturan perundangan undangan yang berlaku. Dalam kesempatan ini juga kami atas nama komisi III dan segenap anggota komisi III

mengucapkan terimakasih yang setinggi tingginya kepada segenap membantu proses berjalannya proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon kapolri dan sekaligus memohon maaf sedalam dalamnya apabila dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri terhadap hal hal yang kurang berkenan baik langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada teman teman rekan rekan media elektronik dan cetak yang selalu mengawasi kinerja daripada komisi III serta dewan DPR RI . Demikian kami sampaikan terimakasih atas nama pimpinan dan anggota komisi III tanggal 15 januari 2015 wassalamualaikum wr.wb.

PS : Baik terimakasih kami sampaikan kepada saudara Dr. M. Ali Samsudin ketua komisi III yang telah menyampaikan laporan hasil kmomisi III terhadap pengambilan keputusan pembahan kapolri. Bapak ibu sekalian sidang dewan yang terhormat merevie dari hasil laporan kita, pada saat pukul 11.10 Rapat Paripurna pada pagi hari ini dihadiri 411 anggota DPR RI yang terdiri dari satu PDIP 80-anggota dari 106 anggota, fraksi partai Golkar 65 anggota dari 90 anggota, fraksi partai Gerindra 57 orang dari 73 anggota, fraksi partai Demokrat 41 anggota dari 62 anggota, fraksi partai amanat nasional 35 orang dari 48 anggota, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 35 orang dari 47 anggota. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 27 orang dari 47 anggota, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 20 orang dari 39 anggota. Fraksi partai Nasdem 30 orang dari 36 anggota, Fraksi Hanura 15 orang dari 16 anggota. Bapak ibu sekalian tentunya menelik dari apa yang telah disampaikan oleh laporan komisi III DPR RI dan terhadap hasil pembahasan yang sangat stretegis dalam kaitan pratik kenegaraan kita. Untuk itu kami mengusulkan dari meja pimpinan sebelum kita putuskan untuk secara bergiliran, pandangan dari setiap fraksi barang kali ada yang mewakili dalam kaitan pembahasan sebelum diambil keputusan pada siang hari ini, apakah dapat disetujui?

Anggota : Setuju.

PS : Untuk itu kami persilahkan pandangan singkat dari fraksi PDIP untuk kami beri kesempatan. Ketua fraksi dapat mewakili atau gimana, setuju ya? Kemudian dari fraksi Golkar, setuju dilantik.

Anggota : Setuju (ketok ssatu kali)

PS : Fraksi partai Golkar setuju?

Anggota : Setuju (ketok ssatu kali)

PS : Fraksi partai Demokrat? Kami persilahkan pak Benny

Harman (demokrat): Baik terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kami ingin menyampaikan pandangan posisi dan sikap fraksi dalam fraksi partai demokrat berkenaan dengan soal ini, untuk jelasnya kami akan bacakan. Assalamualaikum wr. wb. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pimpinan sidang yang kami hormati, seluruh anggota dewan yang kami hormati pula, komjen Budi Gunawan yang kami banggakan pertama-tama dari meja ini

kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang maha Esa atas nikmat dan anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul berssma dalam Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apa pun. Pimpina sidang paripurna dan seluruh anggota dewan yang kami hormati pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mewakili fraksi partai Demokrat menyampaikan pandangan dan sikap fraksi terkait dengan sikap fraksi usulan presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian kapolri. Sebagaimana kita ketahui pada tanggal 9 januari 2015 yang lalu presiden RI telah mengirimkan suratnya kepada dewan perihal pemberhentian dan pengangkatan kapolri terkait pencalonan saudara Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri dan sekaligus memberihentikan Jenderal POLisi Sutarman sebagai kapolri yang saat ini memimpin institusi kepolisian, selanjutnya pimpinan dewan telah menugaskan komisi III guna menindaklanjuti hal tersebut. Dalm menyikapi hal ini fraksi partai Demokrat memberiiikan pandangan dan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama Fraksi Partai Demokrat sungguh sungguh menghormati dan mendukung hak prerogratif presiden untuk mengangkat dan memberihentikan kapolri sesuai dengan pasal 11 UU no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Yang kedua fraksi partai Demokrat juga sungguh menghargai usulan presiden yang telah mencalonkan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai kapolri dan fraksi partai Demokrat berpandangan bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas, pengalaman, dan kompetensi sebagai Kapolri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, fraksi partai Demokrat mendukung sepenuhnya pencalonan komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri (semua tepuk tangan). Kami mendukung sepenuhnya. Yang ketiga namun (semua tertawa) fraksi partai demokrat pak ketua, Bapak ibu anggota dewan yang kami hormati sungguh sungguh dikejutkan seperti tsunami, seperti petir disiang bolong, ndak ada angin ndak ada hujan tiba-tiba diumumkan komjen Pol. Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi. Mengapa tadi kami katakan tsunami di luar dugaan, tidak pernah disangka sebelumnya. Pandangan yang keempat dengan telah ditetapkannya saudara Budi Gunawan sebagai tersangka Fraksi partai Demokrat dalam rapat pleno komisi III mengusulkan penundaan semetara proses uji kelayakan dan kepatutan. Tujuan kami sangat mulia pak ketua dan bapak ibu anggota dewan yang kami hormati, tujuannya adalah guna memberiiikan kesempatan kepada pimpinan komisi untuk berkonsultasi dengan pimpinan dewan. Selanjutnya pimpinan dewan berkonsultasi dengan presiden untuk menyekapi hal ini. Supaya lembaga legislasi dan lembaga eksekutif ketemu untuk membahas soal ini. Namun usulan fraksi partai Demokrat tidak

diterima dan komisi III memutuskan dan melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Keputusan komisi III itupun kami junjung tinggi dan kami hormati (anggota bertepuk tangan). Yang kelima berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut yang dilaksanakan tanpa kehadiran fraksi partai Demokrat. Rapat pleno komisi III memutuskan untuk menirama usulan pengangkatan Komjen Pol. Budi Gunawan dan pemberhentian jenderal polisi Sutarman yang selanjutnya dibawa ke rapat tingkat II untuk pengambilan keputusan. Yang keenam meskipun rapat pleno komisi III telah memutuskan menerima usulan pengangkatan komjen pol. Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal polisi Sutarman. Fraksi partai Demokrat tetap mengusulkan penundaan persetujuan dalam Rapat Paripurna yang mulia ini dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertimbangan yang pertama pengangkatan Komjen polisi Budi Gunawan oleh presiden RI akan mencoreng sejarah republic ini, karena untuk pertama kalinya presiden RI mengangkat seorang tersangka menjadi kapolri (semua tepuk tangan). Yang kedua apabila komjen Pol. Budi Gunawan dipaksakan menjadi kapolri dengan status tersangka maka diyakini tidak akan mendapatkan kepercayaan rakyat, apalagi polri juga dituntut untuk secara aktif menegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi. Pertimbangan yang ketiga yang harus dilakukan dewan saat ini ketua, pimpinan, bapak ibu sekalian yang kami hormati, yang harus kami lakukan pada saat ini adalah melakukan pendalaman dan klarifikasi atas dugaan keterlibatan komjen Pol. Budi Gunawan dalam tindak pidana korupsi seperti yang diduga oleh KPK, baik oleh Presiden, KPK, Kapolri, Kapolnas, maupun Komjen Pol. Budi Gunawan, itu yang harus kita lakukan. Pertimbangan yang keempat kapolri yang menjabat saat ini yaitu jendral polisi Sutarman masih tetap bisa menjalankan tugas sampai klarifikasi atas kasus Komjen Pol. Budi Gunawan selesai. Dikaitkan pula dengan UU no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian khususnya bab 2 pasal 11, berikut penjelasannya. Masa jabatan Jenderal Sutarman belumlah berakhir, yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, belum memasuki usia pensiun, tidak juga berhalangan, dan juga tidak dijatuhi pidana yang telah mempunyai hukum tetap. Pertimbangan yang kelima jika presiden RI dan atau dewan mengabaikan yang menjadi ketetapan KPK akan memiliki akibat yang kurang baik bagi kedua lembaga. Karena kedua lembaga utama dinegara ini. Oleh rakyat dinilai tidak sungguh sungguh mendukung upaya pemberantasan korupsi. Pimpinan bapak ibu anggota dewan yang kami hormati dengan tetap memegang asas praduga tidak bersalah fraksi partai Demokrat berpendapat Komjen Pol. Budi Gunawan justru bisa menggunakan haknya guna melakukan klarifikasi dan pembelaan, apabila nyata nyata tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana yang

- disangkakan oleh KPK. Demikianlah pandangan dan sikap fraksi Partai Demokrat DPR RI ini kami sampaikan. Atas perhatian pimpinan bapak ibu anggota dewan sekalian kami ucapkan terimakasih. Pimpinan fraksi partai Demokrat DPR RI ketua Edi Baskoro Yudoyono sekretaris Didik dan yang membacakan Beni K Harman, saya yang membacakan ini. Sekian dan terimakasih.
- PS : Baik terimakasih bagi saudara Benny K. Harman, sudah dijelaskan yang membacakan tadi saudara Benny K Harman, luar biasa sekali. Baik bapak ibu sekalian yang kami hormati setelah fraksi partai Demokrat, selanjutnya sikap fraksi dari fraksi partai Amanat nasional, siapa yang menyampaikan.
- PAN : Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, setelah mengikuti serangkaian proses *fit and proper tes* Calon kapolri saudara Komjen Pol. Budi Gunawan dan dengan seksama mengikuti perkembangan politik dan hukum serta dengan sungguh sungguh mendengarkan suara masyarakat bahwa fraksi partai amanat nasional berpandangan, satu Pan menghormati hak prerogratif presiden untuk mengajukan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri. Dan setelah *fit and proper test* fraksi pan menilai komjen pol. Budi Gunawan mempunyai kemampuan dan layak menduduki jabatan kapolri tersebut. Kedua fraksi pan menghormati proses hukum di Negara Indonesia ini, bahwa dengan status hukum yang melekat pada calon pan saat ini, maka DPR seharusnya melakukan proper dalam mengambil keputusan, berkenaan dengan hal tersebut fraksi pan menyarankan kiranya pimpinan dewan untuk mengadakan rapat konsultasi antara DPR dan presiden secepat mungkin, sebelum mengambil keputusan. Agar keputusan dewan terhormat dan dihormati oleh lembaga lembaga yang lain termasuk presiden. Demikianlah pandangan fraksi PAN kiranya dapat dimengerti, dan kami berterimakasih atas pandangan saudara. Terimakasih wassalamualaikum wr.wb.
- PS : Baik terimakasih kami sampaikan kepada fraksi PAN, berikutnya kami persilahkan pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, apakah langsung disetujui?
- Anggota : Setuju. (ketok palu 1 kali)
- PS : Berikutnya pandangan dari fraksi partai keadilan sejahtera, setuju?
- Anggota :Setuju. (ketok palu satu kali)
- PS : Berikutnya kami samapiakn pandangan dari fraksi PPP, setuju?
- Anggota : Setuju. (ketok ssatu kali)
- PS : Berikutnya kami sampaikan pandangan dari fraksi Demokrat.
- Anggota : Setuju. (ketok ssatu kali)
- PS : Berikutnya kami sampaikan pandangan dari fraksi partai Hanura.
- Anggota : Setuju. (ketok ssatu kali)
- PS : Bapak ibu sekalian terimakasih atas sikap dan pandangan fraksi dari 10 fraksi yang ada di DPR. Ada dua fraksi yang tentunya ada

menyampaikan usulan terkait dengan sebelum kita memutuskan keputusan di dalam Rapat Paripurna ini. Bapak ibu sekalian tanpa menghormati rasa hormat kita semua terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat komisi III, tentunya semuanya adalah bagian yang tidak terpisahkan di AKD tentunya ini semua menjadi catatan kita semua dan untuk itu karena itu mengingat sangat strategisnya keputusan ini dan ada beberapa pandangan yang tentunya menginspirasi kita semua, sebelum kita mengambil keputusan tetap kita sepakat dalam kaitan ini, apapun keputusan kita serahkan sepenuhnya nanti secara kelembagaan secara seluruh bapak ibu sekalian dewan sidang yang terhormat ini. Barangkali sebelum kita menyampaikan pandangan itu, sebelum mengambil keputusan apakah dari ketua komisi III akan menyampaikan lagi? Cukup?

Anggota : Cukup

PS : Silahkan Pak Aziz, cukup? Ada usulan Pak Aziz silahkan.

Pak Aziz : Saya hanya menyampaikan pandangan dari fraksi Partai Demokrat dan fraksi PAN supaya pada rapat forum paripurna tingkat dua ini menjadi satu kesepakatan dan menjadi clearan kepada public agar tidak ada fraksi yang tidak merasa terpojokan ada fraksi yang merasa di depan. Perlu kami sampaikan kami selaku pimpinan komisi III DPR RI , di dalam rapat pleno komisi III baik yang pertama, kedua, dan ketiga seluruh pandangan fraksi telah menyetujui dan menyepakati. Adapun pandangan fraksi PAN yang meminta rapat konsultasi dan fraksi partai Demokrat meminta rapat konsultasi tidak pernah diungkap dalam rapat pleno komisi III (tepek tangan). Jadi saya selaku ketua rapat pimpinan rapat pleno komisi III tidak pernah menerima usulan ataupun pandangan secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat pleno. Yang kedua di dalam pandangan-pandangan beberapa yang menginginkan untuk melakukan pendalaman dan klarifikasi dalam dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana tertentu kami dari komisi III, saya aziz samsudin A248 dari dapil lampung menyampaikan bahwa fungsi dan tugas dewan adalah mengawasi tugas daripada dewan yang diatur pada konstitusi. Perlu digaris bawahi suatu tindakan yang telah dilakukan digulirkan oleh aparat penegak hukum baik ditingkat kepolisian RI adapapun itu: tingkat kejaksaan republik Indonesia dan KPK terlebih lagi dalam lembaga DPR RI dan pemerintah untuk bisa saling menghormati dan menghargai sesuai dengan kewenangan tugas dan tupoksinhya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundnagan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini saya hanya melukan klarifikasi agar tidak ada salah pandangan di dalam fraksi fraksi didalam komisi III agar jelas dan transparan, demikian wassalamualaikum wr.wb.

PS : Wassalamualaikum wr.wb, baik terimakasih telah menyampaikan ketua komisi III, banyak hal tadi sudah disampaikan dan tentunya

dari beberapa fraksi sudah menyampaikan sikap. Namun demikian kami di meja pimpinan telah berembuk ya, siapa tau mungkin kita mengambil keputusan ini secara bulat karena ini menyangkut hal yang sangat prinsipil. Sehingga kalau boleh kami usulkan kita segera mengadakan lobi barang 5-10 menit tentunya tidak merubah substansi dari apa yang telah disampaikan dan diputuskan oleh komisi III dan tetap menghormati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masukan dari fraksi fraksi yang menyampaikan pandangan.

Anggota : (ada yang menyampaikan setuju ada yang interupsi)

PS : Silahkan Pak Viktor

Viktor (Nasdem): Viktor, fraksi Partai Nasdem, pimpinan rapat yang kami hormati, kami tentunya memahami betul mekanisme pengambilan keputusan di dalam dewan ini. Dan keputusan itu telah kita pertanyakan kepada komisi yang telah mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan surat yang telah disampaikan presiden kepada dewan ini. Mereka telah bekerja dengan baik dan tentunya dalam system berpolitik tentu ada yang setuju dan tidak setuju. Pada rapat tingkat 2 pada saat ini, paripurna hanya menanyakan ada setuju atau tidak setuju. Kalau mayoritas setuju ya disahkan saja tidak perlu lagi ada konsultasi lagi, tidak perlu konsultasi lagi. Kita tidak perlu cukup lama untuk itu. Karena begitu kita masuk agenda pembahasan agenda ketiga itu tentunya tidak perlu lagi, jangan lagi kita mengelimenir putusan yang telah dilakukan oleh teman teman kita. Karena itu adalah utusan fraksi fraksi di komisi III bukan utusan siapa-siapa. dan tentunya tidak perlu kita bertannya, terimakasih.

PS : Baik terimakasih Pak Viktor. Diprinsipnya kita semua sama ya artinya kita ingin memberikan suatu pertama apresiasi dari kerja keras dari komisi III yang telah bekerja luar biasa dalam menentukan calon kapolri. Karena apapun AKD tidak terlepas dari fungsi struktur yang ada di DPR RI ini. Kemudian yang kedua mengingat pentingnya dari putusan putusan yang kita ambil terutama terkait dengan keputusan yang strategis ini tentunya secara objektif kita tentukan tetap objektif. Karena memiliki apresiasi tanpa tentunya meninggalkan keputusan dari apa yang telah disampaikan pada rapat komisi untuk itu kami mengusulkan di ruang pimpinan ini, di meja pimpinan agar kita ada ruang untuk melakukan lobi barang kali 5-10 menit.

(banyak interupsi dan ada yang mengatak setuju)

PS : iya silahkan dari pan dulu kemudian Pak Henry

Kuswanto (Pan): terimakasih pimpinan, saya kuswanto dari dapil Tuban Bojonegoro, yang pertama meskipun dari fraksi pan tadi disampaikan tidak pernah mengungkapkan di komisi III untuk melakukan penundaan terhadap proses paripurna ini. Tetapi politik itu dinamikanya selalu berkembang dan setelah kita

memperhatikan berbagai macam masukan, termasuk kita mengikuti perkembangan diseluruh media yang ada, media sosial media cetak televisi dan lain lain tentunya kita bersama-sama akan lebih bijak akan lebih arif kalau kita lebih hati hati di dalam mengambil keputusan ini. Karena kapolri ini nanti akan bertugas salah satunya adalah penegakan hukum. Kita sangat setuju dengan pernyataan presiden RI ketika mengangkat Kapolri pejabat Negara lainnya harus betul betul hati-hati dan harus komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih. Tradisi yang kemarin betul betul sangat menghargai dan ini apabila dibangun secara terus menerus akan lebih baik. Untk konsultasi sebelumnya kepada KPK dan PPATK. Oleh karena itu, dengan setelah kita mengahragai seluruhnya, menghargai seluruh proses yang ada di komisi III. Dan alhamdulillah meskipun saya tidak berada di komisi III telah mendengarkan juga melalui televisi bahwa dari sisi kapasitas dan lain lain tidak meragukan. Tentu ini adalah salah satu assalamulaikum wr. wb.et anak bangsa, dan saya yakin insyaallah mudah mudahan di dalam polri ada kader kader yang terbaik. Oleh karena itu memohon dalam paripurna ini untuk menunda sejenak kita rapat konsultasi antar pimpinan fraksi sesuai dengan usulan fraksi PAN tadi. Syukur syukur kalau sebelum pengambilan keputusan di dalam waktu yang sesingkat singkatnya kita berkonsultasi sama presiden. Tentu ini menjadi lebih arif dan tentu kita lebih berhati hati didalam kita mengambil sebuah keputusan ini. Terimakasih

PS : Silahkan pak henry PDIP silahkan

Henry Yoso(PDIP): Terimakasih, pimpinan bahwa proses yang sudah dilakukan oleh komisi III itu adalah suatu proses yang melibatkan seluruh fraksi. Artinya seluruh fraksi telah menyatakan sikapnya di dalam komisi III. Sehingga tidak perlu ditanyakan lagi dengan anggota anggota yang lain. Dan tadi sudah dimintakan lagi pandangan pandangn fraksi dari pandangan pandangan fraksi jelas 99 persen mendukung atau membnrkan atau mengahrapkan kepada paripurna hari ini agar menetapkan atau mengesahkan apa yang sudah dihasilakn oleh komisi III. Oleh karena itu tidak perlu lagi ditunda diskor meskipun 2 menit apalagi 10 menit. Jadi sebaiknya pimpinan. Langsung menjatuhkan putusan sekarang terimakasih.

PS : Baik terimakasih, bapak ibu sekalian kita semua menghargai mengapresiasi masukan dari fraksi ataupun dari bapak ibu sekalian secara personal dari bapak ibu sekalin selaku anggota dewan. Tentunya beberapa hal dari pandangan tadi kita melihat ada satu hal yang kami meghharapkan mengambil keputusan betul b etul mengambil keputusan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai masukan saran dan pendapat dari seluruh fraksi maupun beberapa fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya pada siang hari ini. Tentunya subtansi yang tadi kita sudah bahas dari komisi

III menjadi bahan kerja keras yang sama-sama harus kita hormati, ini pengambilan putusan finalnya ada di paripurna dan kita harapkan nanti kita akan mengambil keputusan bahasa kami “ku tau yang kau mau” tantunya menjadi proses hal yang harapannya tetap bulat utuh tanpa meninggalkan suatu hitam putih diantara kita saya sepakat dari yang sudah disampaikan ketua komisi III tadi, jangan sampai kita nanti ini memberiiikan satu presepsi yang berbeda di masyarakat tentunya harapannya ini menjadi harapan institusi DPR RI yang memutuskan nanti seandainya nanti diputuskan untuk setuju untuk lebih dulu kita melalui forum lobi 10 menit dari meja pimpinan untuk mengundang pimpinan fraksi setuju?

Anggota : Setuju (ketok ssatu kali)

Anggota : Yang lobi berdua saja disitu (rapat diskors 10 menit)

(Akhirnya setelah lobi diputuskan anggota DPR RI memutuskan untuk menyetujui pengangkatan Konjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri.)